

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2014



Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2014

Penanggung Jawab :

Kepala PKP2A I Lembaga Administrasi Negara

Tim Penyusun :

Shafiera Amalia, S.IP.

Dr.H. Baban Sobandi, SE., M.Si.

Syarifudin Hidayat, Drs., M.Si.

Candra Setya Nugroho, SH.



Diterbitkan Oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BANDUNG

2014

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2014

Penulis : Shafiera Amalia, *et.al.*
Desain Sampul : Irman Hermansyah, Budi Permana

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2014

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit**

Hak Penerbitan pada:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055
E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info
info@bandung.lan.go.id
Web : www.litbang-lan-bdg.info
www.bandung.lan.go.id

ISBN : 978-979-3382-82-1

Tim Penyusun :

1. Shafiera Amalia, S.IP.
2. Dr. H. Baban Sobandi, SE., M.Si.
3. Syarifudin Hidayat, Drs., M.Si.
4. Candra Setya Nugroho, SH.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridhanya PKP2A I LAN dapat menyelesaikan buku **“Statistik Aparatur Indonesia 2014”**. Kehadiran publikasi ini merupakan suatu usaha untuk memenuhi ketersediaan data mengenai aparatur yang terintegrasi dan komprehensif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan perumusan kebijakan, maupun bagi keperluan akademis. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data terkait dengan aparatur.

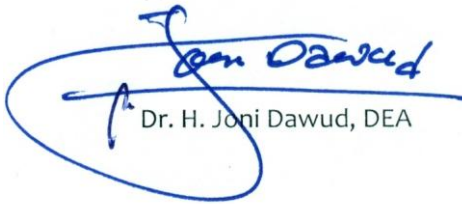
Buku ini berisikan data statistik mengenai aparatur, dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, fiskal/keuangan pemerintah dan aspek kinerja aparatur/birokrasi. Data yang disajikan dalam buku ini diperoleh dari berbagai instansi/lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidangnya.

Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi yang sama di tahun 2012 dan 2013. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan isi publikasi ini agar data yang disajikan lebih memadai. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah cara mempublikasikan data. Selain dipublikasikan dalam bentuk buku ini, berbagai data terkait aparatur dapat dilihat di website <http://dataaparatur.bandung.lan.go.id>.

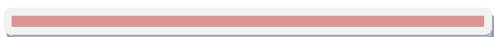
Walau demikian tentu masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karenanya, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk peningkatan kualitas publikasi ini di masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini.

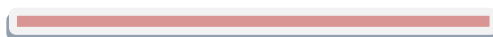
Sumedang, Oktober 2014
Kepala PKP2A I LAN



Dr. H. Joni Dawud, DEA



v





DAFTAR ISI

Halaman Sampul		i
Kata Pengantar		iv
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		vii
Daftar Gambar		xix
Pendahuluan		1
A. Latar Belakang	1	
B. Tujuan	2	
C. Isi Buku	2	
D. Kegunaan dan Manfaat	2	
E. Teknik Pengumpulan Data	2	
Bagian I Kelembagaan		7
A. Kelembagaan Pemerintah	7	
B. Struktur Organisasi	8	
C. Ketersediaan <i>Assessment Center</i> di Lembaga Pemerintah	8	
Bagian II Ketatalaksanaan		91
A. Sistem Perencanaan Kerja	91	
B. Sistem Prosedur Kerja	91	
C. Sistem Pengawasan dan Pengendalian	93	
Bagian III Sumber Daya Manusia Aparatur		125
A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	125	
B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	125	
C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	126	
D. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	127	
E. Pensiun Pegawai Negeri Sipil	127	
Bagian IV Keuangan/Fiskal Pemerintah		203
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	203	
B. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur	203	
C. Alokasi Belanja Negara untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	204	
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	204	
E. Pendapatan Asli Daerah	205	
F. Dana Perimbangan	205	

	G.	Alokasi Belanja Pemerintah Daerah	207	
Bab V		Kinerja Aparatur/Birokrasi		233
	A.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Instansi	233	
	B.	Kualifikasi Penilaian LAKIP oleh Kemenpan	233	
	C.	Integritas Sektor Publik	234	
	D.	Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	234	
	E.	Peringkat Doing Business Indonesia dan Negara ASEAN	235	
	F.	Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN	235	
	G.	Peringkat dan Nilai Human Development Index Indonesia dan Negara ASEAN	236	

DAFTAR TABEL

Bagian I	Kelembagaan	
Tabel I.1	Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2012 - 2013	9
Tabel I.2	Nomenklatur Kementerian Tahun 2012 - 2013	9
Tabel I.3	Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2013	12
Tabel I.4	Nomenklatur Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2012 - 2013	12
Tabel I.5	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2012 - 2013	13
Tabel I.6	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tahun 2013	14
Tabel I.7	Nomenklatur Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri Tahun 2012 - 2013	14
Tabel I.8	Nomenklatur Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2012 - 2013	14
Tabel I.9	Nomenklatur Lembaga Non Struktural Tahun 2012 - 2013	14
Tabel I.10	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Negara Tahun 2012 - 2013	18
Tabel I.11	Jumlah Pemerintah Kabupaten Tahun 2009 - 2013	20
Tabel I.12	Jumlah Pemerintah Kota Tahun 2009 - 2013	21
Tabel I.13	Daerah Otonom Baru Tahun 1999 - 2013	22
Tabel I.14	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945	23
Tabel I.15	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945	25
Tabel I.16	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)	27
Tabel I.17	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	28
Tabel I.18	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian	30
Tabel I.19	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	31
Tabel I.20	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kejaksaan Agung)	33
Tabel I.21	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kepolisian RI)	35
Tabel I.22	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)	36

Tabel I.23	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)	37
Tabel I.24	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)	38
Tabel I.25	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)	39
Tabel I.26	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)	40
Tabel I.27	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kesekretariatan Mahkamah Agung)	42
Tabel I.28	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Panitera Mahkamah Agung)	43
Tabel I.29	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)	44
Tabel I.30	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)	45
Tabel I.31	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Non Struktural	46
Tabel I.32	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Kementerian Negara Tahun 2013	46
Tabel I.33	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2013	49
Tabel I.34	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Sekretariat Lembaga Negara Tahun 2013	51
Tabel I.35	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri Tahun 2013	51
Tabel I.36	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2013	52
Tabel I.37	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Non Struktural Tahun 2013	52
Tabel I.38	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Seluruh Lingkungan Kementerian dan Lembaga Tahun 2014	53
Tabel I.39	Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu 2012 - 2013	54
Tabel I.40	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2012 - 2013	57
Tabel I.41	Jenis dan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan	58

Tabel I.42	Pemerintah Pusat Tahun 2012 - 2013 Nomenklatur Lembaga Pusat/Daerah yang Memiliki Assessment Center Tahun 2013	88
Bagian II Ketatalaksanaan		
Tabel II.1	Jumlah Kementerian/Lembaga Pusat yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011	94
Tabel II.2	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011	94
Tabel II.3	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011	94
Tabel II.4	Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011	94
Tabel II.5	Jumlah Kementerian/LPND yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011	95
Tabel II.6	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011	95
Tabel II.7	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011	95
Tabel II.8	Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011	95
Tabel II.9	Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen SOP Tahun 2013	96
Tabel II.10	Jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Telah Diterbitkan	98
Tabel II.11	Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan PTSP Tahun 2012 - 2013	99
Tabel II.12	Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Menerapkan e-Government Tahun 2012	101
Tabel II.13	Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Website Tahun 2012	101
Tabel II.14	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013	103
Tabel II.15	Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013	103
Tabel II.16	Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Menteri/Kepala K/L Mengenai SPIP Tahun 2010 - 2012	105
Tabel II.17	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2010 - 2011	108
Tabel II.18	Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2009 - 2012	109
Tabel II.19	Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2011 - 2012	120
Bagian III Sumber Daya Manusia Aparatur		
Tabel III.1	Jumlah PNS Berstatus PNS Instansi Pusat dan PNS Pemerintah Daerah Tahun 2012 - 2013	128
Tabel III.2	Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Pendidikan Tahun	128

	2012 - 2013	
Tabel III.3	Jumlah PNS Pusat Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	128
Tabel III.4	Jumlah PNS Daerah Propinsi Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	129
Tabel III.5	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	129
Tabel III.6	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	130
Tabel III.7	Jumlah PNS Pusat Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	130
Tabel III.8	Jumlah PNS Daerah Propinsi Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	131
Tabel III.9	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	131
Tabel III.10	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	132
Tabel III.11	Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	132
Tabel III.12	Jumlah PNS Daerah Propinsi Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	133
Tabel III.13	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	134
Tabel III.14	Total Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013	134
Tabel III.15	Jumlah Umum PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013	135
Tabel III.16	Jumlah Umum PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013	135
Tabel III.17	Jumlah Umum PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013	135
Tabel III.18	Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2012 - 2013	136
Tabel III.19	Jumlah PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	136
Tabel III.20	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	137
Tabel III.21	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	137
Tabel III.22	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	138
Tabel III.23	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	138
Tabel III.24	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	139
Tabel III.25	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	139
Tabel III.26	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	140
Tabel III.27	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	140
Tabel III.28	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis	140

	Kelamin Tahun 2012 – 2013	
Tabel III.29	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	141
Tabel III.30	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	141
Tabel III.31	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	141
Tabel III.32	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	142
Tabel III.33	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	142
Tabel III.34	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	143
Tabel III.35	Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2012 - 2013	144
Tabel III.36	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	144
Tabel III.37	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	145
Tabel III.38	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	145
Tabel III.39	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	146
Tabel III.40	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	146
Tabel III.41	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	147
Tabel III.42	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	147
Tabel III.43	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	148
Tabel III.44	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	148
Tabel III.45	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	148
Tabel III.46	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	149
Tabel III.47	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	149
Tabel III.48	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	149
Tabel III.49	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	150
Tabel III.50	Jumlah PNS Propinsi Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	150
Tabel III.51	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	151
Tabel III.52	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Peneliti Menurut Jenjang	152

	Tahun 2009-2013	
Tabel III.53	Pertumbuhan Jumlah Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2009 - 2013	152
Tabel III.54	Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2009 - 2013	152
Tabel III.55	Pertumbuhan Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2009 - 2013	152
Tabel III.56	Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012 - 2013	153
Tabel III.57	Rasio Mahasiswa per Dosen (Tenaga Edukatif) Tahun 2012 - 2013	153
Tabel III.58	Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	153
Tabel III.59	Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	153
Tabel III.60	Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	154
Tabel III.61	Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	154
Tabel III.62	Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	154
Tabel III.63	Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	154
Tabel III.64	Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	154
Tabel III.65	Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	155
Tabel III.66	Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	155
Tabel III.67	Pertumbuhan Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	155
Tabel III.68	Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	155
Tabel III.69	Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013	155
Tabel III.70	Jumlah Guru TK Menurut Usia Tahun 2012 - 2013	156
Tabel III.71	Jumlah Guru SD Menurut Usia Tahun 2012 - 2013	156
Tabel III.72	Jumlah Guru SMP Menurut Usia Tahun 2012 - 2013	156
Tabel III.73	Jumlah Guru SMA Menurut Usia Tahun 2012 - 2013	157
Tabel III.74	Jumlah Guru SMK Menurut Usia Tahun 2012 - 2013	157
Tabel III.75	Jumlah Guru SLB Menurut Usia Tahun 2012 - 2013	157
Tabel III.76	Jumlah Guru TK Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2012 - 2013	158
Tabel III.77	Jumlah Guru SD Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2012 - 2013	158
Tabel III.78	Jumlah Guru SMP Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2012 - 2013	158
Tabel III.79	Jumlah Guru SMA Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2012 - 2013	158
Tabel III.80	Jumlah Guru SMK Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2012 - 2013	158
Tabel III.81	Jumlah Guru SLB Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2012 - 2013	159
Tabel III.82	Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	159
Tabel III.83	Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	159
Tabel III.84	Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	159
Tabel III.85	Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	159
Tabel III.86	Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	160
Tabel III.87	Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	160

Tabel III.88	Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	160
Tabel III.89	Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	160
Tabel III.90	Jumlah Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	160
Tabel III.91	Pertumbuhan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	161
Tabel III.92	Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	161
Tabel III.93	Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013	161
Tabel III.94	Perkembangan Rasio Siswa Per Guru Tahun 2009 - 2013	161
Tabel III.95	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 -2014	162
Tabel III.96	Pertumbuhan Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2014	162
Tabel III.97	Jumlah Total PNS (Pusat-Daerah) yang Menduduki Jabatan Auditor Tahun 2012 - 2013	163
Tabel III.98	Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2012 - 2014	163
Tabel III.99	Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2012 - 2014	163
Tabel III.100	Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2012 - 2014	164
Tabel III.101	Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2012 - 2014	164
Tabel III.102	Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2014	164
Tabel III.103	Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2014	165
Tabel III.104	Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2014	165
Tabel III.105	Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2014	165
Tabel III.106	Jumlah Penyidik KPK Tahun 2010 - 2014	165
Tabel III.107	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenjang Tahun 2013 2014	166
Tabel III.108	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 – 2014	166
Tabel III.109	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 -2014	166
Tabel III.110	Jumlah SDM Dittipidkor dan Jajarannya di Seluruh Indonesia Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2013	166
Tabel III.111	Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Jenjang Tahun 2013 – 2014	167
Tabel III.112	Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013	167
Tabel III.113	Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013	167
Tabel III.114	Jumlah Umum PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013	168
Tabel III.115	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	168
Tabel III.116	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	169
Tabel III.117	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	169
Tabel III.118	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	170
Tabel III.119	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	170
Tabel III.120	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	171

Tabel III.121	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	171
Tabel III.122	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013	172
Tabel III.123	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	172
Tabel III.124	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	172
Tabel III.125	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	173
Tabel III.126	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	173
Tabel III.127	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	173
Tabel III.128	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	174
Tabel III.129	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	175
Tabel III.130	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013	175
Tabel III.131	Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan Tahun 2010 - 2013	176
Tabel III.132	Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat Fungsional dan Teknis Tahun 2009 - 2012	176
Tabel III.133	Jumlah Keseluruhan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan yang Sudah Diakreditasi Tahun 2012	176
Tabel III.134	Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2011 - 2014	177
Tabel III.135	Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2011 - 2014	177
Tabel III.136	Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2011 - 2014	178
Tabel III.137	Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2011 - 2014	178
Tabel III.138	Gaji Pokok PNS Golongan I Tahun 2012 - 2014	179
Tabel III.139	Gaji Pokok PNS Golongan II Tahun 2012 - 2014	181
Tabel III.140	Gaji Pokok PNS Golongan III Tahun 2012 - 2014	183
Tabel III.141	Gaji Pokok PNS Golongan IV Tahun 2012 - 2014	185
Tabel III.142	Tunjangan Jabatan Struktural	188
Tabel III.143	Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2013	188
Tabel III.144	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2011 - 2013	194
Tabel III.145	Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2011 - 2013	194
Tabel III.146	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2011 - 2013	195
Tabel III.147	Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2011 - 2013	195
Tabel III.148	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013	195

Tabel III.149	Jumlah Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2011 - 2013	196
Tabel III.150	Pertumbuhan Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2011 - 2013	196
Tabel III.151	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2011 - 2013	197
Tabel III.152	Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2011 - 2013	197
Tabel III.153	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2013	197
Tabel III.154	Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2013	198
Tabel III.155	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013	199
Tabel III.156	Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013	199
Bagian IV	Keuangan Pemerintah	
Tabel IV.1	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 - 2014 (Dalam Miliaran Rupiah)	208
Tabel IV.2	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan Tahun 2011 – 2014 (Dalam Triliun Rupiah)	210
Tabel IV.3	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Kesehatan Tahun 2011 – 2014 (Dalam Triliun Rupiah)	211
Tabel IV.4	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur Tahun 2011 – 2014 (Dalam Triliun Rupiah)	212
Tabel IV.5	Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 - 2013	213
Tabel IV.6	Pertumbuhan Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 - 2013	213
Tabel IV.7	Anggaran Lidik-Sidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun 2011 - 2014 (Dalam Milyar Rupiah)	213
Tabel IV.8	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)	214
Tabel IV.9	Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2012 – 2014	214
Tabel IV.10	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)	214
Tabel IV.11	Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014	214
Tabel IV.12	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	215
Tabel IV.13	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	215
Tabel IV.14	Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	216
Tabel IV.15	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	216
Tabel IV.16	Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)	216
Tabel IV.17	Pertumbuhan Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014	217
Tabel IV.18	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	217

Tabel IV.19	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	217
Tabel IV.20	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	218
Tabel IV.21	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	218
Tabel IV.22	Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)	218
Tabel IV.23	Pertumbuhan Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014	218
Tabel IV.24	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	219
Tabel IV.25	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	219
Tabel IV.26	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	219
Tabel IV.27	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	220
Tabel IV.28	Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)	220
Tabel IV.29	Pertumbuhan Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014	220
Tabel IV.30	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	220
Tabel IV.31	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	221
Tabel IV.32	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	221
Tabel IV.33	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014	221
Tabel IV.34	Total Dana Bagi Hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)	222
Tabel IV.35	Pertumbuhan Total Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014	222
Tabel IV.36	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	222
Tabel IV.37	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	222
Tabel IV.38	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	223
Tabel IV.39	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	223
Tabel IV.40	Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)	223
Tabel IV.41	Pertumbuhan Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)	224
Tabel IV.42	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 –	224

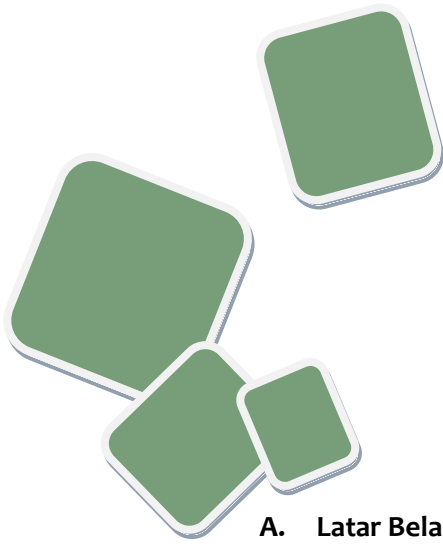
	2014	
Tabel IV.43	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	224
Tabel IV.44	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	225
Tabel IV.45	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	225
Tabel IV.46	Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014	225
Tabel IV.47	Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014	226
Tabel IV.48	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	226
Tabel IV.49	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	226
Tabel IV.50	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	227
Tabel IV.51	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	227
Tabel IV.52	Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014	227
Tabel IV.53	Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014	228
Tabel IV.54	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	228
Tabel IV.55	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	228
Tabel IV.56	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	229
Tabel IV.57	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014	229
Tabel IV.58	Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014	229
Tabel IV.59	Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014	229
Bagian V	Kinerja Aparatur / Reformasi Birokrasi	
Tabel V.1	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004-2012	237
Tabel V.2	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan	237

Tabel V.3	Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2010-2012 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2010-2012	237
Tabel V.4	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 - 2013	241
Tabel V.5	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 - 2013	242
Tabel V.6	Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Pusat Tahun 2011	254
Tabel V.7	Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	256
Tabel V.8	Nomenklatur Pemerintah Daerah Propinsi dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	256
Tabel V.9	Nomenklatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	257
Tabel V.10	Perkembangan Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional Tahun 2008 - 2012	261
Tabel V.11	Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Secara Nasional Tahun 2011 - 2012	262
Tabel V.12	Peringkat Doing Business Negara ASEAN Tahun 2011 -2014	274
Tabel V.13	Peringkat E-Government Negara ASEAN Tahun 2010 - 2014	275
Tabel V.14	Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2008- 2013	275
Tabel V.15	Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2009 - 2014	276
Tabel V.16	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tahun 2009- 2013	276
Tabel V.17	Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh KPK Tahun 2009- 2013	276
Tabel V.18	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Dittipidkor Polri Tahun 2010 - 2013	277
Tabel V.19	Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima oleh KPK Tahun 2008-2013	277
Tabel V.20	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Diterima oleh KPK Tahun 2011 - 2013	278
Tabel V.21	Rangking (<i>Rank</i>) dan Nilai (<i>Value</i>) <i>Human Development Index</i> (HDI) Negara ASEAN Tahun 2011 - 2013	278
Tabel V.22	Nilai Komponen (<i>components</i>) <i>Human Development Index</i> (HDI) Negara ASEAN Tahun 2012 - 2013	279

DAFTAR GAMBAR

Bagian I	Kelembagaan	
Gambar I.1.	Peta Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat	19
Gambar I.2.	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas di sebutkan dalam UUD 1945	24
Gambar I.3.	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkungnya di sebutkan dalam UUD 1945	26
Gambar I.4	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)	27
Gambar I.5	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	29
Gambar I.6	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang dibentuk untuk keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian	30
Gambar I.7.	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	32
Gambar I.8.	Titelatur dan Eselonering pada Kejaksaan Agung	34
Gambar I.9.	Titelatur dan Eselonering pada Kejaksaan Tinggi	34
Gambar I.10.	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Sekretariat Kabinet)	36
Gambar I.11.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)	37
Gambar I.12.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)	38
Gambar I.13.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)	39
Gambar I.14	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga	41

	Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)	
Gambar I.15	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)	44
Gambar I.16.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)	45



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

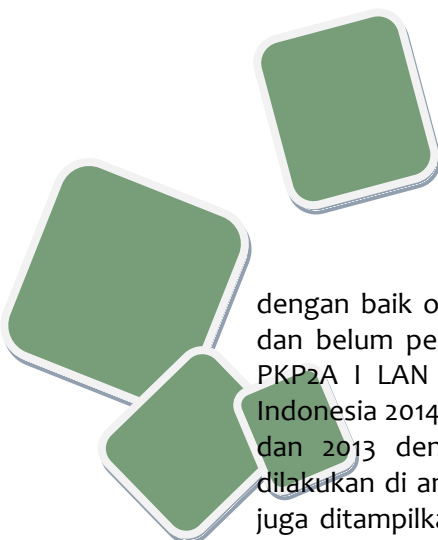
Dewasa ini data mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memproduksi dan mengkonsumsi data, baik pada tingkatan individu; organisasi swasta dan masyarakat; dan juga pada organisasi pemerintah. Pada organisasi pemerintah, data mutlak diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Data diperlukan dalam proses perumusan, implementasi hingga evaluasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Data juga diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di seluruh sektor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan yang benar dan nyata; data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Pentingnya ketersediaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai bahan pertimbangan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ketidakterersediaan data yang memadai akan menyebabkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan atau merencanakan pembangunan, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai dan hanya memboroskan sumber daya yang ada.

Melihat pentingnya data dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi ini mengemukakan dan mengharuskan dua hal, yaitu bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data; dan yang kedua data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan harus data yang valid dan akurat. Walaupun telah tersedia data untuk proses perencanaan pembangunan, tetapi data tersebut tidak valid dan akurat maka dapat terjadi kesalahan dan kegagalan dalam proses perencanaan pembangunan.

Sebagai bagian dari aspek pemerintahan, pengelolaan dan pembangunan aparatur mutlak memerlukan data yang memadai, valid dan akurat sebagai input utama dalam merumuskan berbagai kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur. Namun kenyataannya, belum tersedia data yang memadai, valid dan akurat mengenai aparatur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur. Misalnya saja saat ini terjadi perbedaan data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Data jumlah PNS ini hanya merupakan bagian dari data aparatur yang harus diperbaiki ketersediannya dan dijamin kevalidan dan keakuratannya. Masih banyak data lain mengenai aparatur yang diperlukan tetapi belum dikumpulkan dan dikelola



dengan baik oleh instansi yang berwenang; atau bahkan data tersebut belum ada, dan belum pernah dikumpulkan sama sekali. Kondisi inilah yang melatarbelakangi PKP2A I LAN untuk melaksanakan kegiatan penyusunan buku Statistik Aparatur Indonesia 2014. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang sama pada tahun 2012 dan 2013 dengan berbagai penyempurnaan. Penyempurnaan dan penambahan dilakukan di antaranya terhadap jenis data yang disajikan. Selain itu, dalam buku ini juga ditampilkan pengolahan data sederhana untuk membantu pembaca/pengguna melihat rasio dan/atau pertumbuhan dari data yang disajikan. Diharapkan data yang tersedia semakin memadai untuk keperluan perumusan kebijakan aparatur maupun keperluan akademis. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap cara mempublikasikan data. Selain dipublikasikan dalam bentuk buku ini, berbagai data terkait aparatur dapat dilihat di website <http://dataaparatur.bandung.lan.go.id>.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengumpulkan dan menyusun data aparatur yang tersedia pada instansi yang berwenang dan menyajikannya dalam bentuk publikasi yang mudah dimengerti dan digunakan oleh berbagai stakeholder.

C. Isi Buku

Buku ini berisikan data mengenai aparatur yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu :


1. bagian I berisikan data kelembagaan;
2. bagian II berisikan data ketatalaksanaan;
3. bagian III berisikan data sumber daya manusia aparatur;
4. bagian IV berisikan data keuangan/fiskal pemerintah.
5. bagian V berisikan data kinerja aparatur/ reformasi birokrasi.

D. Kegunaan dan Manfaat

Adapun kegunaan dari buku ini yang utama adalah sebagai bahan bagi perumusan kebijakan perencanaan makro (RPJM) bidang aparatur oleh Bappenas. Selain itu, buku Statistik Aparatur 2014 ini juga dapat digunakan oleh berbagai *stakeholder* yang memerlukan data untuk proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur serta untuk kebutuhan data kajian/penelitian terkait aparatur..

E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data di bidang aparatur menggunakan teknik Studi pustaka (*desk research*) yang dilakukan di beberapa lembaga pemerintah. Diantaranya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN); Badan Pusat Statistik (BPS);



Kementerian PAN dan RB; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Lembaga Administrasi Negara (LAN); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Lembaga Transparency International, UNDP; PT Askes; dan PT Taspen.

Data yang ada pada instansi-instansi tersebut dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Data kelembagaan yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Kementerian PAN dan RB; Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS). Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementrian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Data ketatalaksanaan yang ditampilkan dalam buku ini bersumber dari Kementerian PAN dan RB; Kementerian Dalam Negeri; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Data sumber daya manusia aparatur yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri; BKKBN; LAN; PT Askes; dan PT Taspen. Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah dan berdasarkan database internal.
4. Data keuangan / fiskal pemerintah yang ditampilkan dalam buku ini bersumber dari Kementerian Keuangan; Badan Pusat Statistik (BPS); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah dan berdasarkan database internal.
5. Data Kinerja Aparatur / Birokrasi yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kementerian PAN dan RB; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kemendagri; Lembaga Transparency International, dan UNDP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kementerian PAN dan RB; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kemendagri mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga; Pemerintah Daerah dan berdasarkan database internal. Sementara Lembaga Transparency International.

BAGIAN I

KELEMBAGAAN



Bab ini menyajikan data kelembagaan yang terdiri dari kelembagaan pemerintah, struktur organisasi dan ketersediaan *assessment center* di lembaga pemerintah. Kelembagaan pemerintah dibagi ke dalam dua jenis data yaitu data kelembagaan pemerintah pusat dan data kelembagaan pemerintah daerah. Struktur organisasi dibagi ke dalam empat jenis data yaitu data pemetaan titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga; jumlah jabatan struktural (eselon) di lembaga Negara; nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan instansi pembinaanya; serta nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan kementerian/lembaga. Sedangkan ketersediaan *assessment center* di lembaga pemerintah hanya terdiri dari satu jenis data yaitu nomenklatur lembaga pusat/pemerintah daerah yang telah memiliki *asesment center*.

A. Kelembagaan Pemerintah

Data mengenai kelembagaan pemerintah pusat yang disajikan dalam buku ini adalah data jumlah dan nomenklatur lembaga pemerintah pusat tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014 ini, perubahan jumlah dan nomenklatur lembaga pemerintah pusat masih menunggu perubahan yang dilakukan oleh presiden terpilih tahun 2014 - 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenpan dan RB, pada tahun 2012 tercatat ada sebanyak 173 lembaga negara, dan pada tahun 2013 mengalami penambahan menjadi 178 lembaga negara. Jumlah lembaga negara terbanyak adalah jenis lembaga non struktural. Data lengkap mengenai rekapitulasi jumlah lembaga negara tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel I.10.

Dari segi nomenklatur lembaga, ada beberapa lembaga negara yang berubah nomenklatur lembaganya di tahun 2013, sementara di tahun 2014 perubahan mengenai jumlah dan nomenklatur lembaga pemerintah pusat masih menunggu perubahan yang dilakukan oleh Presiden terpilih 2014-2019. Sampai buku ini disusun, belum dilakukan perubahan jumlah dan nomenklatur lembaga pusat. Data mengenai nomenklatur lembaga negara dapat dilihat pada tabel I.1 sampai tabel I.9. Pada tahun 2013, Ada 17 kementerian yang memiliki wakil menteri. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel I.3.

Data mengenai kelembagaan pemerintah daerah yang disajikan dalam buku ini adalah data jumlah pemerintah daerah propinsi kabupaten/kota antara tahun 2009 sampai 2013. Data mengenai jumlah propinsi/kabupaten/ dan kota tersedia pada tabel I.11 dan tabel I.12. Penambahan jumlah propinsi dan kabupaten disebabkan



dilaksanakannya kembali kebijakan pemekaran daerah. Pada periode tahun 2012-2014, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 18 daerah pemekaran baru, yaitu 1 propinsi; 16 kabupaten; dan 1 kota. Data selengkapnya mengenai jumlah daerah otonom baru dapat dilihat pada tabel I.13.

B. Struktur Organisasi (struktur dan jabatan)

Data yang disajikan dalam bagian ini berupaya untuk menggambarkan struktur organisasi lembaga pemerintah pusat sehingga dapat diketahui titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga; jumlah jabatan struktural yang ada di lingkungan instansi pusat; jumlah dan nomenklatur jabatan fungsional tertentu; dan nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan instansi pusat. Sementara untuk data mengenai struktur organisasi pemerintah daerah masih belum tersedia dan perlu dibangun. Adapun data mengenai titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga dapat dilihat pada tabel I.14 sampai tabel I.31 dan gambar I.2 sampai gambar I.16. Data mengenai jumlah jabatan struktural yang ada di lingkungan instansi pusat dapat dilihat pada tabel I.32 sampai tabel I.38. Pada tahun 2014, ada 511 pejabat struktural eselon I.a; 217 pejabat struktural eselon I.b; 2449 pejabat struktural eselon II.a; 522 pejabat struktural eselon II.b; 9106 pejabat struktural eselon III.a; 1319 pejabat struktural eselon III.b; 20310 pejabat struktural eselon IV.a dan 771 pejabat struktural eselon IV.b diseluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Data di dalam publikasi ini masih belum mengikuti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan optimal karena masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah yang lebih teknis.

Data mengenai jumlah, nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan instansi pembinaanya dapat dilihat pada tabel I.39 dan tabel I.40. Dan data mengenai jenis dan nomenklatur jabatan fungsional umum yang ada di lingkungan pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel I.41.

C. Ketersediaan Assessment Center di Lembaga Pemerintah

Dewasa ini pengembangan *assessment center* / *assessment* kompetensi aparatur dirasa sangat penting untuk memperoleh aparatur publik yang berkualitas. Oleh karena itu, lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia berupaya untuk membangun dan mengembangkan *assessment center*. Kementerian PAN dan RB mencatat sampai tahun 2013, baru 15 instansi yang sudah membangun *assessment center*, yang terdiri dari 10 instansi pusat dan 5 pemerintah daerah. Melihat pentingnya pengembangan *assessment center* tersebut, seharusnya kebijakan ini memperoleh perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun data jumlah dan nomenklatur instansi pusat/pemerintah daerah yang telah memiliki *assessment center* dapat dilihat pada tabel I.42.



Tabel I.1 Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Negara Tahun 2012	Lembaga Negara Tahun 2013	Cabang Kekuasaan Negara yang Dipegang	Pasal dalam UUD 1945
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Mengubah dan menetapkan UUD	Pasal 3
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat	Membentuk Undang-Undang	Pasal 20
3.	Dewan Perwakilan Daerah	Dewan Perwakilan Daerah	Membentuk Undang-Undang	Pasal 22D
4.	Presiden	Presiden	Memegang kekuasaan pemerintahan	Pasal 4
5.	Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	Kekuasaan kehakiman	Pasal 24 C
6.	Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	Kekuasaan kehakiman	Pasal 24A
7.	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksaan keuangan negara	Pasal 23E
8.	Komisi Yudisial	-	Pengusulan pengangkatan hakim agung	Pasal 24B
	Jumlah Tahun 2012 = 8 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 7 Lembaga		

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.2 Nomenklatur Kementerian Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kementerian	2012	2013
1.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang secara tegas di sebutkan dalam UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan
2.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral d. Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral d. Kementerian Perindustrian e. Kementerian Perdagangan f. Kementerian Pertanian





Lanjutan Tabel I.2

No.	Jenis Kementerian	2012	2013
		e. Kementerian Perdagangan f. Kementerian Pertanian g. Kementerian Kehutanan h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan dan Perikanan j. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi k. Kementerian Pekerjaan Umum l. Kementerian Kesehatan m. Kementerian Pendidikan Nasional n. Kementerian Sosial o. Kementerian Agama p. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata q. Kementerian Komunikasi dan Informatika	g. Kementerian Kehutanan h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan dan Perikanan j. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi k. Kementerian Pekerjaan Umum l. Kementerian Kesehatan m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan n. Kementerian Sosial o. Kementerian Agama p. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif q. Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah	a. Kementerian Riset dan Teknologi b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Kementerian Lingkungan Hidup d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	a. Kementerian Riset dan Teknologi b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Kementerian Lingkungan Hidup d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





Lanjutan Tabel I.2

No.	Jenis Kementerian	2012	2013
4.		f. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal g. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional h. Kementerian Badan Usaha Milik Negara i. Kementerian Perumahan Rakyat j. Kementerian Pemuda dan Olahraga k. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian m. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat a. Kementerian Sekretariat Negara	f. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal g. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional h. Kementerian Badan Usaha Milik Negara i. Kementerian Perumahan Rakyat j. Kementerian Pemuda dan Olahraga k. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian m. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat n. Kementerian Sekretariat Negara
		Jumlah Tahun 2012 = 34 Kementerian	Jumlah Tahun 2013 = 34 Kementerian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013





Tabel I.3 Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2013

No	Nomenklatur Kementerian
1.	Kementerian Pertanian
2.	Kementerian Pekerjaan Umum
3.	Kementerian Perhubungan
4.	Kementerian Perindustrian
5.	Kementerian Perdagangan
6.	Kementerian Keuangan
7.	Kementerian Pertahanan
8.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Kementerian Kesehatan
10.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
11.	Kementerian BUMN
12.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
13.	Kementerian Luar Negeri
14.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
15.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17.	Kementerian Agama
Jumlah 17 Kementerian	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.4 Nomenklatur Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2012	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2013
1	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
3	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
5	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
6	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Pusat Statistik (BPS)
7	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Badan Standardisasi Nasional (BSN)
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
9	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
10	Badan Intelijen Negara	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
11	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
12	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
13	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
14	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
15	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
16	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)





Lanjutan Tabel I.4

No	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2012	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2013
17	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Badan Pertahanan Nasional (BPN)
18	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (B POMM)
19	Badan Pertahanan Nasional (BPN)	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
20	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (B POMM)	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
21	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
22	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
23	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Badan SAR Nasional (BASARNAS)
25	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Badan Narkotika Nasional (BNN)
26	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
27	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Badan Informasi Geospasial (BIG)
28	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	
	Jumlah Tahun 2012 = 28 LPNK	Jumlah Tahun 2013 = 27 LPNK

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.5 Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2012 - 2013

No	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2012	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2013
1	Sekretariat Mahkamah Agung	Sekretariat Mahkamah Agung
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
4	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
5	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
7	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	-
	Jumlah Tahun 2012 = 7 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 6 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



**Tabel I.6 Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tahun 2013**

No	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara
1.	Sekretariat Komisi Yudisial
2.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
3.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4.	Sekretariat Ombudsman Republik Indonesia

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.7 Nomenklatur Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri Tahun 2012 - 2013

No	Nomenklatur Lembaga Tahun 2012	Nomenklatur Lembaga Tahun 2013
1.	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.	Tentara Nasional Republik Indonesia	Tentara Nasional Republik Indonesia
4.	Sekretariat Kabinet	Sekretariat Kabinet
5.		Badan Intelejen Negara
	Jumlah Tahun 2012 = 4 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.8 Nomenklatur Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2012	Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2013
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
	Jumlah Tahun 2012 = 2 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 2 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.9 Nomenklatur Lembaga Non Struktural Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
KOMISI		
1.	Komisi Hukum Nasional	Komisi Hukum Nasional
2.	Komisi Kepolisian Nasional	Komisi Kepolisian Nasional
3.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
6.	Komisi Kejaksaan	Komisi Kejaksaan
7.	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
8.	Komisi Nasional Lanjut Usia	Komisi Nasional Lanjut Usia
9.	Komisi Penyiaran Indonesia	-
10.	Komisi Banding Merek	Komisi Banding Merek
11.	Komisi Banding Paten	Komisi Banding Paten
12.	Komisi Informasi Pusat	Komisi Informasi Pusat
13.	Komisi Pengawas Haji Indonesia	Komisi Pengawas Haji Indonesia





Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
14.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
15.	Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum
16.	Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi	-
	Jumlah Tahun 2012 = 16 Komisi	Jumlah Tahun 2013 = 14 Komisi
DEWAN		
1.	Dewan Buku Nasional	Dewan Buku Nasional
2.	Dewan Gula Nasional	Dewan Gula Nasional
3.	Dewan Riset Nasional	Dewan Riset Nasional
4.	Dewan Koperasi Indonesia	Dewan Koperasi Indonesia
5.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
6.	Dewan Kelautan Indonesia	Dewan Kelautan Indonesia
7.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
8.	Dewan Pengupahan Nasional	Dewan Pengupahan Nasional
9.	Dewan Ketahanan Pangan	Dewan Ketahanan Pangan
10.	Dewan Energi Nasional	Dewan Energi Nasional
11.	Dewan Pers	Dewan Pers
12.	Dewan Pertimbangan Presiden	Dewan Pertimbangan Presiden
13.	Dewan Sumber Daya Air Nasional	Dewan Sumber Daya Air Nasional
14.	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)
15.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
16.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
17.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
18.	Dewan Ketahanan Nasional	Dewan Ketahanan Nasional
19.	Dewan Nasional Perubahan Iklim	Dewan Nasional Perubahan Iklim
20.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	Dewan Jaminan Sosial Nasional
21.	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
22.	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
23.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
	Jumlah Tahun 2012 = 23 Dewan	Jumlah Tahun 2013 = 23 Dewan
BADAN		
1.	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
2.	Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional	Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional
3.	Badan Pendukung Pengembangan System Penyediaan Air Minum	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
5.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas





Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
6.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
8.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum
9.	Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura	Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura
10.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
11.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
12.	Badan Amil Zakat Nasional	Badan Amil Zakat Nasional
13.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	Badan Koordinasi Keamanan Laut
14.	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
15.	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
16.	Badan Olahraga Professional	Badan Olahraga Professional
17.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
18.	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
19.	Badan Pertimbangan Kepegawaian	Badan Pertimbangan Kepegawaian
20.	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
21.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
22.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
23.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
24.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
25.	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
26.	Badan Benih Nasional	Badan Benih Nasional
	Jumlah Tahun 2012 = 26 Badan	Jumlah Tahun 2013 = 26 Badan
KOMITE		
1.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
2.	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
3.	Komite Akreditasi Nasional	Komite Akreditasi Nasional
4.	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
5.	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran



Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
6.	Komite Standar Akuntansi Pemerintah	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
7.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
8.	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
9.	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (<i>Avian Influenza</i>) dan Kesiapsiagaan Menghadapi <i>Pandemic Influenza</i>	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (<i>Avian Influenza</i>) dan Kesiapsiagaan Menghadapi <i>Pandemic Influenza</i>
10.	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
11.	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Komite Olahraga Nasional Indonesia
12.	Komite Inovasi Nasional	Komite Inovasi Nasional
13.	Komite Anti Dumping Indonesia	Komite Anti Dumping Indonesia
14.	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
	Jumlah Tahun 2012 = 14 Komite	Jumlah Tahun 2013 = 14 Komite
LEMBAGA		
1.	Lembaga Sensor Film	Lembaga Sensor Film
2.	Lembaga Kerja Sama Tripartit	Lembaga Kerja Sama Tripartit
3.	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
4.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
5.	-	Lembaga Produktivitas Nasional
	Jumlah Tahun 2012 = 4 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga
TIM		
1.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2.	Jumlah Tahun 2012 = 1 Tim	Jumlah Tahun 2013 = 1 Tim
NOMENKLATUR LAIN		
1.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2.	Ombudsman Republik Indonesia	-
3.	Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)	Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
4.	Konsil Kedokteran Indonesia	Konsil Kedokteran Indonesia
5.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
6.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
	Jumlah Tahun 2012 = 6 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga
	Jumlah Total LNS Tahun 2012 = 90 LNS	Jumlah Total LNS Tahun 2013 = 88 LNS

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



**Catatan :**

1. Komisi Kepegawaian Negara sebagai amanat UU Nomor 43 Tahun 1999 pengganti UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sampai saat ini belum dibentuk.
2. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sampai saat ini juga masih belum dibentuk.

Tabel I.10 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Negara Tahun 2012 - 2013

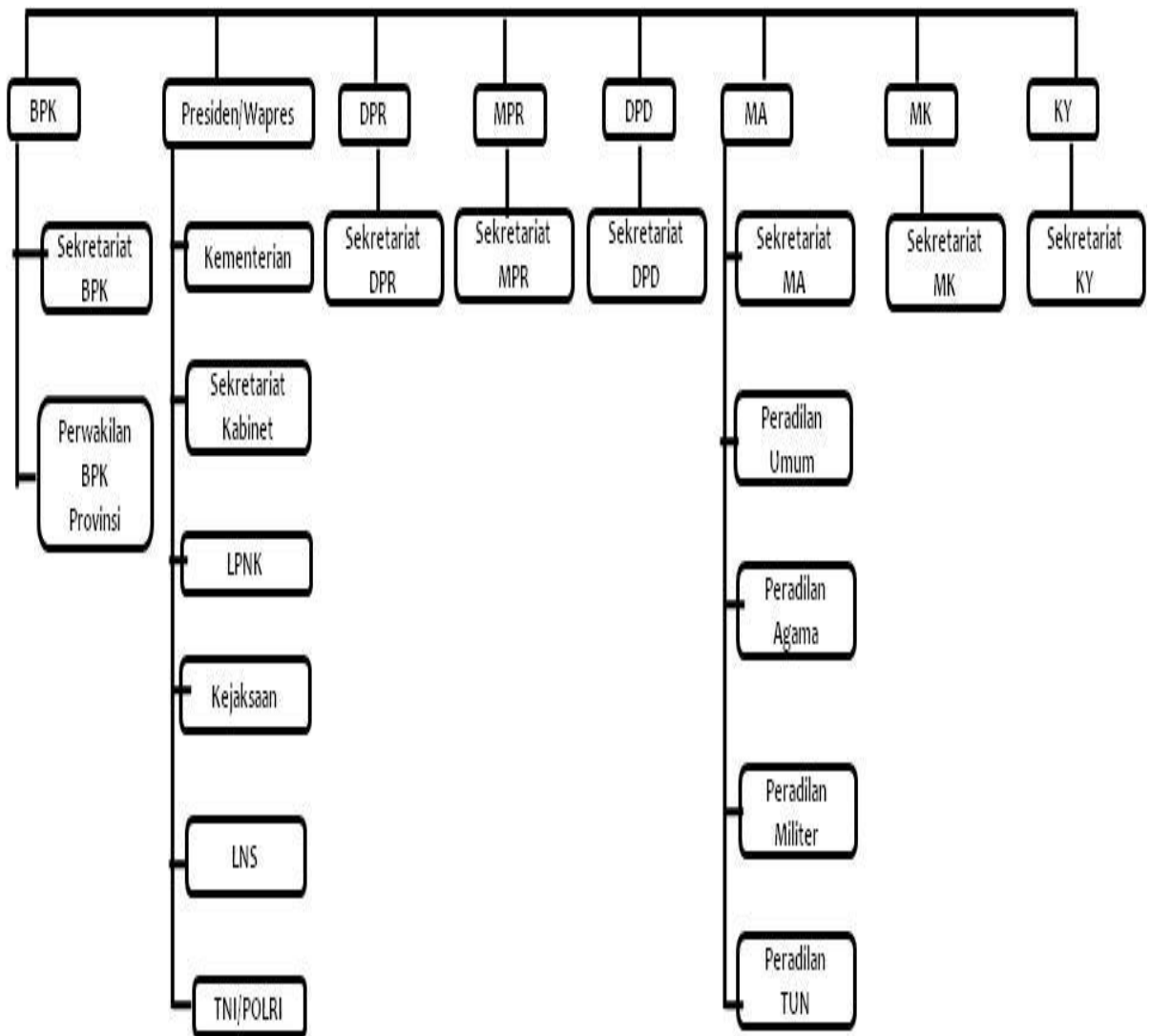
No.	Jenis Lembaga Negara	2012	2013
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	8	7
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang		4
3.	Kementerian	34	34
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	28	27
5.	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7	6
6.	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang		4
7.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	4	5
8.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2	2
9.	Lembaga Non Struktural		
	a. Komisi	16	14
	b. Dewan	23	23
	c. Badan	26	26
	d. Komite	14	14
	e. Lembaga	4	5
	f. Tim	1	1
	g. Nomenklatur lain	6	6
Total Lembaga		173	178

Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2013





Gambar I.1 Peta Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Tabel I.11 Jumlah Pemerintah Kabupaten Tahun 2009 - 2013

No.	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	18	18	18	18	18
2.	Sumatera Utara	25	25	25	25	25
3.	Sumatera Barat	12	12	12	12	12
4.	Riau	10	10	10	10	10
5.	Kepulauan Riau	5	5	5	5	5
6.	Jambi	9	9	9	9	9
7.	Sumatera Selatan	11	11	11	11	12
8.	Kepulauan Bangka Belitung	6	6	6	6	6
9.	Bengkulu	9	9	9	9	9
10.	Lampung	12	12	12	12	13
11.	DKI Jakarta	1	1	1	1	1
12.	Jawa Barat	17	17	17	17	18
13.	Banten	4	4	4	4	4
14.	Jawa Tengah	29	29	29	29	29
15.	DI Yogyakarta	4	4	4	4	4
16.	Jawa Timur	29	29	29	29	29
17.	Bali	8	8	8	8	8
18.	Nusa Tenggara Barat	8	8	8	8	8
19.	Nusa Tenggara Timur	20	20	20	20	21
20.	Kalimantan Barat	12	12	12	12	12
21.	Kalimantan Tengah	13	13	13	13	13
22.	Kalimantan Selatan	11	11	11	11	11
23.	Kalimantan Timur	10	10	10	10	7
24.	Sulawesi Utara	11	11	11	11	11
25.	Gorontalo	5	5	5	5	5
26.	Sulawesi Tengah	10	10	10	10	11
27.	Sulawesi Selatan	21	21	21	21	21
28.	Sulawesi Barat	5	5	5	5	6
29.	Sulawesi Tenggara	10	10	10	10	11
30.	Maluku	9	9	9	9	9
31.	Maluku Utara	7	7	7	7	8
32.	Papua	28	28	28	28	28
33.	Papua Barat	10	10	10	10	12
34.	Kalimantan Utara					4
Indonesia		399	399	399	399	410

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, 2013





Tabel I.12 Jumlah Pemerintah Kota Tahun 2009 - 2013

No.	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	5	5	5	5	5
2.	Sumatera Utara	8	8	8	8	8
3.	Sumatera Barat	7	7	7	7	7
4.	Riau	2	2	2	2	2
5.	Kepulauan Riau	2	2	2	2	2
6.	Jambi	2	2	2	2	2
7.	Sumatera Selatan	4	4	4	4	4
8.	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
9.	Bengkulu	1	1	1	1	1
10.	Lampung	2	2	2	2	2
11.	DKI Jakarta	5	5	5	5	5
12.	Jawa Barat	9	9	9	9	9
13.	Banten	4	4	4	4	4
14.	Jawa Tengah	6	6	6	6	6
15.	DI Yogyakarta	1	1	1	1	1
16.	Jawa Timur	9	9	9	9	9
17.	Bali	1	1	1	1	1
18.	Nusa Tenggara Barat	2	2	2	2	2
19.	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1
20.	Kalimantan Barat	2	2	2	2	2
21.	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
22.	Kalimantan Selatan	2	2	2	2	2
23.	Kalimantan Timur	4	4	4	4	3
24.	Sulawesi Utara	4	4	4	4	4
25.	Gorontalo	1	1	1	1	1
26.	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1
27.	Sulawesi Selatan	3	3	3	3	3
28.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Tenggara	2	2	2	2	2
30.	Maluku	2	2	2	2	2
31.	Maluku Utara	2	2	2	2	2
32.	Papua	1	1	1	1	1
33.	Papua Barat	1	1	1	1	1
34.	Kalimantan Utara					1
Indonesia		98	98	98	98	98

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, 2013





Tabel I.13 Daerah Otonom Baru Tahun 1999 - 2014

No.	Provinsi	Jumlah Daerah Otonom Baru 1999 - 2008				Jumlah Daerah Otonom Baru 2012 - 2014			
		Prov.	Kab.	Kota	Total	Prov.	Kab.	Kota	Total
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	10	3	13	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	12	2	14	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	4	1	5	0	0	0	0
4	Riau	0	6	1	7	0	0	0	0
5	Jambi	0	5	1	5	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	5	3	8	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	6	0	6	0	0	0	0
8	Lampung	0	6	1	7	0	1		1
9	Kep. Bangka Belitung	1	4	0	5	0	0	0	0
10	Kep. Riau	1	4	2	7	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	1	4	5	0	1	0	1
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Banten	1	0	3	4	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	1	1	0	0	0	0
16	Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	2	1	3	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	8	0	8	0	1	0	1
20	Kalimantan Barat	0	6	1	7	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	8	0	8	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	2	1	3	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	6	1	7	0	1	0	1
24	Sulawesi Utara	0	8	0	8	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	0	6	0	6	0	2	0	2
26	Sulawesi Selatan	0	3	1	4	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	6	1	7	0	1	0	1
28	Gorontalo	1	4	0	5	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	1	2	0	3	0	1	0	1
30	Maluku	0	7	1	8	0	1	0	1
31	Maluku Utara	1	5	2	8	0	1	0	1
32	Papua	0	22	0	22	0	0	0	0
33	Papua Barat	1	7	1	9	0	2	0	2
34	Kalimantan Utara					1	4	1	6
Total		7	156	32	203	1	16	1	18

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2014

Catatan : Tahun 2009 sampai 2011 diberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dalam RPJM 2010 – 2014 tidak ada pembentukan DOB usulan pemerintah (Moratorium).





Tabel I.14 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945

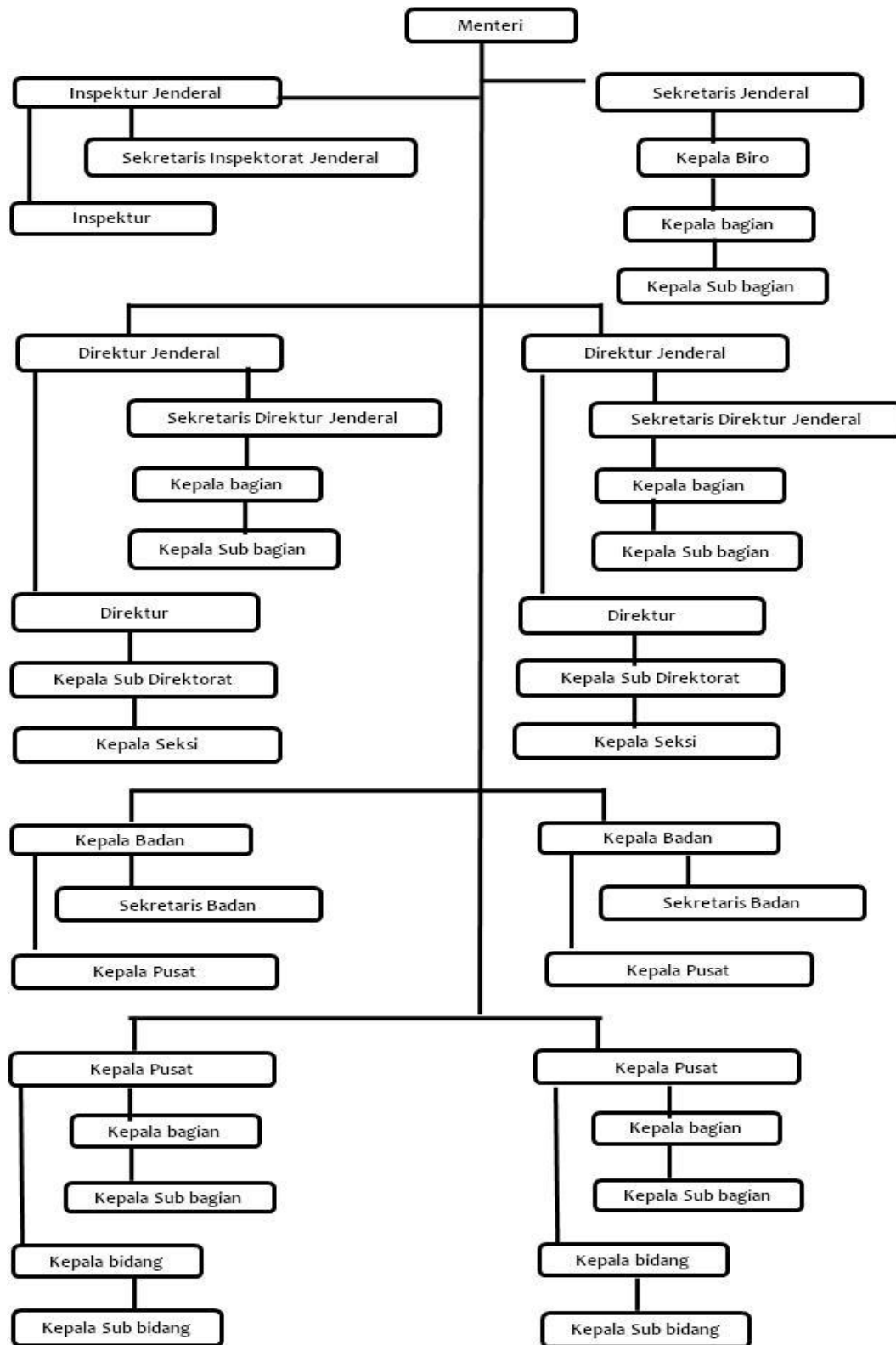
No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Direktur jenderal c. Kepala badan d. Inspektur jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat f. Sekretaris inspektorat jenderal g. Inspektorat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Gambar 1.2 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Tabel 1.15 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945

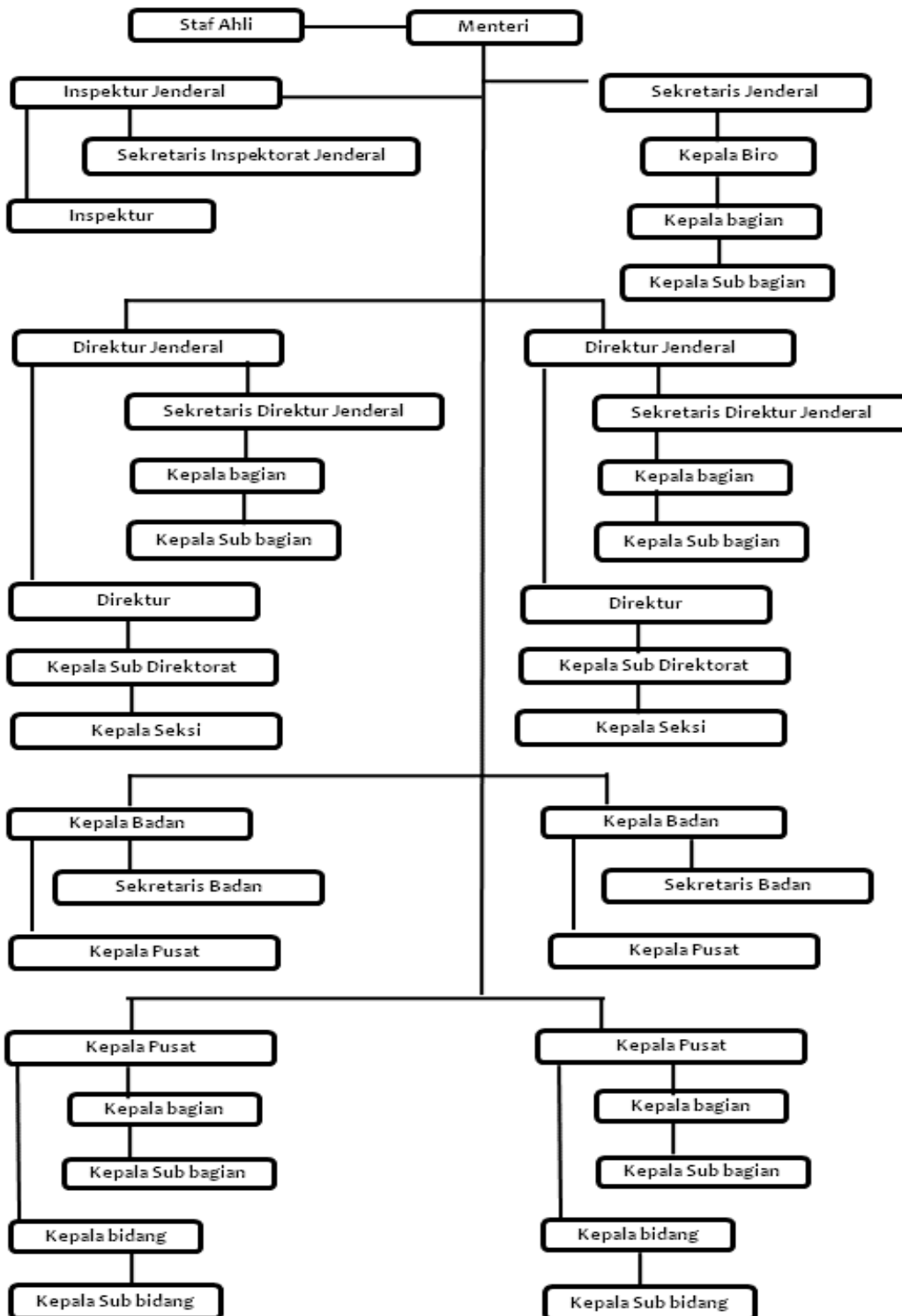
No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Direktur jenderal c. Kepala badan d. Inspektur jenderal e. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat f. Sekretaris inspektorat jenderal g. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Gambar 1.3 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



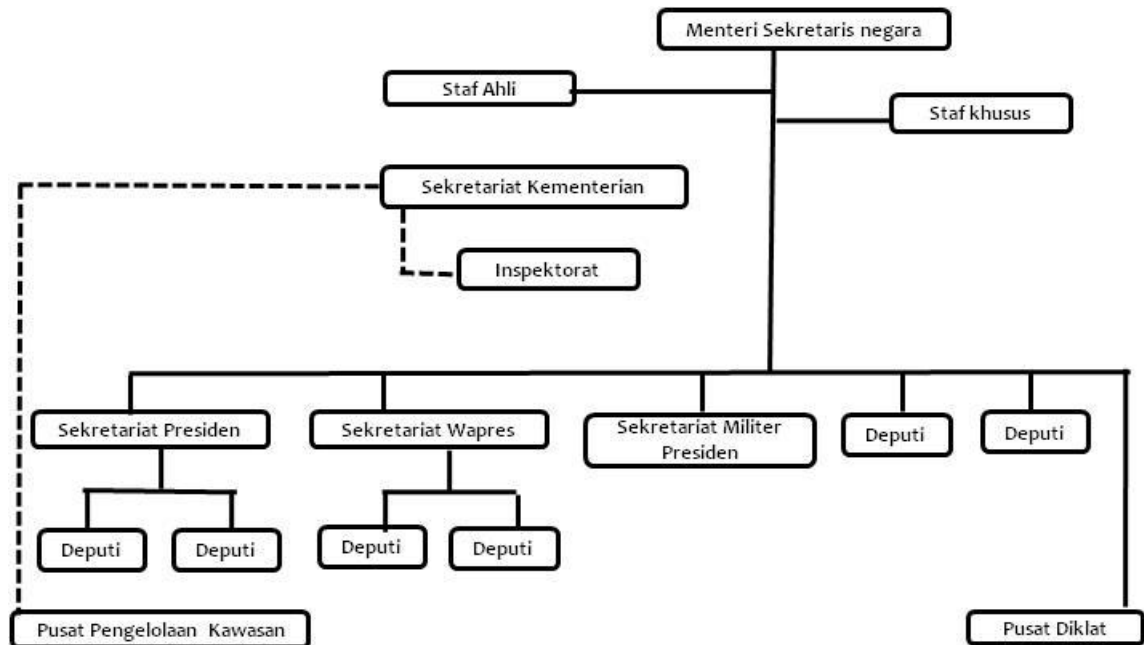


Tabel 1.16 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan b. Sekretaris Wakil Presiden c. Sekretaris Militer d. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara e. Deputi di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Negara f. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala istana d. Kepala unit
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.4 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Tabel 1.17 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah

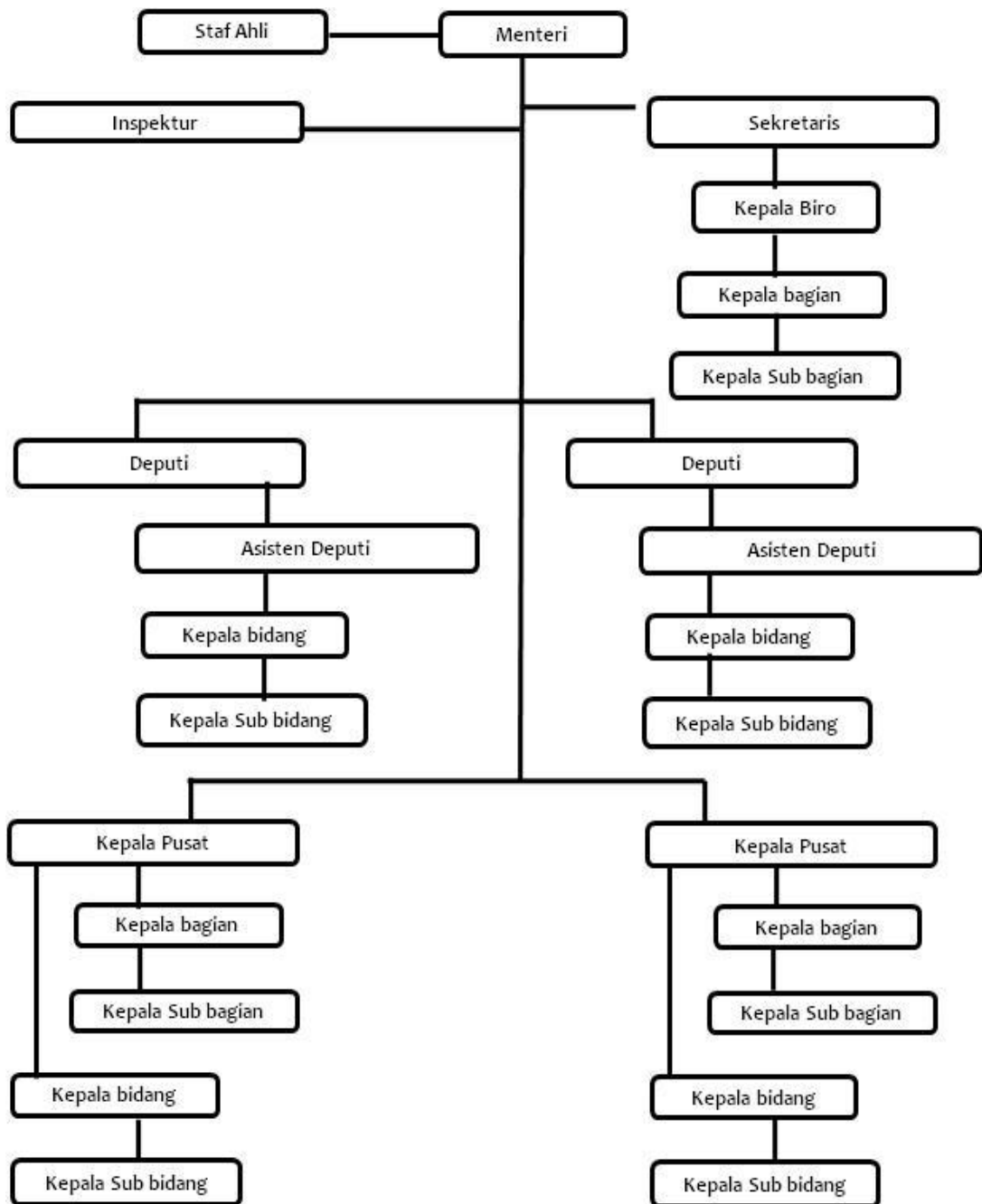
No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Kementerian b. Deputi c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Asisten deputi c. Kepala pusat c. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian e. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, , 2012





Gambar 1.5 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



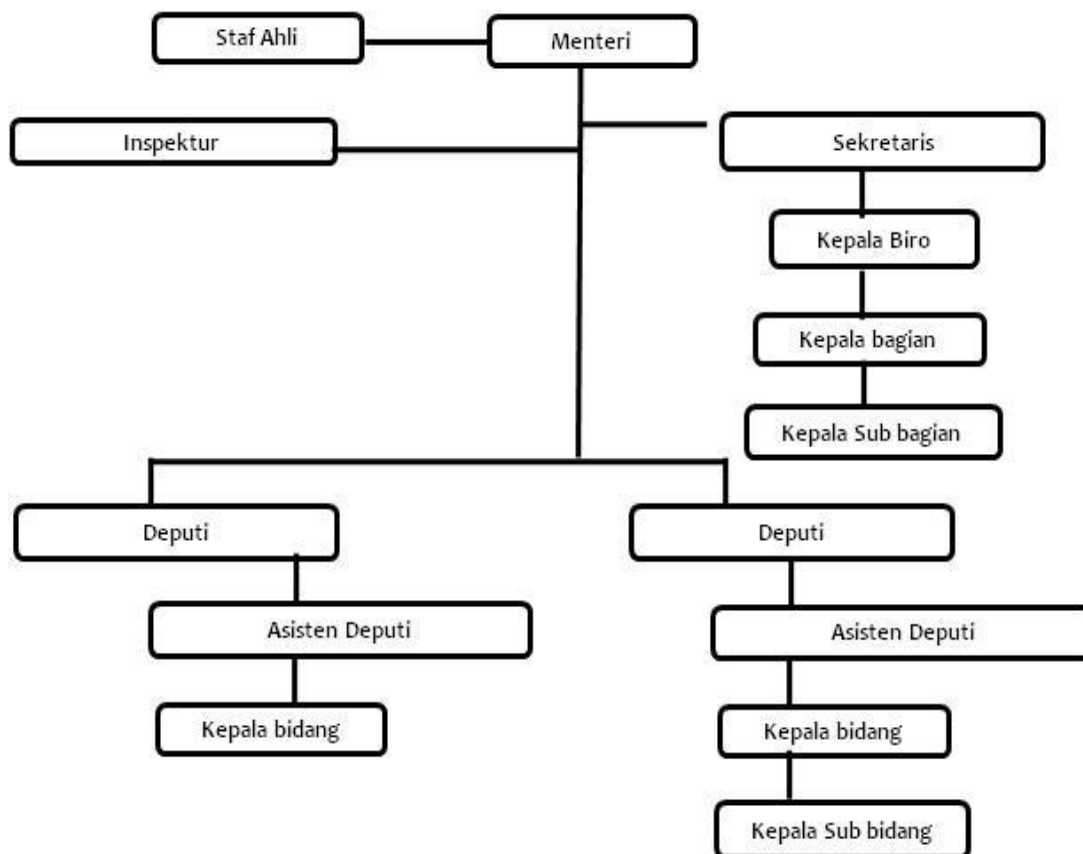


Tabel 1.18 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Kementerian Koordinator b. Deputi c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Asisten deputi c. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.6 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel I.19 Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian

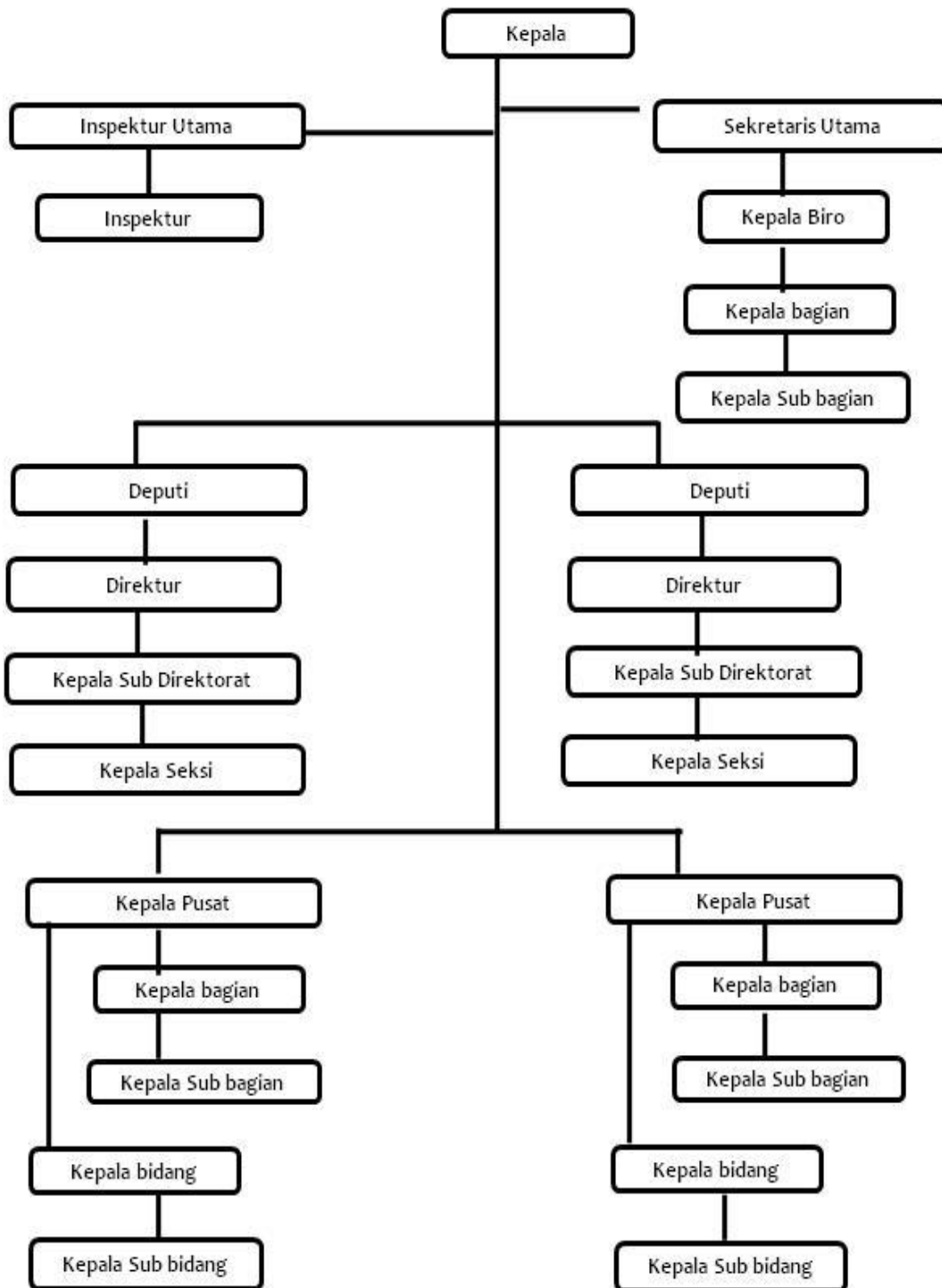
No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Kepala b. Gubernur (Lemhanas) c. Wakil gubernur (Lemhanas) d. Deputi e. Inspektur utama f. Sekretaris utama
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Direktur c. Kepala pusat d. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Gambar 1.7 Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Tabel I.20 Titeltur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kejaksaan Agung)

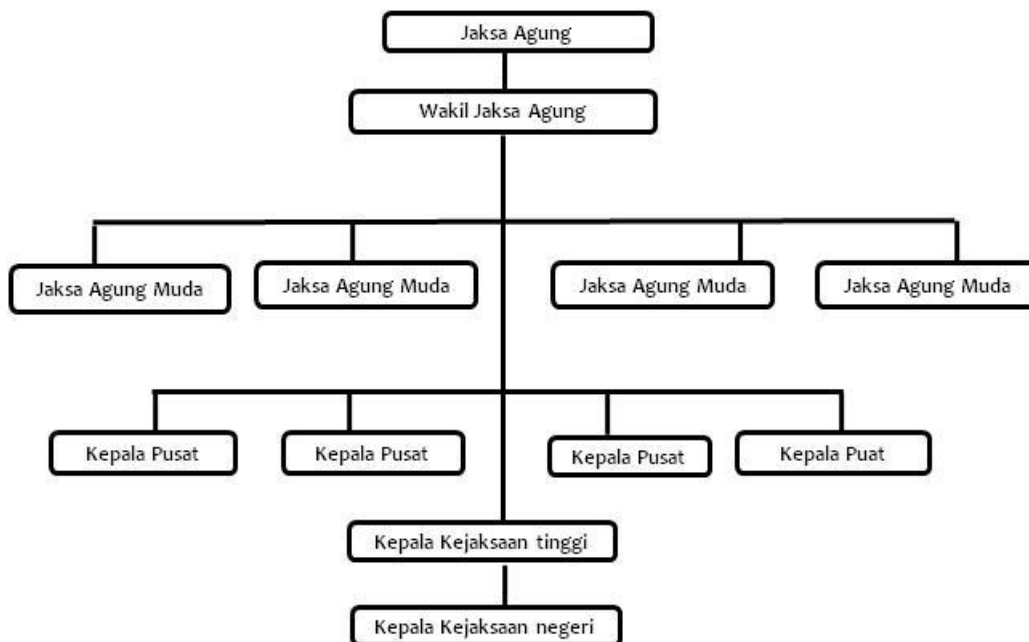
No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Wakil jaksa agung b. Jaksa agung muda c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Sekretaris jaksa agung muda b. Kepala biro c. Direktur d. Kepala Pusat e. Inspektur Instansi vertikal: a. Kepala kejaksaan tinggi b. Wakil kepala kejaksaan tinggi
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat d. Inspektur pembantu Instansi vertikal: a. Kepala kejaksaan negeri tipe a b. Kepala bagian pada kejaksaan tinggi c. Asisten pada kejaksaan tinggi d. Kepala kejaksaan negeri tipe b Di lingkungan kejaksaan tinggi, dibentuk juga jabatan tenaga pengkaji
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang d. Pemeriksa Instansi vertikal: a. Kepala cabang kejaksaan negeri b. Kepala subbagian c. Kepala seksi
5.	Eselon V	Instansi vertikal: a. Kepala urusan b. Kepala subseksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



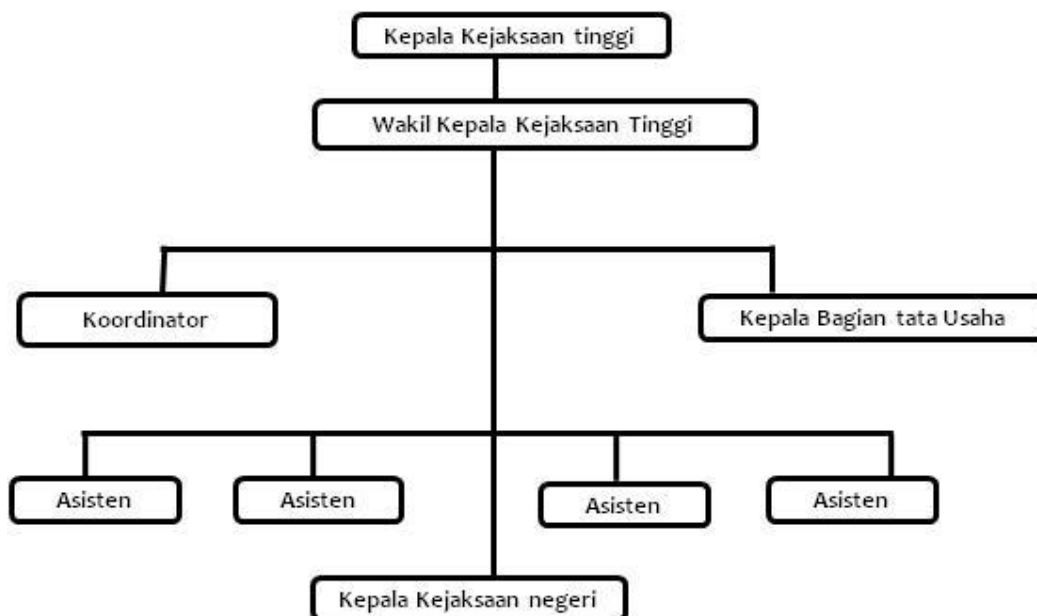


Gambar I.8 Titeltatur dan Eselonering pada Kejaksaan Agung



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.9 Titeltatur dan Eselonering pada Kejaksaan Tinggi



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Tabel I.21 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kepolisian RI)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (wakapolri); b. Inspektur (irwasum); c. Kepala badan; d. Deputi kapolri; e. Kepala badan; f. Wakil inspektur; g. Kepala sekolah staf dan pimpinan kepolisian; h. Gubernur (PTIK dan AKPOL); i. Kepala lembaga (Lemdiklat); j. Kepala divisi; k. Wakil kepala badan; l. Kepala korps (Korbrimob).
2.	Eselon II	a. Kapolda ; b. Wakil kepala divisi; c. Kepala biro; d. Kepala pusat ; e. Direktur; f. Insvektur wilayah; g. Kepala sekolah (Selapa dan secapa); h. Kepala rumah sakit polri; i. Kepala detasemen (Densus 88); j. Kepala bagian; k. Instruktur bidang.
3.	Eselon III	a. Kepala bagian; b. Kepala subdirektorat; c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian; b. Kepala seksi; c. Kepala subbidang
5.	Eselon V	a. Kepala urusan; b. Kepala Subseksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



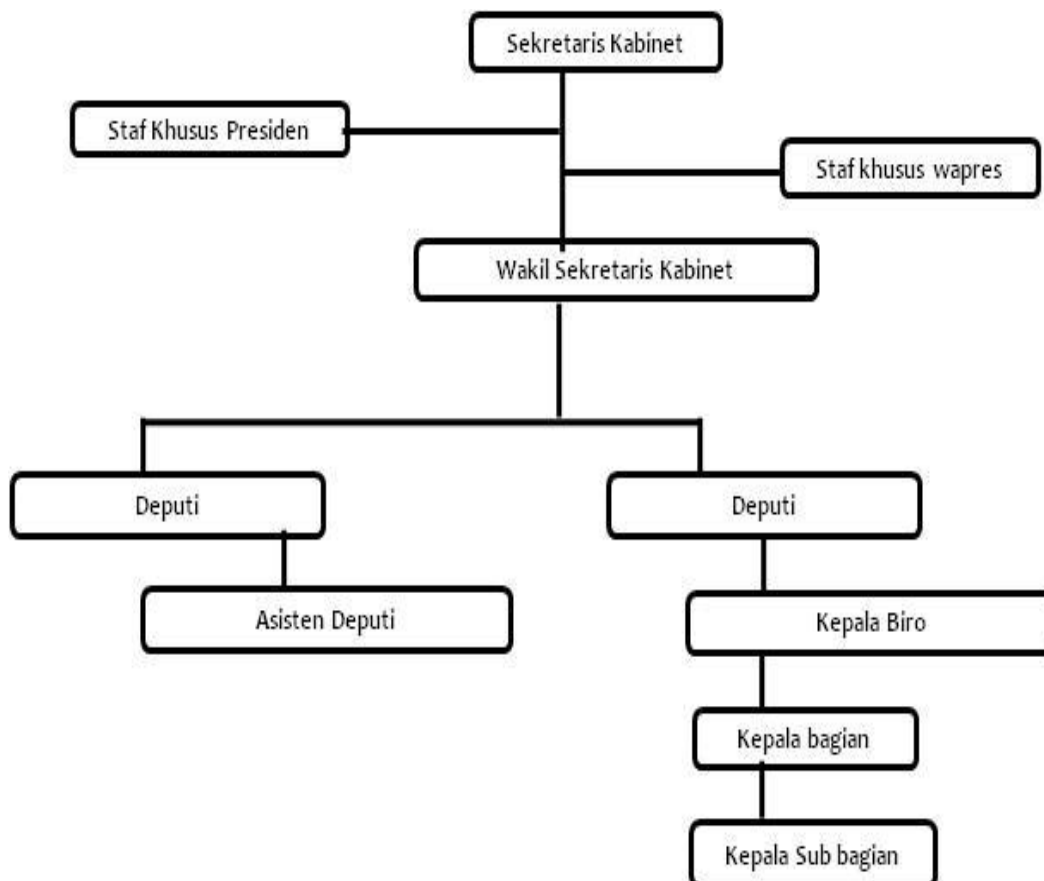


Tabel I.22 Titeltur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Wakil Sekretaris Kabinet; b. Deputi ; c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro
3.	Eselon III	a. Kepala bagian
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian.

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.10 Titeltur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

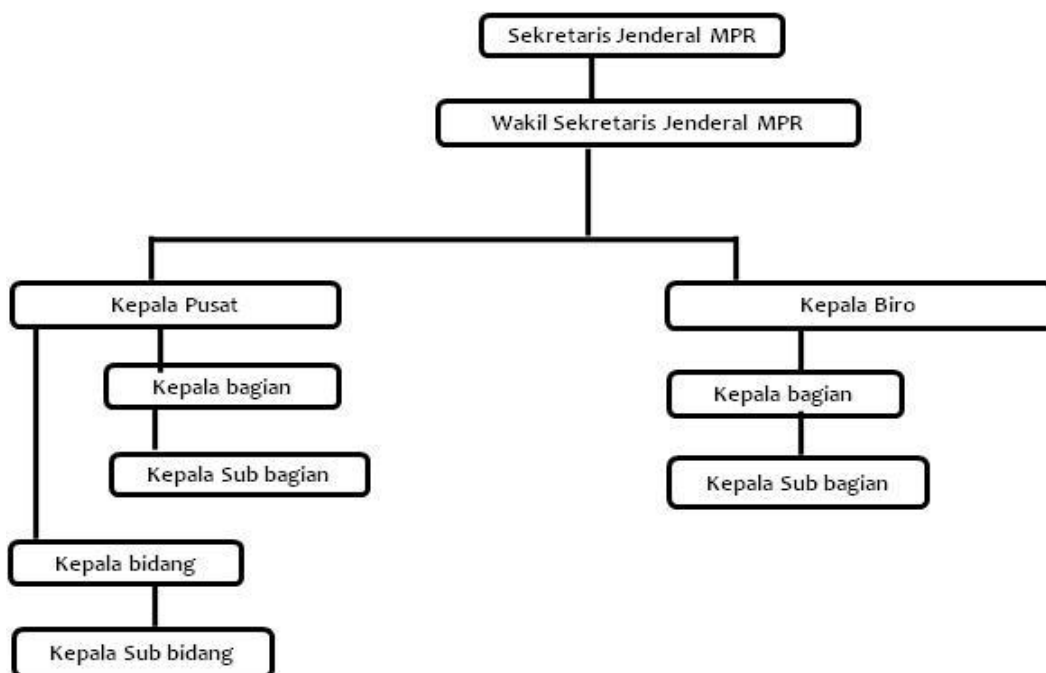


Tabel I.23 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal MPR RI b. Wakil Sekretaris Jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.11 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

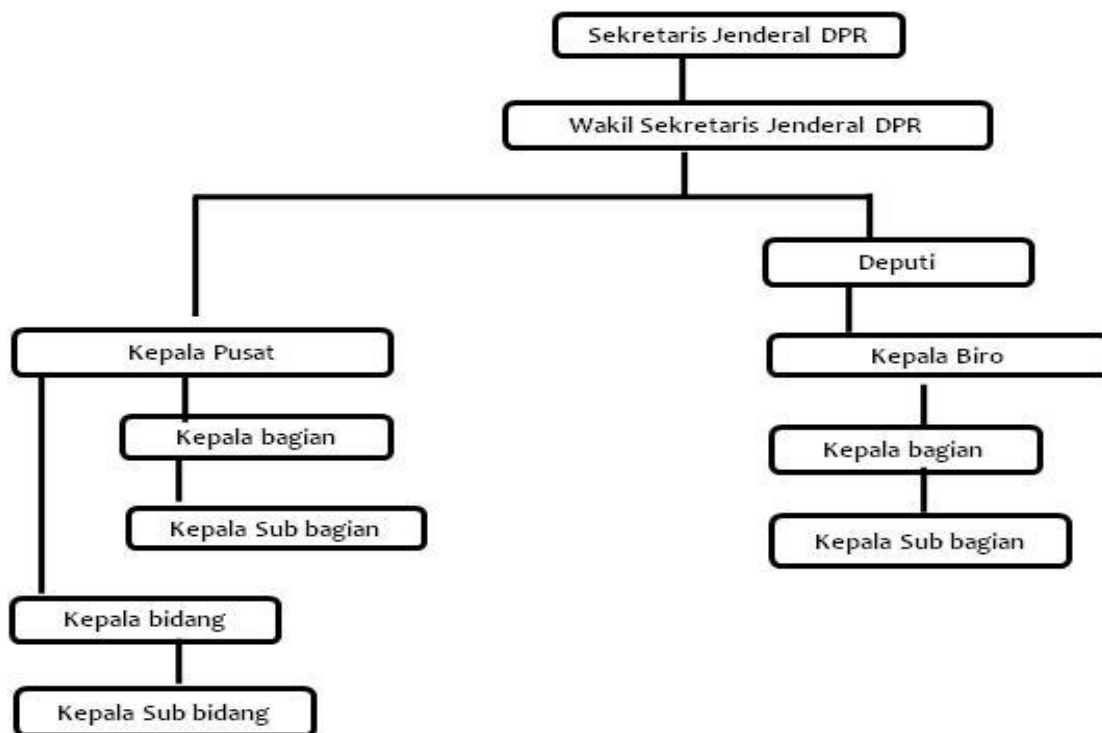


Tabel I.24 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretariat Jenderal DPR RI b. Wakil sekretaris jenderal c. Deputi
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.12 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



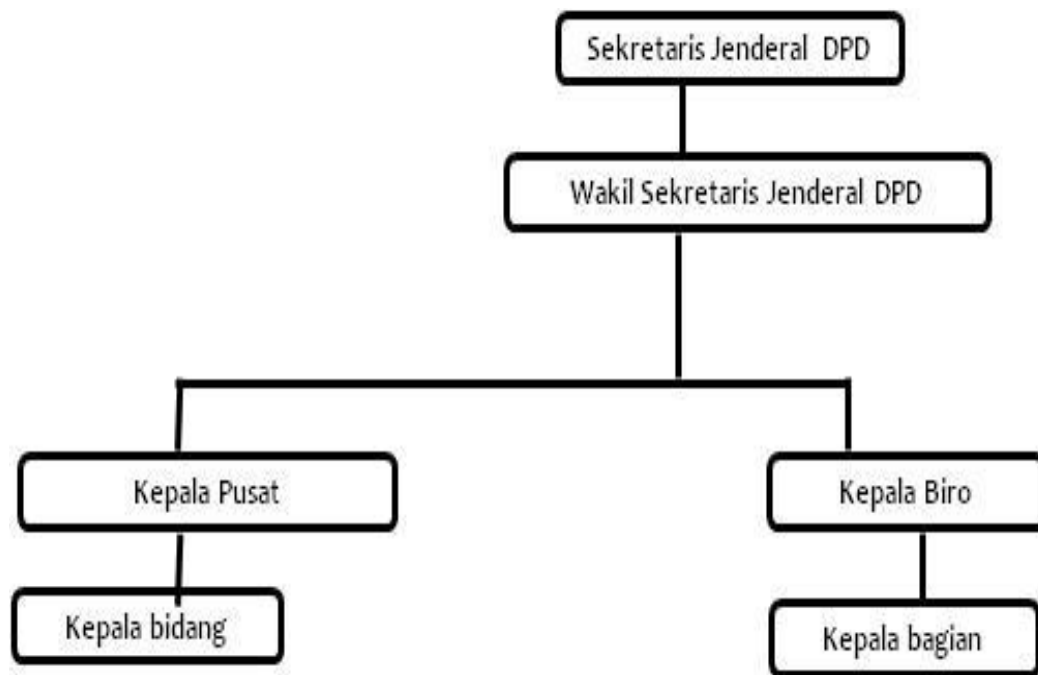


Tabel I.25 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.13 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





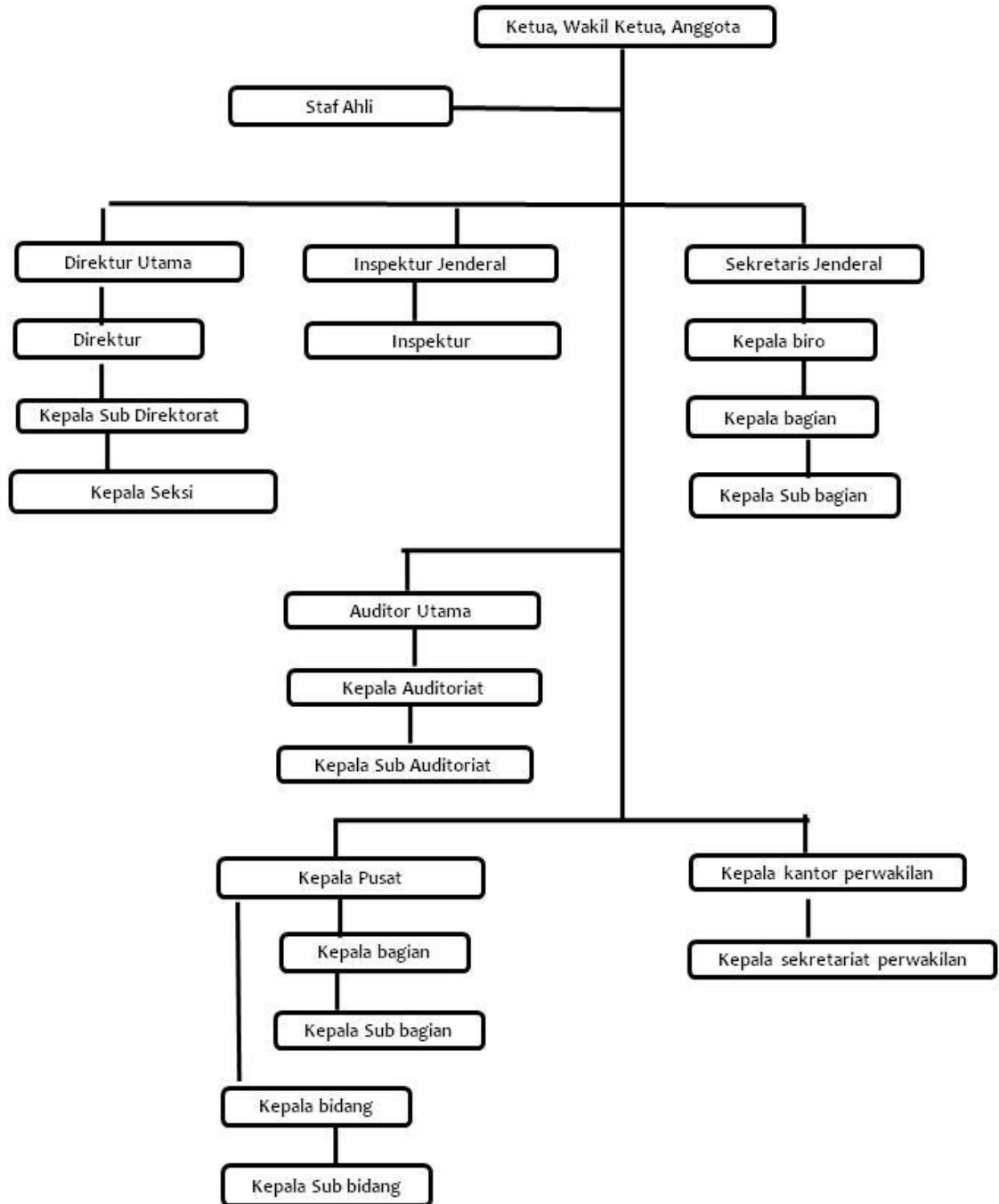
Tabel 1.26 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Inspektur jenderal c. Direktur utama d. Auditor utama e. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Inspektur c. Direktur d. Kepala pusat e. Kepala auditorat f. Kepala kantor perwakilan
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala subdirektorat d. Kepala sekretariat perwakilan
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang c. Kepala seksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Gambar 1.14 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel 1.27 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kesekretariatan Mahkamah Agung)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	<ol style="list-style-type: none">SekretarisDirektur jenderalKepala badan
2.	Eselon II	<ol style="list-style-type: none">Kepala biroSekretaris direktorat jenderalDirekturSekretaris badanKepala pusat Inspektur <p>Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) :</p> <ol style="list-style-type: none">Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Tipe A, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Tinggi TUNSekretaris pada Pengadilan Tinggi , Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan TUN Tipe AWakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi TUN
3.	Eselon III	<ol style="list-style-type: none">Kepala bagianKepala bidangKepala subdirektorat <p>Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) :</p> <ol style="list-style-type: none">Wakil Sekretaris Pada pengadilan Tinggi Tipe A, Pengadilan TinggiSekretaris Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer Kelas A, Pengadilan TUN Tipe AWakil Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus , Pengadilan Negeri Kelas IA, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan TUN Tipe A <p>Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Militer Kelas B, Pengadilan TUN tipe B</p>





Lanjutan Tabel I.27

No.	Eselonering	Titelatur
4.	Eselon IV	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala subbagianb. Kepala subbidangc. Kepala seksi Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : <ul style="list-style-type: none">a. Kepala subbagianb. Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Agama Kelas IBc. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas IAd. Kepala subbagian pada Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Militer Kelas Be. Sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas IIf. Wakil sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas IB
5.	Eselon V	Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : <ul style="list-style-type: none">a. Wakil sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas IIb. Kepala subbagian pada Pengadilan Agama Kelas IBc. Kepala urusan pada Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Agama Kelas II

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel I.28 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Panitera Mahkamah Agung)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	
2.	Eselon II	Sekretaris panitera
3.	Eselon III	Kepala bagian
4.	Eselon IV	Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



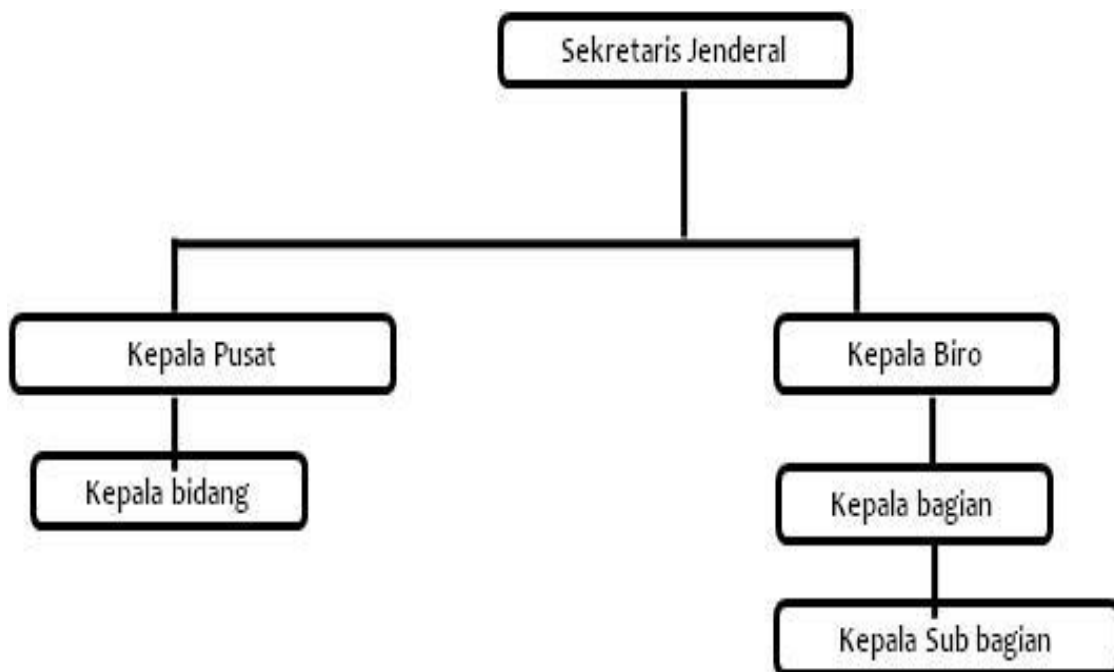


Tabel 1.29 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.15 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



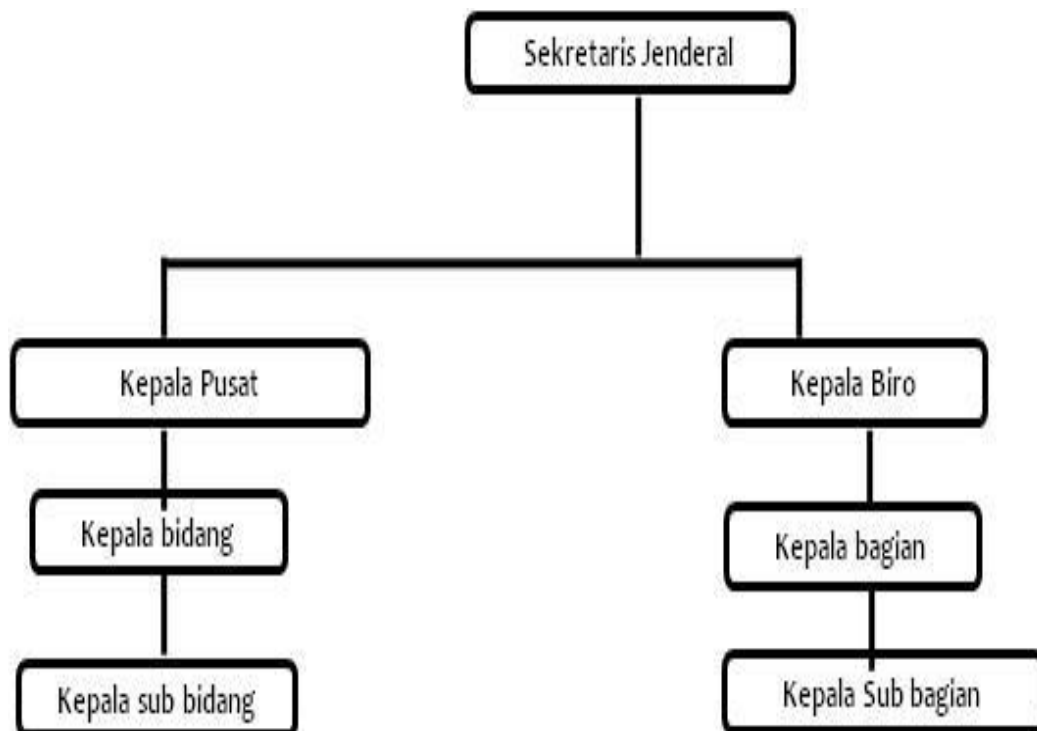


Tabel I.30 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.16 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Tabel I.31 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Non Struktural

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Kepala pelaksana harian c. Deputi (khusus wantanas) d. Pembantu deputi (setinggi-tingginya Eselon I.b dan serendah-rendahnya eselon II.a) (khusus wantanas)
2.	Eselon II	a. Sekretaris, untuk sekretaris LNS eselon II; b. Kepala biro c. Inspektur d. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Sekretaris, untuk sekretariat LNS eselon III; b. Kepala bagian c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel I.32 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Kementerian Negara Tahun 2014

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2014								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	8	7	39	-	85	-	56	-	
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	8	7	39	-	74	-	171	-	
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	8	7	31	-	68	-	152	-	
4.	Kementerian Sekretariat Negara	15	5	49	2	170	-	426	-	
5.	Kementerian Dalam Negeri	11	5	67	-	273	-	654	-	
6.	Kementerian Luar Negeri	10	4	54	-	208	-	690	-	
7.	Kementerian Pertahanan	9	5	52	-	174	-	492	-	
8.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	11	5	67	-	242	-	675	-	





Lanjutan Tabel I.32

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
9.	Kementerian Keuangan	11	5	93	-	383	-	1384	-	
10.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	9	5	46	-	181	-	417	-	
11.	Kementerian Perindustrian	9	3	44	-	149	-	372	-	
12.	Kementerian Perdagangan	9	4	53	-	187	-	407	-	
13.	Kementerian Pertanian	12	5	69	-	244	-	592	-	
14.	Kementerian Kehutanan	8	5	48	-	164	-	400	-	
15.	Kementerian Perhubungan	8	5	46	-	166	-	403	-	
16.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	4	56	-	211	-	517	-	
17.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	5	54	-	182	-	439	-	
18.	Kementerian Pekerjaan Umum	8	5	50	-	212	-	515	-	
19.	Kementerian Kesehatan	8	5	52	-	187	-	460	-	
20.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10	5	55	-	192	-	453	-	
21.	Kementerian Sosial	6	5	35	-	122	-	297	-	
22.	Kementerian Agama	10	5	46	-	154	-	443	-	
23.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7	4	37	-	126	-	312	-	
24.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	7	5	42	-	142	-	350	-	
25.	Kementerian Riset dan Teknologi	6	5	29	-	100	-	216	-	
26.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	5	38	-	112	-	243	-	





Lanjutan Tabel I.32

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
27.	Kementerian Lingkungan Hidup	8	5	39	-	117	-	256	-	
28.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	5	29	-	66	-	145	-	
29.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	5	27	-	64	-	54	-	
30.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	6	5	29	-	64	-	147	-	
31.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	2	5	-	-	-	-	-	-	
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	6	5	20	-	46	-	106	-	
33.	Kementerian Perumahan Rakyat	5	5	26	-	79	-	176	-	
34.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	6	4	29	-	87	-	194	-	
JUMLAH		279	169	1490	2	5031	-	12614	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Catatan : Belum termasuk jumlah eselon pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis (UPT).





Tabel I.33 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Tahun 2014

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2014								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Lembaga Administrasi Negara	5	-	19	-	47	-	46	-	
2.	Arsip Nasional Republik Indonesia	5	-	18	-	48	-	77	-	
3.	Badan Kepegawaian Negara	7	-	28	-	75	-	185	-	
4.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	3	-	10	-	22	-	26	-	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	8	-	46	-	149	-	24	-	
6.	Badan Pusat Statistik	8	-	24	-	76	-	218	-	
7.	Badan Standardisasi Nasional	4	-	11	-	-	-	-	-	
8.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	-	13	-	32	-	24	-	
9.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	4	-	22	-	88	-	174	-	
10.	Lembaga Sandi Negara	5	-	12	-	28	-	38	-	
11.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8	-	29	-	77	-	180	-	
12.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	4	-	13	-	41	-	41	-	
13.	Badan Informasi Geospasial	5	-	12	-	29	-	18	-	
14.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	6	-	28	-	75	-	61	-	
15.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	8	-	31	-	82	-	173	-	
16.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7	-	28	-	85	-	72	-	





Lanjutan Tabel I.33

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
17.	Badan Koordinasi Pananaman Modal	9	-	28	-	70	-	158	-	
18.	Badan Pertanahan Nasional	7	-	33	-	84	-	193	-	
19.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	5	-	23	-	73	-	164	-	
20.	Lembaga Ketahanan Nasional	4	-	20	-	59	-	120	-	
21.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	5	-	15	-	43	-	92	-	
22.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	4	-	18	-	52	-	120	-	
23.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	6	-	20	-	49	-	101	-	
24.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	-	15	-	33	-	66	-	
25.	Badan SAR Nasional	4	-	11	-	24	-	53	-	
26.	Badan Narkotika Nasional	8	-	24	-	49	-	87	-	
27.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5	-	12	-	23	-	16	-	
Jumlah		153	-	563	-	1513	-	2527	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2014

Catatan : Belum termasuk jumlah eselon pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis (UPT).



Tabel I.34 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Sekretariat Lembaga Negara Tahun 2014

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Sekretariat Mahkamah Agung	7	-	30	-	97	-	278	-	
2.	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	1	7	-	26	-	48	-	
3.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	6	-	15	-	61	-	128	-	
4.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	1	1	9	-	35	-	79	-	
5.	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	12	5	34	-	76	-	227	-	
6.	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	1	-	6	-	13	-	23	-	
7.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1	-	6	-	15	-	28	-	
JUMLAH		29	7	107	-	323	-	811	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2014

Tabel I.35 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri Tahun 2014

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Kejaksaan Agung	8	6	36	16	104		177	-	
2.	Kepolisian Negara RI	10	19	81	497	1119	1302	1445	763	
3.	Tentara Nasional Indonesia*	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Badan Intelejen Negara	10	5	47	-	166	-	67	-	
5.	Sekretariat Kabinet	6	3	20	-	62	-	132	-	
JUMLAH		34	33	184	513	1451	1302	1821	763	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2014

Catatan : Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Pasal 177 Perpres 10/2010 tentang Susunan Organisasi TNI, pelaksanaan ditetapkan oleh Panglima TNI tanpa melalui persetujuan Meneg PAN-RB.





Tabel I.36 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2014

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*	-	1	4	3	15	11	54	-	
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia*	-	1	4	3	22	3	56	-	
JUMLAH			2	8	6	37	14	110		

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2014

Catatan : Kesetaraan Eselon.

Tabel I.37 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Nonstruktural Tahun 2014

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Ombudsman Republik Indonesia	1	-	3	-	9	-	19	-	
2.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	-	4	-	10	-	26	-	
3.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Komisi Pemilihan Umum	1	1	41	-	592	-	2143	-	
5.	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	-	-	1	-	4	-	10	-	
6.	Komisi Kejaksaan	-	-	1	-	3	-	6	-	
7.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	-	-	1	-	3	-	6	-	
8.	Komisi Informasi Pusat	-	-	1	-	3	-	6	-	
9.	Dewan Gula Indonesia	-	-	-	-	1	-	3	-	
10.	Dewan Ketahanan Nasional	5	5	17	-	48	-	22	-	
11.	Dewan Kelautan Indonesia	-	-	-	1	-	3	-	8	
12.	Dewan Pers	-	-	1	-	3	-	6	-	
13.	Dewan Energi Nasional	1	-	3	-	8	-	18	-	





Lanjutan Tabel I.37

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
14.	Dewan Pertimbangan Presiden	1	-	2	-	6	-	18	-	
15.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	1	-	3	-	7	-	
16.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	-	-	1	-	3	-	6	-	
17.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	-	1	-	4	-	12	-	
18.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	1	-	4	-	11	-	28	-	
19.	Badan Pengatur Jalan Tol	-	-	1	-	5	-	11	-	
20.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	4	-	11	-	24	-	48	-	
21.	Lembaga Sensor Film	-	-	-	-	1	-	5	-	
22.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	-	-	1	-	4	-	9	-	
23.	Konsil Kedokteran Indonesia	-	-	1	-	4	-	12	-	
24.	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	-	-	1	-	2	-	6	-	
Jumlah		16	6	97	1	751	3	2427	8	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2014

Tabel I.38 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Seluruh Lingkungan Kementerian dan Lembaga Tahun 2014

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2014								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1.	Kementerian Negara	279	169	1490	2	5031	-	12614	-	
2.	LPNK	153	0	563	0	1513	0	2527	-	
3.	Sekretariat Lembaga Negara	29	7	107	-	323	-	811	-	
4.	Lembaga Setingkat Menteri dan Lembaga Pemerintah Lainnya	34	35	192	519	1488	1316	1931	763	
5.	Lembaga Non-Struktural	16	6	97	1	751	3	2427	8	
JUMLAH		511	217	2449	522	9106	1319	20310	771	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2014





Tabel 1.39 Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu 2014

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2014
1.	Kementerian Dalam Negeri	1. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah
2.	Kementerian Luar Negeri	2. Diplomat
3.	Kementerian Pertahanan	3. Kataloger
4.	Kementerian Hukum dan HAM	4. Pemeriksa merek 5. Pemeriksa paten 6. Perancang peraturan Perundang-undangan 7. Pemeriksa Desain Industri
5.	Kementerian Keuangan	8. Penilai pajak bumi dan bangunan 9. Pemeriksa bea dan cukai 10. Pemeriksa pajak 11. Penyuluh pajak
6.	Kementerian ESDM	12. Pengamat gunung api 13. Penyelidik bumi 14. Inspektur ketenagalistrikan 15. Inspektur tambang 16. Inspektur gas dan minyak bumi
7.	Kementerian Perindustrian	17. Penyuluh perindustrian dan perdagangan
8.	Kementerian Perdagangan	18. Penguji mutu barang 19. Penera
9.	Kementerian Pertanian	20. Medik veteriner 21. Paramedik veteriner 22. Pengawas benih tanaman 23. Pengawas bibit ternak 24. Pengawas mutu hasil pertanian 25. Pengawas mutu pakan 26. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan 27. Penyuluh pertanian 28. Analis pasar hasil pertanian 29. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
10.	Kementerian Kehutanan	30. Penyuluh kehutanan 31. Polisi kehutanan 32. Pengendali ekosistem hutan
11.	Kementerian Perhubungan	33. Pengendali frekuensi radio 34. Teknisi penerbangan 35. Pengawas keselamatan pelayaran 36. Penguji kendaraan bermotor
12.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	37. Pengendali hama dan penyakit ikan 38. Pengawas perikanan (penggabungan dengan pengawas benih ikan) 39. Penyuluh perikanan 40. Analis Pasar Hasil Perikanan
13.	Kementerian Tenaga Kerja	41. Pengawas ketenagakerjaan 42. Instruktur 43. Mediator hubungan industrial 44. Pengantar Kerja 45. Penggerak swadaya masyarakat





Lanjutan Tabel I.39

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2014
14.	Kementerian Pekerjaan umum	46. Teknik pengairan 47. Teknik penyehatan lingkungan 48. Teknik jalan dan jembatan 49. Teknik tata bangunan dan perumahan 50. Penata ruang 51. Pembina Jasa Konstruksi
15.	Kementerian Kesehatan	52. Administrator kesehatan 53. Apoteker 54. Asisten apoteker 55. Bidan 56. Dokter 57. Dokter gigi 58. Epidiomolog kesehatan 59. Entomolog kesehatan 60. Fisioterafis 61. Fisikawan medis 62. Nutrisionis 63. Okupasi terapis 64. Ortosis prostetis 65. Penyuluh kesehatan masyarakat 66. Perawat 67. Perawat gigi 68. Perekam medis 69. Pranata laboratorium kesehatan 70. Psikolog klinis 71. Radiografer 72. Refraksionis optisen 73. Sanitarian 74. Teknisi elektromedis 75. Teknisi gigi 76. Terapis tranfusi darah 77. Terapis wicara 78. Dokter pendidik klinis 79. Pembimbing kesehatan kerja
16.	Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	80. Dosen 81. Guru 82. Penilik 83. Pamong belajar 84. Pengawas sekolah 85. Pengembangan teknologi pembelajaran 86. Pranata laboratorium pendidikan
17.	Kementerian Sosial	87. Pekerja sosial 88. Penyuluh sosial
18.	Kementerian Agama	89. Penghulu 90. Penyuluh agama
19.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91. Pamong budaya





Lanjutan Tabel I.39

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2014
20.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	92. Adikara siaran 93. Teknisi siaran 94. Andalan siaran 95. Pranata hubungan masyarakat
21.	Kementerian Lingkungan Hidup	96. Pengendali dampak lingkungan 97. Pengawas lingkungan hidup
22.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	98. Perencana
23.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	99. Widyaiswara 100. Analis kebijakan
24.	Arsip Nasional (ANRI)	101. Arsiparis
25.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	102. Analis kepegawaian 103. Auditor kepegawaian 104. Assesor SDM aparatur
26.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	105. Pustakawan
27.	Badan Pusat Statistik (BPS)	106. Statistisi 107. Pranata komputer
28.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	108. Pengawas radiasi
29.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	109. Pranata nuklir
30.	Badan Intelijen Negara (BIN)	110. Agen
31.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	111. Sandiman 112. Operator transmisi sandi
32.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	113. Penyuluh keluarga berencana
33.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	114. Surveyor pemetaan
34.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	115. Auditor
35.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	116. Peneliti
36.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	117. Teknisi penelitian dan perekayasa 118. Perekayasa
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	119. Pengawas farmasi dan makanan
38.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan GEOFISIKA (BMKG)	120. Pengamat meteorologi dan geofisika
39.	Kejaksaan Agung	121. Jaksa
40.	Sekneg	122. Penerjemah
41.	BPK	123. Pemeriksa
42.	LKPP	124. Pengelola pengadaan barang/jasa

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2014





Tabel I.40 Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2014

No.	Instansi Pembina	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 2014
1.	Kementerian Dalam Negeri	1
2.	Kementerian Luar Negeri	1
3.	Kementerian Pertahanan	1
4.	Kementerian Hukum dan Ham	4
5.	Kementerian Keuangan	4
6.	Kementerian ESDM	5
7.	Kementerian Perindustrian	1
8.	Kementerian Perdagangan	2
9.	Kementerian Pertanian	10
10.	Kementerian Kehutanan	3
11.	Kementerian Perhubungan	4
12.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4
13.	Kementerian Tenaga Kerja	5
14.	Kementerian Pekerjaan umum	6
15.	Kementerian Kesehatan	28
16.	Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	7
17.	Kementerian Sosial	2
18.	Kementerian Agama	2
19.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
20.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4
21.	Kementerian Lingkungan Hidup	2
22.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	1
23.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	2
24.	Arsip Nasional (ANRI)	1
25.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	3
26.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	1
27.	Badan Pusat Statistik (BPS)	2
28.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	1
29.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1
30.	Badan Intelijen Negara (BIN)	1
31.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	1
32.	Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1
33.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	1





Lanjutan Tabel I.40

No.	Instansi Pembina	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 2014
34.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	1
35.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	1
36.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	2
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	1
38.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	1
39.	Kejaksaaan Agung	1
40.	Sekneg	1
41.	BPK	1
42.	LKPP	1
JUMLAH		124

Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2014

Tabel I.41 Jenis dan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun 2012 - 2013

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
Kementerian Koordinator			
1.	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	1. Analis polhukam	1. Analis politik 2. Analis hukum 3. Analis keamanan 4. Analis hubungan kelembagaan ormas 5. Analis hubungan kelembagaan lembaga negara 6. Analis produk hukum
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2. Analis dampak ekonomi	7. Analis ekonomi 8. Penyuluh perekonomian 9. Analis kerjasama dan permodalan
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	3. Analis kesejahteraan rakyat	10. Analis kesejahteraan rakyat 11. Penyuluh kemasyarakatan

Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
Kementerian Negara			
4.	Kementerian Dalam Negeri	4. Satpol PP (nama jabatan sedang di evaluasi) 5. Petugas pemadam kebakaran 6. Analis tatapraja 7. Analis kesbang linmas 8. Analis pendapatan daerah 9. Analis dampak politik, pertahanan dan keamanan	12. Pranata linmas 13. Pranata tatapraja 14. Analis pendapatan daerah 15. Pranata pemadam kebakaran 16. Analis sosial budaya masyarakat 17. Analis kelembagaan masyarakat 18. Analis bidang badan layanan umum 19. Analis kerjasama lintas sektor 20. Analis kerjasama pusat dan daerah 21. Analis penanganan masalah sosial 22. Analis pengaduan pemerintahan 23. Analis pengelolaan dana alokasi khusus 24. Analis pengelolaan dana alokasi umum 25. Analis pengelolaan dana bagi hasil pajak & SDA 26. Analis pengelolaan dana otsus dan dana transfer lainnya 27. Analis pengelolaan kekayaan daerah 28. Analis pengembangan pasar 29. Analis pengembangan perdesaan 30. Analis pengembangan wilayah 31. Analis pengembangan dan penataan batas antar negara 32. Analis organisasi 33. Evaluator 34. Konselor 35. Analis perlindungan hak-hak sipil dan HAM 36. Satpol PP 37. Pranata pembinaan P2UP



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
5.	Kementerian Luar Negeri	10. <i>Legal advisor</i> perlindungan WNI 11. Pengamat politik luar negeri 12. Atase perdagangan 13. Petugas komunikasi diplomantik	38. Atase 39. <i>Legal advisor</i> perlindungan WNI 40. Analis politik luar negeri 41. Pranata komunikasi diplomantik 42. Pranata pembinaan diplomat
6.	Kementerian Pertahanan	14. Analis Pertahanan Negara	43. Analis pertahanan negara 44. Penyuluh pertahanan negara 45. Pranata pembinaan kataloger
7.	Kementerian Hukum dan HAM	15. Pemeriksa dokumen imigrasi 16. Petugas imigrasi 17. Komandan/petugas lapas 18. <i>Legal drafter</i>	46. Pranata lapas 47. Pranata imigrasi 48. PPNS 49. Konsultan hukum 50. Penyuluh hukum 51. Penyuluh narapidana 52. Pranata izin tinggal 53. Analis operasi intelijen keimigrasian 54. Penyuluh HAM 55. Pranata sidik jari 56. Pemeriksa desain industri 57. Pranata pembinaan perancang peraturan Perundang-undangan 58. Pranata pembinaan pemeriksa merek dan paten
8.	Kementerian Keuangan	19. Bendaharawan 20. Penata laporan keuangan 21. Verifikator keuangan 22. Analis pendapatan negara 23. Analis belanja negara 24. Analis kekayaan negara 25. Asisten akuntan 26. Penyusun anggaran / analis anggaran 27. Bendahara (gaji, penerimaan, pengeluaran) 28. Bendahara rutin 29. Pengadministrasi barang milik negara (BMN) (Kemenkeu)	59. Analis anggaran 60. Akuntan 61. Bendahara 62. Analis pengelola barang milik negara (BMN) 63. Verifikator keuangan 64. Analis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 65. Analis penyelesaian LHP/TP/TGR 66. Analis rencana program dan kegiatan 67. Bendahara penerima 68. Bendahara pengeluaran 69. Pembuat daftar gaji 70. Pemegang buku kas 71. Pemegang buku pajak 72. Penata laporan keuangan (Petugas SAI) 73. Perencana anggaran





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			74. Analis pinjaman dan obligasi 75. Pranata pembinaan pemeriksa bea dan cukai 76. Pranata pembinaan penilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa pajak, penyuluh pajak
9.	Kementerian ESDM	30. Analis sumber daya terbarukan 31. Analis potensi tambang	77. Analis pertambangan 78. Analis usaha energi 79. Analis keselamatan pertambangan dan energi 80. Pranata laboratorium sumber energi 81. Pengawas bengkel 82. Penyelidik sumber daya alam 83. Pranata pembinaan pengamat gunung api, penyelidik bumi, inspektur kelistrikan, inspektur tambang, inspektur minyak dan gas bumi
10.	Kementerian Perindustrian	32. Asesor industri 33. Analis industri	84. Asesor industri 85. Analis industri 86. Pengawas industri 87. Penilai mutu produk 88. Pranata pembinaan penyuluh perindustrian dan perdagangan
11.	Kementerian Perdagangan	34. Analis perdagangan dalam negeri 35. Analis perdagangan luar negeri 36. Atase perdagangan	89. Analis perdagangan 90. Atase perdagangan 91. Pengamat tera 92. Pranata laboratorium kmetrologian 93. Pranata pembinaan penguji mutu barang, penera
12.	Kementerian Pertanian	37. Analis potensi pangan 38. Analis tanah 39. Pengembangan bibit pertanian	94. Pemeriksa perlindungan varietas tanaman 95. Pengawas pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi 96. Pengawas pupuk dan pestisida 97. Analis ketahanan pangan 98. Karantinawan 99. Pengawas alat mesin pertanian 100. Analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			101. Analis pakan ternak 102. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Pertanian)
13.	Kementerian Kehutanan	40. Analis potensi hutan 41. Pengembangan bibit tanaman hutan/perkebunan	103. Analis potensi hutan 104. Pranata pengembangan bibit tanaman hutan/perkebunan 105. Pranata DAS 106. Analis biofisik 107. Analis hutan dan lahan (RHL) 108. Analis genetik 109. Analis pengembangan hutan 110. Analis perkebunrayaan 111. Pranata taman 112. Analis tanaman hias/tanaman koleksi 113. Pemelihara bibit tumbuhan 114. Pemelihara sarana kebun 115. Pengadministrasi karcis 116. Pengawas perkebunrayaan 117. Pengolah kompos 118. Perawat koleksi tumbuhan 119. Peregistrasi data koleksi tumbuhan 120. Teknisi bank biji 121. Teknisi herbarium 122. Teknisi pembibitan 123. Pawang gajah 124. Pemelihara kebun wanariset (1) 125. Pemelihara, perawat satwa/ tumbuhan 126. Penelaah data pengendalian bahan baku 127. Penelaah data pengolahan industri primer 128. Penelaah data pengujian mutu persuteraan alam 129. Penelaah data pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			130. Penelaah data pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu 131. Penelaah data sertifikasi dan akreditasi telur ulat sutera 132. Penelaah data sertifikasi mutu benih/bibit 133. Penelaah data sistem informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan 134. Penelaah data statistik pengelolaan DAS 135. Penelaah data sumber benih 136. Penelaah data sumberdaya genetik 137. Penelaah data tanda legalitas hasil hutan 138. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Kehutanan)
14.	Kementerian Perhubungan	42. Pemandu lalu lintas udara 43. Mualim 44. Juru mesin 45. Pilot 46. Juru mudi 47. Pengawas lalu lintas angkutan darat 48. Pengawas lalu lintas perkereta apian 49. Pengawas lalu lintas laut	139. Pengawas lalu lintas udara 140. Pengawas lalu lintas darat 141. Pengawas lalu lintas laut 142. Pengawas perkeretaapian 143. Pilot 144. co pilot 145. Supir 146. Asisten Supir 147. Nakhoda 148. Masinis 149. Juru mesin 150. Auditor keselamatan 151. Anak buah kapal 152. Juru masak kapal 153. Juru minyak kapal 154. Kepala kamar mesin 155. Kerani kapal 156. Masinis kapal 157. Mualim kapal 158. Pembantu kamar mesin kapal





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			159. Analis HSE (kesehatan, keselamatan dan lingkungan) serta <i>security</i> kapal 160. Perwira instrumen kapal 161. Pramu kapal 162. Investigator 163. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi peminanya Kementerian Perhubungan)
15.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	50. Penyuluh perikanan 51. Anak buah kapal 52. Analis alokasi usaha penangkapan ikan 53. Analis budidaya 54. Analis kebutuhan impor 55. Analis data spasial 56. Analis dan penyajian data statistik perikanan tangkap 57. Analis mutu hasil perikanan 58. Analis pasar dalam negeri 59. Analis pasar luar negeri 60. Analis pemeriksa keselamatan pelayaran 61. Analis pengelolaan kawasan konservasi 62. Analis pengelolaan sumber daya ikan 63. Analis pengembangan usaha pelabuhan perikanan 64. Analis potensi kelautan 65. Analis sarana kesyahbandaran 66. Analis sumber daya Pesisir dan lautan 67. Analisis bahan organisasi dan tata laksana 68. Kelasi 69. Juru mudi 70. Penyusun konsep bahan bimbingan teknis kelaikan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	164. Analis budidaya perikanan 165. Analis mutu hasil perikanan 166. Pranata kawasan konservasi 167. Analis kesyahbandaran 168. Analis kesehatan ikan dan lingkungan 169. Pengawas pelabuhan perikanan 170. Analis pasar ikan hias 171. Analis perlindungan dan pelestarian ikan 172. Analis alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 173. Teknisi kapal perikanan 174. Analis konservasi kawasan 175. Analis perlindungan dan pelestarian ikan 176. Analis dampak perubahan iklim 177. Analis identifikasi pulau-pulau kecil 178. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi peminanya Kementerian Kelautan)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		71. Penyusun konsep bahan rumusan kelaikan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 72. Penyusun konsep bahan rumusan rancang bangun alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 73. Petugas pelayanan penerbitan dokumen penangkapan ikan 74. Petugas pemantauan wilayah pesisir 75. Petugas pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana 76. Petugas tata laksana pelayanan dokumen penangkapan ikan 77. Syahbandar perikanan 78. Teknisi budidaya 79. Teknisi kelaikan alat penangkap perikanan teknisi kelayakan alat perikanan 80. Teknisi perawatan kapal pengawas 81. Verifikator gambar desain kapal perikanan 82. Kepala kamar mesin 83. Markonis 84. Masinis 85. Mekanisasi peralatan 86. Mualim kapal perikanan 87. Nahkoda kapal perikanan 88. Nahkoda kapal pengawas 89. Oiler 90. Operator aplikasi sistem PPKA 91. Pelaksana operasional kapal 92. Pembantu teknisi perawatan kapal 93. Penata keselamatan pelayaran 94. Penata usaha informasi pasar luar negeri teknis industri	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		95. Penata usaha jaringan distribusi	
		96. Penata usaha bimbingan penata usaha bimbingan teknis mikro, kecil, dan menengah	
		97. Penata usaha kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan	
		98. Penatalaksana tugas kesyahbandaran	
		99. Pencatatan dan pendokumentasi pendaftaran kapal perikanan	
		100. Pengadministrasi konservasi jenis ikan	
		101. Pengadministrasi konservasi kawasan	
		102. Pengadministrasi mitigasi bencana lingkungan	
		103. Pengadministrasi pemanfaatan kawasan dan jenis ikan	
		104. Pengadministrasi penanggulangan sumber daya pesisir dan laut	
		105. Pengadministrasi identifikasi pulau-pulau kecil	
		106. Pengadministrasi sarana pulau-pulau kecil	
		107. Pengadministrasi sumber daya kelautan	
		108. Pengadministrasi alat dan bahan laboratorium dan instalasi	
		109. Pengadministrasi bahan teknis budidaya	
		110. Pengadministrasi bahan teknis kesehatan ikan dan lingkungan	
		111. Pengadministrasi bahan teknis perbenihan	
		112. Pengadministrasi bahan teknis prasarana dan sarana budidaya	
		113. Pengadministrasi bahan teknis usaha budidaya	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		114. Pengadministrasi rencana tata ruang dan zonasi wilayah	
		115. Pengadministrasi rencana tata ruang laut nasional	
		116. Penggambar desain kapal perikanan	
		117. Penyiap bahan administrasi pengusahaan penangkapan ikan	
		118. Penyiap bahan perumusan kebijakan pengawasan kapal perikanan	
		119. Penyiap bahan evaluasi dan laporan pemulihan sumber daya ikan perairan umum	
		120. Penyiap bahan evaluasi dan laporan pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan	
		121. Penyiap bahan evaluasi dan laporan produktivitas kapal penangkap ikan	
		122. Penyiap bahan evaluasi dan laporan tata kelola sumber daya ikan perairan umum	
		123. Penyiap bahan evaluasi pelabuhan perikanan samudera, nusantara, dan pelabuhan perikanan pantai	
		124. Penyiap bahan evaluasi labuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta	
		125. Penyiap bahan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	
		126. Penyiap bahan evaluasi pengembangan usaha penangkapan ikan	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		127. Penelaah gambar desain alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	
		128. Pengevaluasi pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	
		129. Penyiap bahan identifikasi sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	
		130. Penyiap bahan pedoman identifikasi sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	
		131. Penyiap bahan pedoman tata kelola sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	
		132. Penata usaha identifikasi dan evaluasi sentra pengelolaan produk	
		133. Penata usaha kemiteraan usaha mikro,kecil, dan menengah	
		134. Penata usaha kerja sama industri	
		135. Penata usaha kimia dan hayati	
		136. Penata usaha mikro biologi dan organoleptik	
		137. Penata usaha monitoring cemaran biologi	
		138. Penata usaha monitoring cemaran kimia	
		139. Penata usaha pelayanan usaha besar	
		140. Penata usaha pelayanan usaha mikro , kecil, dan menengah	
		141. Penata usaha pengamanan dan perlindungan akses pasar	
		142. Penata usaha pengembangan produk skala besar	





Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		143. Penata usaha peningkatan akses pasar	
		144. Pengelola sumber daya ikan	
		145. Pengelola informasi dan publikasi	
		146. Pengelola laboratorium	
		147. Pengelola pemanfaatan BMN	
		148. Pengidentifikasi hasil pengukuran dan dokumen kapal perikanan	
		149. Pengumpul dan pengolah data statistik perikanan tangkap	
		150. Penyiap bahan kebijakan tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	
		151. Penyiap bahan pemantauan dan evaluasi ketenagakerjaan perikanan	
		152. Penyiap bahan pemantauan dan evaluasi pengawakan kapal perikanan	
		153. Penyiap bahan pemantauan dan pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan	
		154. Penyiap bahan pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan	
		155. Penyiap bahan pemantauan pengembangan usaha penangkapan ikan	
		156. Penyiap bahan pemantauan produktivitas kapal penangkap ikan	
		157. Penyiap bahan pengembangan sistem informasi pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		158. Penyiap bahan pengembangan sistem informasi pelabuhan perikanan swasta, pangkalan pendaratan ikan	
		159. Penyiap bahan penyusun pedoman dan bimbingan bidan identifikasi dan kapasitas nelayan	
		160. Penyiap bahan penyusun pedoman dan bimbingan pengelolaan usaha	
		161. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis bidang kenelayanan	
		162. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang tata operasional pelabuhan perikanan	
		163. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang keselamatan pelayaran	
		164. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta	
		165. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengembangan prasarana pelabuhan pendaratan ikan	
		166. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengembangan prasarana pelabuhan perikanan	
		167. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang tata pemeliharaan dan rehabilitasi	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		168. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang kesyahbandaran	
		169. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	
		170. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang investasi usaha penangkapan ikan	
		171. Penyiap bahan penyusunan pedoman diversifikasi usaha	
		172. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta	
		173. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	
		174. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan tata pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan pendaratan ikan	
		175. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan kelaikan kapal	
		176. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis penerapan standar rancangan bangun dan konstruksi kapal	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		177. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimtek pengembangan prasarana pelabuhan pendaratan ikan	
		178. Penyiap bahan penyusunan pedoman dan bimbingan kesyahbandaran	
		179. Penyiap bahan penyusunan pedoman identifikasi dan pengukuran kapal perikanan	
		180. Penyiap bahan penyusunan pedoman keselamatan pelayaran	
		181. Penyiap bahan penyusunan pedoman pencatatan dan dokumentasi kapal perikanan	
		182. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis pengembangan prasarana pelabuhan perikanan	
		183. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis tata operasional pelabuhan perikanan	
		184. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimtek investasi usaha penangkapan ikan	
		185. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimtek permodalan usaha penangkapan ikan	
		186. Penyiap bahan perumusan kebijakan ketenagakerjaan perikanan	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		187. Penyiap bahan urusan perifiaksi dokumen penangkapan ikan perorangan dan koperasi	
		188. Penyiap bahan urusan perifiaksi dokumen penangkapan ikan perusahaan berbadan hukum	
		189. Penyiap bahan pertifikasi alokasi usaha penangkapan ikan	
		190. Penyiap bahan pertifikasi pengusaha penangkapan ikan	
		191. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang permodalan usaha penangkapan ikan	
		192. Penyusun bahan teknis perbenihan	
		193. Penyusun bahan teknis prasarana dan sarana budidaya	
		194. Penyusun bahan teknis usaha budidaya	
		195. Penyusun bahan adaptasi dampak perubahan iklim	
		196. Penyusun bahan benda muatan kapal tenggelam	
		197. Penyusunan bahan bimbingan teknis industri pengolahan	
		198. Penyusunan bahan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah	
		199. Penyusunan bahan data dan informasi pulau-pulau kecil	
		200. Penyusunan bahan identifikasi pulau-pulau kecil	
		201. Penyusunan bahan implementasi IPTEK	
		202. Penyusun bahan informasi dan publikasi	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		203. Penyusun bahan informasi kesehatan ikan dan lingkungan	
		204. Penyusun bahan informasi perbenihan	
		205. Penyusun bahan jaringan pasar ikan hias	
		206. Penyusun bahan jasa kelautan	
		207. Penyusun bahan kelembagaan pasar hasil perikanan	
		208. Penyusun bahan kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan	
		209. Penyusun bahan pemanfaatan jenis ikan	
		210. Penyusun bahan pemanfaatan kawasan	
		211. Penyusun bahan pemantauan dan evaluasi imfor	
		212. Penyusun bahan penanggulangan pencemaran sumber daya laut	
		213. Penyusun bahan penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir	
		214. Penyusun bahan perancangan konservasi jenis ikan	
		215. Penyusun bahan perlindungan dan pelestarian ikan	
		216. Penyusun bahan rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan yurisdiksi	
		217. Penyusun bahan sarana pulau-pulau kecil	
		218. Penyusun bahan tata laksana penyusun bahan teknis budidaya	
		219. Penyusun bahan teknis kesehatan ikan dan lingkungan	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
16.	Kementerian Tenaga Kerja	220. Penelaah standar keselamatan kerja	179. Analis keselamatan kerja 180. Analis kesehatan kerja 181. Analis pengawasan masyarakat 182. Analis <i>higiyene</i> industri 183. Penguji hiperkes 184. Penguji K3 185. Assessor K3 186. Penyuluh K3 187. Analis kawasan transmigrasi 188. Penyuluh kawasan transmigrasi 189. Pranata ketransmigrasian 190. Pengawas ketransmigrasian 191. Analis tenaga kerja perusahaan pemerintah 192. Analis tenaga kerja perusahaan swasta 193. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
17.	Kementerian Pekerjaan Umum	221. Pengawas penyehat lingkungan 222. Pengawas tata bangunan dan perumahan 223. Pengawas pengairan 224. Juru gambar 225. Arsitek 226. Desain interior 227. Analis tataguna DAS	194. Pengawas jalan dan jembatan 195. Pengawas tata bangunan dan perumahan 196. Pengawas irigasi 197. Juru gambar 198. Arsitek 199. Desain interior 200. Pranata PAM 201. Pengawas keselamatan jalan 202. Analis investasi jalan tol 203. Analis jaringan jalan 204. Pranata pengadaan tanah 205. Pranat pengelolaan leger jalan 206. Pengawas bangunan 207. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Pekerjaan Umum)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
18.	Kementerian Kesehatan		208. Dokter spesialis syaraf 209. Dokter spesialis kandungan 210. Dosen pendidik keperawatan 211. Binatu rumah sakit 212. Pemulasaran jenazah 213. Pengadministrasi poliklinik 214. Pengelola poliklinik 215. Pramu poliklinik 216. Pranata jasmani & mental 217. Pengemudi ambulan 218. Petugas pembinaan jasmani dan mental pegawai 219. Petugas kamar gelap 220. Analis kesehatan ibu dan anak 221. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Kesehatan)
19.	Kementerian Pendidikan Nasional/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	228. Pelindung /pengonservasi bahasa dan sastra 229. Perancang pengembang kompetensi kependidikan 230. Pengendali pengguna bahasa 231. Pengkaji bahasa 232. Penyuluh bahasa 233. Penyusun acuan bahasa 234. Penyusun pemetaan pendidikan 235. Perancang evaluasi kursus dan kesetaraan 236. Perancang program pendidikan 237. Perancang tes bahasa 238. Perancang sistem evaluasi pendidikan 239. Terminilog/ pengembang istilah	222. Analis bahasa dan sastra 223. Penyuluh bahasa 224. Analis kursus dan kesetaraan 225. Analis peserta didik dan kesetaraan 226. Analis kependidikan 227. Analis kebutuhan dunia kerja 228. Analis tenaga kependidikan 229. Analis kemahasiswaan 230. Analis kompetensi dan kualifikasi pendidikan 231. Pengawas bahasa/sastra 232. Analis istilah 233. Analis leksikograf/pekamus 234. Analis kursus dan kesetaraan 235. Analis sarana dan prasarana pendidikan 236. Analis kurikulum dan pembelajaran 237. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
20.	Kementerian Sosial	240. Analis dampak sosial	238. Analis dampak sosial 239. Analis kemasyarakatan 240. Pranata taman makam pahlawan (TMP), 241. Analis pemberdayaan masyarakat 242. Analis pengembangan model terapi & rehabilitasi 243. Fasilitator rehabilitasi 244. Analis program kerjasama lembaga masyarakat 245. Analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial 246. Penyuluh penanganan masalah sosial 247. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi peminanya Kementerian Sosial)
21.	Kementerian Agama	241. Pencatat nikah 242. Penasehat perkawinan 243. Analis kerukunan beragama 244. Analis penyelenggara haji	248. Analis kerukunan beragama 249. Pranata haji 250. Analis wakaf 251. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi peminanya Kementerian Agama)
22.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	245. Pemandu wisata 246. Analis potensi pengembangan wisata 247. Analis pengembangan ekonomi kreatif 248. Verifikator penyelenggaraan wisata	252. Pemandu wisata 253. Pengawas kepariwisataan 254. Analis perfilman 255. Analis seni pertunjukan 256. Analis kreasi dan produksi musik 257. Analis seni rupa 258. Pranata fotografi 259. Analis apresiasi karya seni 260. Analis film animasi 261. Analis komik 262. Analis tulisan fiksi 263. Analis arsitektur 264. Analis desain interior 265. Analis desain grafis 266. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi peminanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
23.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	249. Analis sistem informatika 250. Pengendali teknologi informasi 251. Jurnalis 252. Juru Foto 253. Juru kamera	267. Analis informatika 268. Pengawas teknologi informasi 269. Penyuluh informatika 270. Jurnalis 271. Analis program pembangunan 272. Pengelola jaringan 273. Pengelola dan pemelihara piranti TI 274. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Komunikasi dan Informatika)
24.	Kementerian Riset Teknologi	254. Analis pemanfaatan teknologi 255. Analis pengembangan teknologi 256. Penyuluh koperasi 257. Analis koperasi 258. Pengawas koperasi	275. Analis pemanfaatan teknologi 276. Analis pengembangan teknologi 277. Pranata sumber daya iptek 278. Analis jaringan iptek 279. Pranata jaringan iptek 280. Analis revansi dan produktivitas iptek 281. Pranata revansi dan produktivitas iptek
25.	Kementerian Koperasi		282. Penyuluh koperasi 283. Analis koperasi 284. Pranata koperasi 285. Pengawas koperasi
26.	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)	259. Laboran lingkungan hidup 260. Analis pemanasan global 261. Analis daya dukung lingkungan 262. Analis daya tampung lingkungan	286. Analis lingkungan hidup 287. Penyuluh lingkungan hidup 288. Analis konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir 289. Analis penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir 290. Analis penanggulangan pencemaran sumber daya laut 291. Analis rehabilitasi 292. Analis reklamasi 293. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Lingkungan Hidup)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
27.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263. Penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak 264. Analis anak	294. Pengawas perempuan dan anak 295. Penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak 296. Analis perlindungan perempuan
28.	Kementerian PAN dan RB	265. Pengawas pelayanan publik 266. Analis ketataksanaan 267. Analis kelembagaan 268. Analis perencanaan SDM aparatur 269. Analis pengembangan SDM aparatur 270. Analis kesejahteraan SDM aparatur 271. Analis penegakan integritas SDM aparatur 272. Analis pengembangan database SDM aparatur 273. Analis kelembagaan / organisasi	297. Analis kelembagaan/ organisasi 298. Analis penegakan integritas SDM aparatur 299. Pengawas pelayanan publik
29.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	274. Analis pengembangan daerah terpencil 275. Pengawas pembangunan daerah terpencil	300. Analis pembangunan daerah terpencil 301. Penyuluh pembangunan daerah terpencil 302. Pengawas pembangunan daerah terpencil
30.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	276. Analis program pembangunan	303. Analis program 304. Pengawas program pembangunan 305. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional)
31.	Kementerian BUMN	277. Pengawas perusahaan negara 278. Analis pengembangan perusahaan	306. Analis perusahaan negara 307. Pengawas perusahaan negara
32.	Kementerian Perumahan Rakyat	279. Analis penyusunan perencanaan wilayah 280. Analis penyusunan penyiapan lahan 281. Pengawas pelaksanan pembangunan fisik 282. Penyusun perencanaan wilayah	308. Analis perumahan 309. Pengawas perumahan 310. Pengawas rumah susun 311. Analis perencanaan wilayah perumahan 312. Analis penyusun penyiapan lahan





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		283. Perencanaan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan	313. Analis lembaga swadaya nasional 314. Analis lembaga swadaya daerah dan adat 315. Analis perumahan swadaya
33.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	284. Pelatih olahraga	316. Pelatih olahraga 317. Pengawas olahraga 318. Penyuluh olahraga
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian			
34.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	285. Analis tata negara 286. Analis kebutuhan diklat 287. Evaluator program diklat 288. Penyusun kurikulum diklat 289. <i>Training offices</i> /pengelola pelatihan 290. Pengadministrasi umum 291. Pengevaluasi diklat	319. Analis diklat 320. Pengawas diklat 321. Analis kebutuhan diklat 322. Pranata diklat 323. Analis diklat prajabatan dan ujian dinas 324. Analis akreditasi lembaga diklat 325. Pranata sistem informasi diklat aparatur (SIDA) 326. Analis diklat teknis 327. Analis diklat fungsional 328. Pranata sarana dan prasarana diklat 329. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Administrasi Negara)
35.	Arsip Nasional (ANRI)	292. Analis pengembangan sistem kearsipan	330. Penyuluh kearsipan 331. Pengawas kearsipan 332. Pranata laboratorium kearsipan 333. Pranata layanan kearsipan 334. Penata preservasi arsip 335. Pranata reproduksi arsip 336. Pranata restorasi arsip 337. Kurator arsip/dokumen dan tata naskah 338. Penata usaha surat dan kearsipan 339. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Arsip Nasional)
36.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	293. Analis jabatan 294. Auditor kepegawaian 295. Assesor kepegawaian 296. Pengadministrasi kepegawaian 297. Analis data	340. Analis jabatan 341. Sekretaris 342. Administrasi umum 343. Analis organisasi 344. Analis tata laksana



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		298. Analis bahan	345. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Kepegawaian Negara)
37.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	299. Analis pengembangan elektronik pustaka (e library) 300. Asisten pustakawan	346. Penyuluh perpustakaan 347. Asisten pustakawan 348. Pengawas perpustakaan 349. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Perpustakaan Nasional)
38.	Badan Pusat Statistik (BPS)		350. Penyuluh statistik 351. Pengawas statistik 352. Administrator jaringan komputer 353. Analis sistem 354. Operator data entry 355. Programmer 356. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pusat Statistik)
39.	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	301. Analis kompetensi	358. Analis Standar Kompetensi 359. Pengawas Standar Kompetensi
40.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPATEN)	302. Perawat peralatan pengawas 303. Pemroses penerbitan izin 304. Pemroses penerbitan izin petugas fasilitas petugas radiasi	360. Analis radiasi 361. Perawat peralatan pengawasan 362. Penyuluh radiasi 363. Pengadministrasi penerbit izin 364. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
41.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	305. Penelaah standar mutu bahan dan peralatan 306. Pengelola pengaman instalasi nuklir 307. Pengelola sistem jaminan mutu 308. Penyiap bahan program jaminan mutu 309. Penyiap bahan standar keselamatan	365. Analis standar mutu bahan dan peralatan 366. Penyuluh nuklir 367. Pranata standar keselamatan 368. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Tenaga Nuklir Nasional)



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
42.	Badan Intelijen Negara (BIN)		369. Analis rahasia negara 370. Analis informasi 371. Analis intelijen 372. Analis kebutuhan perlengkapan intelijen 373. Pengadministrasi senjata api dan amunisi 374. Perawat senjata api 375. Pengawas gudang senjata 376. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Intelijen Negara)
43.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)		377. Analis persandian 378. Pranata alat persandian 379. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Sandi Negara)
44.	Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	310. Analis bina KB 311. Analis bahan kelangsungan hidup ibu 312. Analis bahan kelangsungan hidup bayi dan anak 313. Analis bahan pencegahan penyakit menular 314. Analis bahan penanggulangan intertilitas penyakit menular 315. Analis pencegahan kanker alat reproduksi 316. Analis jaminan pelayanan kb 317. Analis jaminan sarana KB 318. Analis kependudukan 319. Analis penyediaan sarana KB 320. Analis standarisasi pelayanan KB 321. Analis monitoring dan evaluasi pelayanan KB 322. Analis akses pelayanan KB 323. Analis kualitas pelayanan KB	380. Analis kependudukan 381. Pengawas kependudukan 382. Analis pembinaan KB 383. Analis layanan KB 384. Analis sarana KB 385. Analis standarisasi pelayanan KB 386. Pengawas pelayanan KB 387. Analis kehidupan keluarga 388. Analis penyakit menular 389. Analis kanker alat reproduksi 390. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional)



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
45.		324. Penyusun bahan 325. Penyusun bahan jaminan pelayanan KB 326. Penyusun bahan akses pelayanan KB 327. Penyusun bahan kualitas pelayanan KB 328. Penyusunan bahan kelangsungan hidup ibu 329. Penyusun bahan penanggulangan infertilitas	
46.	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	330. Analis penerbangan 331. Pengawas antariksa	391. Analis penerbangan 392. Pengawas antariksa
47.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTA NAL)		393. Analis peta wilayah 394. Pengawas status peta wilayah 395. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
48.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)		396. Analis keuangan 397. Analis pembangunan 398. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
49.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)		399. Analis penelitian 400. Pengawas penelitian dan HKI 401. Analis hasil penelitian 402. Pengelola pemanfaatan hasil penelitian 403. Pengolah data penelitian bidang IPSK 404. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
50.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		405. Pranata laboratorium perekayasa 406. Pengawas perekayasa 407. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
51.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	332. Perencana penanaman modal 333. Analisis permodalan asing	408. Analisis penanaman modal 409. Pengawas penanaman modal 410. Analisis pengembangan potensi daerah 411. Analisis asosiasi dunia usaha
52.	Badan Pertanahan Nasional	334. Analisis peta wilayah 335. Pengawas pertanahan	412. Analisis peta wilayah 413. Pengawas pertanahan 414. Penyuluh pertanahan
53.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	336. Analisis obat dan makanan	415. Analisis obat dan makanan 416. Penyuluh obat dan makanan 417. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawas Obat dan Makanan)
54.	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	337. Analisis program	418. Widyaiswara 419. Analisis program 420. Pengawas Program Lemhanas
55.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan GEOFISIKA	338. Analisis cuaca	421. Analisis cuaca 422. Pengawas cuaca 423. Analisis bahan adaptasi dampak perubahan iklim 424. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)
56.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	339. Analisis tenaga kerja 340. Pengawas tenaga kerja 341. Program kebutuhan tenaga kerja	425. Analisis tenaga kerja 426. Penyuluh tenaga kerja
57.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	342. Analisis bencana alam 343. Penyuluh bencana alam 344. Petugas bencana alam	427. Analisis bencana 428. Penyuluh bencana 429. Pranata bencana





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
58.	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	345. Analis barang dan jasa 346. Pengadaan barang dan jasa	430. Analis barang dan jasa 431. Penyuluh barang dan jasa 432. Pranata barang dan jasa 433. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
59.	Badan SAR Nasional	347. Analis SAR 348. Penyuluh SAR	434. Analis SAR 435. Penyuluh SAR 436. Pranata SAR
60.	Badan Narkotika Nasional	349. Analis dampak narkotik 350. Penyuluh narkotik 351. Pengawas rehabilitasi narkotik	437. Analis narkoba 438. Penyuluh narkoba 439. Pengawas rehabilitasi narkoba 440. Analis laboratorium narkoba 441. Pembina mental 442. Instruktur vokasional 443. Analis intelijen taktis 444. Analis intelijen produk 445. Pranata pemetaan jaringan 446. Analis operasi pemutusan jaringan 447. Analis pemetaan jaringan 448. Penyidik 449. Analis sistem informasi dan jaringan 450. Petugas pengejaran 451. Petugas penindakan 452. Sipir 453. Pengawas barang bukti 454. Analis pengembangan model terapi & rehabilitasi 455. Analis manajemen monitoring & pengendalian kekambuhan dan wajib lapor 456. Fasilitator rehabilitasi 457. Petugas standarisasi dan sertifikasi
61.	Badan Nasional Penanggulangan Teroris	352. Analis dampak lingkungan 353. Penyuluh kemasyarakatan	458. Analis pengamanan lingkungan 459. Analis penangkalan 460. Analis kewaspadaan 461. Analis pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP 462. Analis resosialisasi dan rehabilitasi





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			463. Analis data intelijen 464. Analis pengembangan sistem operasi 465. Analis kerjasama aparat penegak hukum 466. Analis kerjasama luar negeri 467. Analis kerjasama regional 468. Analis kerjasama multilateral 469. Analis konvensi internasional 470. Analis resolusi badan Non PBB
Lembaga Setingkat Menteri			
62.	Kejaksaan Agung RI	354. Panitera pengadilan (MA) 355. Pengamanan barang bukti 356. Pengawasan dan pengamanan terdakwa	471. Panitera pengadilan (MA) 472. Pengawal tahanan 473. Pranata tilang 474. Penyidik pidana khusus 475. Penyidik pidana umum 476. Pemeriksa intelejen 477. Analis penuntutan 478. Pranata barang bukti 479. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kejaksaan Agung RI)
63.	Kepolisian Negara RI	357. Analis gangguan keamanan 358. Penyuluh keamanan masyarakatan	480. Analis gangguan keamanan 481. Penyuluh keamanan masyarakat
64.	Sekretariat Negara (Setneg)		482. Analis pengaduan masyarakat 483. Analis media dan jurnalistik 484. Analis kerjasama teknik luar negeri 485. Pranata acara 486. Pranata acara kepresidenan 487. Pranata dekorasi 488. Pranata jamuan 489. Pranata upacara 490. Analis tanda jasa dan kehormatan 491. Koordinator pemandu wisata istana 492. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Sekretariat Negara (Sekneg)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
65.	Sekretariat Kabinet (Setkab)	359. Analis program kebijakan pemerintah	493. Analis media dan jurnalistik 494. Tenaga peliputan 495. Penata acara 496. Petugas protokol 497. Ajudan sekretaris kabinet
Sekretariat Lembaga Negara			
66.	Sekretariat Jenderal MPR- RI	360. Analis pemerintahan daerah 361. Analis kebijakan pengembangan pemerintah daerah	498. Analis pemerintahan daerah 499. analis kebijakan pengembangan pemerintah daerah
67.	Sekretariat Jenderal DPR- RI	362. Transkriptor 363. Analis anggaran 364. Penyusun risalah	500. Trankriptor 501. Analis anggaran 502. Penyusun risalah 503. Penulis steno 504. Penyusun LAKIP 505. Pemeriksa anggaran
68.	Sekretariat Jenderal BPK		506. Analis pelanggaran 507. Analis akuntabilitas kinerja 508. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Sekretariat Jenderal BPK)
69.	Sekretariat Mahkamah Agung	365. Analis sengketa peradilan	509. Analis sengketa peradilan
70.	Sekretariat DPD-RI	366. Analis pemerintah daerah 367. Analis program daerah	510. Analis pemerintah daerah 511. Legislasi
71.	Sekretariat Mahkamah Konstitusi	368. Panitera pengadilan 369. Panitera muda	512. Panitera pengadilan 513. Panitera muda
72.	Sekretariat Komisi Yudisial	370. Analis keputusan pengadilan 371. Pengawas pengadilan	514. Pengawas pengadilan
Sekretariat Lembaga Non Struktural			
73.	Sekretariat Komisi Nasional HAM	372. Analis pelanggaran HAM 373. Penyuluh pelanggaran HAM	515. Analis pelanggaran HAM 516. Penyuluh pelanggaran HAM
74.	Sekretariat KPU Pusat/Provinsi/ Kab/Kota	374. Analis pemilihan umum 375. Penyuluh pemilihan umum 376. Pengawas pemilihan umum	517. Analis pemilihan umum 518. Penyuluh pemilihan umum 519. Pengawas pemilihan umum 520. Verifikator partai politik peserta pemilu 521. Verifikator perseorangan peserta pemilu





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
75.			522. Penyusun data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu 523. Analis distribusi pemilu 524. Penyusun dokumentasi distribusi pemilu
76.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	377. Analis keamanan laut 378. Penyuluh keamanan laut	525. Analis keamanan laut 526. Penyuluh keamanan laut
77.	PPATK	379. Analis PPATK 380. Penyuluh PPATK 381. Pengawas PPATK	527. Analis PPATK 528. Penyuluh PPATK 529. Pengawas PPATK 530. Pemeriksa transaksi keuangan
78.	Badan Pengelola Perbatasan		531. Analis wilayah/peta 532. Pengawas perbatasan

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.42 Nomenklatur Lembaga Pusat / Pemerintah Daerah yang Memiliki Assessment Center Tahun 2013

No	Instansi pusat/Pemerintah Daerah
1.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
2.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3.	Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan (BPKP)
4.	Kementerian Keuangan
5.	Kementerian Kehutanan
6.	Kementerian Kesehatan
7.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
8.	Pemprov. Jawa Tengah
9.	Pemprov. DI Yogyakarta
10.	Badan Diklat Pemprov. Jawa Timur
11.	Pemprov. Nusa Tenggara Barat
12.	Pemprov. Nusa Tenggara Timur
13.	Kementerian Pekerjaan Umum (sedang dalam proses persiapan)
14.	Kementerian Nakertrans (sedang dalam proses persiapan)
15.	Kementerian Perdagangan (sedang dalam proses persiapan)

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



BAGIAN II

KETATALAKSANAAN



Pada bagian ini disajikan data ketatalaksanaan (*business process*) dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data tersebut di antaranya adalah data mengenai sistem perencanaan kerja; sistem prosedur kerja; sistem pengawasan; dan sistem pelaporan.

A. Sistem Perencanaan Kerja

Bagian ini menyajikan data yang menggambarkan perencanaan kerja pemerintah, yaitu data ketersediaan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ketersediaan dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Kedua dokumen ini harus dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah karena berisikan target kinerja yang harus dicapai oleh organisasi pemerintah. Kementerian PAN dan RB mencatat, pada tahun 2011, baru 49 (57,76%) lembaga Negara; 20 (60,61%) propinsi; 54 (10,87%) kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Data ini perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan karena masih sedikit instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah yang belum memiliki dokumen IKU. Data mengenai jumlah lembaga pusat dan pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen IKU dapat dilihat pada tabel II.1 sampai II.4. Berbeda dengan kepemilikan dokumen IKU, sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dari data yang dimiliki oleh Kementerian PAN dan RB, pada tahun 2011 lembaga pusat yang telah menyusun Tapkin sebanyak 64 (78,05%) lembaga; dan 22 (66,67%) propinsi, 283 (56,94%) kabupaten/kota telah memiliki dokumen Tapkin. Data lengkap mengenai instansi yang telah menyusun dan memiliki dokumen Tapkin disajikan pada tabel II.5 sampai tabel II.8.

B. Sistem Prosedur Kerja

Prosedur merupakan tata cara kerja untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat diperlukan prosedur yang lengkap dan memadai, baik berupa dokumen maupun alat teknologi yang digunakan. Dalam publikasi ini, Data prosedur yang disajikan terdiri dari data Pemerintah Daerah yang telah menyusun dokumen Standar Operating Procedures (SOP); jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan; pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah; penerapan e-



government Pemerintah Pusat dan Daerah; dan data mengenai penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Pusat dan Daerah.

Data mengenai Daerah yang telah menyusun dokumen Standar Operating Procedures (SOP) dapat dilihat pada tabel II.9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai pada tahun 2013 baru sebanyak 147 (27%) Pemerintah Daerah yang memiliki dokumen SOP. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Selain ketersediaan dokumennya, penting juga untuk memastikan dokumen SOP tersebut digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya sekedar dokumen yang disimpan. Untuk data jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan dapat dilihat pada tabel II.10. Antara tahun 2012 dan tahun 2013 ini belum ada penambahan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterbitkan, masih sebanyak 15 Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan sebagai pedoman dan standar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan di Daerah. Dari 15 Bidang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan, 13 bidang sudah memiliki peraturan teknis, sementara 2 bidang yaitu perhubungan dan penanaman modal belum memiliki peraturan teknis. Standar ini diperlukan untuk menjamin setiap Daerah memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimum (SPM) berisikan indikator dan target setiap pelayanan yang harus dicapai oleh Daerah.

Data berikutnya yang disajikan dalam publikasi ini adalah data Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan PTSP Tahun 2012 -2013 pada tabel II.11. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2013 sudah sebanyak 467 (86%) Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki PTSP. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi menjadi cepat, mudah dan murah. Data mengenai penerapan e-Government Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel II.12. Sementara data mengenai Pemerintah Daerah yang telah memiliki website dapat dilihat pada tabel II.13. Penggunaan *e-government* dalam tata kerja pemerintahan sebagian besar masih terbatas pada beberapa jenis, diantaranya adalah penyediaan website lembaga sebagai sarana publikasi informasi kepada masyarakat dan aplikasi untuk manajemen internal instansi pemerintah.

Data mengenai jumlah lembaga pemerintah pusat yang telah melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel II.14. Sampai tahun 2013, baru sebanyak 53 (32%) Lembaga Pusat yang memiliki LPSE. Sementara itu, data jumlah Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel II.15. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai pada tahun 2013 sudah sebanyak 463 (88%) Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu untuk dibangun dan dikembangkan di setiap instansi pemerintah untuk menjamin tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dilaksanakan secara adil, jujur dan bersaing. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini juga diharapkan dapat mengurangi praktek korupsi di lingkungan pemerintah.



C. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian jalannya pemerintahan diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan meminimalisir penyimpangan yang merugikan. Dalam publikasi ini disajikan data mengenai pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern.

Pada tabel II.16 dan tabel II. 17 disajikan data jumlah dan nomenklatur pemerintah pusat yang telah memiliki peraturan menteri/kepala K/L mengenai SPIP tahun 2010 – 2012. Dari data tersebut terlihat bahwa antara tahun 2010 sampai tahun 2012 terdapat peningkatan lembaga pusat yang telah memiliki peraturan mengenai SPIP yaitu sebanyak 56 lembaga pada tahun 2010-2011 menjadi 87 lembaga pada tahun 2012. Sementara pada tabel II.18 dan tabel II.19 disajikan data jumlah dan nomenklatur pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen peraturan daerah mengenai SPIP. Pada tahun 2013, semua daerah propinsi/kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah mengenai SPIP. Data ini menunjukkan perkembangan pelaksanaan SPIP yang cukup menggembirakan di pemerintah daerah. Namun, sampai tahun 2014, belum tersedia data mengenai perkembangan pelaksanaan SPIP di lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.





Tabel II.1 Jumlah Kementerian/Lembaga Pusat yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011

Kementerian/LPNK	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kementerian/LPNK	76	77	81	82
Telah Memiliki IKU	2	8	37	49
Persentase	2,63	10,39	45,68	59,76

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.2 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 -2011

Pemerintah Provinsi	2008	2009	2010	2011
Jumlah Provinsi	33	33	33	33
Telah Memiliki IKU	1	2	19	20
Persentase	3,03	6,06	57,58	60,61

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.3 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011

Pemerintah Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011
Jumlah Pemerintah Daerah	472	472	497	497
Telah Memiliki IKU	0	3	36	54
Persentase	0,00	0,64	7,24	10,87

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.4 Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011

Total Kementerian/LPNK/Provinsi/Kab/ Kota	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kementerian/LPNK/Pemda	581	582	611	612
Telah Memiliki IKU	3	13	92	123
Persentase	0,52	2,23	15,06	20,10

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



Tabel II.5 Jumlah Kementerian/LPND yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011

Kementerian/LPND	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kementerian/LPND	72	76	77	81	82
Telah Memiliki Tapkin	39	36	54	54	64
Persentase	54	47	70	67	78,05

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.6 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011

Pemerintah Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Provinsi	33	33	33	33	33
Telah Memiliki Tapkin	22	20	20	23	22
Persentase	67	61	61	70	66,67

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.7 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kabupaten/Kota	440	472	472	497	497
Telah Memiliki Tapkin	159	160	201	263	283
Persentase	36	3	43	53	56,94

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.8 Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011

Total Kementerian/LPND/Provinsi/Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kementaran/LPND/Pemda	545	581	582	611	612
Telah Memiliki Tapkin	220	216	275	340	369
Persentase	40	37	47	56	60,29

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013





Tabel II.9 Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen SOP Tahun 2013

Provinsi	Total Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah yang Sudah Memiliki SOP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	0	4	1	5	21
Sumatera Utara	34	0	6	4	10	29
Sumatera Barat	20	0	4	2	6	30
Riau	13	0	1	0	1	8
Jambi	12	0	5	1	6	50
Sumatera Selatan	17	1	5	2	8	47
Bengkulu	11	1	2	0	3	27
Lampung	16	0	3	0	3	19
Bangka Belitung	8	0	4	1	5	63
Kepulauan Riau	8	0	0	1	1	13
DKI Jakarta	7	0	0	1	1	14
Jawa Barat	28	0	7	3	10	36
Jawa Tengah	36	0	11	1	12	33
DI Yogyakarta	6	0	2	1	3	50
Jawa Timur	39	0	13	5	18	46
Banten	9	0	0	1	1	11
Bali	10	0	4	1	5	50
Nusa Tenggara Barat	11	1	2	0	3	27
Nusa Tenggara Timur	23	0	3	0	3	13
Kalimantan Barat	15	1	1	1	3	20
Kalimantan Tengah	15	0	3	0	3	20



Lanjutan Tabel II.9

Provinsi	Total Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah yang Sudah Memiliki SOP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%
Kalimantan Selatan	14	0	7	1	8	57
Kalimantan Timur	11*	0	1	2	3	
Sulawesi Utara	16	1	3	1	5	31
Sulawesi Tengah	13	1	1	1	3	23
Sulawesi Selatan	25	0	10	1	11	44
Sulawesi Tenggara	14	0	2	0	2	14
Gorontalo	7	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	7	1	1	0	2	29
Maluku	12	0	1	2	3	25
Maluku Utara	11	0	0	0	0	0
Papua	30	0	0	0	0	0
Papua Barat	14	0	0	0	0	0
Kalimantan Utara**	6					
Total	542	7	106	34	147	27

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2013

Catatan :

*Untuk Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dihitung persentasenya karena pada tahun 2013 Kalimantan Timur sudah dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sementara data yang tersedia adalah data jumlah daerah yang sudah memiliki dokumen SOP sebelum Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan (15 daerah).

** Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia datanya.





Tabel II.10 Jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Telah Diterbitkan

No.	Bidang SPM	Dasar Hukum
1.	Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No. 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pemerintah Dalam Negeri	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
3.	Sosial	Peraturan Menteri Sosial RI No. 129/huk /2008 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
4.	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
5.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
6.	Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
7.	Keluarga Berencana dan Sejahtera	Peraturan Kepala badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 55/hk-010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota
8.	Ketenagakerjaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER. 15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.PER.04/MEN/IV/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.15/MEN/X/2010
9.	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
10.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.14/PRT/M/2010 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Ketahanan Pangan	Peraturan Menteri Pertanian RI No.65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
12.	Kesenian	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No.PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
13.	Komunikasi dan Informasi	Peraturan Menteri Kemkominfo RI No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
14.	Perhubungan	
15.	Penanaman Modal	

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2013



Tabel II.11 Data Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan PTSP Tahun 2012 - 2013

Provinsi	Total (Prov-Kab-Kota) 2012	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2012					Total Pemda 2013	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%		Prov	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	18	5	24	100	24	1	18	5	24	100
Sumatera Utara	34	1	20	8	29	85	34	1	24	8	33	97
Sumatera Barat	20	0	11	7	18	90	20	0	12	7	19	95
Riau	13	1	10	2	13	100	13	1	10	2	13	100
Jambi	12	1	9	2	12	100	12	1	9	2	12	100
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100	17	1	11	4	16	94
Bengkulu	11	1	9	1	11	100	11	1	9	1	11	100
Lampung	15	1	12	2	15	100	16	1	12	2	15	94
Bangka Belitung	8	0	6	1	7	88	8	0	6	1	7	88
Kepulauan Riau	8	0	2	2	4	50	8	0	3	2	5	63
DKI Jakarta	7	1	0	5	6	86	7	1	0	5	6	86
Jawa Barat	27	1	16	9	26	96	28	1	17	9	27	96
Jawa Tengah	36	0	29	6	35	97	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100	39	1	29	9	39	100
Banten	9	0	4	4	8	89	9	1	4	4	9	100
Bali	10	1	8	1	10	100	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	0	7	2	9	82	11	1	7	2	10	91
Nusa Tenggara Timur	22	1	17	1	19	86	23	1	19	1	21	91
Kalimantan Barat	15	0	10	2	12	80	15	1	11	2	14	93
Kalimantan Tengah	15	0	13	1	14	93	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	14	100	14	1	11	2	14	100





Lanjutan Tabel II.11

Provinsi	Total (Prov-Kab-Kota) 2012	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2012					Total Pemda 2013	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%		Prov	Kab	Kota	Total	%
Kalimantan Timur	15	1	9	4	14	93	11*	1*	10*	4*	15	
Sulawesi Utara	16	1	11	4	16	100	16	1	11	4	16	100
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92	13	1	9	1	11	85
Sulawesi Selatan	25	0	19	3	22	88	25	0	19	3	22	88
Sulawesi Tenggara	13	0	9	2	11	85	14	1	9	2	12	86
Gorontalo	7	0	4	1	5	71	7	1	5	1	7	100
Sulawesi Barat	6	0	3	0	3	50	7	1	3	0	4	57
Maluku	12	0	2	2	4	33	12	0	4	2	6	50
Maluku Utara	10	0	1	1	2	20	11	0	1	1	2	18
Papua	30	1	5	1	7	23	30	1	6	1	8	27
Papua Barat	12	0	2	0	2	17	14	0	2	0	2	14
Kalimantan Utara**							6					
Total	530	18	330	96	444	84%	542	26	345	96	467	86

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2013

Catatan :

*Untuk Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dihitung persentasenya karena pada tahun 2013 Kalimantan Timur sudah dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sementara data yang tersedia adalah data jumlah daerah yang sudah melaksanakan PTSP sebelum Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan (15 daerah).

** Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia datanya.



Tabel II.12 Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Menerapkan e-Government Tahun 2012

No.	Jenis Lembaga Negara	Jumlah	Lembaga Pusat yang menerapkan e-Gov 2012	
			e-Gov 2012	%
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7	5	71
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	4	1	25
3.	Kementerian	34	31	91
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	27	27	100
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	5	5	100
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2	2	100
7.	Lembaga Non Struktural	89	87	98
Total Lembaga		168	158	94

Sumber : Kemenpan RB, 2013

Tabel II.13 Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Website Tahun 2012

Provinsi	Total Pemda (Prov-Kab-Kota) 2012	Daerah yang Sudah Memiliki Website 2012				
		Prov.	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	16	5	22	92
Sumatera Utara	34	1	20	6	27	79
Sumatera Barat	20	1	11	7	19	95
Riau	13	1	9	2	12	92
Jambi	12	1	9	2	12	100
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100
Bengkulu	11	1	8	1	10	91
Lampung	15	1	11	2	14	93
Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100
DKI Jakarta*	6	1		5	6	86
Jawa Barat	27	1	17	9	27	100





Lanjutan Tabel II.13

Provinsi	Total Pemda 2012	Daerah yang Sudah Memiliki Website 2012				
		Prov	Kab	Kota	Total	%
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100
Banten	9	1	4	4	9	100
Bali	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	11	100
Nusa Tenggara Timur	22	1	16	1	18	82
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	14	100
Kalimantan Timur	15	1	7	4	12	80
Sulawesi Utara	16	1	8	4	13	81
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92
Sulawesi Selatan	25	1	20	3	24	96
Sulawesi Tenggara	13	1	5	2	8	62
Gorontalo	7	1	3	1	5	71
Sulawesi Barat	6	1	4		5	83
Maluku	12	1	3	1	5	42
Maluku Utara	10	1	5	2	8	80
Papua	30	1	18		19	63
Papua Barat	12	1	7	1	9	75
Kalimantan Utara**						
Total	530	33	346	94	473	89

Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2013



Tabel II.14 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013

No.	Jenis Lembaga Negara	Jumlah	Lembaga Pusat yang Melaksanakan LPSE 2013	
			LPSE 2013	%
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7	5	71
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	4		0
3.	Kementerian	34	27	79
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	27	15	56
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	5	4	80
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2		0
7.	Lembaga Non Struktural	89	2	2
Total Lembaga		168	53	32

Sumber : LKPP, diolah, 2013

Tabel II.15 Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013

Provinsi	Jumlah Daerah	Daerah yang Sudah Melaksanakan LPSE 2013				
	Total (Prov-Kab-Kota)	Prov.	Kab.	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	18	5	24	100
Sumatera Utara	34	1	25	8	34	100
Sumatera Barat	20	1	12	7	20	100
Riau	13	1	10	2	13	100
Jambi	12	1	9	2	12	100
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100
Bengkulu	11	1	9	1	11	100
Lampung	15	1	12	1	14	93





Lanjutan Tabel II.15

Provinsi	Jumlah Daerah	Daerah yang Sudah Melaksanakan LPSE 2013				
		Total (Prov-Kab-Kota)	Prov.	Kab	Kota	Total
Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100
DKI Jakarta*	7	1				100
Jawa Barat	27	1	16	9	26	96
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100
Banten	9	1	4	4	9	100
Bali	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	11	100
Nusa Tenggara Timur	22	1	13	1	15	68
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	12	1	14	100
Kalimantan Timur	15	1	10	4	15	100
Sulawesi Utara	16	1	9	4	14	88
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92
Sulawesi Selatan	25	1	20	3	24	96
Sulawesi Tenggara	13	1	10	2	13	100
Gorontalo	7	1	5	1	7	100
Sulawesi Barat	6	1	4		5	83



Lanjutan Tabel II.15

Provinsi	Jumlah Daerah	Daerah yang Sudah Melaksanakan LPSE 2013				
	Total (Prov-Kab-Kota)	Prov.	Kab	Kota	Total	%
Maluku	12	1	2		3	25
Maluku Utara	10	1	3	1	5	50
Papua	30	1	3	1	5	17
Papua Barat	12	1	3		4	33
Total	530				463	88

Sumber : LKPP, diolah, 2013

Catatan : LPSE Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan LPSE.

Tabel II.16 Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Mengenai SPIP Tahun 2010 – 2012

No.	Kementerian / Lembaga	Peraturan Menteri / Kepala Lembaga
Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara		
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2 Tahun 2010
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	01A/PER-SEKJEN/2010
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	23/K/I-XIII.2/11/2011
4.	Mahkamah Agung	151A/KMA/SK/IX/2011
5.	Mahkamah Konstitusi	10 Tahun 2011
6.	Dewan Perwakilan Daerah	Peraturan No 03/2012
Lembaga Negara yang Diatur dalam UUD 1945 dan UU		
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi	06 Tahun 2012
2.	Ombusman Republik Indonesia	11 Tahun 2012
3.	Komisi Yudisial	2 Tahun 2011
Kementerian		
1.	Kementerian Sekretariat Negara	No.11 Tahun 2012
2.	Kementerian Dalam Negeri	40 Tahun 2010
3.	Kementerian Luar Negeri	12 Tahun 2011
4.	Kementerian Pertahanan	21 tahun 2010
5.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	M.HH-02.PW.02.03 Thn 2011
6.	Kementerian Keuangan	152/KMK.09/2011
7.	Kementerian Pertanian	23/Permentan/OT.140/5/2009
8.	Kementerian Perindustrian	199/M-IND/4/2011





Lanjutan Tabel II.16

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga
9.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	17 TAHUN 2011
10.	Kementerian Perhubungan	PM 78 Tahun 2011
11.	Kementerian Pendidikan Nasional	Permen Nomor 47 Tahun 2011
12.	Kementerian Kesehatan	238/Menkes/SK/IV/2009
13.	Kementerian Agama	24 tahun 2011
14.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PER.19/MEN/XII/2011
15.	Kementerian Sosial	91 Tahun 2011
16.	Kementerian Kehutanan	P.27/Menhut-II/2010
17.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PER.20/MEN/2011 2011
18.	Kementerian Pekerjaan Umum	02/IN/M/2011
19.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	PER-06/MENKO/POLHUKAM/11/2011
20.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	13/M.Ekon/09/2012
21.	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	05 Tahun 2011
22.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	PM.97/UM.001/MPEK/2011
23.	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	14/MBU/2012
24.	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	06/M/PER/XII/2011
25.	Kementerian Lingkungan Hidup	114 Tahun 2011
26.	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12/Per/M.KUKM/XII/2011
27.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permen Nomor 9 Tahun 2012
28.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Permen Nomor 10 Tahun 2012 dan 12 Tahun 2012
29.	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	5 Tahun 2011
30.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	26/PER/M.KOMINFO/12/ 2011
31.	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	10 Tahun 2011
32.	Kementerian Perdagangan	970/M-DAG/KEP/9/2011
33.	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	22 tahun 2011
34.	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	0022 Tahun 2012
Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri		
1.	Kejaksanaan Agung	KEP-255/A/JA/12/2011



Lanjutan Tabel II.16

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga
2.	Badan Intelijen Negara	02 Tahun 2012
3.	Kepolisian RI	Kep-696/XII/2011
4.	Sekretariat Kabinet	8 Tahun 2012
Lembaga Pemerintah Non Kementerian		
1.	Lembaga Sandi Negara	5 Tahun 2012
2.	Badan Pusat Statistik	26 Tahun 2011
3.	Badan Pertanahan Nasional	18 Tahun 2010
4.	Perpustakaan Nasional	No.4 Tahun 2012
5.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011
6.	Lembaga Ketahanan Nasional	04 Tahun 2012
7.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Perka BKPM No. 4 Tahun 2012
8.	Badan Narkotika Nasional	12 TAHUN 2012
9.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	173/PER/B3/2011
10.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	KEP.03 Tahun 2011
11.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1012/A/2011
12.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	201/KA/XI/2011
13.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	347 Tahun 2011
14.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	367 Tahun 2011
15.	Badan Standarisasi Nasional	13 Tahun 2011
16.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	11 Tahun 2011
17.	Lembaga Administrasi Negara	19 Tahun 2011
18.	Arsip Nasional Republik Indonesia	10 Tahun 2011
19.	Badan Kepegawaian Negara	175.11.KEP/2011
20.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	KEP-882/K/SU/201
21.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	203 tahun 2011
22.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	PER.15/KA/XII/2011
23.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Tahun 2011
24.	Basarnas	PK.16 Tahun 2011
25.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	PER-03/K.BNPT/9/2012
Lembaga Pemerintah Lainnya		
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Peraturan Nomor 3/2012
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	97/PRTR/DIREKSI/TVRI/2012





Lanjutan Tabel II.16

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga
Lembaga Non Struktural		
1.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	050/PRT/P/2012
2.	Dewan Ketahanan Nasional	Kep-87/Sesjen/XII/2012
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	002/TUA/X/2012
4.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	4 Tahun 2012
5.	Otorita Batam	12 TAHUN 2012
6.	Komisi Pemilihan Umum	No. 17 Tahun 2012
7.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PER-12/1.01/PPATK/09/12
8.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	2 Tahun 2012
9.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	35/PER/BP-BPWS/IX/2012
10.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	181.1.Tahun 2011
11.	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	8 Tahun 2012
12.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	09/BPKS/2012

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2013

Tabel II.17 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Kepala K/L Mengenai SPIP Tahun 2010 – 2012

No.	Jenis Lembaga Negara	2010 - 2011	2012
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara	5	6
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	1	3
3.	Kementerian	28	34
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	19	25
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	2	4
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya		2
7.	Lembaga Non Struktural	1	13
Total		56	87

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2013



Tabel II.18 Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2009 – 2012

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
1.	1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Pergub Nomor 09 Tahun 2010
2.	2. Kab. Aceh Barat	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
3.	3. Kab. Aceh Besar	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
4.	4. Kab. Aceh Selatan	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
5.	5. Kab. Aceh Singkil	Perbup Nomor 20 Tahun 2011
6.	6. Kab. Aceh Tengah	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
7.	7. Kab. Aceh Tenggara	Perbup Nomor 117 Tahun 2010
8.	8. Kab. Aceh Timur	Perbup Nomor 9 Tahun 2011
9.	9. Kab. Aceh Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
10.	10. Kab. Bireun	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
11.	11. Kab. Pidie	Perbup Nomor 3 Tahun 2010
12.	12. Kab. Simeulue	Perbup Nomor 10 Tahun 2011
13.	13. Kota Banda Aceh	Perwali Nomor 21 Tahun 2010
14.	14. Kota Sabang	Perwali Nomor 21 Tahun 2010
15.	15. Kota Langsa	Perwali Nomor 40 Tahun 2010
16.	16. Kota Lhokseumawe	Perwali Nomor 06 Tahun 2011
17.	17. Kab. Nagan Raya	Perbup Nomor 3 Tahun 2011
18.	18. Kab. Aceh Jaya	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
19.	19. Kab. Aceh Barat Daya	Perbup Nomor 16 Tahun 2011
20.	20. Kab. Gayo Lues	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
21.	21. Kab. Aceh Tamiang	Perbup Nomor 9 Tahun 2011
22.	22. Kab. Bener Meriah	Perbup Nomor 32 Tahun 2010
23.	23. Kota Subulussalam	Perwali Nomor 19 Tahun 2010
24.	24. Kab. Pidie Jaya	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
25.	1. Provinsi Sumatera Utara	Pergub Nomor 33/2011
26.	2. Kab. Asahan	Perbup Nomor 24 Tahun 2011
27.	3. Kab. Dairi	Perbup Nomor 06/2011
28.	4. Kab. Deli Serdang	Perbup Nomor 495/2011
29.	5. Kab. Tanah Karo	Perbup Nomor 05/2010
30.	6. Kab. Labuhan Batu	Perbup Nomor 58 Tahun 2011
31.	7. Kab. Langkat	Perbup Nomor 19 Tahun 2011
32.	8. Kab. Mandailing Natal	Perbup Nomor 57/2011
33.	9. Kab. Nias	Perbup Nomor 19 Tahun 2011
34.	10. Kab. Simalungun	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
35.	11. Kab. Tapanuli Selatan	Perbup Nomor 49/PR/2011
36.	12. Kab. Tapanuli Tengah	Perbup Nomor 04 Tahun 2010
37.	13. Kab. Tapanuli Utara	Perbup Nomor 04 Tahun 2010
38.	14. Kab. Toba Samosir	Perbup Nomor 37 Tahun 2011
39.	15. Kota Binjai	Perwali Nomor 061-4724/2010
40.	16. Kota Medan	Perwali Nomor 23/2011
41.	17. Kota Pematang Siantar	Perwali Nomor 12 Tahun 2011
42.	18. Kota Sibolga	Perwali Nomor 180/15/2011
43.	19. Kota Tanjung Balai	Perwali Nomor 13/2010
44.	20. Kota Tebing Tinggi	Perwali Nomor 07/2011
45.	21. Kota Padang Sidempuan	Perwali Nomor 16.B/PW/2010
46.	22. Kab. Pakpak Bharat	Perbup Nomor 7 Tahun 2011





Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
47.	23.	Kab. Nias Selatan	Perbup Nomor 09 Tahun 2011
48.	24.	Kab. Humbang Hasundutan	Perbup Nomor 13/2010
49.	25.	Kab. Serdang Berdagai	Perbup Nomor 34 Tahun 2011
50.	26.	Kab. Samosir	Perbup Nomor 3/2011
51.	27.	Kab. Batu bara	Perbup Nomor 12/2011
52.	28.	Kab. Labuhan Batu Utara	Perbup Nomor 06/2011
53.	29.	Kab. Labuhan Batu Selatan	Perbup Nomor 15/2011
54.	30.	Kab. Padang Lawas Utara	Perbup Nomor 08/2011
55.	31.	Kab. Padang Lawas	Perbup Nomor 08 Tahun 2010
56.	32.	Kab Nias Utara	Perbup Nomor 13/2011
57.	33.	Kab Nias Barat	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
58.	34.	Kota Gunung Sitoli	Perwali Nomor 7/2011
59.	1.	Provinsi Sumatera Barat	Pergub Nomor 40 Tahun 2009
60.	2.	Kab. Limapuluh Kota	Pergub Nomor 1 Tahun 2012
61.	3.	Kab. Agam	Pergub Nomor 04 Tahun 2012
62.	4.	Kab. Kepulauan Mentawai	Pergub Nomor 01 Tahun 2012
63.	5.	Kab. Padang Pariaman	Pergub Nomor 14 Tahun 2011
64.	6.	Kab. Pasaman	Perbup Nomor 18 Tahun 2010
65.	7.	Kab. Sijunjung	Perbup Nomor 8 Tahun 2011
66.	8.	Kab. Solok	Perbup Nomor 38 Tahun 2011
67.	9.	Kab. Pesisir Selatan	Pergub Nomor 162 Tahun 2011
68.	10.	Kab. Tanah Datar	Perbup Nomor 68 Tahun 2009
69.	11.	Kota Bukit Tinggi	Perwali Nomor 18 Tahun 2010
70.	12.	Kota Padang Panjang	Perwali Nomor 16 Tahun 2011
71.	13.	Kota Padang	Perwali Nomor 37 Tahun 2011
72.	14.	Kota Payakumbuh	Perwali Nomor 6 Tahun 2011
73.	15.	Kota Sawahlunto	Perwali Nomor 67 Tahun 2010
74.	16.	Kota Solok	Perwali Nomor 6 Tahun 2011
75.	17.	Kota Pariaman	Perwali Nomor 67 Tahun 2010
76.	18.	Kab. Pasaman Barat	Pergub Nomor 28 Tahun 2011
77.	19.	Kab. Dharmasraya	Pergub Nomor 11 Tahun 2012
78.	20.	Kab. Solok Selatan	Pergub Nomor 29 Tahun 2011
79.	1.	Provinsi Riau	Pergub Nomor 31 Tahun 2010
80.	2.	Kab. Bengkalis	Perbup Nomor 340/KPTS/XII/2010
81.	3.	Kab. Indragiri Hilir	Pergub Nomor 18 Tahun 2010
82.	4.	Kab. Indragiri Hulu	Perbup Nomor 36 Tahun 2010
83.	5.	Kab. Kampar	Perbup Nomor 28 Tahun 2010
84.	6.	Kab. Kuantan Singingi	Pergub Nomor 8 Tahun 2012
85.	7.	Kab. Pelalawan	Pergub Nomor 15 Tahun 2011
86.	8.	Kab. Rokan Hilir	Perbup Nomor 26 Tahun 2009
87.	9.	Kab. Rokan Hulu	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
88.	10.	Kab. Siak	Perbup Nomor 31 Tahun 2011
89.	11.	Kota Dumai	Perwali Nomor 23 Tahun 2010
90.	12.	Kota Pekanbaru	Perwali Nomor 24 Tahun 2010
91.	13.	Kab Kep. Meranti	Perbup Nomor 52 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
92.	1.	Provinsi Kepulauan Riau	Pergub Nomor 16 Tahun 2010
93.	2.	Kab. Bintan	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
94.	3.	Kab. Natuna	Pergub Nomor 19 tahun 2011
95.	4.	Kab. Karimun	Pergub Nomor 13 tahun 2011
96.	5.	Kota Batam	Perwali 10 tahun 2011
97.	6.	Kota Tanjung Pinang	Perwali Nomor 31 Tahun 2011
98.	7.	Kab. Lingga	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
99.	8.	Kab. Kepulauan Anambas	Perbup Nomor 15 Tahun 2011
100.	1.	Provinsi Jambi	Pergub Nomor 47 Tahun 2011
101.	2.	Kab. Batanghari	Perbup Nomor 26 Tahun 2012
102.	3.	Kab. Bungo	Perbup Nomor 3 Tahun 2011
103.	4.	Kab. Kerinci	Perbup Nomor 23 Tahun 2011
104.	5.	Kab. Merangin	Perbup Nomor 28 Tahun 2010
105.	6.	Kab. Muaro Jambi	Pergub Nomor 19 Tahun 2012
106.	7.	Kab. Sarolangun	Pergub Nomor 19 Tahun 2012
107.	8.	Kab. Tanjung Jabung Barat	Pergub Nomor 30 Tahun 2011
108.	9.	Kab. Tanjung Jabung Timur	Perbup Nomor 15 Tahun 2010,
109.	10.	Kab. Tebo	Perbup Nomor 14 Tahun 2012
110.	11.	Kota Jambi	Perbup Nomor 17 Tahun 2012
111.	12.	Kota Sungai Penuh	Perwali Nomor 22 Tahun 2010.
112.	1.	Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 51 Tahun 2010
113.	2.	Kab. Lahat	Perbup Nomor 1 Tahun 2011
114.	3.	Kab. Musi Banyuasin	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
115.	4.	Kab. Musi Rawas	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
116.	5.	Kab. Muara Enim	Perbup Nomor 42 Tahun 2010
117.	6.	Kab. Ogan Komering Ilir	Perbup Nomor 2 Tahun 2011
118.	7.	Kab. Ogan Komering Ulu	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
119.	8.	Kota Palembang	Perwali Nomor 46 Tahun 2010
120.	9.	Kota Pagar Alam	Perwali Nomor 2 Tahun 2011
121.	10.	Kota Lubuk Linggau	Perwali Nomor 19 Tahun 2010
122.	11.	Kota Prabumulih	Perwali Nomor 2 Tahun 2011
123.	12.	Kab. Banyuasin	Perbup Nomor 633 Tahun 2010
124.	13.	Kab. Ogan Ilir	Perbup Nomor 3 Tahun 2011
125.	14.	Kab. OKU Timur	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
126.	15.	Kab. OKU Selatan	Perbup Nomor 15 Tahun 2012
127.	16.	Kab. Empat lawang	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
128.	1.	Provinsi Bengkulu	Pergub Nomor 9 Tahun 2010
129.	2.	Kab. Bengkulu Selatan	Perbup Nomor 19 Tahun 2009
130.	3.	Kab. Bengkulu Utara	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
131.	4.	Kab. Rejang Lebong	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
132.	5.	Kota Bengkulu	Perwali Nomor 30 Tahun 2009
133.	6.	Kab. Kaur	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
134.	7.	Kab. Seluma	Perbup Nomor 11 Tahun 2010





Lanjutan Tabel II.18

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
135.	8. Kab. Mukomuko	Perbup Nomor 8 Tahun 2010
136.	9. Kab. Lebong	Perbup Nomor 367 Tahun 2010
137.	10. Kab. Kepahiang	Perbup Nomor 07 Tahun 2010
138.	11. Kab. Bengkulu Tengah	Perbup Nomor 29 Tahun 2010
139.	1. Provinsi Lampung	Pergub Nomor 12 Tahun 2010
140.	2. Kab. Lampung Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
141.	3. Kab. Lampung Selatan	Perbup Nomor 3 Tahun 2010
142.	4. Kab. Lampung Tengah	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
143.	5. Kab. Lampung Utara	Perbup Nomor 6 Tahun 2010
144.	6. Kab. Lampung Timur	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
145.	7. Kab. Tanggamus	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
146.	8. Kab. Tulang Bawang	Perbup Nomor 6 Tahun 2010
147.	9. Kab. Way Kanan	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
148.	10. Kota Bandar Lampung	Perwali Nomor 22 Tahun 2010
149.	11. Kota Metro	Perwali Nomor 4 Tahun 2010
150.	12. Kab. Pesawaran	Perbup Nomor 2 Tahun 2010
151.	13. Kab Tulang Bawang Barat	Perbup Nomor 4 Tahun 2010
152.	14. Kab Mesuji	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
153.	15. Kab Pringsewu	Perbup Nomor 6 Tahun 2010
154.	1. Provinsi DKI Jakarta	Pergub Nomor 171 Tahun 2010
155.	1. Provinsi Jawa Barat	Pergub Nomor 10 Tahun 2011
156.	2. Kab. Bandung	Perbup Nomor 30 Tahun 2011
157.	3. Kab. Bekasi	Perbup Nomor 35 Tahun 2011
158.	4. Kab. Bogor	Perbup Nomor 49 Tahun 2011
159.	5. Kab. Ciamis	Perbup Nomor 20 Tahun 2011 11
160.	6. Kab. Cianjur	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
161.	7. Kab. Cirebon	Perbup Nomor 14 Tahun 2011
162.	8. Kab. Garut	Perbup Nomor 504 Tahun 2011
163.	9. Kab. Indramayu	Perbup Nomor 15B Tahun 2011
164.	10. Kab. Karawang	Perbup Nomor 43 Tahun 2010
165.	11. Kab. Kuningan	Perbup Nomor 04 Tahun 2012
166.	12. Kab. Majalengka	Perbup Nomor 15 Tahun 2012
167.	13. Kab. Purwakarta	Perbup Nomor 28 Tahun 2011
168.	14. Kab. Subang	Perbup Nomor 25 tahun 2011
169.	15. Kab. Sukabumi	Perbup Nomor 24 Tahun 2010
170.	16. Kab. Sumedang	Perbup Nomor 42 Tahun 2011
171.	17. Kab. Tasikmalaya	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
172.	18. Kota Bandung	Perwali Nomor 944 Tahun 2010
173.	19. Kota Bekasi	Perwali Nomor 30 Tahun 2010
174.	20. Kota Bogor	Perwali Nomor 2 Tahun 2011
175.	21. Kota Cirebon	Perwali Nomor 12 September 2011
176.	22. Kota Depok	Perwali Nomor 49 Tahun 2010
177.	23. Kota Sukabumi	Perwali Nomor 16 Tahun 2011
178.	24. Kota Cimahi	Perwali Nomor 20 Tahun 2011
179.	25. Kota Tasikmalaya	Perwali Nomor 32 Tahun 2011





Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
180.	26.	Kota Banjar	Perwali Nomor 22 Tahun 2011
181.	27.	Kab. Bandung Barat	Perbup Nomor 30 Tahun 2010
182.	1.	Provinsi Banten	Pergub Nomor 26 Tahun 2010
183.	2.	Kab. Lebak	34 Tahun 2011
184.	3.	Kab. Pandeglang	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
185.	4.	Kab. Serang	Perbup Nomor 45 Tahun 2010
186.	5.	Kab. Tangerang	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
187.	6.	Kota Cilegon	Perwali Nomor 4 Tahun 2012
188.	7.	Kota Tangerang	Perwali Nomor 41 Tahun 2010
189.	8.	Kota Serang	Perwali Nomor 22 Tahun 2011
190.	9.	Kota Tangerang Selatan	Perwali Nomor 69 Tahun 2011
191.	1.	Provinsi Jawa Tengah	Pergub Nomor 89 Tahun 2010
192.	2.	Kab. Banjarnegara	Perbup Nomor 351 Tahun 2010
193.	3.	Kab. Banyumas	Perbup Nomor 64 Tahun 2010
194.	4.	Kab. Batang	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
195.	5.	Kab. Blora	Perbup Nomor 84 Tahun 2010
196.	6.	Kab. Boyolali	Perbup Nomor 19 Tahun 2009
197.	7.	Kab. Brebes	Perbup Nomor 023.A Tahun 2010
198.	8.	Kab. Cilacap	Perbup Nomor 71 Tahun 2010
199.	9.	Kab. Demak	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
200.	10.	Kab. Grobogan	Perbup Nomor 15 Tahun 2011
201.	11.	Kab. Jepara	Perbup Nomor 37 Tahun 2009
202.	12.	Kab. Karanganyar	Perbup Nomor 18 Tahun 2010
203.	13.	Kab. Kebumen	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
204.	14.	Kab. Kendal	Perbup Nomor 36 Tahun 2010
205.	15.	Kab. Klaten	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
206.	16.	Kab. Kudus	Perbup Nomor 23 Tahun 2012
207.	17.	Kab. Magelang	Perbup Nomor 31 Tahun 2011
208.	18.	Kab. Pati	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
209.	19.	Kab. Pekalongan	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
210.	20.	Kab. Pemasang	Perbup Nomor 69 Tahun 2007
211.	21.	Kab. Purbalingga	Perbup Nomor 88 Tahun 2011
212.	22.	Kab. Purworejo	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
213.	23.	Kab. Rembang	Perbup Nomor 21 Tahun 2011
214.	24.	Kab. Semarang	Perbup Nomor 74 Tahun 2011
215.	25.	Kab. Sragen	Perbup Nomor 79 Tahun 2009
216.	26.	Kab. Sukoharjo	Perbup Nomor 54 Tahun 2010
217.	27.	Kab. Tegal	Perbup Nomor 43 Tahun 2010
218.	28.	Kab. Temanggung	Perbup Nomor 59 Tahun 2010
219.	29.	Kab. Wonogiri	Perbup Nomor 23 Tahun 2011
220.	30.	Kab. Wonosobo	Perbup Nomor 37 Tahun 2010
221.	31.	Kota Magelang	Perwali Nomor 14 Tahun 2011
222.	32.	Kota Pekalongan	Perwali Nomor 10 Tahun 2010
223.	33.	Kota Salatiga	Perwali Nomor 34 Tahun 2011
224.	34.	Kota Semarang	Perwali Nomor 24 Tahun 2010
225.	35.	Kota Surakarta	Perwali Nomor 20 Tahun 2009
226.	36.	Kota Tegal	Perwali Nomor 02 Tahun 2011





Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
227.	1.	Provinsi DI Yogyakarta	Pergub Nomor 52 Tahun 2010
228.	2.	Kab. Bantul	Perbup Nomor 10 Tahun 2011
229.	3.	Kab. Gunung Kidul	Perbup Nomor 6 Tahun 2011
230.	4.	Kab. Kulon Progo	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
231.	5.	Kab. Sleman	Perbup Nomor 35 Tahun 2010
232.	6.	Kota Yogyakarta	Perwali Nomor 61 Tahun 2010
233.	1.	Provinsi Jawa Timur	Pergub Nomor 66 thn 2010
234.	2.	Kab. Bangkalan	Perbup Nomor 29 thn 2010
235.	3.	Kab. Banyuwangi	Perbup Nomor 31 thn 2010
236.	4.	Kab. Blitar	Perbup Nomor 26 thn 2010
237.	5.	Kab. Bojonegoro	Perbup Nomor 41 thn 2010
238.	6.	Kab. Bondowoso	Perbup Nomor 18 thn 2010
239.	7.	Kab. Gresik	Perbup Nomor 36 th 2010
240.	8.	Kab. Jember	Perbup Nomor 22 thn 2010
241.	9.	Kab. Jombang	Perbup Nomor 10 thn 2010
242.	10.	Kab. Kediri	Perbup Nomor 26 thn 2010
243.	11.	Kab. Lamongan	Perbup Nomor 39 Tahun 2010
244.	12.	Kab. Lumajang	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
245.	13.	Kab. Madiun	Perbup Nomor 26 thn 2010
246.	14.	Kab. Magetan	Perbup Nomor 46 thn 2010
247.	15.	Kab. Malang	Perbup Nomor 21 Tahun 2010
248.	16.	Kab. Mojokerto	Perbup Nomor 52 Tahun 2010
249.	17.	Kab. Nganjuk	Perbup Nomor 38 Tahun 2010
250.	18.	Kab. Ngawi	Perbup Nomor 269 Tahun 2010
251.	19.	Kab. Pacitan	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
252.	20.	Kab. Pamekasan	Perbup Nomor 37 A thn 2010
253.	21.	Kab. Pasuruan	Perbup Nomor 32 Tahun 2010
254.	22.	Kab. Ponorogo	Perbup Nomor 30 thn 2010
255.	23.	Kab. Probolinggo	Perbup Nomor 22 Tahun 2010
256.	24.	Kab. Sampang	Perbup Nomor 23 th 2010
257.	25.	Kab. Sidoarjo	Perbup Nomor 23 Tahun 2010
258.	26.	Kab. Situbondo	Perbup Nomor 25 thn 2010
259.	27.	Kab. Sumenep	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
260.	28.	Kab. Trenggalek	Perbup Nomor 72 Tahun 2010
261.	29.	Kab. Tuban	Perbup Nomor 21 thn 2010
262.	30.	Kab. Tulungagung	Perbup Nomor 43 thn 2009
263.	31.	Kota Blitar	Perwali Nomor 18 thn 2010
264.	32.	Kota Kediri	Perwali Nomor 37 thn 2010
265.	33.	Kota Madiun	Perwali Nomor 23 Tahun 2010
266.	34.	Kota Malang	Perwali Nomor 39 thn 2010
267.	35.	Kota Mojokerto	Perwali Nomor 52 thn 2010
268.	36.	Kota Pasuruan	Perwali Nomor 11 Tahun 2011
269.	37.	Kota Probolinggo	Perwali Nomor 32 th 2010
270.	38.	Kota Surabaya	Perwali Nomor 51 th 2010
271.	39.	Kota Batu	Perwali Nomor 33 thn 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
272.	1.	Provinsi Kalimantan Barat	Pergub Nomor 30 Tahun 2010
273.	2.	Kab. Bengkayang	Perbup Nomor 28 Tahun 2010
274.	3.	Kab. Landak	Perbup Nomor 08 Tahun 2010
275.	4.	Kab. Kapuas Hulu	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
276.	5.	Kab. Ketapang	Perbup Nomor 17 Tahun 2010
277.	6.	Kab. Pontianak	Perbup Nomor 22 Tahun 2010
278.	7.	Kab. Sambas	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
279.	8.	Kab. Sanggau	Perbup Nomor 27 Tahun 2010
280.	9.	Kab. Sintang	Perbup Nomor 135 Tahun 2010
281.	10.	Kota Pontianak	Perwali Nomor 06 Tahun 2010
282.	11.	Kota Singkawang	Perwali Nomor 25 Tahun 2010
283.	12.	Kab. Sekadau	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
284.	13.	Kab. Melawi	Perbup Nomor 30 Tahun 2010
285.	14.	Kab. Kayong Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
286.	15.	Kab. Kubu Raya	Perbup Nomor 46 Tahun 2010
287.	1.	Provinsi Kalimantan Tengah	Pergub Nomor 41 Tahun 2009
288.	2.	Kab. Barito Selatan	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
289.	3.	Kab. Barito Utara	Perbup Nomor 18 Tahun 2010
290.	4.	Kab. Kapuas	Perbup Nomor 15 Tahun 2010
291.	5.	Kab. Kotawaringin Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2011
292.	6.	Kab. Kotawaringin Timur	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
293.	7.	Kota Palangkaraya	Perbup Nomor 53 Tahun 2010
294.	8.	Kab. Barito Timur	Perbup Nomor 81 Tahun 2010
295.	9.	Kab. Murung Raya	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
296.	10.	Kab. Pulang Pisau	Perbup Nomor 09 Tahun 2010
297.	11.	Kab. Gunung Mas	Perbup Nomor 25 Tahun 2009
298.	12.	Kab. Lamandau	Perbup Nomor 17 Tahun 2011
299.	13.	Kab. Sukamara	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
300.	14.	Kab. Katingan	Perbup Nomor 24 Tahun 2010
301.	15.	Kab. Seruyan	Perbup Nomor 14 Tahun 2011
302.	1.	Provinsi Kalimantan Selatan	Pergub No.22 Tahun 2010
303.	2.	Kab. Banjar	Perbup No.18 Tahun 2010
304.	3.	Kab. Barito Kuala	Perbup No.12 Tahun 2010
305.	4.	Kab. Hulu Sungai Selatan	Perbup No.14 Tahun 2010
306.	5.	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perbup Nomor 1 Tahun 2011
307.	6.	Kab. Hulu Sungai Utara	Perbup No.11 Tahun 2010
308.	7.	Kab. Kota Baru	Perbup No.31 Tahun 2010
309.	8.	Kab. Tabalong	Perbup No.18 Tahun 2010
310.	9.	Kab. Tanah Laut	Perbup No.69 Tahun 2010
311.	10.	Kab. Tapin	Perbup No.09 Tahun 2010
312.	11.	Kota Banjarbaru	Perwali Nomor 2 Tahun 2011
313.	12.	Kota Banjarmasin	Perwali Nomor 28 Tahun 2010
314.	13.	Kab. Balangan	Perbup No.22 Tahun 2010
315.	14.	Kab. Tanah Bumbu	Perbup No.18 Tahun 2010





Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
316.	1.	Provinsi Kalimantan Timur	Pergub Nomor 89 Tahun 2009
317.	2.	Kab. Berau	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
318.	3.	Kab. Bulungan	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
319.	4.	Kab. Kutai Kartanegara	Perbup Nomor 18 Juni 2012
320.	5.	Kab. Kutai Barat	Perbup Nomor 26 Oktober 2010
321.	6.	Kab. Kutai Timur	Perbup Nomor 02 Tahun 2011
322.	7.	Kab. Malinau	Perbup Nomor 20 Tahun 2010
323.	8.	Kab. Nunukan	Perbup Nomor 57 Tahun 2010
324.	9.	Kab. Paser	Perbup Nomor 25 Tahun 2010
325.	10.	Kota Balikpapan	Perwali Nomor 20 Tahun 2010
326.	11.	Kota Bontang	Perwali Nomor 20 Tahun 2010
327.	12.	Kota Samarinda	Perwali Nomor 31 Tahun 2010
328.	13.	Kota Tarakan	Perwali Nomor 66 Tahun 2009
329.	14.	Kab. Penajam Paser Utara	Perbup Nomor 31 Tahun 2012
330.	15.	Kab Tana Tidung	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
331.	1.	Provinsi Sulawesi Utara	Pergub Nomor 23 Tahun 2010
332.	2.	Kab. Bolaang Mongondow	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
333.	3.	Kab. Minahasa	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
334.	4.	Kab. Sangihe	Perbup Nomor 21 Tahun 2010
335.	5.	Kota Bitung	Perwali Nomor 29 Tahun 2010
336.	6.	Kota Manado	Perwali Nomor 58a Tahun 2011
337.	7.	Kab. Kepulauan Talaud	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
338.	8.	Kab. Minahasa Selatan	Perbup Nomor 128 Tahun 2011
339.	9.	Kota Tomohon	Perwali Nomor 24 Tahun 2011
340.	10.	Kab. Minahasa Utara	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
341.	11.	Kota Kotamobagu	Perwali Nomor 22 Tahun 2010
342.	12.	Kab. Bolaang Mangondow Utara	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
343.	13.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
344.	14.	Kab. Minahasa Tenggara	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
345.	15.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Perbup Nomor 6 Tahun 2010
346.	16.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Perbup Nomor 88 Tahun 2010
347.	1.	Provinsi Sulawesi Tengah	Pergub Nomor 74 Tahun 2009
348.	2.	Kab. Banggai	Perbup Nomor 47 Tahun 2009
349.	3.	Kab. Banggai Kepulauan	Perbup Nomor 35 Tahun 2009
350.	4.	Kab. Buol	Perbup Nomor 14 Tahun 2009
351.	5.	Kab. Toli Toli	Perbup Nomor 25 Tahun 2009
352.	6.	Kab. Donggala	Perbup Nomor 58 Tahun 2009
353.	7.	Kab. Morowali	Perbup Nomor 7 Tahun 2009
354.	8.	Kab. Poso	Perbup Nomor 60 Tahun 2009
355.	9.	Kota Palu	Perbup Nomor 39 Tahun 2009
356.	10.	Kab. Parigi Moutong	Perbup Nomor 18 Tahun 2009
357.	11.	Kab. Tojo Una Una	Perbup Nomor 21 Tahun 2009
358.	12.	Kab. Sigi	Perbup Nomor 12 Tahun 2009





Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
359.	1.	Provinsi Sulawesi Selatan	Pergub Nomor 62 Tahun 2010
360.	2.	Kab. Bantaeng	Perbup Nomor 35 Tahun 2011
361.	3.	Kab. Barru	Perbup Nomor 14 Tahun 2012
362.	4.	Kab. Bone	Perbup Nomor 25 Tahun 2010
363.	5.	Kab. Bulukumba	Perbup Nomor 31 Tahun 2010
364.	6.	Kab. Enrekang	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
365.	7.	Kab. Gowa	Perbup Nomor 36 Tahun 2010
366.	8.	Kab. Jeneponto	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
367.	9.	Kab. Luwu	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
368.	10.	Kab. Luwu Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
369.	11.	Kab. Maros	Perbup Nomor 17 Tahun 2011
370.	12.	Kab. Pangkajene Kepulauan	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
371.	13.	Kab. Pinrang	Perbup Nomor 20 Tahun 2010
372.	14.	Kab. Kepulauan Selayar	Perbup Nomor 18 Tahun 2011
373.	15.	Kab. Sidenreng Rappang	Perbup Nomor 19 tahun 2012
374.	16.	Kab. Sinjai	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
375.	17.	Kab. Soppeng	Perbup Nomor 25 Tahun 2010
376.	18.	Kab. Takalar	Perbup Nomor 3 Tahun 2012
377.	19.	Kab. Tana Toraja	Perbup Nomor 23 Tahun 2010
378.	20.	Kab. Wajo	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
379.	21.	Kota Pare pare	Perwali Nomor 23 Tahun 2010
380.	22.	Kota Makassar	Perwali Nomor 33 Tahun 2010
381.	23.	Kota Palopo	Perwali Nomor 14 Tahun 2010
382.	24.	Kab. Luwu Timur	Perbup Nomor 42 Tahun 2011
383.	25.	Kab. Tana Toraja Utara	Perbup Nomor 52 Tahun 2010
384.	1.	Provinsi Sulawesi Barat	Pergub Nomor 9 Tahun 2010
385.	2.	Kab. Majene	Perbup Nomor 17 tahun 2012
386.	3.	Kab. Mamuju	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
387.	4.	Kab. Polewali Mandar	Perbup Nomor 22 Tahun 2010
388.	5.	Kab. Mamasa	Perbup Nomor 7 Tahun 2012
389.	6.	Kab. Mamuju Utara	Perbup Nomor 092 tahun 2011
390.	1.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pergub Nomor 17 Tahun 2010
391.	2.	Kab. Buton	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
392.	3.	Kab. Konawe	Perbup Nomor 21 Tahun 2010
393.	4.	Kab. Kolaka	Perbup Nomor 2 Tahun 2010
394.	5.	Kab. Muna	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
395.	6.	Kota Kendari	Perwali Nomor 3 Tahun 2010
396.	7.	Kota Bau bau	Perwali Nomor 29 Tahun 2010
397.	8.	Kab. Konawe Selatan	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
398.	9.	Kab. Bombana	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
399.	10.	Kab. Wakatobi	Perbup Nomor 2A Tahun 2010
400.	11.	Kab. Kolaka Utara	Perbup Nomor 800/146 Tahun 2010
401.	12.	Kab. Konawe Utara	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
402.	13.	Kab. Buton Utara	Perbup Nomor 23 Tahun 2010





Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
403.	1.	Provinsi Bali	Pergub Nomor 27 Tahun 2010
404.	2.	Kab. Badung	Perbup Nomor 28 Tahun 2010
405.	3.	Kab. Bangli	Perbup Nomor 25 Tahun 2010
406.	4.	Kab. Buleleng	Perbup Nomor 37 Tahun 2010
407.	5.	Kab. Gianyar	Perbup Nomor 61 Tahun 2009
408.	6.	Kab. Jembrana	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
409.	7.	Kab. Karangasem	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
410.	8.	Kab. Klungkung	Perbup Nomor 18 Tahun 2010
411.	9.	Kab. Tabanan	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
412.	10.	Kota Denpasar	Perwali Nomor 20 Tahun 2010
413.	1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
414.	2.	Kab. Bima	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
415.	3.	Kab. Dompu	Perbup Nomor 30 Tahun 2010
416.	4.	Kab. Lombok Barat	Perbup Nomor 24 Tahun 2010
417.	5.	Kab. Lombok Tengah	Perbup Nomor 32 Tahun 2011 1
418.	6.	Kab. Lombok Timur	Perbup Nomor 31 Tahun 2010
419.	7.	Kab. Sumbawa	Perbup Nomor 43 Tahun 2010
420.	8.	Kota Mataram	Perwali Nomor 13 Tahun 2010
421.	9.	Kota Bima	Perwali Nomor 04 Tahun 2010
422.	10.	Kab. Sumbawa Barat	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
423.	11.	Kab. Lombok Utara	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
424.	1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pergub Nomor 39 Tahun 2010
425.	2.	Kab. Alor	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
426.	3.	Kab. Belu	Perbup Nomor 23 Tahun 2010
427.	4.	Kab. Ende	Perbup Nomor 21 Tahun 2010
428.	5.	Kab. Flores Timur	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
429.	6.	Kab. Kupang	Perbup Nomor 15 Tahun 2010
430.	7.	Kab. Lembata	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
431.	8.	Kab. Manggarai	Perbup Nomor 24 Tahun 2010
432.	9.	Kab. Ngada	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
433.	10.	Kab. Sikka	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
434.	11.	Kab. Sumba Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
435.	12.	Kab. Sumba Timur	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
436.	13.	Kab. Timor Tengah Selatan	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
437.	14.	Kab. Timor Tengah Utara	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
438.	15.	Kota Kupang	Perwali Nomor 11A Tahun 2010
439.	16.	Kab. Rote Ndao	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
440.	17.	Kab. Manggarai Barat	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
441.	18.	Kab. Nagekeo	Perbup Nomor 17 Tahun 2010
442.	19.	Kab. Sumba Barat Daya	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
443.	20.	Kab. Sumba Tengah	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
444.	21.	Kab. Manggarai Timur	Perbup Nomor 22 Tahun 2010
445.	22.	Kab Sabu Raijua	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
446.			
447.	1.	Provinsi Maluku	Pergub Nomor 02 Tahun 2010
448.	2.	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perbup Nomor 02 Tahun 2010
449.	3.	Kab. Maluku Tengah	Perbup Nomor 40 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
450.	4.	Kab. Maluku Tenggara	Perbup Nomor 02 Tahun 2010
451.	5.	Kab. Buru	Perbup Nomor 14 Tahun 2011
452.	6.	Kota Ambon	Perwali Nomor 14 Tahun 2011
453.	7.	Kab. Seram Bagian Barat	Perbup Nomor 04 Tahun 2011
454.	8.	Kab. Seram Bagian Timur	Perbup Nomor 36 Tahun 2011
455.	9.	Kab. Kepulauan Aru	Perbup Nomor 04 Tahun 2010
456.	10.	Kab. Maluku Barat Daya	Perbup PerBub No.08/2011
457.	11.	Kota Tual	Perwali Nomor 04 Tahun 2010
458.	12.	Kab. Buru Selatan	Perbup Nomor 15 Tahun 2011
459.	1.	Provinsi Maluku Utara	Pergub Nomor 22 Tahun 2010
460.	2.	Kab. Halmahera Tengah	Perbup Nomor 06 Tahun 2011
461.	3.	Kab. Halmahera Barat	Perbup Nomor 08 Tahun 2010
462.	4.	Kota Ternate	Perwali Nomor 07 Tahun 2011
463.	5.	Kab. Halmahera Timur	Perbup Nomor 04 Tahun 2011
464.	6.	Kota Tidore Kepulauan	Perwali Nomor 15 Tahun 2011
465.	7.	Kab. Kepulauan Sula	Perbup Nomor 04 Tahun 2011
466.	8.	Kab. Halmahera Selatan	Perbup Nomor 04 Tahun 2010
467.	9.	Kab. Halmahera Utara	Perbup Nomor 7 tahun 2012
468.	10.	Kab. Morotai	Perbup Nomor 10 Tahun 2012
469.	1.	Provinsi Papua	Pergub Nomor 188.3/046 Tahun 2011
470.	2.	Kab. Biak Numfor	Perbup Nomor 183 Tahun 2011
471.	3.	Kab. Jayapura	Perbup Nomor 32 Tahun 2009
472.	4.	Kab. Jayawijaya	Perbup Nomor 17 Tahun 2010
473.	5.	Kab. Merauke	Perbup Nomor 10 Tahun 2012
474.	6.	Kab. Mimika	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
475.	7.	Kab. Nabire	Perbup Nomor 15 Tahun 2011
476.	8.	Kab. Paniai	Perbup Nomor 52 Tahun 2010
477.	9.	Kab. Puncak Jaya	Perbup Nomor 58 Tahun 2010
478.	10.	Kab. Kepulauan Yapen	Perbup Nomor No.6 Tahun 2011
479.	11.	Kota Jayapura	Perwali Nomor 06 Tahun 2010
480.	12.	Kab. Sarmi	Perbup Nomor 72 Tahun 2010
481.	13.	Kab. Keerom	Perbup Nomor 8 Tahun 2011
482.	14.	Kab. Yahukimo	Perbup Nomor 7 Tahun 2012
483.	15.	Kab. Pegunungan Bintang	Perbup Nomor 700/154 Tahun 2010
484.	16.	Kab. Tolikara	Perbup Nomor 4 Tahun 2012
485.	17.	Kab. Boven Digoel	Perbup Nomor 11 Tahun 2012
486.	18.	Kab. Mappi	Perbup Nomor 7 Tahun 2012
487.	19.	Kab. Asmat	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
488.	20.	Kab. Waropen	Perbup Nomor 44 Tahun 2010
489.	21.	Kab. Supiori	Perbup Nomor 10 Tahun 2011
490.	22.	Kab. Mamberamo Raya	Perbup Nomor 06 Tahun 2010
491.	23.	Kab. Mamberamo Tengah	Perbup Nomor 700/06/BUP-MT/2012
492.	24.	Kab. Yalimo	Perbup Nomor 36 Tahun 2012
493.	25.	Kab. Lanny Jaya	Perbup Nomor 52 Tahun 2012
494.	26.	Kab. Nduga	Perbup Nomor 7 Tahun 2012
495.	27.	Kab. Dogiyai	Perbup Nomor 05 Tahun 2011
496.	28.	Kab. Puncak	Perbup Nomor 15 Tahun 2012





Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
497.	29.	Kab. Intan Jaya	Perbup Nomor 8 Tahun 2011
498.	30.	Kab. Deiyai	Perbup Nomor 4 Tahun 2012
499.	1.	Provinsi Papua Barat	Pergub Nomor 900/10/V/2011
500.	2.	Kab. Sorong	Perbup Nomor 91 Tahun 2010
501.	3.	Kab. Manokwari	Perbup Nomor 41 Tahun 2011
502.	4.	Kab. Fak Fak	Perbup Nomor 14 tahun 2012
503.	5.	Kota Sorong	Perwali Nomor 04 Tahun 2010
504.	6.	Kab. Sorong Selatan	Perbup Nomor 02 Tahun 2011
505.	7.	Kab. Raja Ampat	Perbup Nomor 6 Tahun 2011
506.	8.	Kab. Teluk Bintuni	Perbup Nomor 06 Tahun 2011
507.	9.	Kab. Teluk Wondama	Perbup Nomor 06 Tahun 2011
508.	10.	Kab. Kaimana	Perbup Nomor 05 Tahun 2012
509.	11.	Kab Tambrau	Perbup Nomor 48 Tahun 2010
510.	12.	Kab. Maybrat	Perbup Nomor 115 Tahun 2012

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2013

Tabel II.19 Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2011 – 2012

Provinsi	Total Pemda	Pemda yang memiliki Perda SPIP							
		2011				2012			
		Prov.	Kab/kota	Total	%	Prov.	Kab/kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	23	24	100	1	23	24	100
Sumatera Utara	34	1	33	34	100	1	33	34	100
Sumatera Barat	20	1	14	15	75	1	19	20	100
Riau	13	1	12	13	100	1	12	13	100
Jambi	12	1	6	7	58	1	11	12	100
Sumatera Selatan	16	1	14	15	94	1	15	16	100
Bengkulu	11	1	10	11	100	1	10	11	100
Lampung	15	1	14	15	100	1	14	15	100
Bangka Belitung	8	1	6	7	88	1	7	8	100
Kepulauan Riau	8	1	7	8	100	1	7	8	100



Lanjutan Tabel II.19

Provinsi	Total Pemda	Pemda yang memiliki Perda SPIP							
		2011				2012			
		Prov.	Kab/kota	Total	%	Prov.	Kab/kota	Total	%
DKI Jakarta*	7	1	-	1	100	1		1	100
Jawa Barat	27	1	24	25	93	1	26	27	100
Jawa Tengah	36	1	34	35	97	1	35	36	100
DI Yogyakarta	6	1	5	6	100	1	5	6	100
Jawa Timur	39	1	38	1	100	1	38	39	100
Banten	9	1	7	8	89	1	8	9	100
Bali	10	1	9	10	100	1	9	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	1	10	11	100	1	10	11	100
Nusa Tenggara Timur	22	1	21	22	100	1	21	22	100
Kalimantan Barat	15	1	14	15	100	1	14	15	100
Kalimantan Tengah	15	1	14	15	100	1	14	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	13	14	100	1	13	14	100
Kalimantan Timur	15	1	12	13	87	1	14	15	100
Sulawesi Utara	16	1	15	16	100	1	15	16	100
Sulawesi Tengah	12	1	11	12	100	1	11	12	100
Sulawesi Selatan	25	1	21	22	88	1	24	25	100
Sulawesi Tenggara	13	1	12	13	100	1	12	13	100
Gorontalo	7	1	6	7	100	1	6	7	100
Sulawesi Barat	6	1	3	4	67	1	5	6	100



Lanjutan Tabel II.19

Provinsi	Total Pemda	Pemda yang memiliki Perda SPIP							
		2011				2012			
		Prov.	Kab/kota	Total	%	Prov.	Kab/kota	Total	%
Maluku	12	1	11	12	100	1	11	12	100
Maluku Utara	10	1	7	8	80	1	9	10	100
Papua	30	1	19	20	67	1	29	30	100
Papua Barat	12	1	8	9	75	1	11	12	100
Kalimantan Utara**									
Total	524			486	93			524	100

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2013

Catatan : Peraturan SPIP Provinsi DKI Jakarta dibuat oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta tidak membuat peraturan SPIP.

BAGIAN III

SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR



Bagian ini menyajikan data statistik sumber daya manusia aparatur dalam mendukung terlaksananya pemerintahan dan pembangunan. Sumber daya manusia aparatur yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Data yang disajikan meliputi Jumlah PNS secara umum, jumlah PNS berdasarkan pendidikan, berdasarkan usia, berdasarkan golongan ruang, berdasarkan jenis kelamin. Selain jumlah PNS disajikan pula data tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, fungsional umum, fungsional tertentu. Ada beberapa jabatan fungsional tertentu yang disajikan datanya secara lebih spesifik, yaitu jabatan fungsional peneliti; guru; dosen; tenaga kesehatan; auditor; pemeriksa; penyidik; dan penyuluh KB. Sebelum mengakhiri bagian ini disajikan tentang diklat PNS, jumlah lembaga kediklatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta akreditasinya; dan data mengenai widyaiswara. Untuk mengakhiri bagian ini disajikan tentang kesejahteraan PNS dan data mengenai pensiun PNS.

A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sub Bagian ini mengemukakan data jumlah PNS yang berstatus PNS pusat maupun daerah secara umum pada tahun 2012 - 2013, tidak diklasifikasikan berdasarkan jabatan. Jumlah umum PNS ini ditampilkan pada tabel Tabel III.1. Data mengenai jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut pendidikan disajikan pada tabel III.2, tabel III.3, tabel III.4 dan tabel III.5. Data tentang jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut kelompok umur disajikan pada tabel III.6, tabel III.7, tabel III.8, tabel III.9. Dan jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.10, tabel III.11, tabel III.12 dan tabel III.13.

B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Data dalam sub bagian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu data umum jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum; data jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural dengan variasinya; data



jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan variasinya; dan data jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dengan variasinya.

Data umum jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum disajikan pada tabel III.14 sampai tabel III.17. Sementara itu, data mengenai jumlah umum dan pertumbuhan PNS yang menduduki jabatan struktural disajikan pada tabel III.18 dan tabel III.19. Data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut kelompok umur disajikan pada tabel III.20 sampai tabel III.23. Berikutnya data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut pendidikan disajikan pada tabel III.24 sampai tabel III.27. Sementara data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut jenis kelamin disajikan pada tabel III.28 sampai tabel III.31. Dan data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut golongan/ruang disajikan pada tabel III.32 sampai tabel III.35.


Data mengenai jabatan fungsional tertentu yang disajikan dalam publikasi ini meliputi data umum mengenai jabatan fungsional tertentu dengan variasi kelompok umur; pendidikan; usia dan golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.36 sampai tabel III.51. Selain itu, dalam publikasi disajikan beberapa data jabatan fungsional tertentu secara spesifik, yaitu data mengenai jabatan fungsional peneliti; guru; dosen; tenaga kesehatan; auditor; pemeriksa; penyidik; dan penyuluh KB. Jabatan fungsional ini dipilih untuk mewakili jabatan fungsional yang memberikan pelayanan dasar dan berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Data mengenai peneliti dapat dilihat pada tabel III.52 sampai tabel III.53. Sementara data mengenai tenaga pendidikan dosen dan guru dapat dilihat pada tabel III.54 sampai tabel III.94. Data mengenai jabatan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel III.95 dan tabel III.96. Data mengenai jabatan auditor ditampilkan pada tabel III.97. Sementara data mengenai jabatan pemeriksa dengan variasinya ditampilkan pada tabel III.98 sampai tabel III.105. Data mengenai jabatan penyidik KPK dan Polri dapat dilihat pada tabel III.106 sampai tabel III.110. Dan tabel mengenai jabatan penyuluh KB dengan variasinya ditampilkan pada tabel III.112 dan pada tabel 113.

Data jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum juga disajikan dengan berbagai variasi, yaitu menurut kelompok umur; pendidikan; usia dan golongan/ruang. Data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum disajikan pada tabel III.114 sampai tabel III.130.

C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

Data mengenai pendidikan dan pelatihan PNS yang ditampilkan dalam publikasi ini meliputi data jumlah PNS yang sudah mengikuti diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan; jumlah PNS yang pernah mengikuti diklat fungsional dan teknis; data program diklat di Instansi Pusat dan Daerah yang sudah diakreditasi; dan data widyaiswara diklat di Instansi Pusat maupun di Daerah. Untuk data mengenai jumlah PNS yang sudah mengikuti diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan dapat dilihat pada tabel III.131. Sementara data mengenai jumlah PNS yang pernah mengikuti diklat





fungsional dan teknis ditampilkan pada tabel III.132. Data mengenai program diklat di Instansi Pusat dan Daerah yang sudah diakreditasi ditampilkan pada tabel III.133. dan data mengenai jumlah dan pertumbuhan widyaiswara di instansi pusat dan daerah dapat dilihat pada tabel III.134 sampai tabel III.137.

D. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Data kesejahteraan PNS yang penting untuk disajikan adalah data mengenai gaji pokok pegawai; tunjangan jabatan; dan asuransi kesehatan PNS. Tabel III.138 sampai tabel III.141 menunjukkan data *time series* tahun 2012 - 2014 gaji pokok PNS golongan I sampai golongan IV. Sementara itu, tabel III.142 menjelaskan mengenai tunjangan jabatan struktural eselon I-IV dan tabel III.143 menjelaskan mengenai tunjangan jabatan fungsional tertentu. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tunjangan jabatan untuk jabatan struktural selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan.

Selain data gaji dan tunjangan, kesejahteraan PNS juga dapat dilihat dari pemanfaatan asuransi kesehatan. Pada tabel III.144 sampai tabel III.148 ditampilkan data mengenai kepesertaan dalam asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan).

E. Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Data yang ditampilkan dalam sub bagian pensiun PNS adalah data total uang pensiun PNS; data PNS yang pensiun menurut beberapa variasi. Data total uang pensiun PNS dan pertumbuhannya disajikan pada tabel III.149 dan tabel III.150. Sementara data mengenai PNS yang pensiun menurut kelompok dapat dilihat pada tabel III.151 dan tabel III.152. Data mengenai PNS yang pensiun menurut golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.153 dan tabel III.154. Dan data mengenai PNS yang pensiun menurut jenis kelamin ditampilkan pada tabel III.155 dan tabel III.156.



Tabel III.1 Jumlah PNS Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2012 - 2013

No.	Instansi	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Instansi Pusat	919235	20,22	890521	20,41	-3,12
2.	Pemerintah Provinsi	313566	6,90	295142	6,76	-5,88
3.	Pemerintah Kab/Kota	3 314298	72,89	3177142	72,82	-4,14
	Total	4547099	100	4362805	100	-4,05

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.2 Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	79602	1,75	60451	1,4	-24
2.	SLTP	119161	2,62	93422	2,1	-22
3.	SLTA	1477787	32,50	1241248	28,5	-16
4.	D1	72928	1,60	57365	1,3	-21
5.	D II	674853	14,84	528450	12,1	-22
6.	D III	428478	9,42	412735	9,5	-4
7.	D IV	19864	0,44	30448	0,7	53
8.	S 1	1547306	34,03	1748364	40,1	13
9.	S 2	118648	2,61	179719	4,1	51
10.	S 3	8472	0,19	10603	0,2	25
	Total	4547099	100	4362805	100,0	-4

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.3 Jumlah PNS Pusat Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	14064	1,53	10713	1,20	-23,83
2.	SLTP	23057	2,51	18138	2,04	-21,33
3.	SLTA	285730	31,08	246555	27,69	-13,71
4.	D1	14398	1,57	14444	1,62	0,32
5.	D II	43044	4,68	23744	2,67	-44,84
6.	D III	80377	8,74	76224	8,56	-5,17
7.	D IV	10863	1,18	13621	1,53	25,39
8.	S 1	358491	39,00	375192	42,13	4,66
9.	S 2	80944	8,81	101798	11,43	25,76
10.	S 3	8267	0,90	10092	1,13	22,08
	Total	919235	100	890521	100,00	-3,12

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014



Tabel III.4 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	7939	2,5	5847	1,98	-26,35
2.	SLTP	10432	3,3	8260	2,80	-20,82
3.	SLTA	122059	38,9	103104	34,93	-15,53
4.	D1	3557	1,1	2755	0,93	-22,55
5.	D II	17921	5,7	13250	4,49	-26,06
6.	D III	34608	11	31711	10,74	-8,37
7.	D IV	1375	0,4	2673	0,91	94,40
8.	S 1	106256	33,8	111160	37,66	4,62
9.	S 2	9333	2,9	16192	5,49	73,49
10.	S 3	86	0,03	190	0,06	120,93
	Total	3 13566	100	295142	100,00	-5,88

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.5 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	57599	1,74	43891	1,38	-23,80
2.	SLTP	85672	2,58	67024	2,11	-21,77
3.	SLTA	1069998	32,28	891589	28,06	-16,67
4.	D1	54973	1,66	40166	1,26	-26,94
5.	D II	613888	18,52	491456	15,47	-19,94
6.	D III	313493	9,46	304800	9,59	-2,77
7.	D IV	7626	0,23	14154	0,45	85,60
8.	S 1	1082559	32,66	1262012	39,72	16,58
9.	S 2	28371	0,86	61729	1,94	117,58
10.	S 3	119	0,00	321	0,01	169,75
	Total	3314298	100	3177142	100,00	-4,14

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.6 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	2970	0,07	1578	0,0	-47
2.	21 - 25	142729	3,14	60274	1,4	-58
3.	26 - 30	495061	10,89	401925	9,2	-19
4.	31 - 35	582718	12,82	591490	13,6	2
5.	36 - 40	581770	12,79	567207	13,0	-3
6.	41 - 45	819195	18,02	743965	17,1	-9
7.	46 - 50	946912	20,82	919137	21,1	-3
8.	51 - 55	749347	16,48	834270	19,1	11
9.	56 - 60	218340	4,80	226151	5,2	4
10.	61 - 65	7568	0,17	16106	0,4	113
11.	65 +	489	0,01	702	0,0	44
	Total	4547099	100	4362805	100,0	-4

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.7 Jumlah PNS Pusat Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	2006	0,22	1568	0,18	-21,83
2.	21 - 25	44051	4,79	27634	3,10	-37,27
3.	26 - 30	111876	12,17	96509	10,84	-13,74
4.	31 - 35	131730	14,33	130086	14,61	-1,25
5.	36 - 40	138734	15,09	132185	14,84	-4,72
6.	41 - 45	162694	17,70	160315	18,00	-1,46
7.	46 - 50	156225	17,00	158730	17,82	1,60
8.	51 - 55	132530	14,42	139010	15,61	4,89
9.	56 - 60	32022	3,48	34991	3,93	9,27
10.	61 - 65	6885	0,75	8810	0,99	27,96
11.	65 +	482	0,05	683	0,08	41,70
	Total	919235	100	890521	100,00	-3,12

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014



Tabel III.8 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	177	0,06	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	7395	2,36	3713	1,26	-49,79
3.	26 - 30	26841	8,56	21835	7,40	-18,65
4.	31 - 35	36042	11,49	36648	12,42	1,68
5.	36 - 40	37448	11,94	38116	12,91	1,78
6.	41 - 45	49282	15,72	45352	15,37	-7,97
7.	46 - 50	70599	22,51	63898	21,65	-9,49
8.	51 - 55	72585	23,15	72654	24,62	0,10
9.	56 - 60	13049	4,16	12135	4,11	-7,00
10.	61 - 65	148	0,05	779	0,26	426,35
11.	65 +	-	0,00	12	0,00	0,00
	Total	313566	100	295142	100,00	-5,88

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.9 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	787	0,02	10	0,00	-98,73
2.	21 - 25	91283	2,75	28927	0,91	-68,31
3.	26 - 30	356344	10,75	283581	8,93	-20,42
4.	31 - 35	414946	12,52	424756	13,37	2,36
5.	36 - 40	405588	12,24	396906	12,49	-2,14
6.	41 - 45	607219	18,32	538298	16,94	-11,35
7.	46 - 50	720088	21,73	696509	21,92	-3,27
8.	51 - 55	544232	16,42	622606	19,60	14,40
9.	56 - 60	173269	5,23	179025	5,63	3,32
10.	61 - 65	535	0,02	6517	0,21	1118,13
11.	65 +	7	0,00	7	0,00	0,00
	Total	3314298	100	3177142	100,00	-4,14

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.10 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	16090	0,35	10253	0,2	-36
2.	Ib	17119	0,38	20297	0,5	19
3.	Ic	36693	0,81	22858	0,5	-38
4.	Id	29288	0,64	29663	0,7	1
5.	Ila	371890	8,18	219278	5,0	-41
6.	Ilb	405000	8,91	354444	8,1	-12
7.	Ilc	344023	7,57	306839	7,0	-11
8.	Ild	184823	4,06	200818	4,6	9
9.	Illa	668451	14,70	550363	12,6	-18
10.	IIIb	575750	12,66	631948	14,5	10
11.	IIIc	404004	8,88	456967	10,5	13
12.	IIId	487044	10,71	502741	11,5	3
13.	IVa	863045	18,98	880654	20,2	2
14.	IVb	113394	2,49	139735	3,2	23
15.	IVc	22298	0,49	25874	0,6	16
16.	IVd	6069	0,13	7471	0,2	23
17.	IVe	2118	0,05	2602	0,1	23
	Total	4547099	100	4362805	100,0	-4

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.11 Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	1396	0,15	649	0,07	-53,51
2.	Ib	2054	0,22	2459	0,28	19,72
3.	Ic	5000	0,54	2295	0,26	-54,10
4.	Id	5896	0,64	5489	0,62	-6,90
5.	Ila	71615	7,79	43796	4,92	-38,85
6.	Ilb	66636	7,25	58166	6,53	-12,71
7.	Ilc	74937	8,15	70699	7,94	-5,66
8.	Ild	48814	5,31	48599	5,46	-0,44
9.	Illa	178540	19,42	137868	15,48	-22,78
10.	IIIb	164568	17,90	181854	20,42	10,50
11.	IIIc	95154	10,35	110719	12,43	16,36
12.	IIId	91500	9,95	103729	11,65	13,37
13.	IVa	72322	7,87	78972	8,87	9,19
14.	IVb	24065	2,62	26719	3,00	11,03



Lanjutan Tabel III.11

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
15.	IVc	10351	1,13	10911	1,23	5,41
16.	IVd	4444	0,48	5268	0,59	18,54
17.	IVe	1943	0,21	2329	0,26	19,87
	Total	919235	100	890521	100,00	-3,12

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.12 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	1318	0,42	803	0,27	-39,07
2.	Ib	1289	0,41	1645	0,56	27,62
3.	Ic	3508	1,12	1940	0,66	-44,70
4.	Id	2212	0,71	2709	0,92	22,47
5.	IIa	31376	10,01	17754	6,02	-43,42
6.	IIb	20347	6,49	29811	10,10	46,51
7.	IIc	21753	6,94	15659	5,31	-28,01
8.	IId	14433	4,60	13480	4,57	-6,60
9.	IIIa	46790	14,92	39851	13,50	-14,83
10.	IIIb	56239	17,94	53980	18,29	-4,02
11.	IIIc	29605	9,44	29304	9,93	-1,02
12.	IIId	39627	12,64	36371	12,32	-8,22
13.	IVa	35304	11,26	39473	13,37	11,81
14.	IVb	6980	2,23	9242	3,13	32,41
15.	IVc	1962	0,63	1953	0,66	-0,46
16.	IVd	754	0,24	1045	0,35	38,59
17.	IVe	69	0,02	122	0,04	76,81
	Total	313566	100	295142	100,00	-5,88

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.13 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	13376	0,40	8801	0,28	-34,20
2.	Ib	13776	0,42	16193	0,51	17,55
3.	Ic	28185	0,85	18623	0,59	-33,93
4.	Id	21180	0,64	21465	0,68	1,35
5.	IIa	268899	8,11	157728	4,96	-41,34
6.	IIb	318017	9,60	266467	8,39	-16,21
7.	IIc	247333	7,46	220481	6,94	-10,86
8.	IId	121576	3,67	138739	4,37	14,12
9.	IIIa	443121	13,37	372644	11,73	-15,90
10.	IIIb	354943	10,71	396114	12,47	11,60
11.	IIIc	279245	8,43	316944	9,98	13,50
12.	IIId	355917	10,74	362641	11,41	1,89
13.	IVa	755419	22,79	762209	23,99	0,90
14.	IVb	82349	2,48	103774	3,27	26,02
15.	IVc	9985	0,30	13010	0,41	30,30
16.	IVd	871	0,03	1158	0,04	32,95
17.	IVe	106	0,00	151	0,00	42,45
	Total	3314298	100	3177142	100,00	-4,14

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.14 Total Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013

No.	Jabatan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Jabatan Struktural	273403	6,01	277745	6,4	2
2.	Jabatan Fungsional tertentu	2034362	44,74	2335975	53,5	15
3.	Jabatan Rangkap	2290	0,05	0	0,0	-100
4.	Jabatan Fungsional Umum	2237044	49,20	1749085	40,1	-22
	Total	4547099	100	4362805	100	-4

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.15 Jumlah Umum PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013

No.	Jabatan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Jabatan Struktural	58919	6,41	48846	5,49	-17,10
2.	Jabatan Fungsional tertentu	268706	29,23	321857	36,14	19,78
3.	Jabatan Rangkap	1838	0,20	0	0,00	0,00
4.	Jabatan Fungsional Umum	589772	64,16	519818	58,37	-11,86
	Total	919235	100	890521	100,00	-3,12

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.16 Jumlah Umum PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013

No.	Jabatan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Jabatan struktural	25798	8,23	23670	8,02	-8,25
2.	Jabatan fungsional tertentu	64471	20,56	73636	24,95	14,22
3.	Jabatan rangkap	22	0,01	0	0,00	0,00
4.	Jabatan fungsional umum	223275	71,21	197836	67,03	-11,39
	Total	313566	100	295142	100	-5,88

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.17 Jumlah Umum PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013

No.	Jabatan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Jabatan struktural	188686	5,69	205229	6,46	8,77
2.	Jabatan fungsional tertentu	1701185	51,33	1940482	61,08	14,07
3.	Jabatan rangkap	430	0,01	0	0,00	0,00
4.	Jabatan fungsional umum	1423997	42,97	1031431	32,46	-27,57
	Total	3314298	100	3177142	100,00	-4,14

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.18 Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2012 - 2013

Instansi	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
Pusat	58919	22	48846	18	-17
Provinsi	25798	9	23670	9	-8
Kab/Kota	188686	69	205229	74	9
Total	273403	100	277745	100	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.19 Jumlah PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	-	0,00	0	0,0	0
2.	21 - 25	540	0,20	369	0,1	-32
3.	26 - 30	4276	1,56	6197	2,2	45
4.	31 - 35	12996	4,75	20512	7,4	58
5.	36 - 40	24403	8,93	34943	12,6	43
6.	41 - 45	45795	16,75	51612	18,6	13
7.	46 - 50	80180	29,33	76756	27,6	-4
8.	51 - 55	94270	34,48	81246	29,3	-14
9.	56 - 60	10730	3,92	6004	2,2	-44
10.	61 - 65	192	0,07	95	0,0	-51
11.	65 +	21	0,01	11	0,0	-48
	Total	273403	100	277745	100,0	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014



Tabel III.20 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	-	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	9	0,02	22	0,05	144,44
3.	26 - 30	707	1,20	1105	2,26	56,29
4.	31 - 35	2940	4,99	3748	7,67	27,48
5.	36 - 40	6148	10,43	6543	13,40	6,42
6.	41 - 45	11285	19,15	10470	21,43	-7,22
7.	46 - 50	15522	26,34	11812	24,18	-23,90
8.	51 - 55	18587	31,55	13295	27,22	-28,47
9.	56 - 60	3547	6,02	1760	3,60	-50,38
10.	61 - 65	153	0,26	80	0,16	-47,71
11.	65 +	21	0,04	11	0,02	-47,62
	Total	58919	100	48846	100,00	-17,10

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.21 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	-	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	12	0,05	9	0,04	-25,00
3.	26 - 30	122	0,47	136	0,57	11,48
4.	31 - 35	524	2,03	761	3,22	45,23
5.	36 - 40	1529	5,93	1900	8,03	24,26
6.	41 - 45	3564	13,82	3989	16,85	11,92
7.	46 - 50	7906	30,65	7197	30,41	-8,97
8.	51 - 55	10713	41,53	8862	37,44	-17,28
9.	56 - 60	1409	5,46	810	3,42	-42,51
10.	61 - 65	19	0,07	6	0,03	-68,42
11.	65 +	-	0,00	0	0,00	0,00
	Total	25798	100	23670	100,00	-8,25

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.22 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	-	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	519	0,28	338	0,16	-34,87
3.	26 - 30	3447	1,83	4956	2,41	43,78
4.	31 - 35	9532	5,05	16003	7,80	67,89
5.	36 - 40	16726	8,86	26500	12,91	58,44
6.	41 - 45	30946	16,40	37153	18,10	20,06
7.	46 - 50	56752	30,08	57747	28,14	1,75
8.	51 - 55	64970	34,43	59089	28,79	-9,05
9.	56 - 60	5774	3,06	3434	1,67	-40,53
10.	61 - 65	20	0,01	9	0,00	-55,00
11.	65 +	-	0,00	0	0,00	0,00
	Total	188686	100	205229	100,00	8,77

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.23 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	69	0,03	21	0,0	-70
2.	SLTP	234	0,09	162	0,1	-31
3.	SLTA	56118	20,53	46703	16,8	-17
4.	D1	872	0,32	811	0,3	-7
5.	D II	5011	1,83	3128	1,1	-38
6.	D III	12539	4,59	11043	4,0	-12
7.	D IV	3602	1,32	5009	1,8	39
8.	S 1	160338	58,65	161269	58,1	1
9.	S 2	33807	12,37	48565	17,5	44
10.	S 3	813	0,30	1034	0,4	27
	Total	273403	100	277745	100,0	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.24 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	15	0,03	1	0,00	-93,33
2.	SLTP	39	0,07	23	0,05	-41,03
3.	SLTA	8251	14,00	4767	9,76	-42,23
4.	D1	123	0,21	69	0,14	-43,90
5.	D II	558	0,95	161	0,33	-71,15
6.	D III	1647	2,80	1242	2,54	-24,59
7.	D IV	1750	2,97	1687	3,45	-3,60
8.	S 1	32245	54,73	24456	50,07	-2416
9.	S 2	13574	23,04	15646	32,03	15,26
10.	S 3	717	1,22	794	1,63	10,74
	Total	58919	100	48846	100	-17,10

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.25 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	2	0,01	3	0,01	50,00
2.	SLTP	11	0,04	5	0,02	-54,55
3.	SLTA	2090	8,10	1315	5,56	-37,08
4.	D1	29	0,11	22	0,09	-24,14
5.	D II	234	0,91	166	0,70	-29,06
6.	D III	787	3,05	677	2,86	-13,98
7.	D IV	187	0,72	248	1,05	32,62
8.	S 1	17788	68,95	14205	60,01	-20,14
9.	S 2	4623	17,92	6934	29,29	49,99
10.	S 3	47	0,18	95	0,40	102,13
	Total	25798	100	23670	100	-8,25

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.26 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	52	0,03	17	0,01	-67,31
2.	SLTP	184	0,10	134	0,07	-27,17
3.	SLTA	45777	24,26	40621	19,79	-11,26
4.	D1	720	0,38	720	0,35	0,00
5.	D II	4219	2,24	2801	1,36	-33,61
6.	D III	10105	5,36	9124	4,45	-9,71
7.	D IV	1665	0,88	3074	1,50	84,62
8.	S 1	110305	58,46	122608	59,74	11,15
9.	S 2	15610	8,27	25985	12,66	66,46
10.	S 3	49	0,03	145	0,07	195,92
	Total	188686	100	205229	100,00	8,77

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.27 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	202595	74,10	195592	70,4	-3
2.	Perempuan	70808	25,90	82153	29,6	16
	Total	273403	100	277745	100,0	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.28 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	44563	75,63	35931	73,56	-19,37
2.	Perempuan	14356	24,37	12915	26,44	-10,04
	Total	58919	100	48846	100	-17,10

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014



Tabel III.29 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	18418	71,4	16230	68,57	-11,88
2.	Perempuan	7380	28,6	7440	31,43	0,81
	Total	25798	100	23670	100	-8,25

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.30 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	139614	74,0	143431	69,89	2,73
2.	Perempuan	49072	26,0	61798	30,11	25,93
	Total	188686	100	205229	100	8,77

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.31 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	11	0,00	4	0,0	-64
2.	Ib	14	0,01	4	0,0	-71
3.	Ic	47	0,02	10	0,0	-79
4.	Id	22	0,01	20	0,0	-9
5.	IIa	386	0,14	169	0,1	-56
6.	IIb	464	0,17	386	0,1	-17
7.	IIc	508	0,19	527	0,2	4
8.	IId	936	0,34	783	0,3	-16
9.	IIIa	7874	2,88	5426	2,0	-31
10.	IIIb	26687	9,76	28489	10,3	7
11.	IIIc	53189	19,45	74840	26,9	41
12.	IIId	91712	33,54	87771	31,6	-4
13.	IVa	48704	17,81	43941	15,8	-10
14.	IVb	30825	11,27	26524	9,5	-14
15.	IVc	9518	3,48	6938	2,5	-27
16.	IVd	2036	0,74	1560	0,6	-23





Lanjutan Tabel III.31

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
17.	IVe	470	0,17	353	0,1	-25
	Total	273403	100	277745	100,0	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.32 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	-	0,00	0	0,00	0,00
2.	Ib	-	0,00	1	0,00	0,00
3.	Ic	3	0,01	2	0,00	-33,33
4.	Id	3	0,01	5	0,01	66,67
5.	IIa	34	0,06	17	0,03	-50,00
6.	IIb	96	0,16	50	0,10	-47,92
7.	IIc	108	0,18	79	0,16	-26,85
8.	IId	204	0,35	140	0,29	-31,37
9.	IIIa	1596	2,71	944	1,93	-40,85
10.	IIIb	6272	10,65	4251	8,70	-32,22
11.	IIIc	10199	17,31	10655	21,81	4,47
12.	IIId	19733	33,49	15939	32,63	-19,23
13.	IVa	9610	16,31	8592	17,59	-10,59
14.	IVb	7512	12,75	5622	11,51	-25,16
15.	IVc	1861	3,16	1290	2,64	-30,68
16.	IVd	1252	2,12	932	1,91	-25,56
17.	IVe	436	0,74	327	0,67	-25,00
	Total	58919	100	48846	100,00	-17,10

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.33 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	-	0,00	0	0,00	0,00
2.	Ib	1	0,00	0	0,00	0,00
3.	Ic	-	0,00	0	0,00	0,00
4.	Id	-	0,00	1	0,00	0,00



Lanjutan Tabel III.33

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
5.	Ila	7	0,03	6	0,03	-14,29
6.	Ilb	13	0,05	14	0,06	7,69
7.	Ilc	23	0,09	7	0,03	-69,57
8.	Ild	38	0,15	22	0,09	-42,11
9.	IIla	282	1,09	110	0,46	-60,99
10.	IIlb	1080	4,19	710	3,00	-34,26
11.	IIlc	3256	12,62	3360	14,20	3,19
12.	IIld	9596	37,20	8938	37,76	-6,86
13.	IVa	5987	23,21	5590	23,62	-6,63
14.	IVb	4058	15,73	3940	16,65	-2,91
15.	IVc	1010	3,92	572	2,42	-43,37
16.	IVd	428	1,66	383	1,62	-10,51
17.	IVe	19	0,07	17	0,07	-10,53
	Total	25798	100	23670	100,00	-8,25

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.34 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	11	0,01	4	0,00	-63,64
2.	Ib	13	0,01	3	0,00	-76,92
3.	Ic	44	0,02	8	0,00	-81,82
4.	Id	19	0,01	14	0,01	-26,32
5.	IIa	345	0,18	146	0,07	-57,68
6.	IIb	355	0,19	322	0,16	-9,30
7.	IIc	377	0,20	441	0,21	16,98
8.	IId	694	0,37	621	0,30	-10,52
9.	IIla	5996	3,18	4372	2,13	-27,08
10.	IIlb	19335	10,25	23528	11,46	21,69
11.	IIlc	39734	21,06	60825	29,64	53,08
12.	IIld	62383	33,06	62894	30,65	0,82
13.	IVa	33107	17,55	29759	14,50	-10,11
14.	IVb	19255	10,20	16962	8,26	-11,91
15.	IVc	6647	3,52	5076	2,47	-23,63
16.	IVd	356	0,19	245	0,12	-31,18
17.	IVe	15	0,01	9	0,00	-40,00
	Total	188686	100	205229	100,00	8,77

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.35 Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2012 - 2013

Instansi	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
Pusat	268706	13	321857	13,78	19,78
Provinsi	64471	3	73636	3,15	14,22
Kab/Kota	1701185	84	1940482	83,07	14,07
Total	2034362	100	2335975	100,00	14,83

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.36 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	6	0,00	0	0,0	-100
2.	21 - 25	6513	0,32	19879	0,9	205
3.	26 - 30	7566	3,67	166060	7,1	123
4.	31 - 35	139951	6,88	252201	10,8	80
5.	36 - 40	219771	10,80	251729	10,8	15
6.	41 - 45	446544	21,95	416887	17,8	-7
7.	46 - 50	544991	26,79	535896	22,9	-2
8.	51 - 55	406425	19,98	482602	20,7	19
9.	56 - 60	188067	9,24	195014	8,3	4
10.	61 - 65	7082	0,35	15105	0,6	113
11.	65 +	446	0,02	602	0,0	35
	Total	2034362	100	2335975	100,0	15

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.37 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	-	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	520	0,19	1712	0,53	229,23
3.	26 - 30	11491	4,28	16158	5,02	40,61
4.	31 - 35	29748	11,07	45294	14,07	52,26
5.	36 - 40	45856	17,07	55353	17,20	20,71
6.	41 - 45	63065	23,47	70448	21,89	11,71
7.	46 - 50	49890	18,57	57811	17,96	15,88
8.	51 - 55	40948	15,24	44564	13,85	8,83
9.	56 - 60	20272	7,54	21949	6,82	8,27
10.	61 - 65	6477	2,41	7981	2,48	23,22
11.	65 +	439	0,16	587	0,18	33,71
	Total	268706	100	321857	100,00	19,78

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.38 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	-	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	179	0,28	941	1,28	425,70
3.	26 - 30	1114	1,73	4423	6,01	297,04
4.	31 - 35	2668	4,14	6197	8,42	132,27
5.	36 - 40	5470	8,48	6596	8,96	20,59
6.	41 - 45	10088	15,65	9475	12,87	-6,08
7.	46 - 50	18092	28,06	16612	22,56	-8,18
8.	51 - 55	18044	27,99	20655	28,05	14,47
9.	56 - 60	8700	13,49	8006	10,87	-7,98
10.	61 - 65	116	0,18	721	0,98	521,55
11.	65 +	-	0,00	10	0,01	0,00
	Total	64471	100	73636	100,00	14,22

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.39 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	6	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	5814	0,34	17226	0,89	196,28
3.	26 - 30	61961	3,64	145479	7,50	134,79
4.	31 - 35	107535	6,32	200710	10,34	86,65
5.	36 - 40	168445	9,90	189780	9,78	12,67
6.	41 - 45	373391	21,95	336964	17,36	-9,76
7.	46 - 50	477009	28,04	461473	23,78	-3,26
8.	51 - 55	347433	20,42	417383	21,51	20,13
9.	56 - 60	159095	9,35	165059	8,51	3,75
10.	61 - 65	489	0,03	6403	0,33	1209,41
11.	65 +	7	0,00	5	0,00	-28,57
	Total	1701185	100	1940482	100,00	14,07

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.40 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	181	0,01	246	0,0	36
2.	SLTP	1509	0,07	1236	0,1	-18
3.	SLTA	472427	23,22	398582	17,1	-16
4.	D1	35037	1,72	35242	1,5	1
5.	D II	570645	28,05	492391	21,1	-14
6.	D III	153483	7,54	250399	10,7	63
7.	D IV	3527	0,17	10281	0,4	191
8.	S 1	735766	36,17	1056133	45,2	44
9.	S 2	54742	2,69	82787	3,5	51
10.	S 3	7045	0,35	8678	0,4	23
	Total	2034362	100	2335975	100,0	15

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014



Tabel III.41 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	45	0,02	38	0,01	-15,56
2.	SLTP	217	0,08	161	0,05	-25,81
3.	SLTA	30791	11,46	26062	8,10	-15,36
4.	D1	1275	0,47	980	0,30	-23,14
5.	D II	30150	11,22	18455	5,73	-38,79
6.	D III	18550	6,90	24272	7,54	30,85
7.	D IV	2178	0,81	2982	0,93	36,91
8.	S 1	132110	49,17	179509	55,77	35,88
9.	S 2	46410	17,27	60861	18,91	31,14
10.	S 3	6980	2,60	8537	2,65	22,31
	Total	268706	100	321857	100	19,78

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.42 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	2	0,00	4	0,01	100,00
2.	SLTP	66	0,10	48	0,07	-27,27
3.	SLTA	11858	18,39	10809	14,68	-8,85
4.	D1	2077	3,22	1857	2,52	-10,59
5.	D II	15336	23,79	11551	15,69	-24,68
6.	D III	9156	14,20	15267	20,73	66,74
7.	D IV	147	0,23	623	0,85	323,81
8.	S 1	24517	38,03	30849	41,89	25,83
9.	S 2	1295	2,01	2592	3,52	100,15
10.	S 3	17	0,03	36	0,05	111,76
	Total	64471	100	73636	100	14,22

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.43 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	134	0,01	204	0,01	52,24
2.	SLTP	1226	0,07	1027	0,05	-16,23
3.	SLTA	429778	25,26	361711	18,64	-15,84
4.	D1	31685	1,86	32405	1,67	2,27
5.	D II	525159	30,87	462385	23,83	-11,95
6.	D III	125777	7,39	210860	10,87	67,65
7.	D IV	1202	0,07	6676	0,34	455,41
8.	S 1	579139	34,04	845775	43,59	46,04
9.	S 2	7037	0,41	19334	1,00	174,75
10.	S 3	48	0,00	105	0,01	118,75
	Total	1701185	100	1940482	100,00	14,07

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.44 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	883982	43,46	947970	40,6	7
2.	Perempuan	1150078	56,54	1388005	59,4	21
	Total	2034060	100	2335975	100,0	15

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.45 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	157528	27,75	170591	53,00	8,29
2.	Perempuan	410196	72,25	151266	47,00	-63,12
	Total	567724	100	321857	100	-43,31

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014



Tabel III.46 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	24868	43,38	27283	37,05	9,71
2.	Perempuan	32464	56,62	46353	62,95	42,78
	Total	57332	100	73636	100	28,44

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.47 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	701586	49,79	750096	38,66	6,91
2.	Perempuan	707418	50,21	1190386	61,34	68,27
	Total	1409004	100	1940482	100	37,72

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.48 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	3	0,00	1	0,0	-67
2.	Ib	1	0,00	3	0,0	200
3.	Ic	12	0,00	16	0,0	33
4.	Id	15	0,00	25	0,0	67
5.	Ila	36507	1,79	11250	0,5	-69
6.	Ilb	85647	4,21	61497	2,6	-28
7.	Ilc	83522	4,11	143535	6,1	72
8.	Ild	62135	3,05	108281	4,6	74
9.	IIla	153308	7,54	225256	9,6	47
10.	IIlb	205726	10,11	291915	12,5	42
11.	IIlc	211136	10,38	259724	11,1	23
12.	IIld	310912	15,28	315999	13,5	2
13.	IVa	791899	38,93	802125	34,3	1
14.	IVb	77554	3,81	97345	4,2	26
15.	IVc	10949	0,54	12851	0,6	17
16.	IVd	3499	0,17	4330	0,2	24
17.	IVe	1537	0,08	1822	0,1	19
	Total	2034362	100	2335975	100,0	15

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.49 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	-	0,00	0	0,00	0,00
2.	Ib	1	0,00	1	0,00	0,00
3.	Ic	1	0,00	0	0,00	0,00
4.	Id	1	0,00	2	0,00	100,00
5.	IIa	2322	0,86	1120	0,35	-51,77
6.	IIb	8622	3,21	3548	1,10	-58,85
7.	IIc	7571	2,82	10159	3,16	34,18
8.	IId	8147	3,03	9399	2,92	15,37
9.	IIIa	33664	12,53	36662	11,39	8,91
10.	IIIb	37693	14,03	60147	18,69	59,57
11.	IIIc	44815	16,68	57616	17,90	28,56
12.	IIId	42852	15,95	52779	16,40	23,17
13.	IVa	56443	21,01	61393	19,07	8,77
14.	IVb	14588	5,43	16159	5,02	10,77
15.	IVc	7803	2,90	8007	2,49	2,61
16.	IVd	2781	1,03	3264	1,01	17,37
17.	IVe	1402	0,52	1601	0,50	14,19
	Total	268706	100	321857	100,00	19,78

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.50 Jumlah PNS Provinsi Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	-	0,00	1	0,00	0,00
2.	Ib	-	0,00	0	0,00	0,00
3.	Ic	1	0,00	0	0,00	0,00
4.	Id	-	0,00	0	0,00	0,00
5.	IIa	191	0,30	159	0,22	-16,75
6.	IIb	652	1,01	642	0,87	-1,53
7.	IIc	1509	2,34	2894	3,93	91,78
8.	IId	2335	3,62	4749	6,45	103,38
9.	IIIa	4467	6,93	5879	7,98	31,61
10.	IIIb	6136	9,52	7436	10,10	21,19
11.	IIIc	7208	11,18	8266	11,23	14,68
12.	IIId	12788	19,84	9365	12,72	-26,77
13.	IVa	25994	40,32	29518	40,09	13,56





Lanjutan Tabel III.50

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
14.	IVb	2186	3,39	3453	4,69	57,96
15.	IVc	710	1,10	817	1,11	15,07
16.	IVd	246	0,38	365	0,50	48,37
17.	IVe	48	0,07	92	0,12	91,67
	Total	64471	100	73636	100,00	14,22

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.51 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	3	0,00	0	0,00	0,00
2.	Ib	-	0,00	2	0,00	0,00
3.	Ic	10	0,00	16	0,00	60,00
4.	Id	14	0,00	23	0,00	64,29
5.	Ila	33994	2,00	9971	0,51	-70,67
6.	Ilb	76373	4,49	57307	2,95	-24,96
7.	Ilc	74442	4,38	130482	6,72	75,28
8.	Ild	51653	3,04	94133	4,85	82,24
9.	IIla	115177	6,77	182715	9,42	58,64
10.	IIlb	161897	9,52	224332	11,56	38,56
11.	IIlc	159113	9,35	193842	9,99	21,83
12.	IIld	255272	15,01	253855	13,08	-0,56
13.	IVa	709462	41,70	711214	36,65	0,25
14.	IVb	60780	3,57	77733	4,01	27,89
15.	IVc	2436	0,14	4027	0,21	65,31
16.	IVd	472	0,03	701	0,04	48,52
17.	IVe	87	0,01	129	0,01	48,28
	Total	1701185	100	1940482	100,00	14,07

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.52 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2009 - 2013

No	Jenjang Peneliti	2009	2010	2011	2012	2013
1	Peneliti Pertama	2098	2020	2055	2191	2611
2	Peneliti Muda	2091	2091	2064	2177	2447
3	Peneliti Madya	2668	2613	2562	2633	2639
4	Peneliti Utama	1029	778	977	1074	1016
	JUMLAH	7886	7502	7658	8075	8713

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014

Tabel III.53 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2009 - 2013

No	Jenjang Peneliti	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Peneliti Pertama	-3,72	1,73	6,62	19,17
2	Peneliti Muda	0,00	-1,29	5,47	12,40
3	Peneliti Madya	-2,06	-1,95	2,77	0,23
4	Peneliti Utama	-24,39	25,58	9,93	-5,40
	JUMLAH	-4,87	2,08	5,45	7,90

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, diolah, 2014

Tabel III.54 Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2009 - 2013

No.	Lembaga	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Universitas	137213	136763	123099	115232	124403
2	Institut	9442	9737	10444	8727	9647
3	Sekolah Tinggi	47116	53221	41697	42328	44373
4	Akademi	22622	21631	19568	16423	17008
5	Politeknik	12388	12038	12699	10234	11210
	Jumlah	228781	233390	207507	192944	206641

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.55 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2009 - 2013

No.	Lembaga	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Universitas	-0,33	-9,99	-6,39	7,96
2	Institut	3,12	7,26	-16,44	10,54
3	Sekolah Tinggi	12,96	-21,65	1,51	4,83
4	Akademi	-4,38	-9,54	-16,07	3,56
5	Politeknik	-2,83	5,49	-19,41	9,54
	Jumlah	2,01	-11,09	-7,02	7,10

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014





Tabel III.56 Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
	Dosen tetap					
1	< S1	824	0	841	0,41	2,06
2	S-1/D4	55686	29	53896	26,08	-3,21
3	S2	84330	44	97300	47,09	15,38
4	S3	16523	9	18191	8,80	10,10
5	Spesialis	2063	1	2463	1,19	19,39
6	Profesi	2201	1	2249	1,09	2,18
	Tidak Tetap	31317	16	31701	15,34	1,23
	Jumlah	192944	100	206641	100,00	7,10

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.57 Rasio Mahasiswa per Dosen (Tenaga Edukatif) Tahun 2012 - 2013

No.	Lembaga	Tahun	
		2011/2012	2012/2013
1.	Universitas	1355	844
2.	Institut	385	360
3.	Sekolah Tinggi	995	926
4.	Akademi	846	610
5.	Politeknik	572	399
	Rata - Rata	899	823

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.58 Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	PNS	44254	58699	53993	47354	25103
2	Non-PNS	189501	218136	213583	227745	188720
	Jumlah	233755	276835	267576	275099	213823

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.59 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	PNS	32,64	-8,02	-12,30	-46,99
2	Non-PNS	15,11	-2,09	6,63	-17,14
	Jumlah	18,43	-3,34	2,81	-22,27

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014





Tabel III.60 Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	PNS	1079243	1106430	1056209	1072735	909350
2	Non-PNS	490083	521554	588716	477541	624641
Jumlah		1569326	1627984	1644925	1550276	1533991

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.61 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	PNS	2,52	-4,54	1,56	-15,23
2	Non-PNS	6,42	12,88	-18,88	30,80
Jumlah		3,74	1,04	-5,75	-1,05

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.62 Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	PNS	335513	343643	346898	358528	360961
2	Non-PNS	293523	293305	210007	155303	191122
Jumlah		629036	636948	556905	513831	552083

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.63 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	PNS	2,42	0,95	3,35	0,68
2	Non-PNS	-0,07	-28,40	-26,05	23,06
Jumlah		1,26	-12,57	-7,73	7,44

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.64 Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No	Status Kepegawaian	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	PNS	149586	161027	162480	166868	153420
2	Non-PNS	164803	166136	102032	69040	98985
Jumlah		314389	327163	264512	235908	252405

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014



Tabel III.65 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 – 2013

No	Status Kepegawaian	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	PNS	7,65	0,90	2,70	-8,06
2	Non-PNS	0,81	-38,59	-32,33	43,37
Jumlah		4,06	-19,15	-10,81	6,99

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.66 Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No	Status Kepegawaian	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	PNS	70955	82782	78000	6188	76817
2	Non-PNS	175063	187619	97656	62994	100039
Jumlah		246018	270401	175656	159182	176856

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.67 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 – 2013

No	Status Kepegawaian	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	PNS	16,67	-5,78	23,32	-20,14
2	Non-PNS	7,17	-47,95	-35,49	58,81
Jumlah		9,91	-35,04	-9,38	11,10

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.68 Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 - 2013

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	PNS	9635	10175	8936	7017	8657
2	Non-PNS	8412	8749	7166	3066	6545
Jumlah		18047	18924	16102	10083	15202

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.69 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2009 – 2013

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	PNS	5,60	-12,18	-21,47	23,37
2	Non-PNS	4,01	-18,09	-57,21	113,47
Jumlah		4,86	-14,91	-37,38	50,77

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014





Tabel III.70 Jumlah Guru TK Menurut Usia Tahun 2012 – 2013

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	76186	27,69	59739	27,9	-21,59
2	31-35	52681	19,15	41014	19,2	-22,15
3	36-40	44452	16,6	34539	16,2	-22,30
4	41-45	47867	17,40	37209	17,4	-22,27
5	46-50	32610	11,85	25173	11,8	-22,81
6	51-55	13785	5,01	10453	4,9	-24,17
7	>=56	7518	2,73	5642	2,6	-24,95
Jumlah		275099	100,00	213823	100,0	-22,27

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.71 Jumlah Guru SD Menurut Usia Tahun 2012 - 2013

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	299413	19	288957	18,84	-3,49
2	31-35	152945	10	211308	13,78	38,16
3	36-40	123372	8	168992	11,02	36,98
4	41-45	249275	16	178973	11,67	-28,20
5	46-50	311457	20	220929	14,40	-29,07
6	51-55	255088	16	249700	16,28	-2,11
7	>=56	158726	10	215132	14,02	35,54
Jumlah		1550276	100	1533991	100,00	-1,05

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.72 Jumlah Guru SMP Menurut Usia Tahun 2012 - 2013

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	69790	14	75292	13,64	7,88
2	31-35	69374	14	74787	13,55	7,80
3	36-40	66392	13	71507	12,95	7,70
4	41-45	101834	20	109347	19,81	7,38
5	46-50	109622	21	117416	21,27	7,11
6	51-55	67730	13	72498	13,13	7,04
7	>=56	29089	6	31236	5,66	7,38
Jumlah		513831	100	552083	100,00	7,44

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014



Tabel III.73 Jumlah Guru SMA Menurut Usia Tahun 2012 - 2013

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	31279	13	32633	12,93	4,33
2	31-35	37033	16	39611	15,69	6,96
3	36-40	35143	15	37640	14,91	7,11
4	41-45	42648	18	46017	18,23	7,90
5	46-50	45374	19	48729	19,31	7,39
6	51-55	29667	13	31912	12,64	7,57
7	>=56	14764	6	15863	6,28	7,44
Jumlah		235908	100	252405	100,00	6,99

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.74 Jumlah Guru SMK Menurut Usia Tahun 2012 - 2013

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	28459	18	31752	17,95	11,57
2	31-35	28851	18	32057	18,13	11,11
3	36-40	25725	16	28602	16,17	11,18
4	41-45	26219	16	29064	16,43	10,85
5	46-50	26320	17	29170	16,49	10,83
6	51-55	16001	10	17752	10,04	10,94
7	>=56	7607	5	8459	4,78	11,20
Jumlah		159182	100	176856	100,00	11,10

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.75 Jumlah Guru SLB Menurut Usia Tahun 2012 - 2013

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	1361	13	1950	12,83	43,28
2	31-35	896	9	1425	9,37	59,04
3	36-40	1190	12	1844	12,13	54,96
4	41-45	2075	21	3205	21,08	54,46
5	46-50	2594	26	3925	25,82	51,31
6	51-55	1347	13	2026	13,33	50,41
7	>=56	620	6	827	5,44	33,39
Jumlah		10083	100	15202	100,00	50,77

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014





Tabel III.76 Jumlah Guru TK Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012 - 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	195968	71	152811	71,47	-22,02
2	>= S1	79131	29	61012	28,53	-22,90
Jumlah		275099	100	213823	100,00	-22,27

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.77 Jumlah Guru SD Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012 - 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	729281	47	539036	35,14	-26,09
2	>= S1	820995	53	994955	64,86	21,19
Jumlah		1.550.276	100	1533991	100,00	-1,05

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.78 Jumlah Guru SMP Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012 - 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	79434	15	84688	15,34	6,61
2	>= S1	434397	85	467395	84,66	7,60
Jumlah		513831	100	552083	100,00	7,44

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.79 Jumlah Guru SMA Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012 - 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	13048	6	16383	6,49	25,56
2	>= S1	222860	94	236022	93,51	5,91
Jumlah		235908	100	252405	100,00	6,99

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.80 Jumlah Guru SMK Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012 - 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	13349	8	18601	10,52	39,34
2	>= S1	145833	92	158255	89,48	8,52
Jumlah		159182	100	176856	100,00	11,10

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014



Tabel III.81 Jumlah Guru SLB Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012 - 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		2011/2012		2012/2013		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	2856	28	5693	37,45	99,33
2	>= S1	7227	72	9509	62,55	31,58
Jumlah		10083	100	15202	100,00	50,77

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.82 Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Laki-laki	7770	9247	8541	8614	5527
2	Perempuan	225985	267588	259035	266485	208296
Jumlah		233755	276835	267576	275099	213823

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.83 Persentase (%) Pertumbuhan (%) Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Laki-laki	19,01	-7,63	0,85	-35,84
2	Perempuan	18,41	-3,20	2,88	-21,84
Jumlah		18,43	-3,34	2,81	-22,27

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.84 Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Laki-laki	635247	1430853	624241	584752	549571
2	Perempuan	934079	197131	1020684	965524	984420
Jumlah		1569326	1627984	1644925	1550276	1533991

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.85 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Laki-laki	125,24	-56,37	-6,33	-6,02
2	Perempuan	-78,90	417,77	-5,40	1,96
Jumlah		3,74	1,04	-5,75	-1,05

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014





Tabel III.86 Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Laki-laki	318628	310338	248832	226305	240455
2	Perempuan	310408	326610	308073	287526	311628
Jumlah		629036	636948	556905	513831	552083

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.87 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Laki-laki	-2,60	-19,82	-9,05	6,25
2	Perempuan	5,22	-5,68	-6,67	8,38
Jumlah		1,26	-12,57	-7,73	7,44

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.88 Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Laki-laki	189200	165457	121930	107581	111518
2	Perempuan	125189	161706	142582	128327	140887
Jumlah		314389	327163	264512	235908	252405

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.89 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Laki-laki	-12,55	-26,31	-11,77	3,66
2	Perempuan	29,17	-11,83	-10,00	9,79
Jumlah		4,06	-19,15	-10,81	6,99

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.90 Jumlah Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Laki-laki	148826	159917	92948	82792	89734
2	Perempuan	97192	110484	82708	7390	87122
Jumlah		246018	270401	175656	159182	176856

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

**Tabel III.91 Persentase (%) Pertumbuhan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013**

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Laki-laki	7,45	-41,88	-10,93	8,38
2	Perempuan	13,68	-25,14	-7,64	14,05
Jumlah		9,91	-35,04	-9,38	11,10

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.92 Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Laki-laki	7008	7618	5326	3462	4527
2	Perempuan	11025	11306	10776	6621	10675
Jumlah		18033	18924	16102	10083	15202

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tabel III.93 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Laki-laki	8,70	-30,09	-35,00	30,76
2	Perempuan	2,55	-4,69	-38,56	61,23
Jumlah		4,94	-14,91	-37,38	50,77

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2014

Tabel III.94 Perkembangan Rasio Siswa Per Guru Tahun 2009 - 2013

No	Perkembangan Rasio	Tahun				
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Siswa Per Guru TK	12	15	15	16	14
2	Siswa Per Guru SD	19	17	18	20	17
3	Siswa Per Guru SMP (termasuk kepala sekolah)	14	15	17	18	16
4	Siswa Per Guru SMA (termasuk kepala sekolah)	12	12	12	18	16
5	Siswa Per Guru SMK (termasuk kepala sekolah)	13	13	13	25	22
6	Siswa Per Guru SLB*				8	5

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

- Untuk Perkembangan Rasio Siswa Per Guru SLB Tahun 2007/2008 sampai 2010/2011 tidak tersedia datanya.





Tabel III.95 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2014

No	SDM Kesehatan	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Dokter spesialis	27333	4	38895	4	38866	4,36
2.	Dokter umum	37364	5	42398	5	42265	4,74
3.	Dokter gigi	11826	2	13114	1	13092	1,47
4.	Perawat	235496	33	296126	33	295508	33,13
5.	Bidan	126276	18	136917	15	136606	15,32
6.	Kefarmasian	31223	4	46764	5	46336	5,20
7.	Tenaga kesehatan lainnya	97904	14	125609	14	125349	14,05
8.	Tenaga Nonnakes	139812	20	194272	22	193875	21,74
	Total	707234	100	894095	100	891897	100,00

Sumber : Profil Kesehatan, diolah, 2014

Tabel III.96 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2014

No	SDM Kesehatan	2012-2013	2013-2014
1.	Dokter spesialis	42,30	-0,07
2.	Dokter umum	13,47	-0,31
3.	Dokter gigi	10,89	-0,17
4.	Perawat	25,75	-0,21
5.	Bidan	8,43	-0,23
6.	Kefarmasian	49,77	-0,92
7.	Tenaga kesehatan lainnya	28,30	-0,21
8.	Tenaga Nonnakes	38,95	-0,20
	Total	26,42	-0,25

Sumber : Profil Kesehatan, diolah, 2014



Tabel III.97 Jumlah Total PNS (Pusat-Daerah) yang Menduduki Jabatan Auditor Tahun 2012-2013

No.	Klasifikasi Auditor	Tahun				Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		2012		2013		
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
Auditor Ahli						
1	Utama	11	0	9	0,09	-18,18
2	Madya	1233	15	1557	15,46	26,28
3	Muda	2553	32	3093	30,70	21,15
4	Pertama	1770	22	2656	26,36	50,06
Auditor Terampil						
1	Penyelia	1110	14	1183	11,74	6,58
2	Pelaksana lanjutan	658	8	717	7,12	8,97
3	Pelaksana	761	9	859	8,53	12,88
Jumlah Total Auditor		8096	100	10074	100,00	24,43

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2014

Tabel III.98 Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2012- 2014

No.	Jenjang	Tahun					
		2012		2013		2014	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	Pemeriksa pertama	3561	68	3416	66	3147	60,89
2	Pemeriksa muda	1393	27	1457	28	1705	32,99
3	Pemeriksa madya	259	5	279	5	311	6,02
4	Pemeriksa utama	7	0,13	7	0,14	5	0,10
Jumlah		5220	100	5159	100	5168	100,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2014

Tabel III.99 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2012 - 2014

No.	Jenjang	Tahun	
		2012-2013	2013-2014
1	Pemeriksa pertama	-4,07	-7,87
2	Pemeriksa muda	4,59	17,02
3	Pemeriksa madya	7,72	11,47
4	Pemeriksa utama	0,00	-28,57
Jumlah Pemeriksa		-1,17	0,17

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2014





Tabel III.100 Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2012 - 2014

No.	Kategori Usia	Tahun					
		2012		2013		2014	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	>30 tahun	1445	28	1443	28%	1278	24,73
2	30 – 40 tahun	2347	45	2332	45%	2453	47,47
3	40 – 50 tahun	947	18	937	18%	985	19,06
4	>50 tahun	481	9	447	9%	452	8,75
Jumlah		5220	100	5159	100%	5168	100,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2014

Tabel III.101 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2012 - 2014

No.	Kategori Usia	Tahun	
		2012-2013	2013-2014
1	>30 tahun	-0,14	-11,43
2	30 – 40 tahun	-0,64	5,19
3	40 – 50 tahun	-1,06	5,12
4	>50 tahun	-7,07	1,12
Jumlah Pemeriksa		-1,17	0,17

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2014

Tabel III.102 Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2014

No.	Kategori Pendidikan	Tahun					
		2012		2013		2014	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	SLTA	206	4	183	4	161	3,12
2	D III	590	11	543	11	495	9,58
3	D IV	74	1	73	1	81	1,57
4	S1	3460	66	3370	65	3442	66,60
5	S2	885	17	983	19	982	19,00
6	S3	5	0,10	7	0,14	7	0,14
Jumlah		5220	100	5159	100	5168	100,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2014



Tabel III.103 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2014

No.	Kategori Pendidikan	Tahun	
		2012-2013	2013-2014
1	SLTA	-11,2	-12,0
2	D III	-8,0	-8,8
3	D IV	-1,4	11,0
4	S1	-2,6	2,1
5	S2	11,1	-0,1
6	S3	40,0	0,0
Jumlah Pemeriksa		-1,2	0,2

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2014

Tabel III.104 Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2014

No.	Kategori	Tahun					
		2012		2013		2014	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	Laki-laki	3114	60	3071	60	3060	59,21
2	Perempuan	2106	40	2088	40	2108	40,79
Jumlah		5220	100	5159	100	5168	100,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2014

Tabel III.105 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2014

No.	Kategori Jenis Kelamin	Tahun	
		2012-2013	2013-2014
1	Laki-laki	-1,38	-0,36
2	Perempuan	-0,85	0,96
Jumlah Pemeriksa		-1,17	0,17

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2014

Tabel III.106 Jumlah Penyidik KPK Tahun 2010 - 2014

No.	Penyidik KPK	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah	77	83	51	75	77
2	Persentase Pertumbuhan		7,79	-38,55	47,06	2,67

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2014





Tabel III.107 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenjang Tahun 2013 - 2014

No.	Jenjang	2013		2014		Pertumbuhan 2013-2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1	Penyidik muda	57	76	59	76,62	3,51
2	Penyidik madya	15	20	15	19,48	0,00
3	Penyidik utama	3	4	3	3,90	0,00
Jumlah		75	100	77	100,00	2,67

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2014

Tabel III.108 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013-2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1	>=S1	70	93	71	92,21	1,43
2	S2	5	7	6	7,79	20,00
Jumlah		75	100	77	100,00	2,67

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2014

Tabel III.109 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenjang	2013		2014		Pertumbuhan 2013-2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1	Laki-laki	69	92	71	92,21	2,90
2	Perempuan	6	8	6	7,79	0,00
Jumlah		75	100	77	100,00	2,67

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2014

Tabel III.110 Jumlah SDM Dittipidkor dan Jajarannya di Seluruh Indonesia Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2013

No.	Pangkat/Golongan	2013	
		Jumlah	%
	Polisi		
1.	Brigjen	1	0,0
2.	Komisaris Besar Polisi (KBP)	6	0,2
3.	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)	45	1,7
4.	Komisaris Polisi (Kopol)	82	3,1
5.	Ajun Komisaris Polisi (AKP)	197	7,5
6.	Inspektur Polisi Tk.I (IPTU)	81	3,1
7.	Inspektur Polisi Tk. II (IPDA)	125	4,7
8.	Bintara (BA)	2076	78,8
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
9.	Golongan IV		
10.	Golongan III	8	0,3
11.	Golongan II	14	0,5
12.	Golongan I	1	0,0
Jumlah		2636	100

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, diolah, 2013





Tabel III.111 Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Jenjang Tahun 2013 - 2014

No.	Jenjang	2013		2014		Pertumbuhan 2013-2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
	PKB Terampil					
1.	Pelaksana pemula	410	2	2117	13,66	416,34
2.	Pelaksana	894	5	3565	23,00	298,77
3.	Pelaksana Lanjutan	1627	9	1563	10,08	-3,93
4.	Penyelia	3300	19	3418	22,05	3,58
	PKB Ahli					
5.	Pertama	4640	27	1577	10,17	-66,01
6.	Muda	4234	24	2106	13,59	-50,26
7.	Madya	2355	13	1156	7,46	-50,91
	Jumlah	17460	100	15502	100,00	-11,21

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2014

Tabel III.112 Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

No.	Pendidikan	2013	
		Jumlah	% Rasio
1.	SMA	8519	49
2.	D1 – D3	2269	13
3.	S1	6346	36
4.	S2	326	2
5.	S3		
	Jumlah	17460	100

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2013

Tabel III.113 Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Jenis Kelamin	2013	
		Jumlah	% Rasio
1.	Laki-Laki	8122	47
2.	Perempuan	9338	53
	Jumlah	17460	100

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2013





Tabel III.114 Jumlah Umum PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Tahun 2012 - 2013

Instansi	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
Pusat	589772	26	519818	29,72	-11,85
Provinsi	223275	10	197836	11,31	-11,39
Kab/Kota	1423997	64	1031431	58,97	-27,57
Total	2237044	100	1749085	100,00	-21,81

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.115 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	2964	0,13	1578	0,1	-47
2.	21 - 25	135675	6,06	40026	2,3	-70
3.	26 - 30	416211	18,61	229668	13,1	-45
4.	31 - 35	429725	19,21	318777	18,2	-26
5.	36 - 40	337430	15,08	280535	16,0	-17
6.	41 - 45	326437	14,59	275466	15,7	-16
7.	46 - 50	321089	14,35	306485	17,5	-5
8.	51 - 55	248096	11,09	270422	15,5	9
9.	56 - 60	19181	0,86	25133	1,4	31
10.	61 - 65	219	0,01	906	0,1	314
11.	65 +	17	0,00	89	0,0	424
	Total	2237044	100	1749085	100,0	-22

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.116 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	2006	0,34	1568	0,30	-21,83
2.	21 - 25	43521	7,38	25900	4,98	-40,49
3.	26 - 30	99676	16,90	79246	15,24	-20,50
4.	31 - 35	99000	16,79	81044	15,59	-18,14
5.	36 - 40	86568	14,68	70289	13,52	-18,80
6.	41 - 45	87971	14,92	79397	15,27	-9,75
7.	46 - 50	90322	15,31	89107	17,14	-1,35
8.	51 - 55	72595	12,31	81151	15,61	11,79
9.	56 - 60	7914	1,34	11282	2,17	42,56
10.	61 - 65	182	0,03	749	0,14	311,54
11.	65 +	17	0,00	85	0,02	400,00
	Total	589772	100	519818	100,00	-11,86

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.117 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	177	0,08	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	7204	3,23	2763	1,40	-61,65
3.	26 - 30	25605	11,47	17276	8,73	-32,53
4.	31 - 35	32850	14,71	29690	15,01	-9,62
5.	36 - 40	30448	13,64	29620	14,97	-2,72
6.	41 - 45	35628	15,96	31888	16,12	-10,50
7.	46 - 50	44597	19,97	40089	20,26	-10,11
8.	51 - 55	43819	19,63	43137	21,80	-1,56
9.	56 - 60	2935	1,31	3319	1,68	13,08
10.	61 - 65	12	0,01	52	0,03	333,33
11.	65 +	-	0,00	2	0,00	0,00
	Total	223275	100	197836	100,00	-11,39

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.118 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No.	Usia	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	781	0,05	10	0,00	-98,72
2.	21 - 25	84950	5,97	11363	1,10	-86,62
3.	26 - 30	290930	20,43	133146	12,91	-54,23
4.	31 - 35	297875	20,92	208043	20,17	-30,16
5.	36 - 40	220414	15,48	180626	17,51	-18,05
6.	41 - 45	202838	14,24	164181	15,92	-19,06
7.	46 - 50	186170	13,07	177289	17,19	-4,77
8.	51 - 55	131682	9,25	146134	14,17	10,97
9.	56 - 60	8332	0,59	10532	1,02	26,40
10.	61 - 65	25	0,00	105	0,01	320,00
11.	65 +	-	0,00	2	0,00	0,00
	Total	1423997	100	1031431	100,00	-27,57

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.119 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	79352	3,55	60184	3,4	-24
2.	SLTP	117418	5,25	92024	5,3	-22
3.	SLTA	949182	42,43	795963	45,5	-16
4.	D1	37018	1,65	21312	1,2	-42
5.	D II	99189	4,43	32931	1,9	-67
6.	D III	262442	11,73	151293	8,6	-42
7.	D IV	12733	0,57	15158	0,9	19
8.	S 1	649368	29,03	530962	30,4	-18
9.	S 2	29776	1,33	48367	2,8	62
10.	S 3	566	0,03	891	0,1	57
	Total	2237044	100	1749085	100,0	-22

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.120 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	14004	2,37	10674	2,05	-23,78
2.	SLTP	22801	3,87	17954	3,45	-21,26
3.	SLTA	246664	41,82	215726	41,50	-12,54
4.	D1	13000	2,20	13395	2,58	3,04
5.	D II	12333	2,09	5128	0,99	-58,42
6.	D III	60174	10,20	50710	9,76	-15,73
7.	D IV	6934	1,18	8952	1,72	29,10
8.	S 1	192672	32,67	171227	32,94	-11,13
9.	S 2	20667	3,50	25291	4,87	22,37
10.	S 3	523	0,09	761	0,15	45,51
	Total	589772	100	519818	100,00	-11,86

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.121 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	7935	3,55	5840	2,95	-26,40
2.	SLTP	10355	4,64	8207	4,15	-20,74
3.	SLTA	108110	48,42	90980	45,99	-15,84
4.	D1	1451	0,65	876	0,44	-39,63
5.	D II	2351	1,05	1533	0,77	-34,79
6.	D III	24665	11,05	15767	7,97	-36,08
7.	D IV	1041	0,47	1802	0,91	73,10
8.	S 1	63935	28,64	66106	33,41	3,40
9.	S 2	3411	1,53	6666	3,37	95,43
10.	S 3	21	0,01	59	0,03	180,95
	Total	223275	100	197836	100,00	-11,39

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014





Tabel III.122 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2012 - 2013

No.	Pendidikan	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	57413	4,03	43670	4,23	-23,94
2.	SLTP	84262	5,92	65863	6,39	-21,84
3.	SLTA	594408	41,74	489257	47,43	-17,69
4.	D1	22567	1,58	7041	0,68	-68,80
5.	D II	84505	5,93	26270	2,55	-68,91
6.	D III	177603	12,47	84816	8,22	-52,24
7.	D IV	4758	0,33	4404	0,43	-7,44
8.	S 1	392761	27,58	293629	28,47	-25,24
9.	S 2	5698	0,40	16410	1,59	188,00
10.	S 3	22	0,00	71	0,01	222,73
	Total	1423997	100	1031431	100,00	-27,57

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.123 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	1297922	58,02	1117046	63,9	-14
2.	Perempuan	939122	41,98	632039	36,1	-33
	Total	2237044	100	1749085	100,0	-22

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.124 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	368122	62,42	334455	64,34	-9,15
2.	Perempuan	221650	37,58	185363	35,66	-16,37
	Total	589772	100	519818	100	-11,86

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014



Tabel III.125 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	138115	61,86	124519	62,94	-9,84
2.	Perempuan	85160	38,14	73317	37,06	-13,91
	Total	223275	100	197836	100,00	-11,39

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.126 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kelamin	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	791685	55,60	658072	63,80	-16,88
2.	Perempuan	632312	44,40	373359	36,20	-40,95
	Total	1423997	100	1031431	100,00	-27,57

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.127 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	16076	0,72	10248	0,6	-36
2.	Ib	17104	0,76	20290	1,2	19
3.	Ic	36634	1,64	22832	1,3	-38
4.	Id	29251	1,31	29618	1,7	1
5.	IIa	334996	14,97	207859	11,9	-38
6.	IIb	318879	14,25	292561	16,7	-8
7.	IIc	259992	11,62	162777	9,3	-37
8.	IId	121751	5,44	91754	5,2	-25
9.	IIIa	507263	22,68	319681	18,3	-37
10.	IIIb	343285	15,35	311544	17,8	-9





Lanjutan Tabel III.127

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
11.	IIIc	139562	6,24	122403	7,0	-12
12.	IIId	83674	3,74	98971	5,7	18
13.	IVa	21802	0,97	34588	2,0	59
14.	IVb	4656	0,21	15866	0,9	241
15.	IVc	1612	0,07	6085	0,3	277
16.	IVd	427	0,02	1581	0,1	270
17.	IVe	80	0,00	427	0,0	434
	Total	2237044	100	1749085	100,0	-22

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.128 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	1396	0,24	649	0,12	-53,51
2.	Ib	2053	0,35	2457	0,47	19,68
3.	Ic	4996	0,85	2293	0,44	-54,10
4.	Id	5892	1,00	5482	1,05	-6,96
5.	IIa	69259	11,74	42659	8,21	-38,41
6.	IIb	57918	9,82	54568	10,50	-5,78
7.	IIc	67258	11,40	60461	11,63	-10,11
8.	IId	40463	6,86	39060	7,51	-3,47
9.	IIIa	143274	24,29	100262	19,29	-30,02
10.	IIIb	120557	20,44	117456	22,60	-2,57
11.	IIIc	40037	6,79	42448	8,17	6,02
12.	IIId	28259	4,79	35011	6,74	23,89
13.	IVa	5800	0,98	8987	1,73	54,95
14.	IVb	1699	0,29	4938	0,95	190,64
15.	IVc	522	0,09	1614	0,31	209,20
16.	IVd	315	0,05	1072	0,21	240,32
17.	IVe	74	0,01	401	0,08	441,89
	Total	589772	100	519818	100,00	-11,86

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014



Tabel III.129 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	1318	0,59	802	0,41	-39,15
2.	Ib	1288	0,58	1645	0,83	27,72
3.	Ic	3507	1,57	1940	0,98	-44,68
4.	Id	2212	0,99	2708	1,37	22,42
5.	IIa	31178	13,96	17589	8,89	-43,59
6.	IIb	19682	8,82	29155	14,74	48,13
7.	IIc	20221	9,06	12758	6,45	-36,91
8.	IId	12060	5,40	8709	4,40	-27,79
9.	IIIa	42041	18,83	33862	17,12	-19,45
10.	IIIb	49023	21,96	45834	23,17	-6,51
11.	IIIc	19139	8,57	17678	8,94	-7,63
12.	IIId	17240	7,72	18068	9,13	4,80
13.	IVa	3318	1,49	4365	2,21	31,56
14.	IVb	731	0,33	1849	0,93	152,94
15.	IVc	237	0,11	564	0,29	137,97
16.	IVd	78	0,03	297	0,15	280,77
17.	IVe	2	0,00	13	0,01	550,00
	Total	223275	100	197836	100,00	-11,39

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.130 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2013

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 - 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	13362	0,94	8797	0,85	-34,16
2.	Ib	13763	0,97	16188	1,57	17,62
3.	Ic	28131	1,98	18599	1,80	-33,88
4.	Id	21147	1,49	21428	2,08	1,33
5.	IIa	234559	16,47	147611	14,31	-37,07
6.	IIb	241279	16,94	208838	20,25	-13,45
7.	IIc	172513	12,11	89558	8,68	-48,09
8.	IId	69228	4,86	43985	4,26	-36,46
9.	IIIa	321948	22,61	185557	17,99	-42,36
10.	IIIb	173705	12,20	148254	14,37	-14,65
11.	IIIc	80386	5,65	62277	6,04	-22,53
12.	IIId	38175	2,68	45892	4,45	20,21
13.	IVa	12684	0,89	21236	2,06	67,42
14.	IVb	2226	0,16	9079	0,88	307,86
15.	IVc	853	0,06	3907	0,38	358,03





Lanjutan Tabel III.130

No.	Gol/ Ruang	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
16.	IVd	34	0,00	212	0,02	523,53
17.	IVe	4	0,00	13	0,00	225,00
	Total	1423997	100	1031431	100,00	-27,57

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

Tabel III.131 Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan Tahun 2010 - 2013

No	Jenis diklat	2010		2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Diklat Prajabatan Gol. I	11896	4	6187	3	486	0	2391	4
2	Diklat Prajabatan Gol. II	132412	48	122177	59	43158	35	15104	25
3	Diklat Prajabatan Gol. III	113070	41	66562	32	50950	41	7489	12
4	Diklatpim Tk. IV	13023	5	7576	4	20530	16	25802	42
5	Diklatpim Tk. III	5902	2	3315	2	7836	6	8977	15
6	Diklatpim tk. II	1501	1	1116	1	1414	1	1170	2
7	Diklatpim Tk. I	30	0	59	0	60	0	105	0
	Jumlah Total	277834	100	206992	100	124434	100	61038	100

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2014

Tabel III.132 Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat Fungsional dan Teknis Tahun 2009 - 2012

No	Jenis diklat	2009		2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Diklat Fungsional	5116	27	4181	26	3631	24	10225	12
2	diklat teknis	13570	73	12020	74	11251	76	77464	88
	Jumlah Total	18686	100	16201	100	14882	100	87689	100

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2013

Tabel III.133 Jumlah Keseluruhan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan yang Sudah Diakreditasi Tahun 2012

No	Program Diklat	Instansi Pusat 2012			Pemda 2012		
		A	B	C	A	B	C
1.	Prajab Gol. I dan II	5	32	3	4	27	2
2.	Prajab Gol. III	9	27	2	4	27	2
3.	Kepemimpinan TK.IV	6	28	2	3	28	2
4.	Kepemimpinan TK.III	7	26	2	4	26	2
5.	Kepemimpinan TK.II				2	1	
	Jumlah Total	27	113	9	17	109	8

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2013





Tabel III.134 Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2011 - 2014

NO.	KLASIFIKASI WI	2011		2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Widyaiswara Pertama									
1.	Gol. III/a	223	9	251	9	269	10	265	9,85
2.	Gol. III/b	174	7	180	7	204	7	215	8,00
Widyaiswara Muda									
3.	Gol. III/c	314	12	319	12	349	13	350	13,02
4.	Gol. III/d	420	16	417	16	431	16	422	15,69
Widyaiswara Madya									
5.	Gol. IV/a	599	23	563	21	512	19	492	18,30
6.	Gol. IV/b	404	15	457	17	500	18	518	19,26
7.	Gol. IV/c	224	9	228	9	236	9	220	8,18
Widyaiswara Utama									
8.	Gol. IV/d	199	8	189	7	185	7	165	6,14
9.	Gol. IV/e	50	2	51	2	48	2	42	1,56
	Total	2607	100	2655	100	2734	100	2689	100

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2014

Tabel III.135 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2011 - 2014

NO.	KLASIFIKASI WI	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Widyaiswara Pertama				
1.	Gol. III/a		12,56	7,17
2.	Gol. III/b		3,45	13,33
Widyaiswara Muda				
3.	Gol. III/c		1,59	9,40
4.	Gol. III/d		-0,71	3,36
Widyaiswara Madya				
5.	Gol. IV/a		-6,01	-9,06
6.	Gol. IV/b		13,12	9,41
7.	Gol. IV/c		1,79	3,51
Widyaiswara Utama				
8.	Gol. IV/d		-5,03	-2,12
9.	Gol. IV/e		2,00	-5,88
	Total		1,84	2,98

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2014





Tabel III.136 Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2011 - 2014

NO.	KLASIFIKASI WI	2011		2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Widyaiswara Pertama									
1.	Gol. III/a	15	2	17	2	20	3	37	4,89
2.	Gol. III/b	38	6	47	7	54	7	66	8,72
Widyaiswara Muda									
3.	Gol. III/c	80	12	84	12	113	16	124	16,38
4.	Gol. III/d	76	11	85	12	101	14	104	13,74
Widyaiswara Madya									
5.	Gol. IV/a	110	16	116	17	121	17	118	15,59
6.	Gol. IV/b	97	14	99	14	108	15	117	15,46
7.	Gol. IV/c	113	16	98	14	85	12	77	10,17
Widyaiswara Utama									
8.	Gol. IV/d	138	20	130	19	107	15	98	12,95
9.	Gol. IV/e	18	3	16	2	16	2	16	2,11
	Total	685	100	692	100	725	100	757	100

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2014

Tabel III.137 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2011 - 2014

NO.	KLASIFIKASI WI	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Widyaiswara Pertama				
1.	Gol. III/a	13,33	17,65	85,00
2.	Gol. III/b	23,68	14,89	22,22
Widyaiswara Muda				
3.	Gol. III/c	5,00	34,52	9,73
4.	Gol. III/d	11,84	18,82	2,97
Widyaiswara Madya				
5.	Gol. IV/a	5,45	4,31	-2,48
6.	Gol. IV/b	2,06	9,09	8,33
7.	Gol. IV/c	-13,27	-13,27	-9,41
Widyaiswara Utama				
8.	Gol. IV/d	-5,80	-17,69	-8,41
9.	Gol. IV/e	-11,11	0,00	0,00
	Total	1,02	4,77	4,41

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2014





Tabel III.138 Gaji Pokok PNS Golongan I Tahun 2012 - 2014

MKG	Golongan I/a			MKG	Golongan I/b		
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
0	1.260.000,-	1.323.000,-	1.402.400,-	0			
1				1			
2	1.297.600,-	1.364.700,-	1.446.500,-	2			
3				3	1.372.700,-	1.444.800,-	1.531.500,-
4	1.336.400,-	1.407.600,-	1.492.100,-	4			
5				5	1.413.700,-	1.490.300,-	1.579.700,-
6	1.376.300,-	1.452.000,-	1.539.100v	6			
7				7	1.455.900,-	1.537.200,-	1.629.500,-
8	1.417.400,-	1.497.700,-	1.587.600,-	8			
9				9	1.499.400,-	1.585.600,-	1.680.800,-
10	1.459.700,-	1.544.900,-	1.637.600,-	10			
11				11	1.544.100,-	1.635.600,-	1.733.700,-
12	1.305.300,-	1.593.500,-	1.689.200,-	12			
13				13	1.590.300,-	1.687.100,-	1.788.300,-
14	1.548.200,-	1.643.700,-	1.742.400,-	14			
15				15	1.637.700,-	1.740.200,-	1.844.700,-
16	1.594.400,-	1.695.500,-	1.797.200,-	16			
17				17	1.686.600,-	1.795.000,-	1.902.700,-
18	1.642.000,-	1.748.900,-	1.853.800,-	18			
19				19	1.737.000,-	1.851.600,-	1.962.700,-
20	1.691.000,-	1.804.000,-	1.912.200,-	20			
21				21	1.788.900,-	1.909.900,-	2.024.500,-
22	1.741.500,-	1.860.800,-	1.972.400,-	22			
23				23	1.842.300,-	1.970.000,-	2.088.300
24	1.793.500,-	1.919.400,-	2.034.600,-	24			
25				25	1.897.300,-	2.032.100,-	2.154.000,-
26	1.847.000,-	1.979.900,-	2.098.600,-	26			
27				27	1.953.900,-	2.096.100,-	2.221.900,-





Lanjutan Tabel III.138

MK G	Golongan I/c			MKG	Golongan I/d		
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
0				0			
1				1			
2				2			
3	1.430.800,-	1.505.900,-	1.596.300,-	3	1.491.300,-	1.569.600,-	1.663.800,-
4				4			
5	1.473.500,-	1.553.300,-	1.646.500,-	5	1.535.800,-	1.619.000,-	1.716.200,-
6				6			
7	1.517.500,-	1.602.300,-	1.698.400,-	7	1.581.700,-	1.670.000,-	1.770.200,-
8				8			
9	1.562.800,-	1.652.700,-	1.751.900,-	9	1.628.900,-	1.722.600,-	1.826.000,-
10				10			
11	1.677.500,-	1.704.800,-	1.807.100,-	11	1.677.500,-	1.776.900,-	1.883.500,-
12				12			
13	1.657.500,-	1.758.500,-	1.864.000,-	13	1.727.600,-	1.832.800,-	1.942.800,-
14				14			
15	1.707.000,-	1.813.800,-	1.922.700,-	15	1.779.200,-	1.890.600,-	2.004.000,-
16				16			
17	1.758.000,-	1.871.000,-	1.983.200,-	17	1.832.300,-	1.950.100,-	2.067.100,-
18				18			
19	1.810.500,-	1.929.900,-	2.045.700,-	19	1.887.000,-	2.011.500,-	2.132.200,-
20				20			
21	1.864.500,-	1.990.700,-	2.110.100,-	21	1.943.400,-	2.074.900,-	2.199.400,-
22				22			
23	1.920.200,-	2.053.400,-	2.176.600,-	23	2.001.400,-	2.140.200,-	2.268.700,-
24				24			
25	1.977.500,-	2.118.100,-	2.245.100,-	25	2.061.200,-	2.207.600,-	2.340.100,-
26				26			
27	2.036.600,-	2.184.800,-	2.315.800,-	27	2.122.700,-	2.277.200,-	2.413.800,-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.



Tabel III.139 Gaji Pokok PNS Golongan II Tahun 2012 - 2014

MKG	Golongan II/a			MKG	Golongan II/b		
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
0	1.624.700,-	1.714.100,-	1.816.900,-	0			
1	1.648.900,-	1.741.100,-	1.845.600,-	1			
2				2			
3	1.698.200,-	1.795.900,-	1.903.700,-	3	1.770.000,-	1.871.900	1.984.200,-
4				4			
5	1.748.900,-	1.852.500,-	1.963.600,-	5	1.822.900,-	1.930.900	2.046.700,-
6				6			
7	1.801.100,-	1.910.800,-	2.025.500,-	7	1.877.300,-	1.991.700	2.111.200,-
8				8			
9	1.854.900,-	1.971.000,-	2.089.300,-	9	1.933.300,-	2.054.400	2.177.700,-
10				10			
11	1.910.300,-	2.033.100,-	2.155.100,-	11	1.991.100,-	2.119.100	2.246.200,-
12				12			
13	1.967.300,-	2.097.100,-	2.223.000,-	13	1.967.300,-	2.185.800	2.317.000,-
14				14			
15	2.026.000,-	2.163.200,-	2.293.000,-	15	2.026.000,-	2.254.700	2.390.000,-
16				16			
17	2.086.500,-	2.231.300,-	2.365.200,-	17	2.174.800,-	2.325.700	2.465.200,-
18				18			
19	2.148.800,-	2.301.600,-	2.439.700,-	19	2.148.800,-	2.398.900	2.542.900,-
20				20			
21	2.213.000,-	2.374.100,-	2.516.500,-	21	2.306.600,-	2.474.500	2.623.000,-
22				22			
23	2.279.100,-	2.448.800,-	2.595.800,-	23	2.375.500,-	2.552.400	2.705.600,-
24				24			
25	2.347.100,-	2.526.000,-	2.677.500,-	25	2.446.400,-	2.632.800	2.790.800,-
26				26			
27	2.417.200,-	2.605.500,-	2.761.900,-	27	2.519.400,-	2.715.700	2.878.700,-
28				28			
29	2.489.400,-	2.687.600,-	2.848.800,-	29	2.594.700,-	2.801.300	2.969.300,-
30				30			
31	2.563.700,-	2.772.200,-	2.938.600,-	31	2.672.100,-	2.889.500	3.062.900,-
32				32			
33	2.640.200,-	2.859.500,-	3.031.100,-	33	2.751.900,-	2.980.500	3.159.300,-





Lanjutan Tabel III.139

MKG	Golongan II/c			MKG	Golongan II/d		
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
0				0			
1				1			
2				2			
3	1.844.900,-	1.951.100,-	2.068.100,-	3	1.922.900,-	2.033.600	2.155.600,-
4				4			
5	1.900.000,-	2.012.500,-	2.133.300,-	5	1.980.300,-	2.097.700	2.223.500,-
6				6			
7	1.956.700,-	2.075.900,-	2.200.500,-	7	2.039.500,-	2.163.700	2.293.500,-
8				8			
9	2.015.100,-	2.141.300,-	2.269.800,-	9	2.100.400,-	2.231.900	2.365.800,-
10				10			
11	2.075.300,-	2.208.700,-	2.341.300,-	11	2.163.100,-	2.302.200	2.440.300,-
12				12			
13	2.137.200,-	2.278.300,-	2.415.000,-	13	2.277.700,-	2.374.700	2.517.200,-
14				14			
15	2.201.100,-	2.350.100,-	2.491.100,-	15	2.294.200,-	2.449.500	2.596.400,-
16				16			
17	2.266.800,-	2.424.100,-	2.569.500,-	17	2.362.700,-	2.526.600	2.678.200,-
18				18			
19	2.334.500,-	2.500.400,-	2.650.400,-	19	2.433.200,-	2.606.200	2.762.600,-
20				20			
21	2.404.200,-	2.579.200,-	2.733.900,-	21	2.505.900,-	2.688.300	2.849.600,-
22				22			
23	2.475.900,-	2.660.400,-	2.820.000,-	23	2.580.700,-	2.772.900	2.939.300,-
24				24			
25	2.549.900,-	2.744.200,-	2.908.800,-	25	2.657.700,-	2.860.300	3.031.900,-
26				26			
27	2.626.000,-	2.830.600,-	3.000.400,-	27	2.737.100,-	2.950.300	3.127.400,-
28				28			
29	2.704.400,-	2.919.800,-	3.094.900,-	29	2.818.800,-	3.013.300	3.225.900,-
30				30			
31	2.765.200,-	3.011.700,-	3.192.400,-	31	2.903.000,-	3.139.100	3.327.500,-
32				32			
33	2.868.300,-	3.106.600,-	3.293.000,-	33	2.989.600,-	3.238.000	3.432.300,-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.





Tabel III.140 Gaji Pokok PNS Golongan III Tahun 2012 - 2014

MKG	Golongan III/a			MKG	Golongan III/b		
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
0	2.064.100,-	2.186.400,-	2.317.600,-	0	2.151.400,-	2.278.900	2.415.600,-
1				1			
2	2.125.700,-	2.255.200,-	2.390.600,-	2	2.215.700,-	2.350.600	2.491.700,-
3				3			
4	2.189.200,-	2.326.300,-	2.465.900,-	4	2.281.800,-	2.424.700	2.678.900,-
5				5			
6	2.245.600,-	2.399.500,-	2.543.500,-	6	2.349.900,-	2.501.000	2.763.300,-
7				7			
8	2.321.900,-	2.475.100,-	2.623.600,-	8	2.420.100,-	2.579.800	2.850.300,-
9				9			
10	2.391.200,-	2.553.100,-	2.706.300,-	10	2.492.400,-	2.661.100	2.940.000,-
11				11			
12	2.462.600,-	2.633.500,-	2.791.500,-	12	2.566.800,-	2.744.900	3.032.600,-
13				13			
14	2.536.100,-	2.716.400,-	2.879.400,-	14	2.643.400,-	2.831.300	3.001.200,-
15				15			
16	2.611.900,-	2.802.000,-	2.970.100,-	16	2.722.300,-	2.920.500	3.095.700,-
17				17			
18	2.689.800,-	2.890.000,-	3.063.600,-	18	2.803.600,-	3.012.500	3.193.200,-
19				19			
20	2.770.100,-	2.981.300,-	3.160.100,-	20	2.887.300,-	3.107.400	3.293.800,-
21				21			
22	2.852.900,-	3.075.100,-	3.259.700,-	22	2.973.500,-	3.205.200	3.397.500,-
23				23			
24	2.938.000,-	3.172.000,-	3.362.300,-	24	3.062.300,-	3.306.200	3.504.500,-
25				25			
26	3.025.800,-	3.271.900,-	3.468.200,-	26	3.153.700,-	3.410.300	3.614.900,-
27				27			
28	3.116.100,-	3.374.900,-	3.577.400,-	28	3.247.900,-	3.517.700	3.728.800,-
29				29			
30	3.209.100,-	3.481.200,-	3.690.100,-	30	2.344.900,-	3.628.500	3.846.200,-
31				31			
32	3.305.000,-	3.590.900,-	3.806.300,-	32	3.444.800,-	3.742.800	3.967.300,-





Lanjutan Tabel III.140

MKG	Golongan III/c			MKG	Golongan III/d		
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
0	2.242.400,-	2.375.300,-	2.517.800,-	0	2.337.300,-	2.475.700	2.624.300,-
1				1			
2	2.309.400,-	2.450.100,-	2.597.100,-	2	2.407.100,-	2.553.700	2.706.900,-
3				3			
4	2.378.300,-	2.527.200,-	2.678.900,-	4	2.478.900,-	2.634.100	2.792.200,-
5				5			
6	2.449.300,-	2.606.800,-	2.763.300,-	6	2.552.900,-	2.717.100	2.880.100,-
7				7			
8	2.522.500,-	2.688.900,-	2.850.300,-	8	2.629.200,-	2.802.700	2.970.800,-
9				9			
10	2.597.800,-	2.773.600,-	2.940.000,-	10	2.707.700,-	2.891.000	3.064.400,-
11				11			
12	2.675.300,-	2.861.000,-	3.032.600,-	12	2.788.500,-	2.982.000	3.160.900,-
13				13			
14	2.755.200,-	2.951.100,-	3.128.200,-	14	2.871.800,-	3.075.900	3.260.500,-
15				15			
16	2.837.500,-	3.044.000,-	3.226.700,-	16	2.957.500,-	3.172.800	3.363.200,-
17				17			
18	2.922.200,-	3.139.900,-	3.328.300,-	18	3.045.800,-	3.272.700	3.469.100,-
19				19			
20	3.009.500,-	3.238.800,-	3.433.100,-	20	3.136.800,-	3.375.800	3.578.400,-
21				21			
22	3.099.300,-	3.340.800,-	3.541.300,-	22	3.230.400,-	3.482.100	3.691.100,-
23				23			
24	3.191.900,-	3.446.000,-	3.652.800,-	24	3.326.900,-	3.591.800	3.807.300,-
25				25			
26	3.287.200,-	3.554.600,-	3.767.800,-	26	3.426.200,-	3.704.900	3.927.200,-
27				27			
28	3.385.300,-	3.666.500,-	3.886.500,-	28	3.528.500,-	3.821.600	4.050.900,-
29				29			
30	3.486.400,-	3.782.000,-	4.008.900,-	30	3.633.800,-	3.942.000	4.178.500,-
31				31			
32	3.590.500,-	3.901.100,-	4.135.200,-	32	3.742.300,-	4.066.100	4.310.100,-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.



Tabel III.141 Gaji Pokok PNS Golongan IV Tahun 2012 - 2014

MKG	Golongan IV/a			Golongan IV/b		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	2.436.100,-	2.580.500,-	2.735.300,-	2.539.200,-	2.689.600,-	2.851.000,-
1						
2	2.508.900,-	2.661.700,-	2.821.400,-	2.615.000,-	2.774.300,-	2.940.800,-
3						
4	2.583.800,-	2.745.600,-	2.910.300,-	2.693.100,-	2.861.700,-	3.033.400,-
5						
6	2.660.900,-	2.832.000,-	3.002.000,-	2.773.500,-	2.951.800,-	3.128.900,-
7						
8	2.740.400,-	2.921.200,-	3.096.500,-	2.856.300,-	3.044.800,-	3.227.500,-
9						
10	2.822.200,-	3.013.200,-	3.194.000,-	2.941.600,-	3.140.700,-	3.329.100,-
11						
12	2.906.500,-	3.108.100,-	3.294.600,-	3.029.400,-	3.239.600,-	3.434.000,-
13						
14	2.993.200,-	3.206.000,-	3.398.400,-	3.119.900,-	3.341.700,-	3.542.200,-
15						
16	3.082.600,-	3.307.000,-	3.505.400,-	3.213.000,-	3.446.900,-	3.653.700,-
17						
18	3.174.700,-	3.411.200,-	3.615.800,-	3.308.900,-	3.555.500,-	3.768.800,-
19						
20	3.269.400,-	3.518.600,-	3.729.700,-	3.407.700,-	3.667.400,-	3.887.500,-
21						
22	3.367.100,-	3.629.400,-	3.847.200,-	3.509.500,-	3.782.900,-	4.009.900,-
23						
24	3.467.600,-	3.743.700,-	3.968.300,-	3.614.300,-	3.902.100,-	4.136.200,-
25						
26	3.571.100,-	3.861.600,-	4.093.300,-	3.722.200,-	4.025.000,-	4.266.500,-
27						
28	3.677.800,-	3.983.300,-	4.222.300,-	3.833.300,-	4.151.700,-	4.400.900,-
29						
30	3.787.600,-	4.108.700,-	4.355.200,-	3.947.800,-	4.282.500,-	4.539.500,-
31						
32	3.900.600,-	4.238.100,-	4.492.400,-	4.065.600,-	4.417.400,-	4.682.400,-





Lanjutan Tabel III.141

MKG	Golongan IV/c			Golongan IV/d		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	2.646.600,-	2.803.400,-	2.971.600,-	2.758.500,-	2.922.000,-	3.097.300,-
1						
2	2.725.600,-	2.891.700,-	3.065.200,-	2.840.900,-	3.014.000,-	3.194.800,-
3						
4	2.807.000,-	2.982.800,-	3.161.700,-	2.925.700,-	3.108.900,-	3.295.500,-
5						
6	2.890.800,-	3.076.700,-	3.261.300,-	3.013.100,-	3.206.800,-	3.399.300,-
7						
8	2.977.100,-	3.173.600,-	3.364.000,-	3.103.100,-	3.307.800,-	3.506.300,-
9						
10	3.066.000,-	3.273.600,-	3.470.000,-	3.195.700,-	3.412.000,-	3.616.700,-
11						
12	3.157.600,-	3.376.700,-	3.579.300,-	3.291.100,-	3.519.500,-	3.730.700,-
13						
14	3.251.800,-	3.483.000,-	3.692.000,-	3.389.400,-	3.630.300,-	3.848.200,-
15						
16	3.348.900,-	3.592.700,-	3.808.300,-	3.490.600,-	3.744.700,-	3.969.400,-
17						
18	3.448.900,-	3.705.900,-	3.928.200,-	3.594.800,-	3.862.600,-	4.094.400,-
19						
20	3.551.900,-	3.822.600,-	4.051.900,-	3.702.100,-	3.984.300,-	4.223.300,-
21						
22	3.657.900,-	3.943.000,-	4.179.500,-	3.812.700,-	4.109.700,-	4.356.300,-
23						
24	3.767.200,-	4.067.100,-	4.311.200,-	3.926.500,-	4.239.200,-	4.493.500,-
25						
26	3.879.600,-	4.195.200,-	4.447.000,-	4.043.700,-	4.372.700	4.635.100,-
27						
28	3.995.500,-	4.327.400,-	4.587.000,-	4.164.500,-	4.510.400,-	4.781.000,-
29						
30	4.114.800,-	4.463.700,-	4.731.500,-	4.288.800,-	4.652.500,-	4.931.600,-
31						
32	4.237.600,-	4.604.200,-	4.880.500,-	4.416.900,-	4.799.000,-	5.086.900,-



Lanjutan Tabel III.141

MKG	Golongan IV/e		
	2012	2013	2014
0	2.875.200,-	3.045.600,-	3.228.300,-
1			
2	2.961.100,-	3.141.500,-	3.330.000,-
3			
4	3.049.500,-	3.240.400,-	3.434.900,-
5			
6	3.140.500,-	3.342.500,-	3.543.000,-
7			
8	3.234.300,-	3.447.800,-	3.654.600,-
9			
10	3.330.900,-	3.556.400,-	3.769.700,-
11			
12	3.430.300,-	3.668.400,-	3.888.500,-
13			
14	3.532.800,-	3.783.900,-	4.010.900,-
15			
16	3.638.200,-	3.903.100,-	4.137.300,-
17			
18	3.746.900,-	4.026.000,-	4.267.600,-
19			
20	3.858.700,-	4.152.800,-	4.402.000,-
21			
22	3.973.900,-	4.283.600,-	4.540.600,-
23			
24	4.092.600,-	4.418.500,-	4.683.600,-
25			
26	4.214.800,-	4.557.700,-	4.831.100,-
27			
28	4.340.600,-	4.701.200,-	4.983.300,-
29			
30	4.470.200,-	4.849.300,-	5.140.200,-
31			
32	4.603.700,-	5.002.000,-	5.302.100,-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.





Tabel III.142 Tunjangan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Tunjangan Jabatan PNS		
		Keppres No.99/2000	Perpres No.3/2006	Perpres No.26/2007
1.	Eselon IA	4.500.000,-	4.500.000,-	5.500.000,-
2.	Eselon IB	3.500.000,-	3.500.000,-	4.375.000,-
3.	Eselon IIA	2.500.000,-	2.500.000,-	3.250.000,-
4.	Eselon IIB	1.500.000,-	1.500.000,-	2.025.000,-
5.	Eselon IIIA	600.000,-	900.000,-	1.260.000,-
6.	Eselon IIIB	450.000,-	675.000,-	980.000,-
7.	Eselon IVA	240.000,-	360.000,-	540.000,-
8.	Eselon IVB	210.000,-	315.000,-	490.000,-
9.	Eselon VA	150.000,-	225.000,-	360.000,-

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.143 Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2013

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
1.	Peneliti	Rp.5.200.000,-	Rp. 1.100.000,-	No. 100 Tahun 2012
2.	Widyaiswara	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 59 Tahun 2007
3.	Perawat	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
4.	Pengawas Ketenagakerjaan	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 51 Tahun 2007
5.	Pengamat Meteorologi Dan Geofisika	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 56 Tahun 2007
6.	Penyuluh Kehutanan	A.Rp. 1.260.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 360.000,-	No. 19 Tahun 2013
7.	Pranata Hubungan Masyarakat	A.Rp. 650.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 29 Tahun 2007
8.	Pekerja Sosial	A.Rp. 790.000,- T.Rp. 525.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 61 Tahun 2007
9.	Teknisi Penerbangan	Rp.500.000,-	Rp. 260.000,-	No. 69 Tahun 2007
10.	Penguji Mutu Barang	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 70 Tahun 2007
11.	Jaksa	Rp.2.500.000,-	Rp. 600.000,-	No. 158 Tahun 2000
12.	Pemeriksa Bea Dan Cukai	A.Rp. 1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007
13.	Pranata Komputer	A.Rp. 1.200.000,- T.Rp. 425.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 39 Tahun 2007
14.	Teknisi Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
15.	Andalan Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
16.	Adikara Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.143

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
17.	Polisi Kehutanan	A.Rp. 1.380.000,- T.Rp. 840.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 18 Tahun 2013
18.	Instruktur	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 58 Tahun 2007
19.	Pranata Nuklir	A.Rp. 1.400.000,- T.Rp. 450.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 55 Tahun 2007
20.	Pengawas Radiasi	A.Rp. 1.400.000,- T.Rp. 450.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 57 Tahun 2007
21.	Agen (BIN)	A.Rp. 1.100.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 48 Tahun 2007
22.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Rp.450.000,-	Rp. 220.000,-	No. 31 Tahun 2007
23.	Arsiparis	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 46 Tahun 2007
24.	Statisi	A.Rp. 900.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 40 Tahun 2007
25.	Penera	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 70 Tahun 2007
26.	Pengendali Ekosistem Hutan	A.Rp. 600.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 34 Tahun 2007
27.	Operator Transmisi Sandi	A.Rp. 957.000,- T.Rp. 495.000,-	A.Rp. 264.000,- T.Rp. 197.000,-	No. 105 Tahun 2006
28.	Sandiman	Rp.1.500.000,-	Rp. 300.000,-	No. 79 Tahun 2008
29.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	A.Rp.5.000.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 60 Tahun 2007
30.	Perekayasa	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 31Tahun 2007
31.	Pemeriksa Paten	Rp.1.100.000,-	Rp. 300.000,-	No. 41 Tahun 2007
32.	Pemeriksa Merek	A.Rp.900.000,- T.Rp. 525.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 41 Tahun 2007
33.	Pemeriksa Pajak	A.Rp.1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007
34.	Guru	Rp. 389.000,-	Rp. 286.000,-	No. 108 Tahun 2007
35.	Penggerak Swadaya Masyarakat	A.Rp.500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 63 Tahun 2007
36.	Auditor	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 425.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 66 Tahun 2007
37.	Pengawas Sekolah	Rp. 725.000,-	Rp. 485.000,-	No. 108 Tahun 2007
38.	Pengamat Gunung Api	A.Rp.400.000,- T.Rp. 260.000,-	A.Rp. 260.000,- T.Rp. 230.000,-	No. 67 Tahun 2007
39.	Dokter	Rp.1.230.000,-	Rp. 278.000,-	No. 54 Tahun 2007
40.	Dokter Gigi	Rp.1.230.000,-	Rp. 278.000,-	No. 54 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.143

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
41.	Diplomat	Rp.1.400.000,-	Rp. 400.000,-	No. 54 Tahun 2007
42.	Pustakawan	A.Rp.700.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 47 Tahun 2007
43.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	A.Rp.1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007
44.	Penyuluh KB	A.Rp.500.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 64 Tahun 2007
45.	Penyuluh Pertanian	A.Rp.1.500.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
46.	Pamong Belajar	Rp. 345.000,-	Rp. 225.000,-	No. 108 Tahun 2007
47.	Dosen	A.Rp.1.350.000,- T.Rp. 5.500.000,-	A.Rp. 375.000,- T.Rp. 1.350.000,-	No. 65 Tahun 2007
48.	Penyuluh Agama	A.Rp.500.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 50 Tahun 2007
49.	Analisis Kepegawaian	A.Rp.1.080.000,- T.Rp. 600.000,-	A.Rp. 480.000,- T.Rp. 330.000,-	No. 17 Tahun 2013
50.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	A.Rp.660.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
51.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	A.Rp.1.140.000,- T.Rp. 660.000,-	A.Rp. 510.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
52.	Pengawas Benih Tanaman	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
53.	Pengawas Benih Ikan/Perikanan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
54.	Medik Veteriner	Rp.1.560.000,-	Rp. 540.000,-	No. 16 Tahun 2013
55.	Paramedik Veteriner	Rp.810.000,-	Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
56.	Pengawas Bibit Ternak	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 360.000,-	No. 16 Tahun 2013
57.	Pamong Budaya	A.Rp.530.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 74 Tahun 2007
58.	Penyelidik Bumi	Rp.1.200.000,-	Rp. 300.000,-	No. 38 Tahun 2007
59.	Teknik Pengairan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
60.	Teknik Jalan dan Jembatan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
61.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
62.	Teknik Penyehatan Lingkungan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.143

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
63.	Pengawas Perikanan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
64.	Pengawas Farmasi dan Makanan	A.Rp.1.400.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 260.000,-	No. 52 Tahun 2007
65.	Apoteker	Rp.1.230.000,-	Rp. 278.000,-	No. 54 Tahun 2007
66.	Asisten Apoteker	Rp.440.000,-	Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
67.	Pranata Laboratorium Kesehatan	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
68.	Pengantar Kerja	A.Rp.500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 62 Tahun 2007
69.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007
70.	Epidemiolog Kesehatan	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
71.	Entomolog Kesehatan	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
72.	Sanitarian	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
73.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 43 Tahun 2007
74.	Administrator Kesehatan	Rp.715.000,-	Rp. 253.000,-	No. 54 Tahun 2007
75.	Perencana	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 44 Tahun 2007
76.	Perawat Gigi	Rp.440.000,-	Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
77.	Nutrisionis	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007
78.	Bidan	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 9 Tahun 2010
79.	Penilik	Rp.345.000,-	Rp.225.000,-	No. 108 Tahun 2007
80.	Inspektur Ketenagalistrikan	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
81.	Inspektur Tambang	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
82.	Inspektur Minyak dan Gas	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
83.	Pengendali Dampak Lingkungan	A.Rp.975.000,- T.Rp. 400.000,-	A.Rp. 310.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 35 Tahun 2007
84.	Radiografer	Rp.440.000,-	Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.143

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
85.	Surveyor Pemetaan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 37 Tahun 2007
86.	Perekam Medis	Rp.440.000,-	Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007
87.	Teknisi Elektromedis	Rp.440.000,-	Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007
88.	Penguji Kendaraan Bermotor	Rp.440.000,-	Rp.200.000,-	No. 107 Tahun 2006
89.	Fisioterapis	A.Rp850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
90.	Pengawas Mutu Pakan	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
91.	Penghulu	Rp.500.000,-	Rp. 260.000,-	No. 73 Tahun 2007
92.	Pengendali Frekuensi Radio			No. 33 Tahun 2008
93.	Refraksionis Optisien	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
94.	Terapis Wicara	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
95.	Ortotis Prostetis	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
96.	Okupasi Terapis	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
97.	Penyuluh Pajak			
98.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	A.Rp.1.175.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 39 Tahun 2009
99.	Penerjemah	Rp.1.300.000,-	Rp. 375.000,-	No. 73 Tahun 2007
100.	Teknisi Transfusi Darah	Rp. 500.000,-	Rp. 220.000,-	No. 34 Tahun 2008
101.	Teknisi Gigi	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
102.	Penata Ruang	Rp.1.260.000,-	Rp. 540.000,-	No. 20 Tahun 2013
103.	Penyuluh Sosial	Rp.700.000,-	Rp. 300.000,-	No. 11 Tahun 2009
104.	Psikolog Klinis	Rp.850.000,-	Rp. 300.000,-	No. 42 Tahun 2009
105.	Fisikawan Medis	Rp.850.000,-	Rp. 300.000,-	No. 42 Tahun 2009
106.	Dokter Pendidik Klinis	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 42 Tahun 2009
107.	Penyuluh Perikanan	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 61 Tahun 2010
108.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Rp.1.320.000,-	Rp. 540.000,-	No. 22 Tahun 2013
109.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Rp.900.000-	Rp. 300.000,-	No. 4 Tahun 2012

Lanjutan Tabel III.143

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
110.	Pranata Laboratorium Pendidikan	A.Rp.1.260.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 360.000,-	No. 21 Tahun 2013
111.	Jurusita	A.Rp.285.000,- T.Rp. 245.000,-	A.Rp. 250.000,- T.Rp. 215.000,-	No. 25 Tahun 2007
112.	Pranata Hubungan Industrial	Rp.500.000,-	Rp. 270.000,-	No. 42 Tahun 2007
113.	Petugas pemasyarakatan	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 72 Tahun 2007
114.	Perekasaya	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 31 Tahun 2007
115.	Kataloger			
116.	Mediator Hubungan Industrial	N/A	N/A	N/A
117.	Pengawas Keselamatan Pelayaran	N/A	N/A	N/A
118.	Analisis Kebijakan	N/A	N/A	N/A
119.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	N/A	N/A	N/A
120.	Assesor	N/A	N/A	N/A
121.	Auditor Kepegawaian	N/A	N/A	N/A
122.	Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	N/A	N/A	N/A
123.	Pembimbing Kesehatan Kerja	N/A	N/A	N/A

Sumber : Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu, diolah, 2013



Tabel III.144 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2011 - 2013

No	Jenis Kepesertaan	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PNS aktif	11661743	70,7	11769536	71,13	11169847	69,22
2.	Penerimaan pensiun PNS	3042573	18,5	3010500	18,20	3341358	20,71
3.	Penerimaan pensiun TNI/POLRI	942172	6	1146284	6,93	1128790	6,99
4.	Veteran/perintis kemerdekaan	582790	3,5	570983	3,45	452306	2,80
5.	PTT (dokter/bidan)	41313	0,25	43379	0,26	39622	0,25
6.	Jamkesmen	2763	0,02	2873	0,02	2765	0,02
7.	Jamkestama	2483	0,02	1867	0,01	2445	0,02
	Jumlah	16275837	100	16545422	100,00	16137133	100,00

Sumber : BPJS Kesehatan, 2014

Tabel III.145 Persentase (%) Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan PNS Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2011 - 2013

No.	Jenis Kepesertaan	2011-2012	2012-2013
1.	PNS aktif	0,92	-5,10
2.	Penerimaan pensiun PNS	-1,05	10,99
3.	Penerimaan pensiun TNI/POLRI	21,66	-1,53
4.	Veteran/perintis kemerdekaan	-2,03	-20,78
5.	PTT (dokter/bidan)	5,00	-8,66
6.	Jamkesmen	3,98	-3,76
7.	Jamkestama	-24,81	30,96
	Jumlah	1,66	-2,47

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah, 2014





Tabel III.146 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2011 - 2013

No	Jenis Kepesertaan	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Golongan I	926519	5,6	917020	5,99	766660	4,75
2.	Golongan II	4776021	28,9	4803037	31,35	4282818	26,54
3.	Golongan III	7198795	43,6	6559144	42,82	6961033	43,14
4.	Golongan IV	3580996	21,7	3040366	19,85	4126622	25,57
	Jumlah	16482331	100	15319567	100	16137133	100,00

Sumber : BPJS Kesehatan, 2014

Tabel III.147 Persentase (%) Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan PNS Menurut Golongan Kepegawaian 2011 - 2013

No.	Jenis Kepesertaan	2011-2012	2012-2013
1.	Golongan I	-1,03	-16,40
2.	Golongan II	0,57	-10,83
3.	Golongan III	-8,89	6,13
4.	Golongan IV	-15,10	35,73
	Jumlah	-7,05	5,34

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah, 2014

Tabel III.148 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 - 2013

No	Kelompok Umur	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	0-4	421796	2,57	429343	2,66	1,79
2.	5-9	734897	4,48	758112	4,70	3,16
3.	10-14	908526	5,54	926022	5,74	1,93
4.	15-19	1200469	7,33	1166842	7,23	-2,80
5.	20-24	1315190	8,03	1131529	7,01	-13,96
6.	25-29	515647	3,15	453263	2,81	-12,10
7.	30-34	880114	5,37	873319	5,41	-0,77
8.	35-39	945435	5,77	952497	5,90	0,75
9.	40-44	1247245	7,61	1161870	7,20	-6,85
10.	45-49	1578682	9,63	1532562	9,50	-2,92
11.	50-54	1582975	9,66	1617014	10,02	2,15
12.	55-59	1249798	7,63	1295578	8,03	3,66
13.	60-64	980968	5,99	1022394	6,34	4,22





Lanjutan Tabel III.148

No.	Kelompok Umur	2012		2013		Pertumbuhan 2012 – 2013 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
14.	65-69	749167	4,57	768161	4,76	2,54
15.	70-74	878480	5,36	812137	5,03	-7,55
16.	75-79	470252	2,87	496179	3,07	5,51
17.	80-84	400590	2,44	376059	2,33	-6,12
18.	>85	326043	1,99	364252	2,26	11,72
	Jumlah	16386274	100,00	16137133	100,00	-1,52

Sumber : BPJS Kesehatan, 2014

Tabel III.149 Jumlah Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2011 - 2013

No.	Kelompok Pensiun	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	1.710.719.286.964	43	1.867.776.496.400	42	1.982.515.673.306	39
2.	Pejabat negara	9.878.118.729	0	9.546.104.600	0	9.681.685.465	0
3.	ABRI	302.282.977.025	8	300.936.204.100	7	298.845.506.846	6
4.	Veteran/ dahor	161.530.171.172	4	162.196.750.100	4	164.795.761.800	3
5.	PKRI/KNIP	1.643.755.035	0	1.663.623.200	0	1.627.089.100	0
6.	Sipil daerah	1.781.204.939.633	45	2.107.479.238.900	47	2.659.349.359.224	52
	JUMLAH	3.967.259.248.558	100	4.449.598.417.300	100	5.116.815.075.741	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2014

Tabel III.150 Persentase (%) Pertumbuhan Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2011 - 2013

No.	Kelompok Pensiun	2011-2012	2012-2013
1.	Sipil pusat	9,18	6,14
2.	Pejabat negara	-3,36	1,42
3.	ABRI	-0,45	-0,69
4.	Veteran/ dahor	0,41	1,60
5.	PKRI/KNIP	1,21	-2,20
6.	Sipil daerah	18,32	26,19
	JUMLAH	12,16	14,99

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2014



Tabel III.151 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2011 - 2013

No	Kelompok Pensiun	2011		2012		2013	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	Sipil pusat	987862	43	1001029	42	964752	39,85
2	Pejabat negara	5491	0	5507	0	5510	0,23
3	ABRI	229648	10	217157	9	203611	8,41
4	Veteran/dahor	178069	8	170206	7	161931	6,69
5	PKRI/KNIP	1152	0	1068	0	979	0,04
6	Sipil Daerah	888979	39	963686	41	1084333	44,79
	JUMLAH	2291201	100	2358653	100	2421116	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2014

Tabel III.152 Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2011 - 2013

No.	Kelompok Pensiun	2011-2012	2012-2013
1.	Sipil pusat	1,33	-3,62
2.	Pejabat negara	0,29	0,05
3.	ABRI	-5,44	-6,24
4.	Veteran/ dahor	-4,42	-4,86
5.	PKRI/KNIP	-7,29	-8,33
6.	Sipil daerah	8,40	12,52
	JUMLAH	2,94	2,65

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2014

Tabel III.153 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2013

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2011		2012		2013	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	1	121607	5	113262	4,8	104615	4,32
		2	274811	12	283668	12,0	256956	10,61
		3	371840	16	377757	16,0	370988	15,32
		4	219604	10	226342	9,6	232193	9,59
2.	Pejabat negara	4	5491	0	5507	0,2	5510	0,23
3.	ABRI	1	44363	2	41981	1,8	39312	1,62
		2	151070	7	143132	6,1	134516	5,56
		3	20644	1	19277	0,8	17781	0,73
		4	13571	1	12767	0,5	12002	0,50
4.	Veteran/ dahor	1	16029	1	170206	7,2	14605	0,60
		2	7869	0	0		6663	0,28
		3	24909	1	0		21260	0,88
		4	129262	6	0		119403	4,93





Lanjutan Tabel III.153

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2011		2012		2013	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
5.	PKRI/KNIP	1	1152	0	1068	0,05	979	0,04
		2	0		0		0	0,00
		3	0		0		0	0,00
		4	0		0		0	0,00
6.	Sipil daerah	1	53019	2	50485	2,1	48171	1,99
		2	230707	10	225793	9,57	251803	10,40
		3	269039	12	289957	12,2	319834	13,21
		4	336214	15	397451	16,8	464525	19,19
	Total		2291201	100	2358653	100,0	2421116	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2014

Tabel III.154 Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2013

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2011-2012	2012-2013
1.	Sipil pusat	1	-6,86	-7,63
		2	3,22	-9,42
		3	1,59	-1,79
		4	3,07	2,59
2.	Pejabat negara	4	0,29	0,05
3.	ABRI	1	-5,37	-6,36
		2	-5,25	-6,02
		3	-6,62	-7,76
		4	-5,92	-5,99
4.	Veteran/ dahor	1	961,86	-91,42
		2	0,00	0,00
		3	0,00	0,00
		4	0,00	0,00
5.	PKRI/KNIP	1	-7,29	-8,33
		2	0,00	0,00
		3	0,00	0,00
		4	0,00	0,00
6.	Sipil daerah	1	-4,78	-4,58
		2	-2,13	11,52
		3	7,78	10,30
		4	18,21	16,88

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2014





Tabel III.155 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013

No.	Kelompok Pensiun	Jenis Kelamin	2011		2012		2013	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	L	455598	20	463655	20	435114	18
		P	532264	23	537374	23	529638	22
2.	Pejabat negara	L	3353	0,1	3349	0,1	3327	0
		P	2138	0,1	2158	0,1	2183	0
3.	ABRI	L	67581	3	60208	3	53317	2
		P	162067	7	156949	7	150294	6
4.	PKRI/KNIP	L	273	0,01	243	0,01	215	0
		P	879	0,04	825	0,03	764	0
5.	Veteran/ dahor	L	83772	4	79256	3	74775	3
		P	94297	4	90950	4	87156	4
6.	Sipil daerah	L	505553	22	539540	23	608211	25
		P	383426	17	424146	18	476122	20
Total			2291201	100	2358653	100	2421116	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2014

Tabel III.156 Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013

No.	Kelompok Pensiun	Jenis Kelamin	2011-2012	2012-2013
1.	Sipil pusat	L	1,77	-6,16
		P	0,96	-1,44
2.	Pejabat negara	L	-0,12	-0,66
		P	0,94	1,16
3.	ABRI	L	-10,91	-11,45
		P	-3,16	-4,24
4.	PKRI/KNIP	L	-10,99	-11,52
		P	-6,14	-7,39
5.	Veteran/ dahor	L	-5,39	-5,65
		P	-3,55	-4,17
6.	Sipil daerah	L	6,72	12,73
		P	10,62	12,25
Total			2,94	2,65

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2014





BAGIAN IV

KEUANGAN PEMERINTAH

Bagian ini menyajikan data keuangan pemerintah. Aspek keuangan memang bukan merupakan dimensi yang terkait langsung dengan aparatur. Namun, aspek keuangan sangat mempengaruhi kinerja aparatur, sehingga banyak data mengenai keuangan yang juga harus disajikan untuk dapat melengkapi analisis mengenai aparatur dan kinerjanya. Data mengenai keuangan yang ditampilkan dalam bagian ini diantaranya adalah data mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara; alokasi belanja negara untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; anggaran belanja negara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi; anggaran pendapatan dan belanja daerah; pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan alokasi belanja pemerintah daerah.

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sub bagian pertama dalam bagian ini menampilkan data anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.1. Tabel tersebut menunjukkan data APBN antara tahun 2011 sampai tahun 2014. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pendapatan negara dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 sekitar 1.104 miliar rupiah menjadi sekitar 1.662 miliar rupiah pada tahun 2014. Demikian pula untuk belanja negara. Belanja negara dari tahun 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.229 miliar rupiah pada tahun 2011 menjadi 1.816 miliar rupiah pada tahun 2014.

B. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Sub bagian berikutnya menampilkan data alokasi Belanja Negara untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Data anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dipilih karena ketiga sektor tersebut merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komponen anggaran pendidikan mencakup 3 (tiga) hal diantaranya Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Untuk Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dan Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Sedangkan, untuk Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional) cukup bervariasi di setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, data mengenai alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan disajikan pada Tabel IV.2.

Sementara itu, tabel IV.3 memuat informasi mengenai Alokasi Belanja Negara pada Sektor Kesehatan baik yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat maupun melalui transfer daerah. Untuk Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat, pada tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami kenaikan realisasi di setiap tahunnya, yaitu 38,5 Triliun Rupiah pada tahun 2011 menjadi 66,5 Triliun rupiah pada tahun 2014.

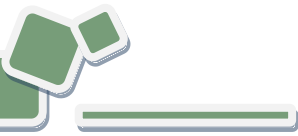
Tabel berikutnya berisi informasi mengenai data alokasi Belanja Negara dalam hal infrastruktur, dimana Kementerian Negara/Lembaga menjadi penyumbang terbesar dalam pemakaian belanja Negara bila dibandingkan dengan total pemakaian belanja Negara untuk Non Kementerian/Lembaga. Berdasarkan data pada tahun 2011 hingga tahun 2014, dari 14 (empat belas) Kementerian Pekerjaan Umum menempati urutan pertama dalam hal penggunaan alokasi belanja Negara untuk sektor infrastruktur. Meskipun demikian, baik Kementerian Negara/ Lembaga Non Kementerian Negara/Lembaga cukup fluktuatif dalam penggunaan Belanja Negara di sektor infrastruktur, kadang mengalami peningkatan ataupun penurunan untuk masing-masing instansi. Untuk lebih lengkapnya, pada Tabel IV.4. disajikan data Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur secara lebih terinci.

C. Alokasi Belanja Negara untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sub Bagian ini menampilkan data mengenai alokasi belanja Negara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Data ini ditampilkan karena korupsi saat ini merupakan salah satu masalah bangsa yang harus diselesaikan. Selain itu, penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, perlu disajikan sejumlah data terkait upaya pemberantasan korupsi, termasuk anggarannya sebagai bahan analisis untuk pengambilan kebijakan terkait pemberantasan korupsi. Saat ini ada dua lembaga Negara yang diberi kewenangan terkait upaya pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dengan demikian, disajikan data anggaran pemberantasan korupsi dari dua lembaga tersebut pada tabel IV.5 sampai tabel IV.7. Dari data yang ditampilkan terlihat bahwa antara tahun 2011 sampai 2013 anggaran di kedua lembaga ini meningkat. Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 naik sekitar 39% dari anggaran tahun 2012 Sementara anggaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada tahun 2014 turun sekitar 51% dari tahun 2013.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Data berikutnya yang disajikan adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012 -2014 yang ditampilkan dalam Tabel IV.8 sampai Tabel IV.11. Tabel IV.8 dan tabel IV.9 menunjukkan data jumlah dan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi, sementara tabel IV.10 dan tabel IV.11 menampilkan data jumlah dan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota. Dilihat dari data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 total Anggaran Pendapatan dan Belanja seluruh Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Total APBD Provinsi tahun 2014 naik sebesar 24% dari tahun 2013 dan Total APBD



Kabupaten/Kota tahun 2014 naik sebesar 8% dari tahun 2013. Dengan adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah ini diharapkan juga adanya peningkatan dalam hal ketersediaan fasilitas publik dan kualitas pelayanan publik.

E. Pendapatan Asli Daerah

Sub bagian berikutnya menampilkan data Jumlah Pemerintah daerah berdasarkan persentase Kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan. Dalam penyajian data, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar Kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tahun 2012 hingga tahun 2014 terlihat bahwa sebagian besar PAD pemerintah daerah Provinsi/kabupaten/kota memberikan Kontribusi yang kecil terhadap total keseluruhan pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut. Pada tahun 2014, ada sebanyak 456 kab/kota yang memiliki kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapan. Hal ini menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota belum mampu untuk mengoptimalkan potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, dilihat dari Total PAD Pemerintah Provinsi maupun PAD Pemerintah Kabupaten/Kota, dari tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan kenaikan jumlah PAD yang cukup signifikan. Total PAD Pemerintah Provinsi pada tahun 2014 naik sekitar 29% dari tahun 2013, dan Total PAD Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2014 naik sekitar 22% dari tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.16 dan table IV.17.

F. Dana Perimbangan

Setelah menampilkan data mengenai kategorisasi pemerintah daerah berdasarkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada bagian sebelumnya, berikut disajikan data mengenai kategorisasi pemerintah daerah berdasarkan rasio dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) terhadap total pendapatan daerah. Data ini dapat membantu menjelaskan sejauhmana ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Tabel IV.18 sampai tabel IV.21 menunjukkan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase kontribusi DAU terhadap Anggaran Pendapatan dan pada tabel IV.22 menunjukkan total alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Daerah baik DAU Provinsi maupun DAU Kabupaten/Kota. Dalam penyajian data, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DAU terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tabel IV.18 dan tabel IV.20 dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2014 Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi besar, yaitu antara

50%-75% dari pendapatan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2014, ada sebanyak 376 kab/kota yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% terhadap anggaran pendapatan, meningkat 3,58% dari tahun 2013 yang sebanyak 363 kab/kota. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota belum mandiri karena masih tergantung dari dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Tabel IV.24 sampai tabel IV.28 berikut menampilkan data mengenai Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase kontribusi DAK terhadap Anggaran Pendapatan dan total jumlah alokasi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Daerah baik DAK Provinsi maupun DAK Kabupaten/Kota. Sama seperti dalam menampilkan data mengenai DAU, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tabel IV.24 dan tabel IV.26 terlihat bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan daerah tidak besar, anggaran pendapatan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota hanya disumbang kurang dari 50% dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tidak ada perubahan trend jumlah pemerintah provinsi/kab/kota berdasarkan kategori kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan.

Tabel berikutnya, yaitu tabel IV.30 sampai tabel IV.34 menunjukkan kontribusi dana bagi hasil (DBH) bagi anggaran pendapatan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. Sama seperti dalam menampilkan data mengenai DAU dan DAK, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DBH terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DBH antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan.

Tabel IV.30 dan tabel IV.33 menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) hanya menyumbang kurang dari 25% dari anggaran pendapatan sebagian besar pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pada tahun 2014, sebanyak 28 provinsi memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan dan 434 kab/kota memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana transfer yang memberikan kontribusi tinggi bagi anggaran pendapatan pemerintah daerah.



G. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah

Data pada sub bagian ini menjelaskan alokasi belanja pemerintah daerah untuk belanja pegawai; belanja sektor pendidikan; belanja sektor kesehatan dan belanja sektor infrastruktur. Dalam menyajikan data mengenai alokasi belanja pemerintah daerah, juga dirumuskan beberapa kategorisasi untuk melihat perbandingan antara belanja pemda untuk belanja pegawai, belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur dengan total belanja pemerintah daerah.

Sementara itu, Untuk melihat belanja pegawai pemda dirumuskan tiga kategori, yaitu pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai lebih dari 75% dari total anggaran belanja; pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai antara 50%-75% dari total anggaran belanja; dan kategori pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai kurang dari 50% dari total anggaran belanja. Sementara itu, untuk melihat belanja sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dirumuskan dua kategori, yaitu pemerintah daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan/ kesehatan/ infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari total anggaran belanja; dan pemerintah daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan/ kesehatan/ infrastruktur kurang dari 20% dari total anggaran belanja.

Tabel IV.36 sampai tabel IV.41 menunjukkan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase Anggaran Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja serta Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota. Bila dilihat dari total dana belanja pegawai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota antara tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, total dana belanja pegawai pemerintah provinsi naik sekitar 10% dari tahun 2013. Dan total dana belanja pegawai pemerintah kab/kota naik sekitar 5% dari tahun 2013. Sementara itu, dilihat dari tabel IV.36 dan tabel IV.38 tampak bahwa antara tahun 2012 - 2014 belanja pegawai dari sebagian besar pemerintah provinsi dibawah 50% dari total belanja daerah, dan belanja pegawai dari sebagian besar pemerintah kabupaten/kota antara 50% - 75% dari total belanja daerah. Pada tahun 2014, tidak ada perubahan signifikan dalam kategorisasi jumlah pemda kab/kota berdasarkan persentase belanja pegawai terhadap anggaran belanja. Tidak ada lagi Kabupaten/Kota yang memiliki Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja.



Tabel IV.1 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 – 2014 (dalam Miliar Rupiah)

Rincian/Description	2011	2012	2013	2014
Pendapatan dan hibah/revenue and grants	1 104 902	1 311387	1529673	1662500
Penerimaan dalam negeri/domestic revenue	1 101 162	1310562	1525189	1661100
Penerimaan pajak/tax revenue	850 255	1032570	1192994	1310200
Pajak dalam negeri/ domestic taxes	827 246	989637	1134289	1256300
Pajak perdagangan internasional/internasional trade taxes	23 009	42933	58705	53900
Penerimaan Bukan Pajak/Non Tax Revenue	250 907	277992	332195	350900
Penerimaan sumber daya alam/natural resources revenue	163 119	177264	197205	198000
Bagian Laba BUMN/Profit Transfer from SOE	27 590	28001	33500	37000
Penerimaan bukan pajak lainnya/other non-tax revenue	45 167	53492	77991	91100
Pendapatan badan layanan umum (BLU)	15 031	19235	23499	24800
Hibah / grants	3 740	825	4484	1400
Pengeluaran / expenditures	1 229 558	1435407	1683011	1816700
Pengeluaran pemerintah pusat/central government expenditures	836 578	964997	1154381	1230300
Belanja pegawai/personel expenditures	180 825	215862	241606	276700
Belanja barang/material expenditures	137 850	188002	200735	203700
Belanja modal/capital expenditures	135 854	151975	184364	205800
Pembayaran bunga utang/interest payments subsidi	115 209	122217	113244	119500
Subsidi/subsidies	187 624	208850	317219	336300
Subsidi BBM/Oil subsidy	136 614	168560	274743	284718
Subsidi non BBM/Non-Oil subsidy	51 010	40290	42476	51582
Belanja hibah/grants	771	1797	3621	3500
Bantuan social/social expenditures	63 184	47764	73609	55900
Belanja lainnya/Other expenditures	15 261	28530	19983	28900
Pengeluaran untuk daerah/Expenditure for regions	392 980	470410	528630	586400
Dana perimbangan/Balance funds	334 324	399986	444798	481800
Dana bagi hasil/revenue sharing	83 558	100055	101962	107400
Dana alokasi umum/general allocation funds	225 533	273815	311139	341400
Dana alokasi khusus/Specific allocation funds	25 233	26116	31697	33000



Lanjutan Tabel IV.1

Rincian/description	2011	2012	2013	2014*
Dana otonomi khusus dan penyeimbang/ <i>Special automous region and balancing funds</i>	58 656	70424	83832	104600
Keseimbangan Primer/Primary Balance	-9 447	-1802	-40094	34700
Surplus/Defisit anggaran/Overall balance	-124 656	-124020	-153338	-154200
Pembiayaan bersih/Financing Net	124 656	124020	153338	154200
Pembiayaan dalam negeri/Domestic financing	125 266	125912	172792	173200
Perbankan dalam negeri/ <i>Domestic bank financing</i>	12 657	8947	14307	4300
Nonperbankan dalam negeri/ <i>domestic non-banking financing</i>	112 609	116965	158485	168900
Pembiayaan Luar Negeri/Foreign financing	-610	-1892	-19454	-19000
Pinjaman bruto luar negeri/ <i>Gross drawing</i>	58 933	54282	45919	43200
Penerusan pinjaman/ <i>subsidiary loan agreement</i>	-11 725	-8914	-6968	-5300
Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri/ <i>Amortizations</i>	-47 818	-47260	-58405	-56900

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

*Angka RAPBN



Tabel IV.2 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan Tahun 2011 – 2014 (dalam Triliun Rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat	105,4	117,2	126,2	130,3
2. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah	159,0	186,6	214,1	238,6
a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	0,9	1,0	0,9	1,0
b. DAK Pendidikan	10,0	10,0	11,1	10,0
c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	104,3	113,9	128,1	135,6
d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3,7	2,9	2,4	1,9
e. Tunjangan Profesi Guru	18,5	30,6	43,1	60,5
f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	2,7	3,3	3,7	4,1
g. Dana Insentif Daerah	1,4	1,4	1,4	1,4
h. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	-	-	-	-
i. Bantuan Operasional Sekolah	16,8	23,6	23,4	24,1
j. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Pendidikan	0,6	-	-	--
3. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan	2,6	7,0	5,0	-
4. Anggaran pendidikan (1+2+3)	266,9	310,8	345,3	368,9
5. Total belanja negara	1.320,8	1.548,3	1.726,2	1.842,5
Rasio anggaran pendidikan (4:5) x 100%	20,2	20,1	20,0	20,0

Sumber : Kementerian Keuangan, 2014



Tabel IV.3 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Kesehatan Tahun 2011 – 2014 (dalam Triliun Rupiah)

Komponen Anggaran Kesehatan	2011	2012	2013	2014
	REAL	REAL	APBNP	APBN
1. Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat	38,5	42,3	54,1	66,5
A. Melalui K/L	36,3	39,7	51,0	61,6
68 Kementerian Kesehatan	26,9	28,7	36,6	46,5
63 Badan POM	0,8	1,1	1,2	1,1
68 BKKBN	2,4	2,2	2,6	2,9
K/L Lainnya	6,3	7,7	10,7	11,1
B. Melalui Non K/L	2,3	2,6	3,1	4,9
1. Subsidi untuk air bersih				
2. Askes PNS (belanja pegawai)	2,3	2,6	3,0	4,8
2. Anggaran kesehatan melalui transfer daerah	3,8	3,8	3,9	4,0
1. DAK Kesehatan	2,9	3,0	3,1	3,1
2. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus	0,8	0,8	0,8	0,9
3. Total anggaran kesehatan	42,3	46,1	58,0	70,5
4. Total belanja negara	1.320,8	1.548,3	1.726,2	1.842,5
Rasio anggaran kesehatan (3:4) x100%	3,3	3,1	3,4	3,8

Sumber : Kementerian Keuangan, 2014



Tabel IV.4 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur Tahun 2011 – 2014 (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	2014
	REAL	REAL	APBNP	APBN
1. K/L	91,2	122,6	153,6	172,6
033 KEMEN PU	41,8	56,5	66,7	72,4
022 KEMENHUB	16,0	25,3	30,7	31,5
020 KEMEN ESDM	6,2	6,7	13,8	11,5
023 KEMENDIKBUD	8,2	8,4	8,8	10,7
K/L Lainnya	19,0	25,8	33,6	46,5
2. Non K/L	23,0	22,8	30,7	34,0
a. Resiko Kenaikan Harga Tanah (land capping)	0,4	0,3	0,5	0,3
b. Uni Perencanaan Pembangunan Prov. Papua dan Papua Barat	-	-	1,0	-
c. Pemetaan dan Pembangunan Shelter Daerah Rawan Bencana	-	-	1,0	-
d. Penyelesaian Pembangunan Perumahan Warga Baru NTT	-	-	0,9	-
e. Cadangan VGF	-	-	0,3	1,1
f. Belanja Hibah	-	-	2,3	3,5
g. Dana Alokasi Khusus	6,1	6,3	10,9	12,4
h. Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur	1,4	1,0	1,0	2,5
i. Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur	4,6	6,0	3,7	3,0
j. Dana Kontijensi PLN	-	-	0,6	1,0
k. Penyertaan Modal Negara	3,5	5,0	4,0	3,0
l. LPDB KUKM	0,3	0,6	1,0	1,0
3. Anggaran Infrastruktur	114,2	145,5	184,3	206,6
4. Total Belanja Negara	1.320,8	1.548,3	1.726,2	1.842,5
Rasio anggaran infrastruktur (3:4) x100%	8,6	9,4	10,5	11,2

Sumber : Kementerian Keuangan, 2014



Tabel IV.5 Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 – 2013

No.	Unit	2011		2012		2013	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Penindakan	13.436.007.908	5	20.330.373.611	6	26.777.599.330	6
2.	Pencegahan	23.153.313.020	8	33.895.906.560	10	25.265.045.453	5
3.	INDA	38.332.733.130	13	48.110.046.038	14	69.471.555.629	15
4.	PIPM	2.992.808.186	1	2.296.253.903	1	2.266.461.586	0,5
5.	Setjen	218.282.764.314	74	231.927.718.776	69	344.054.411.384	74
	Total	296.197.626.558	100	336.560.298.888	100	467.835.073.382	100

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2014

Catatan :

Inda : Informasi dan Data

PIPM : Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Persentase (%) yang dimaksudkan di atas adalah % anggaran setiap unit terhadap total anggaran yang dimiliki oleh KPK.

Tabel IV.6 Persentase (%) Pertumbuhan Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 - 2013

No.	Unit	2011-2012	2012-2013
1.	Penindakan	51,31	31,71
2.	Pencegahan	46,40	-25,46
3.	INDA	25,51	44,40
4.	PIPM	-23,27	-1,30
5.	Setjen	6,25	48,35
	Total	13,63	39,00

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2014

Catatan :

Inda : Informasi dan Data

PIPM : Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Tabel IV.7 Anggaran Lidik-Sidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun 2011 – 2014 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Kategori	2011	2012	2013	2014
1.	Total Anggaran	1,356	14,378	7,235	4,785
2.	Pertumbuhan (%)		960	-50	-51

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, 2014



Tabel IV.8 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2012 – 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total Anggaran	2012	2013	2014
1.	Pendapatan	162.757.943,8	198.011.520,0	245.811.132
2.	Belanja	174.016.403,9	212.918.920,7	257.876.380

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.9 Persentase (%) Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2012 – 2014

No	Total Anggaran	2012-2013	2013-2014
1.	Pendapatan	22	24
2.	Belanja	22	21

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.10 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total Anggaran	2012	2013	2014
1.	Pendapatan	414.701.201	485.552.562	523.311.878
2.	Belanja	443.358.982	524.762.020	570.389.888

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.11 Persentase (%) Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014

No	Total Anggaran	2012-2013	2013-2014
1.	Pendapatan	17	8
2.	Belanja	18	9

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.12 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi PAD	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	8	24	9	27	8	24
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	15	45	15	45	17	50
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	10	30	9	27	9	26
	Tidak ada Data PAD						
	Jumlah	33	100	33	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.13 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi PAD	2012-2013	2013-2014
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	12,50	-11,11
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	0	13,33
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	-10,0	0
	Tidak ada Data PAD	0.00	0.00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.14 Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi PAD	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	479	98	474	97	456	90
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	10	2	16	3	22	4,5
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	2	0	1	0,2	2	0,5
	Tidak ada data PAD					25	5
	Jumlah	491	100	491	100	505	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.15 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi PAD	2012-2013	2013-2014
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	-1,04	-3,80
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	60	37,50
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	-50	100
	Tidak ada Data PAD	0,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.16 Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total PAD	2012	2013	2014
1.	PAD Provinsi	75.070.594	92.449.998	118.977.123
2.	PAD Kabupaten/Kota	37.458.350	47.878.219	58.522.076

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.17 Persentase (%) Pertumbuhan Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014

No.	Total PAD	2012-2013	2013-2014
1.	PAD Provinsi	23	29
2.	PAD Kabupaten/Kota	28	22

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.18 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DAU	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0	6	18	6	18
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	33	100	27	82	28	82
	Tidak ada Data DAU						
	Jumlah	33	100	33	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.19 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DAU	2012-2013	2013-2014
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	-18,18	3,70
	Tidak ada Data DAU	0,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.20 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DAU	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	80	16	63	13	38	8
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	353	72	363	74	376	74
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	58	12	64	13	68	13
	Tidak ada data DAU			1	0	23	5
	Jumlah	491	100	491	100	505	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.21 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DAU	2012-2013	2013-2014
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	-21,25	-39,68
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	2,83	3,58
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	10,34	6,25
	Tidak ada Data DAU	0,00	2200,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.22 Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DAU	2012	2013	2014
1.	DAU Provinsi	27.052.242	30.960.353	34.121.947
2.	DAU Kabupaten/ Kota	246.257.685	289.864.359	294.249.763

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.23 Persentase (%) Pertumbuhan Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014

No.	Total DAU	2012-2013	2013-2014
1.	DAU Provinsi	14	10
2.	DAU Kabupaten/ Kota	18	2

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.24 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DAK	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	33	100	33	100	33	97
	Tidak ada data DAK					1	3
	Jumlah	33	100	33	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.25 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DAK	2012-2013	2013-2014
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	0	0
	Tidak ada Data DAK	0,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.26 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DAK	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	486	99	481	98	471	93
	Tidak ada data DAK	5	1	10	2	34	7
	Jumlah	491	100	491	100	505	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.27 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DAK	2012-2013	2013-2014
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0,00	0,00
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0,00	0,00
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	-1,03	-2,08
	Tidak ada Data DAK	100,00	240,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.28 Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DAK	2012	2013	2014
1.	DAK Provinsi	1.335.813	1.821.376	1.868.494
2.	DAK Kabupaten/ Kota	24.602.958	29.559.812	30.500.149

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.29 Persentase (%) Pertumbuhan Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014

No.	Total DAK	2012-2013	2013-2014
1.	DAK Provinsi	36	3
2.	DAK Kabupaten/ Kota	20	3

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.30 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DBH	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	0	0	8	24	2	6
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	5	15	2	6	4	12
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	28	85	23	70	28	82
	Tidak ada Data DBH						
	Jumlah	33	100	33	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.31 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DBH	2012-2013	2013-2014
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	0,00	-75,00
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	-60,00	100,00
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	-17,86	21,74
	Tidak ada Data DBH	0,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.32 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DBH	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	15	3	67	14	14	3
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	37	8	30	6	34	7
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	438	89	392	80	434	86
	Tidak ada Data DBH	1	0	2	0	23	4
	Jumlah	491	100	491	100	505	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.33 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Kontribusi DBH	2012-2013	2013-2014
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	346,67	-79,10
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	-18,92	13,33
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	-10,50	10,71
	Tidak ada Data DBH	0,00	1050,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.34 Total Dana Bagi Hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DBH	2012	2013	2014
1.	DBH Provinsi	25.781.660	44.850.478	42.630.900
2.	DBH Kabupaten/Kota	56.102.460	99.208.376	58.137.201

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.35 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014

No.	Total DBH	2012-2013	2013-2014
1.	DBH Provinsi	74	-5
2.	DBH Kabupaten/Kota	77	-41

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.36 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja Pegawai	2012		2013		2014	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0	0	0	0	0
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	0	0	0	0	0	0
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	33	100	33	100	34	100
	Tidak ada Data Belanja Pegawai						
	Jumlah	33	100	33	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.37 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja Pegawai	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	0	0
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	0	3,03
	Tidak ada Data Belanja Pegawai	0	0

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.38 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja Pegawai	2012		2013		2014	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	1	0	0	0	0	0
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	305	62	276	56	250	49
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	185	38	215	44	232	46
	Tidak ada Data Belanja Pegawai					23	5
	Jumlah	491	100	491	100	505	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.39 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja Pegawai	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	-100,00	0,00
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	-9,51	-9,42
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	16,22	7,91
	Tidak ada Data Belanja Pegawai	0,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.40 Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Total Belanja Pegawai	2012	2013	2014
1.	Belanja Pegawai Provinsi	35.522.392	39.019.039.81	42.909.078
2.	Belanja Pegawai Kabupaten / Kota	225.835.150.06	257.798.873.2	269.761.391

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.41 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Total Belanja Pegawai	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja Pegawai Provinsi	10	10
2.	Belanja Pegawai Kabupaten / Kota	14	5

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.42 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2012		2013		2014	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	1	3	1	3	0	0
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	32	97	32	97	32	94
	Tidak ada Data Belanja Pendidikan					2	6
	Jumlah	33	100	33	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.43 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	0,0	-100,00
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	0,0	0,0
	Tidak ada Data Belanja Pendidikan	0,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.44 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2012		2013		2014	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	425	86	423	86	391	78
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	62	13	68	14	62	12
	Tidak ada Data Belanja Pendidikan	4	1			52	10
	Jumlah	491	100	491	100	505	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.45 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	-0,47	-7,57
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	9,68	-8,82
	Tidak ada Data Belanja Pendidikan	-100,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.46 Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014

No	Total Belanja Sektor Pendidikan	2012	2013	2014
1.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi	15.855.881,82	18.644.391,12	7.520.347,05
2.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten/ Kota	154.368.108,18	175.778.032,3	185.811.424,01

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.47 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014

No	Total Belanja Sektor Pendidikan	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi	18	-60
2.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten/ Kota	14	6

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.48 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2012		2013		2014	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	0	0	0	0	1	3
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	33	100	33	100	31	91
	Tidak ada Data Belanja Kesehatan					2	6
	Jumlah	33	100	33	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.49 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	0	0,00
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	0,00	-6,06
	Tidak ada Data Belanja Kesehatan	0,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.50 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2012		2013		2014	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	6	1	5	1	3	1
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	481	98	486	99	450	89
	Tidak ada Data Belanja Kesehatan	4	1			52	10
	Jumlah	491	100	491	100	505	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.51 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2012-2013	2013-2014
1.	belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	-16,67	-40,00
2.	belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	1,04	-7,41
	Tidak ada Data Belanja Kesehatan	-100,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.52 Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014

No	Total Belanja Sektor Kesehatan	2012	2013	2014
1.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Provinsi	14.155.893,77	17.512.928,42	14.567.657,90
2.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Kabupaten/ Kota	41.944.815,43	51.388.353,8	58.888.413,39

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.53 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014

No	Total Belanja Sektor Kesehatan	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Provinsi	24	-17
2.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Kabupaten/ Kota	23	15

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.54 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	6	18,2	10	30	10	29
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	27	81,8	23	70	22	65
	Tidak ada Data Belanja Infrastruktur					2	6
	Jumlah	33	100	33	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.55 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	66,67	0,00
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	-14,81	-4,35
	Tidak ada Data Belanja Infrastruktur	0,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



Tabel IV.56 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	84	17	121	24,6	144	29
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	403	82	370	75,4	309	67
	Tidak ada Data Belanja Infrastruktur	4	1			52	4
	Jumlah	491	100	491	100	505	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.57 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2012 – 2014

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	44,05	19,01
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	-8,19	-8,65
	Tidak ada Data Belanja Infrastruktur	-100,00	0,00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.58 Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014

No	Total Belanja Sektor Infrastruktur	2012	2013	2014
1.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Provinsi	26.190.879	32.770.774,27	28.010.994,06
2.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/ Kota	64.400.934	92.269.679,81	103.818.150,30

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014

Tabel IV.59 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2012 – 2014

No	Total Belanja Sektor Infrastruktur	2012-2013	2013-2014
1.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Provinsi	25	-15
2.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/ Kota	43	13

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2014



BAGIAN V

KINERJA APARATUR / BIROKRASI

Bagian ini menyajikan data mengenai kinerja aparatur/birokrasi yang dilihat dari beberapa indikator, baik indikator nasional maupun indikator internasional. Untuk indikator kinerja aparatur/birokrasi dalam skala nasional adalah opini BPK terhadap Laporan Keuangan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; Hasil Penilaian LAKIP oleh Kemenpan; Integritas Sektor Publik; dan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk indikator kinerja aparatur/birokrasi dalam skala internasional adalah Peringkat *Doing Business*; Indeks Persepsi Korupsi; Peringkat *E-government* dan Peringkat dan Nilai *Human Development Index*.

A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Instansi

Tabel V.1 sampai tabel V.5 menyajikan data kualifikasi hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Opini tertinggi BPK yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari tahun 2010–2012, terjadi peningkatan jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP dari BPK dan semakin menurunnya jumlah K/L yang mendapatkan opini WDP bahkan TMP. Hal ini menunjukkan semakin baiknya hasil laporan keuangan pemerintah pusat.

Peningkatan jumlah lembaga pemerintah yang memperoleh opini WTP bukan saja terjadi pada lembaga pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Jika pada tahun 2010 terdapat 34 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, pada tahun 2012 terdapat 120 (23%) pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP. Opini WTP merupakan prestasi tertinggi dalam penilaian kualitas laporan keuangan instansi, walaupun bukan berarti lembaga atau pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini yang baik bebas dari penyimpangan.

B. Kualifikasi Penilaian LAKIP oleh Kemenpan

Penilaian LAKIP oleh Kemenpan merupakan salah satu indikator kinerja aparatur. Subbagian ini menampilkan data Penilaian LAKIP lembaga pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2011. Untuk kualifikasi hasil penilaian Kemenpan terhadap LAKIP pemerintah pusat tahun 2011 dapat dilihat dari tabel V.6 dan untuk kualifikasi hasil penilaian Kemenpan terhadap LAKIP pemerintah daerah tahun 2011 dapat dilihat dari tabel V.7 sampai table V.9 Pada tahun 2011, Kemenpan memberikan nilai A



untuk 2 K/L, nilai B untuk 17 K/L, nilai CC untuk 49 K/L, dan nilai C untuk 14 k/L. Sementara itu, untuk LAKIP pemerintah daerah, Kemenpan memberikan nilai dari B untuk 2 Provinsi dan 1 kota; nilai CC untuk 17 Provinsi, 14 kabupaten dan 7 kota; nilai C untuk 11 Provinsi 73 kabupaten dan 20 kota; dan nilai D untuk 53 kabupaten dan 12 kota.

Dari data yang ada, tidak satupun institusi pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah yang mendapatkan nilai AA. Bahkan di Daerah, tidak satupun institusi pemerintah yang mendapatkan nilai A. hal ini tentu harus menjadi kajian serius mengingat LAKIP merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap apa yang telah dilakukannya.

C. Integritas Sektor Publik

Integritas sektor publik merupakan survey yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur persepsi masyarakat tentang pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Adapun responden dalam survey ini adalah para pengguna layanan langsung dari layanan yang disediakan oleh instansi tersebut. Skala penilaian dimulai dari 1 sampai dengan 10, dimana semakin mendekati 10, maka semakin baik integritas sektor publik. Integritas Sektor Publik Tingkat nasional pada Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat dari 3 kategori yaitu variabel pengalaman integritas, variabel potensi integritas dan indeks integritas nasional (IIN). Data mengenai kategori tersebut dapat dilihat pada tabel V.10. Dari data tersebut terlihat bahwa indeks integritas nasional (IIN) dari tahun 2008 sampai 2012 nilainya fluktuatif berkisar antara nilai 5-6. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden pengguna layanan, integritas sektor publik nasional Indonesia masih kurang baik dan perlu untuk ditingkatkan.

D. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja sesuai dengan amanah dari PP Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten /kota dalam wilayah provinsi dan juga pemerintahan propinsi. Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD. EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja aparatur, terutama aparatur pemerintah daerah.

Aspek penilaian EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksanaan kebijaksanaan daerah. Pada tataran pengambil kebijakan, aspek penilaiannya adalah : ketentraman dan ketertiban umum daerah; keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;



efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD; efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah; transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah; efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD; Pengelolaan potensi daerah; terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara tataran pengambil kebijakan, aspek penilaiannya adalah : kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; tingkat capaian SPM; penataan kelembagaan daerah; pengelolaan kepegawaian daerah; Perencanaan pembangunan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan barang milik daerah; dan Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat. Pada tabel V.11 ditampilkan data mengenai peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah kota tahun 2012 dan 2013.

E. Peringkat *Doing Business* Indonesia dan Negara ASEAN

Doing Business report merupakan laporan yang menyediakan penilaian objektif mengenai regulasi berusaha yang berdampak pada kemudahan berusaha di negara-negara yang disurveinya. Selain itu, laporan ini dapat menjadi pedoman untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, membuat perbandingan antar negara dan mengidentifikasi reformasi yang telah dilakukan. Pada tabel V.12. disajikan peringkat *Doing Business* di Indonesia dan negara ASEAN lain sebagai perbandingan. Pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat 126, sementara pada tahun 2012, peringkat *Doing Business* Indonesia turun menjadi 129. Pada tahun 2013, peringkat *Doing Business* Indonesia naik sedikit menjadi 128. Dan pada tahun 2014, peringkat *Doing Business* Indonesia kembali naik menjadi 120.

F. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN

Indeks persepsi korupsi merupakan pengukuran terhadap tingkat korupsi di suatu negara yang dilakukan secara berkala oleh lembaga Transparency International. Indeks ini merupakan indeks gabungan, sebuah hasil polling dari berbagai polling, kumpulan pendapat ahli terkait dengan korupsi dan survei bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan terkemuka. Indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia, termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara yang dievaluasi.

Tabel V.14 menampilkan skor Indeks persepsi korupsi Indonesia dan negara ASEAN, sementara pada tabel V.15. ditampilkan data mengenai peringkat Indeks persepsi korupsi Indonesia dan Negara ASEAN sebagai perbandingan. Dari tabel





tersebut terlihat bahwa tahun 2010, Indonesia memperoleh skor 2,8 dengan peringkat 110. Sementara pada tahun 2012, Indonesia memperoleh skor 3,2 dengan peringkat 118. Dan pada tahun 2013, peringkat IPK Indonesia naik menjadi 114.

Selain menampilkan data *outcomes* yang berupa pengukuran indeks persepsi korupsi, sub bagian ini juga menampilkan data *output* (hasil) upaya pemberantasan korupsi ya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Data tersebut ditampilkan pada tabel V.16 sampai tabel V.18. Setelah itu, pada tabel V.19 ditampilkan data laporan gratifikasi yang diterima oleh KPK tahun 2008-2013 dan pada tabel V.19 disajikan data jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima oleh KPK Tahun 2011-2013.

G. Peringkat dan Nilai *Human Development Index* Indonesia dan Negara ASEAN

Human Development Index atau indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran yang dilakukan oleh UNDP secara berkala untuk melihat perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih khusus dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dan aparatur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel V.21 menampilkan data mengenai Rangking (*Rank*) dan Nilai (*Value*) *Human Development Index* (HDI) Negara ASEAN 2010-2012 Sementara itu, tabel V.22 menampilkan Nilai Komponen (*Components*) *Human Development Index* (HDI) Negara ASEAN 2011-2012. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rangking indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat, tahun 2011 Indonesia menempati peringkat 124, tetapi pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat 108.



Tabel V.1 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004 - 2012

No.	LKPP	Opini
1.	Tahun 2004	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
2.	Tahun 2005	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
3.	Tahun 2006	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
4.	Tahun 2007	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
5.	Tahun 2008	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
6.	Tahun 2009	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
7.	Tahun 2010	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
8.	Tahun 2011	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
9.	Tahun 2012	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, BPK

Tabel V.2 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2010 - 2012

No.	Opini	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	WTP	52	63	66	76	68	74
2.	WDP	29	35	18	21	22	24
3.	TW	0	0	0	0	0	0
4.	TMP	2	2	3	3	2	2
	Jumlah	83	100	87	100	92	100

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2013

Tabel V.3 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2010 - 2012

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WDP	WDP	WTP
5.	Kejaksaan Agung	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
6.	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP - DPP	WTP - DPP
8.	Kementerian Luar Negeri	WDP	WTP - DPP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WTP - DPP
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11.	Kementerian Keuangan	WDP	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP-DPP	WTP	WTP
15.	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP
16.	Kementerian Pendidikan Nasional	TMP	TMP	WDP





Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
17.	Kementerian Kesehatan	TMP	WDP	WTP-DPP
18.	Kementerian Agama	WDP	WTP - DPP	WTP-DPP
19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP
20.	Kementerian Sosial	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
21.	Kementerian Kehutanan	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP - DPP	WTP - DPP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WTP - DPP
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP
27.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP
29.	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP
30.	Kementerian Lingkungan Hidup	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
31.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP - DPP
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	WTP	WTP	WTP
33.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	WTP	WTP	WDP
34.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP
35.	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WTP - DPP	WTP
36.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
37.	Badan Pusat Statistik	WDP	WTP	WTP
38.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP
39.	Badan Pertahanan Nasional	WDP	WDP	WTP - DPP
40.	Perpustakaan Nasional	WTP	WTP	WTP
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP
42.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP-DPP	WTP - DPP	WTP - DPP
43.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP-DPP	WTP	TMP
44.	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
45.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP
46.	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP
47.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggi	WDP	WDP	WTP-DPP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
48.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP - DPP	WTP
49.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP
51.	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP
52.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP
53.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP	WTP
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WDP
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WDP
57.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WDP
58.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/ Badan Informasi Geospasial	WDP	WTP	WDP
59.	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP-DPP	WDP	WDP
61.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP
63.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP
64.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP
65.	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP	WTP
66.	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WDP
67.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP
68.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP
69.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP
70.	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP
71.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WDP	WTP	WTP
72.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP-DPP	WTP	WTP
73.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP	WTP
74.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP
75.	Badan SAR Nasional	WDP	WTP-DPP	WTP
76.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WDP	WTP
77.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura		WDP	WDP
78.	Ombudsman Republik Indonesia		WTP	WTP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
79.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan		TMP	WDP
80.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam		TMP*)	
81.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme			WDP
82.	Sekretariat Kabinet			WTP
83.	Badan Pengawas Pemilihan Umum			WDP
84.	Lembaga Penyiaran Publik RRI			WDP
85.	Lembaga Penyiaran Publik TVRI			WDP
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang			TMP
87.	APP 61 (Pembayar Bunga Utang)	*	*	*
88.	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	*	*	*
89.	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	*	*	*
90.	APP 70 (Dana Perimbangan)	*	*	*
91.	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	*	*	*
92.	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	*	*	*
93.	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	*	*	*
94.	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	*	*	*
95.	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	*	*	*
96.	BA 999.01 - Pengolaan Utang	WTP	WTP	
97.	BA 999.02 - Hibah	WDP	WDP	
98.	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	WTP-DPP	WTP-DPP	
99.	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	WDP	WTP	
100.	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WTP	
101.	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	*	*	*
102.	BA 999.07 - Belanja Subsidi	WDP	WTP	
103.	BA 999.08 - Belanja Lain-Lain	WDP	WTP-DPP	
104.	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP
105.	Badan Rehabilitas dan Rekontruksi NAD-Nias	****	****	****
106.	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP
107.	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP
108.	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	*****	*****
109.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	WTP	*****	*****
110.	Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1431 H/2010 M	TMP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
111.	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada <i>projek management office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP)</i> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta	WTP		
112.	Laporan Keuangan <i>Loan ABD 2575-INO Pada Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project 2</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010	WTP	WTP	WTP
113.	Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Gas Bumi (BPMIGAS) Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2008	*****		
114.	<i>Loan ABD 2654-INO Pada Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2011		WTP	WTP
115.	<i>Loan ABD 2768-INO Pada Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) support to PNPM Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2012			WTP
116.	<i>PT. Jamsostek</i>		WTP-DPP	

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2013

Catatan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP –DPP : Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Tabel V.4 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 - 2012

No.	Opini	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	WTP	34	7	67	13	120	23
2.	WDP	341	66	349	67	319	61
3.	TW	26	5	8	2	6	1
4.	TMP	115	22	96	18	78	15
	Jumlah	516	100	520	100	523	100

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2014



Tabel V.5 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2010 - 2012

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
1.	1.	Prov. Aceh	WDP	WDP	WDP*
2.	2.	Kab. Aceh Barat	WDP	WDP	WDP
3.	3.	Kab. Aceh Barat Daya	WDP	WDP	WDP
4.	4.	Kab. Aceh Besar	WDP	WDP	WTP
5.	5.	Kab. Aceh Jaya	WDP	WDP	WTP
6.	6.	Kab. Aceh Selatan	WDP	WDP	WDP*
7.	7.	Kab. Aceh Singkil	WDP	WDP	WDP*
8.	8.	Kab. Aceh Tamiang	WDP	WDP	WDP
9.	9.	Kab. Aceh Tengah	WTP	WDP	WTP DPP
10.	10.	Kab. Aceh Tenggara	WDP	WDP	WDP
11.	11.	Kab. Aceh Timur	WDP	WDP	WDP*
12.	12.	Kab. Aceh Utara	TMP	WDP	WDP
13.	13.	Kab. Bener Meriah	WDP	WDP	WDP
14.	14.	Kab. Bireuen	WDP	WDP	WDP*
15.	15.	Kab. Gayo Lues	WDP	WDP	WDP
16.	16.	Kab. Nagan Raya	WTP	WTP	WTP DPP
17.	17.	Kab. Pidie	WDP	WDP	WDP
18.	18.	Kab. Pidie Jaya	WDP	WDP	WDP
19.	19.	Kab. Simeulue	TW	WDP	WDP*
20.	20.	Kota Banda Aceh	WTP	WTP	WTP DPP
21.	21.	Kota Langsa	WTP	WDP	WDP
22.	22.	Kota Lhokseumawe	WDP	WDP	WDP
23.	23.	Kota Sabang	WTP	WDP	WTP
24.	24.	Kota Subulussalam	WDP	WDP	WTP
25.	1.	Prov. Sumatera Utara	WDP	WDP	WDP
26.	2.	Kab. Asahan	TMP	WDP	WDP
27.	3.	Kab. Batubara	TMP	TMP	WDP
28.	4.	Kab. Dairi	WDP	WDP	WDP
29.	5.	Kab. Deli Serdang	TMP	TMP	TW*
30.	6.	Kab. Humbang Hasundutan	WDP	WTP	WTP DPP
31.	7.	Kab. Karo	WDP	WDP	WDP
32.	8.	Kab. Labuhanbatu	WDP	WDP	WDP
33.	9.	Kab. Labuhanbatu Selatan	WDP	WDP	WDP
34.	10.	Kab. Labuhanbatu Utara	TMP	TMP	WDP
35.	11.	Kab. Langkat	TMP	WDP	WDP
36.	12.	Kab. Mandailing Natal	WDP	WDP	TMP
37.	13.	Kab. Nias	TMP	TMP	TMP
38.	14.	Kab. Nias Barat	TMP	TMP	TMP*
39.	15.	Kab. Nias Selatan	TMP	TMP	TMP*
40.	16.	Kab. Nias Utara	TMP	TMP	TMP*
41.	17.	Kab. Padang Lawas	TMP	TMP	TMP
42.	18.	Kab. Padang Lawas Utara	TMP	WDP	WDP*
43.	19.	Kab. Pakpak Bharat	WDP	WDP	WDP
44.	20.	Kab. Samosir	WDP	WDP	WDP*
45.	21.	Kab. Serdang Bedagai	WDP	WDP	WDP
46.	22.	Kab. Simalungun	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
47.	23.	Kab. Tapanuli Selatan	TW	WDP	WDP
48.	24.	Kab. Tapanuli Tengah	WDP	TMP	WDP
49.	25.	Kab. Tapanuli Utara	WDP	WDP	WDP
50.	26.	Kab. Toba Samosir	WDP	WDP	WDP
51.	27.	Kota Binjai	TW	WDP	WDP
52.	28.	Kota Gunung Sitoli	WDP	WDP	WDP*
53.	29.	Kota Medan	WDP	WTP	WTP DPP
54.	30.	Kota Padangsidimpuan	WDP	WDP	WDP*
55.	31.	Kota Pematangsiantar	WDP	WDP	WDP
56.	32.	Kota Sibolga	WDP	WTP DPP	WDP
57.	33.	Kota Tanjung Balai	WDP	WDP	TMP*
58.	34.	Kota Tebing Tinggi	WDP	WDP	TMP
59.	1.	Prov. Sumatera Barat	WDP	WDP	WTP DPP
60.	2.	Kab. Agam	WDP	WDP	WDP
61.	3.	Kab. Dharmasraya	WDP	WDP	WDP
62.	4.	Kab. Kep. Mentawai	WDP	WDP	WDP
63.	5.	Kab. Lima Puluh Kota	WDP	WDP	WDP
64.	6.	Kab. Padang Pariaman	WDP	WDP	WDP
65.	7.	Kab. Pasaman	WDP	WDP	WDP
66.	8.	Kab. Pasaman Barat	WDP	WDP	WDP
67.	9.	Kab. Pesisir Selatan	WDP	WDP	WDP
68.	10.	Kab. Sijunjung	WDP	WDP	WDP
69.	11.	Kab. Solok	WDP	WDP	WDP
70.	12.	Kab. Solok Selatan	TMP	TMP	WDP*
71.	13.	Kab. Tanah Datar	WDP	WDP	WTP DPP
72.	14.	Kota Bukittinggi	WDP	WDP	WDP
73.	15.	Kota Padang	WDP	WDP	WTP DPP
74.	16.	Kota Padang Panjang	WDP	WDP	WTP DPP
75.	17.	Kota Pariaman	WDP	WDP	WTP
76.	18.	Kota Payakumbuh	WDP	WDP	WDP
77.	19.	Kota Sawahlunto	WDP	WDP	WDP
78.	20.	Kota Solok	WDP	WDP	WTP DPP
79.	1.	Prov. Riau	WTP	WDP	WTP DPP
80.	2.	Kab. Bengkalis	WDP	TMP	WDP
81.	3.	Kab. Indragiri Hilir	WDP	WDP	WDP*
82.	4.	Kab. Indragiri Hulu	TW	WDP	WDP*
83.	5.	Kab. Kampar	WDP	WDP	WDP
84.	6.	Kab. Kepulauan Meranti	WDP	WDP	WTP DPP*
85.	7.	Kab. Kuantan Singingi	WDP	WTP DPP	WTP
86.	8.	Kab. Pelalawan	WDP	WDP	WTP DPP
87.	9.	Kab. Rokan Hilir	WDP	WDP	WDP*
88.	10.	Kab. Rokan Hulu	WDP	WDP	WDP
89.	11.	Kab. Siak	WDP	WTP DPP	WTP DPP
90.	12.	Kota Dumai	WDP	WDP	WDP
91.	13.	Kota Pekanbaru	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
92.	1.	Prov. Jambi	WDP	WDP	WTP DPP
93.	2.	Kab. Batang Hari	WDP	WDP	WTP DPP
94.	3.	Kab. Bungo	WDP	WDP	WDP
95.	4.	Kab. Kerinci	WDP	WDP	WDP
96.	5.	Kab. Merangin	WDP	WDP	WDP
97.	6.	Kab. Muaro Jambi	WDP	WDP	WTP
98.	7.	Kab. Sarolangun	WDP	WDP	WDP
99.	8.	Kab. Tanjung Jabung Barat	WDP	WDP	WDP
100.	9.	Kab. Tanjung Jabung Timur	WDP	WDP	WTP DPP
101.	10.	Kab. Tebo	WDP	WDP	WDP
102.	11.	Kota Jambi	WDP	WDP	WDP
103.	12.	Kota Sungai Penuh	WDP	WDP	WTP
104.	1.	Prov. Sumatera Selatan	WDP	WDP	WDP
105.	2.	Kab. Banyuasin	WDP	WTP DPP	WTP
106.	3.	Kab. Empat Lawang	WDP	WDP	TMP
107.	4.	Kab. Lahat	WDP	WDP	WDP
108.	5.	Kab. Muara Enim	WDP	WDP	WDP
109.	6.	Kab. Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP
110.	7.	Kab. Musi Rawas	WDP	WDP	WDP
111.	8.	Kab. Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP
112.	9.	Kab. Ogan Komering Ilir	WDP	WTP	WTP
113.	10.	Kab. Ogan Komering Ulu	WDP	WDP	WDP
114.	11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	WDP	WDP	WDP
115.	12.	Kab. Ogan Komering ulu Timur	WDP	WDP	WTP
116.	13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir			
117.	14.	Kab. Musi Rawas Utara			
118.	15.	Kota Lubuklinggau	WDP	WTP	WTP
119.	16.	Kota Pagaralam	WDP	WDP	WDP
120.	17.	Kota Palembang	WDP	WTP	WTP
121.	18.	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WDP
122.	1.	Prov. Bengkulu	WDP	WTP	WTP
123.	2.	Kab. Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP
124.	3.	Kab. Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WTP
125.	4.	Kab. Bengkulu Utara	WDP	WDP	WTP
126.	5.	Kab. Kaur	WTP	WTP	WTP
127.	6.	Kab. Kapahiang	WDP	WDP	TMP
128.	7.	Kab. Lebong	TMP	WDP	WTP DPP
129.	8.	Kab. Mukomuko	WDP	WTP	WTP
130.	9.	Kab. Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP
131.	10.	Kab. Seluma	WDP	TW	WDP
132.	11.	Kota Bengkulu	WDP	WTP	WDP
133.	1.	Prov. Lampung	WDP	WTP DPP	WTP
134.	2.	Kab. Lampung Barat	WTP	WTP DDP	WTP
135.	3.	Kab. Lampung Selatan	WTP	WTP DDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
136.	4.	Kab. Lampung Tengah	WDP	WDP	WTP
137.	5.	Kab. Lampung Timur	TMP	TMP	WDP
138.	6.	Kab. Lampung Utara	TMP	WDP	TW
139.	7.	Kab. Mesuji	WDP	TMP	WDP
140.	8.	Kab. Pesawaran	WDP	WDP	WDP
141.	9.	Kab. Pesisir Barat			***
142.	10.	Kab. Pringsewu	TMP	WDP	TMP
143.	11.	Kab. Tanggamus	WDP	WDP	WDP
144.	12.	Kab. Tulang Bawang	WDP	WDP	WDP
145.	13.	Kab. Tulang Bawang Barat	WDP	WTP	WTP
146.	14.	Kab. Way Kanan	WTP	WTP	WTP
147.	15.	Kota Bandar Lampung	WTP	WTP DPP	WTP
148.	16.	Kota Metro	WTP	WTP	WTP
149.	1.	Prov. Bangka Belitung	WDP	WDP	WDP
150.	2.	Kab. Bangka	WDP	WTP	WTP DPP
151.	3.	Kab. Bangka Barat	WDP	WDP	WDP
152.	4.	Kab. Bangka Selatan	WDP	WDP	WDP
153.	5.	Kab. Bangka Tengah	WDP	WTP DPP	WTP DPP
154.	6.	Kab. Belitung	WDP	WDP	WDP
155.	7.	Kab. Belitung Timur	WDP	WDP	WDP
156.	8.	Kota Pangkalpinang	WDP	WDP	WDP
157.	1.	Prov. Kepulauan Riau	WTP	WTP	WTP
158.	2.	Kab. Bintan	WDP	WTP	WTP
159.	3.	Kab. Karimun	WDP	WDP	WTP
160.	4.	Kab. Kepulauan Anambas	WDP	WDP	WDP
161.	5.	Kab. Lingga	WDP	WDP	WDP
162.	6.	Kab. Natuna	WDP	WDP	WTP
163.	7.	Kota Batam	WDP	WDP	WTP
164.	8.	Kota Tanjungpinang	WDP	WDP	WDP
165.	1.	Prov. DKI Jakarta	WDP	WTP DPP	WTP DPP
166.	1.	Prov. Jawa Barat	WDP	WTP	WTP
167.	2.	Kab. Bandung	WDP	WDP	WDP
168.	3.	Kab. Bandung Barat	TMP	WDP	WDP
169.	4.	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP
170.	5.	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP
171.	6.	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WDP
172.	7.	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP
173.	8.	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP
174.	9.	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP
175.	10.	Kab. Indramayu	WDP	WDP	WDP
176.	11.	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP
177.	12.	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP
178.	13.	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WDP
179.	14.	Kab. Pangandaran			***
180.	15.	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
181.	16.	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP
182.	17.	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP
183.	18.	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP
184.	19.	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP
185.	20.	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP
186.	21.	Kota Banjar	WDP	WTP	WTP
187.	22.	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP
188.	23.	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP
189.	24.	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP
190.	25.	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP
191.	26.	Kota Depok	WDP	WTP DPP	WTP
192.	27.	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP
193.	28.	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP
194.	1.	Prov. Jawa Tengah	WDP	WTP DPP	WTP
195.	2.	Kab. Banjarnegara	WDP	WDP	WDP
196.	3.	Kab. Banyumas	WDP	WTP	WTP
197.	4.	Kab. Batang	WDP	WDP	WDP
198.	5.	Kab. Blora	WDP	WDP	WDP
199.	6.	Kab. Boyolali	WDP	WTP	WTP
200.	7.	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP
201.	8.	Kab. Cilacap	WDP	WDP	WDP
202.	9.	Kab. Demak	TMP	WDP	WDP
203.	10.	Kab. Grobogan	WDP	WDP	WDP
204.	11.	Kab. Jepara	WTP	WTP	WTP
205.	12.	Kab. Karanganyar	WDP	WDP	WDP
206.	13.	Kab. Kebumen	WDP	WTP	WTP
207.	14.	Kab. Kendal	WDP	WDP	WDP
208.	15.	Kab. Klaten	WDP	WDP	WDP
209.	16.	Kab. Kudus	WDP	WDP	WDP
210.	17.	Kab. Magelang	WDP	WDP	WDP
211.	18.	Kab. Pati	WDP	WDP	WDP
212.	19.	Kab. Pekalongan	WDP	WDP	WDP
213.	20.	Kab. Pemalang	WDP	WDP	WDP
214.	21.	Kab. Purbalingga	WDP	WDP	WDP
215.	22.	Kab. Purworejo	WDP	WDP	WDP
216.	23.	Kab. Rembang	WDP	WDP	WDP
217.	24.	Kab. Semarang	WDP	WTP	WTP
218.	25.	Kab. Sragen	WDP	WDP	WDP
219.	26.	Kab. Sukoharjo	WDP	WDP	WDP
220.	27.	Kab. Tegal	WDP	WDP	WDP
221.	28.	Kab. Temanggung	WDP	WDP	WTP
222.	29.	Kab. Wonogiri	WDP	WDP	WDP
223.	30.	Kab. Wonosobo	WDP	WDP	WDP
224.	31.	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP
225.	32.	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP
226.	33.	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP
227.	34.	Kota Semarang	WDP	WDP	WTP
228.	35.	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
229.	36.	Kota Tegal	WDP	WTP	WDP
230.	1.	Prov. D.I Yogyakarta	WTP	WTP DPP	WTP
231.	2.	Kab. Bantul	WDP	WDP	WTP DPP
232.	3.	Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP
233.	4.	Kab. Kulon Progo	WDP	WDP	WDP
234.	5.	Kab. Sleman	WDP	WTP DPP	WTP DPP
235.	6.	Kota Yogyakarta	WTP	WTP DPP	WTP DPP
236.	1.	Prov. Jawa Timur	WTP	WTP DPP	WTP
237.	2.	Kab. Bangkalan	WTP	WTP	WTP
238.	3.	Kab. Banyuwangi	WDP	WDP	WTP
239.	4.	Kab. Blitar	WDP	WDP	WDP
240.	5.	Kab. Bojonegoro	WDP	WDP	WDP
241.	6.	Kab. Bondowoso	WDP	WTP DPP	WTP
242.	7.	Kab. Gresik	WDP	WDP	WDP
243.	8.	Kab. Jember	WDP	WDP	WTP
244.	9.	Kab. Jombang	WDP	WDP	WDP
245.	10.	Kab. Kediri	WDP	WDP	WDP
246.	11.	Kab. Lamongan	WDP	WDP	WDP
247.	12.	Kab. Lumajang	WDP	WDP	WDP
248.	13.	Kab. Madiun	WDP	WDP	WDP
249.	14.	Kab. Magetan	WDP	WDP	WDP
250.	15.	Kab. Malang	WDP	WDP	WDP
251.	16.	Kab. Mojokerto	WDP	TMP	WDP
252.	17.	Kab. Nganjuk	WDP	WDP	WTP
253.	18.	Kab. Ngawi	WDP	WDP	WDP
254.	19.	Kab. Pacitan	WTP	WTP DPP	WDP
255.	20.	Kab. Pamekasan	WDP	WTP DPP	WDP
256.	21.	Kab. Pasuruan	WDP	WDP	WDP
257.	22.	Kab. Ponogoro	WDP	WDP	WTP
258.	23.	Kab. Probolinggo	WDP	WDP	WDP
259.	24.	Kab. Sampang	WDP	WDP	WDP
260.	25.	Kab. Sidoarjo	WDP	WDP	WDP
261.	26.	Kab. Situbondo	WDP	WDP	WDP
262.	27.	Kab. Sumenep	WDP	WDP	WDP
263.	28.	Kab. Trenggalek	WDP	WDP	WDP
264.	29.	Kab. Tuban	WDP	WTP DPP	WDP
265.	30.	Kab. Tulungagung	WTP	WTP DPP	WTP
266.	31.	Kota Batu	TMP	WDP	WDP
267.	32.	Kota Blitar	WTP	WTP DPP	WTP
268.	33.	Kota Kediri	WDP	WDP	WDP
269.	34.	Kota Madiun	WDP	WDP	WDP
270.	35.	Kota Malang	WDP	WTP DPP	WTP
271.	36.	Kota Mojokerto	WTP	WTP DPP	WTP
272.	37.	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WDP
273.	38.	Kota Probolinggo	WDP	WTP DPP	WTP
274.	39.	Kota Surabaya	WDP	WDP	WTP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
275.	1.	Prov. Banten	WDP	WDP	WDP
276.	2.	Kab. Lebak	WDP	WDP	WDP
277.	3.	Kab. Pandeglang	TMP	WDP	WDP
278.	4.	Kab. Serang	WDP	WTP DPP	WTP
279.	5.	Kab. Tangerang	WTP	WTP	WTP
280.	6.	Kota Cilegon	TMP	WDP	WDP
281.	7.	Kota Serang	WDP	WDP	WDP
282.	8.	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP
283.	9.	Kota Tangerang Selatan	WTP	WTP	WTP DPP
284.	1.	Prov. Bali	WDP	WDP	WDP
285.	2.	Kab. Badung	WDP	WTP DPP	WTP
286.	3.	Kab. Bangli	WDP	WDP	WDP
287.	4.	Kab. Buleleng	TMP	WDP	WDP
288.	5.	Kab. Gianyar	WDP	WDP	WDP
289.	6.	Kab. Jembrana	TW	WDP	WDP
290.	7.	Kab. Karangasem	TMP	WDP	WDP
291.	8.	Kab. Klungkung	WDP	WDP	WDP
292.	9.	Kab. Tabanan	WDP	WDP	TMP
293.	10.	Kota Denpasar	WDP	WDP	WTP
294.	1.	Prov. Nusa Tenggara Barat	TMP	WTP	WTP
295.	2.	Kab. Bima	WDP	TMP	WDP
296.	3.	Kab. Dompu	TMP	TMP	WDP*
297.	4.	Kab. Lombok Barat	WDP	WDP	WDP
298.	5.	Kab. Lombok Tengah	WDP	WDP	WTP DPP
299.	6.	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP
300.	7.	Kab. Lombok Utara	WDP	WDP	WDP
301.	8.	Kab. Sumbawa	WDP	WDP	WTP DPP
302.	9.	Kab. Sumbawa Barat	WDP	WDP	WDP
303.	10.	Kota Bima	TMP	WDP	WDP
304.	11.	Kota Mataram	WDP	WDP	WDP
305.	1.	Prov. Nusa Tenggara Timur	WDP	WDP	WDP*
306.	2.	Kab. Alor	TMP	TMP	TMP*
307.	3.	Kab. Belu	WDP	WDP	WDP
308.	4.	Kab. Ende	TMP	WDP	WDP
309.	5.	Kab. Flores Timur	WDP	WDP	WDP
310.	6.	Kab. Kupang	TMP	TMP	TMP*
311.	7.	Kab. Lembata	TMP	TMP	WDP*
312.	8.	Kab. Manggarai	WDP	WDP	WDP*
313.	9.	Kab. Manggarai Barat	TMP	WDP	WDP*
314.	10.	Kab. Manggarai Timur	TMP	TMP	TMP*
315.	11.	Kab. Nagekeo	TMP	WDP	WDP
316.	12.	Kab. Ngada	TMP	TMP	WDP
317.	13.	Kab. Rote Ndao	TMP	TMP	TMP
318.	14.	Kab. Sabu Raijua	WDP	WDP	WDP*
319.	15.	Kab. Sikka	TMP	WDP	WDP*
320.	16.	Kab. Sumba Barat	TMP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
321.	17.	Kab. Sumba Darat Daya	WDP	WDP	WDP
322.	18.	Kab. Sumba Tengah	WDP	WDP	WDP
323.	19.	Kab. Sumba Timur	TMP	WDP	WDP*
324.	20.	Kab. Timor Tengah Selatan	TMP	WDP	WDP*
325.	21.	Kab. Timor Tengah Utara	TMP	TMP	WDP*
326.	22.	Kab. Malaka			
327.	23.	Kota Kupang	WDP	WDP	WDP
328.	1.	Prov. Kalimantan Barat	WDP	WDP	WTP DPP
329.	2.	Kab. Bengkayang	WDP	WDP	WDP
330.	3.	Kab. Kapuas hulu	WDP	WDP	WDP
331.	4.	Kab. Kayong Utara	WDP	WDP	WDP*
332.	5.	Kab. Ketapang	WDP	WDP	WDP
333.	6.	Kab. Kubu Raya	TW	WDP	WDP
334.	7.	Kab. Landak	WDP	WDP	WDP
335.	8.	Kab. Melawi	TW	TW	WDP*
336.	9.	Kab. Pontianak	WDP	WDP	WDP
337.	10.	Kab. Sambas	WDP	WDP	WDP
338.	11.	Kab. Sanggau	WDP	WDP	WDP
339.	12.	Kab. Sekadau	WDP	WDP	WTP DPP*
340.	13.	Kab. Sintang	WDP	WDP	WTP DPP
341.	14.	Kota Pontianak	WDP	WTP DPP	WTP DPP
342.	15.	Kota Singkawang	WDP	WDP	WDP*
343.	1.	Prov. Kalimantan Tengah	WDP	WDP	TMP
344.	2.	Kab. Barito Selatan	TW	WDP	WDP*
345.	3.	Kab. Barito Timur	TMP	WDP	TMP
346.	4.	Kab. Barito Utara	TMP	WDP	TMP
347.	5.	Kab. Gunung Mas	WDP	WDP	WTP DPP*
348.	6.	Kab. Kapuas	WDP	WDP	WDP
349.	7.	Kab. Katingan	TMP	WDP	WDP
350.	8.	Kab. Kotawaringin Barat	WDP	TW	WDP
351.	9.	Kab. Kotawaringin Timur	TW	WDP	TMP
352.	10.	Kab. Lamandau	WDP	WDP	WDP
353.	11.	Kab. Murung Raya	TW	WDP	WDP
354.	12.	Kab. Pulang Pisang	TW	WDP	TMP
355.	13.	Kab. Seruyan	TMP	WDP	TMP*
356.	14.	Kab. Sukamara	WDP	WTP DPP	WTP*
357.	15.	Kota Palangkaraya	WDP	WDP	TMP
358.	1.	Prov. Kalimantan Selatan	WDP	WDP	WDP
359.	2.	Kab. Balangan	WDP	WDP	WDP
360.	3.	Kab. Banjar	TW	WDP	WDP
361.	4.	Kab. Barito Kuala	WDP	WDP	WDP
362.	5.	Kab. Hulu Sungai Selatan	WDP	WDP	WDP
363.	6.	Kab. Hulu Sungai Tengah	WDP	WDP	WDP
364.	7.	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP	WDP	WDP
365.	8.	Kab. Kotabaru	WDP	WDP	TW
366.	9.	Kab. Tabalong	WDP	TMP	WDP*



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
367.	10.	Kab. Tanah Bumbu	WDP	WDP	WDP
368.	11.	Kab. Tanah Laut	WDP	WDP	WDP
369.	12.	Kab. Tapih	WDP	WDP	WDP
370.	13.	Kota Banjarbaru	WDP	WDP	WDP*
371.	14.	Kota Banjarmasin	WDP	WDP	WDP
372.	1.	Prov. Kalimantan Timur	WDP	WDP	WTP DPP*
373.	2.	Kab. Berau	WDP	WDP	WDP*
374.	3.	Kab. Kutai Barat	TW	WDP	WDP*
375.	4.	Kab. Kutai Kartanegara	TMP	TMP	WTP DPP*
376.	5.	Kab. Kutai Timur	TW	TW	WDP*
377.	6.	Kab. Paser	TW	WDP	WDP*
378.	7.	Kab. Penajam Paser Utara	TW	WDP	WDP*
379.	8.	Kab. Balikpapan	WDP	WDP	WDP*
380.	9.	Kab. Mahakam Hulu			
381.	10.	Kota Bontang	WDP	WDP	WDP*
382.	11.	Kota Samarinda	TMP	TMP	WDP*
383.	1.	Prov. Kalimantan Utara			***
384.	2.	Kab. Malinau	TW	WDP	WDP*
385.	3.	Kab. Nunukan	TW	WDP	WDP*
386.	4.	Kab. Tana Tidung	TMP	TMP	WDP*
387.	5.	Kab. Bulungan	TW	WDP	WDP*
388.	6.	Kota Tarakan	WDP	WDP	WTP*
389.	1.	Prov Sulawesi Utara	WTP	WDP	WTP DPP
390.	2.	Kab. Bolaang Mongondow	TW	TMP	TMP
391.	3.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	TMP	TMP	WDP
392.	4.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	TMP	TMP	WDP
393.	5.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	TW	TMP	TMP*
394.	6.	Kab. Kepulauan Sangihe	TW	TMP	TMP
395.	7.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	TW	WDP	WDP
396.	8.	Kab. Kepulauan Taulad	TW	TMP	TW
397.	9.	Kab. Minahasa	WDP	WDP	TW
398.	10.	Kab. Minahasa Selatan	TMP	TMP	TMP*
399.	11.	Kab. Minahasa Tenggara	TMP	TMP	TMP*
400.	12.	Kab. Minahasa Utara	TMP	TMP	WDP
401.	13.	Kota Bitung	WDP	WTP DPP	WTP DPP
402.	14.	Kota Kotamobagu	TW	TW	WDP*
403.	15.	Kota Manado	TMP	TW	WDP
404.	16.	Kota Tomohon	TMP	TMP	WDP
405.	1.	Prov. Sulawesi Tengah	WDP	WDP	WTP DPP
406.	2.	Kab. Banggai	WDP	WDP	WTP
407.	3.	Kab. Banggai Kepulauan	WDP	WTP DPP	WTP
408.	4.	Kab. Banggai Laut			



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
409.	5.	Kab. Buol	TMP	WDP	TMP
410.	6.	Kab. Donggala	WDP	WTP DPP	WTP
411.	7.	Kab. Morowali	WDP	WDP	WTP DPP
412.	8.	Kab. Morowali Utara			
413.	9.	Kab. Parigi Moutong	TMP	WDP	WDP
414.	10.	Kab. Poso	WDP	WDP	WTP DPP
415.	11.	Kab. Sigi	WDP	WTP DPP	WTP
416.	12.	Kab. Tojo Una-Una	WDP	WDP	WTP
417.	13.	Kab. tolitoli	WDP	WDP	WDP
418.	14.	Kota Palu	WDP	WDP	WTP
419.	1.	Prov. Sulawesi Selatan	WTP	WTP	WTP
420.	2.	Kab. Bantaeng	WDP	WDP	WDP
421.	3.	Kab. Barru	TMP	WDP	WDP
422.	4.	Kab. Bone	WDP	WDP	WDP
423.	5.	Kab. Bulukumba	WDP	WDP	WTP DPP
424.	6.	Kab. Enrekang	WDP	WDP	WDP
425.	7.	Kab. Gowa	WDP	WTP	WTP
426.	8.	Kab. Jeneponto	WDP	TMP	TMP
427.	9.	Kab. Kep. Selayar	TMP	TMP	TMP
428.	10.	Kab. Luwu	WDP	WDP	TMP
429.	11.	Kab. Luwu Timur	WDP	WTP	WTP DPP
430.	12.	Kab. Luwu Utara	WTP	WDP	WDP
431.	13.	Kab. Maros	TMP	WDP	WDP
432.	14.	Kab. Pangkajene dan kepulauan	WDP	WDP	WTP DPP
433.	15.	Kab. Pinrang	WDP	WDP	WTP DPP
434.	16.	Kab. sindereng Rappang	WDP	WDP	WDP
435.	17.	Kab. Sinjai	WDP	WDP	WDP
436.	18.	Kab. Soppeng	WDP	WDP	TMP
437.	19.	Kab. Takalar	TMP	TMP	TMP
438.	20.	Kab. Tana Toraja	WDP	TMP	WDP
439.	21.	Kab. Toraja Utara	WDP	WDP	WDP
440.	22.	Kab. Wajo	WDP	WDP	WTP DPP
441.	23.	Kota Makassar	WDP	WDP	WDP
442.	24.	Kota Palopo	TMP	TMP	WDP
443.	25.	Kota Pare-Pare	WDP	TMP	TMP
444.	1.	Prov. Sulawesi Tenggara	WDP	WDP	WDP
445.	2.	Kab. Bombana	TMP	TMP	WDP
446.	3.	Kab. Buton	WTP	WDP	WDP
447.	4.	Kab. Buton Utara	TMP	TMP	TMP
448.	5.	Kab. Kolaka	WDP	WDP	WDP
449.	6.	Kab. Kolaka Utara	WDP	WDP	WDP
450.	7.	Kab. Kolaka Timur			
451.	8.	Kab. Konawe	TMP	WDP	WDP
452.	9.	Kab. Konawe Selatan	TMP	WDP	WDP
453.	10.	Kab. Konawe Utara	TMP	TMP	TMP*
454.	11.	Kab. Muna	TMP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
455.	12.	Kab. Wakatobi	WDP	WDP	WDP
456.	13.	Kota Bau-Bau	TMP	WDP	WDP
457.	14.	Kota Kendari	WDP	WDP	WDP
458.	1.	Prov. Gorontalo	WDP	WDP	WDP
459.	2.	Kab. Boalemo	WDP	WDP	WDP
460.	3.	Kab. Bone Bolango	WDP	WDP	WDP
461.	4.	Kab. Gorontalo	WTP	WDP	WTP
462.	5.	Kab. Gorontalo Utara	WDP	WDP	WDP
463.	6.	Kab. Pohuwato	WDP	WDP	WDP
464.	7.	Kota Gorontalo	WDP	WDP	WDP
465.	1.	Prov. Sulawesi Barat	WDP	WDP	WDP
466.	2.	Kab. Majene	WDP	WDP	WDP
467.	3.	Kab. Mamasa	WDP	WDP	TMP
468.	4.	Kab. Mamuju	WDP	WDP	WTP DPP
469.	5.	Kab. Mamuju Utara	WDP	WDP	WDP
470.	6.	Kab. Mamuju Tengah			
471.	7.	Kab. Polewali Mandar	WDP	WDP	WDP
472.	1.	Prov. Maluku	TMP	TMP	TMP*
473.	2.	Kab. Buru	TMP	TMP	TMP*
474.	3.	Kab. Buru Selatan	***	**	TMP*
475.	4.	Kab. Kepulauan Aru	***	TMP	**
476.	5.	Kab. Konawe Kepulauan			
477.	6.	Kab. Maluku Barat Daya	TMP	TMP	TMP*
478.	7.	Kab. Maluku Tengah	TMP	TMP	WDP*
479.	8.	Kab. Maluku Tenggara	TMP	WDP	WDP
480.	9.	Kab. Maluku Tenggara Barat	TMP	TMP	TMP
481.	10.	Kab. Seram Bagian Barat	TMP	***	TMP*
482.	11.	Kab. Seram Bagian Timur	TMP	TMP	TMP*
483.	12.	Kota Ambon	TMP	TMP	TMP*
484.	13.	Kota Tual	TMP	TMP	TMP
485.	1.	Prov. Maluku Utara	TMP	TMP	TMP*
486.	2.	Kab. Halmahera Barat	TMP	TMP	WDP*
487.	3.	Kab. Halmahera Selatan	TMP	WDP	WDP
488.	4.	Kab. Halmahera Tengah	TMP	TMP	WDP
489.	5.	Kab. Halmahera Timur	TMP	TMP	WDP*
490.	6.	Kab. Halmahera Utara	TMP	TMP	WDP
491.	7.	Kab. Kepulauan Sula	TMP	TMP	TMP*
492.	8.	Kab. Pulau Morotai	TMP	TMP	TMP*
493.	9.	Kab. Pulau Taliabu			
494.	10.	Kota Ternate	TMP	WDP	WDP*
495.	11.	Kota Tidore Kepulauan	WDP	WDP	WDP
496.	1.	Prov. Papua	TMP	TMP	TMP*
497.	2.	Kab. Asmat	WDP	WDP	WDP
498.	3.	Kab. Baik Numfor	TMP	TMP	WDP*



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
499.	4.	Kab. Boven Digoel	TMP	TMP	TMP*
500.	5.	Kab. Deiyai	*	TMP	TMP*
501.	6.	Kab. Dogiyai	TMP	TMP	TMP*
502.	7.	Kab. Intan Jaya	*	TMP	TMP*
503.	8.	Kab. Jayapura	WDP	WDP	WDP
504.	9.	Kab. Jayawijaya	WDP	WDP	WDP
505.	10.	Kab. Keerom	TMP	TMP	TMP*
506.	11.	Kab. Kepulauan Yapen	TMP	WDP	WDP
507.	12.	Kab. Lanny Jaya	TMP	TMP	TMP*
508.	13.	Kab. Memberamo Raya	**	TMP	TMP*
509.	14.	Kab. Memberamo Tengah	*	**	TMP*
510.	15.	Kab. Mappi	TMP	TMP	TMP
511.	16.	Kab. Marauke	TMP	TMP	TMP*
512.	17.	Kab. Mimika	WDP	WDP	WDP
513.	18.	Kab. Nabire	TMP	TW	TW*
514.	19.	Kab. Nduga	TMP	TMP	TMP*
515.	20.	Kab. Paniai	TMP	TMP	TMP*
516.	21.	Kab. Pegunungan Bintang	TMP	TW	WDP
517.	22.	Kab. Puncak	*	TMP	TMP*
518.	23.	Kab. Puncak Jaya	TMP	WDP	TMP
519.	24.	Kab. Sarmi	TMP	TMP	TMP*
520.	25.	Kab. Supiori	TMP	TMP	TMP*
521.	26.	Kab. Tolikara	TMP	TMP	TMP*
522.	27.	Kab. Waropen	**	**	TMP*
523.	28.	Kab. Yahukimo	TMP	TMP	TMP
524.	29.	Kab. Yalimo	TMP	TMP	TMP*
525.	30.	Kota Jayapura	WDP	WDP	WDP
526.	1.	Prov. Papua Barat	TMP	TMP	TMP*
527.	2.	Kab. Fakfak	TMP	TMP	TMP*
528.	3.	Kab. Kaimana	WDP	TMP	
529.	4.	Kab. Manokwari	TMP	TMP	TMP*
530.	5.	Kab. Manokwari Selatan			***
531.	6.	Kab. Maybrat	TMP	TMP	TMP*
532.	7.	Kab. Pegunungan Arfak			***
533.	8.	Kab. Raja Ampat	WDP	TMP	WDP
534.	9.	Kab. Sorong	TMP	TMP	WDP*
535.	10.	Kab. Sorong Selatan	WDP	WDP	WDP
536.	11.	Kab. Tambrauw	TMP	TMP	TMP*
537.	12.	Kab. Teluk Bintuni	TMP	WDP	WDP*
538.	13.	Kab. Teluk Wondama	TMP	TMP	TMP*
539.	14.	Kota Sorong	TW	TMP	TMP*

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2014

Catatan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP -DPP : Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat





Tabel V.6 Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Pusat Tahun 2011

No.	Kementerian/lembaga	Kriteria
NILAI A		
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi	A
2.	Badan Pemeriksa Keuangan	A
	Jumlah	2
NILAI B		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	B
2.	Sekretariat Negara	B
3.	Kementerian Dalam Negeri	B
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	B
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	B
6.	Kementerian Keuangan	B
7.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	B
8.	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	B
9.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	B
10.	Kementerian Hukum dan HAM	B
11.	Kementerian Pekerjaan Umum	B
12.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	B
13.	Kementerian Perdagangan	B
14.	Kementerian Pertanian	B
15.	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	B
16.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	B
17.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	B
	Jumlah	17
NILAI CC		
1.	Kementeriaan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	CC
2.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	CC
3.	Sekretariat kabinet	CC
4.	Kementerian Agama	CC
5.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	CC
6.	Kementerian Kehutanan	CC
7.	Kementerian Kesehatan	CC
8.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	CC
9.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	CC
10.	Kementerian Lingkungan Hidup	CC
11.	Kementerian Luar Negeri	CC
12.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	CC
13.	Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal	CC
14.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	CC
15.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	CC
16.	Kementerian Perhubungan	CC
17.	Kementerian Perindustrian	CC
18.	Kementerian Pertahanan	CC
19.	Kementerian Perumahan Rakyat	CC
20.	Kementerian Riset dan Teknologi	CC
21.	Kementerian Sosial	CC
22.	Markas Besar TNI	CC
23.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	CC
24.	Mahkamah Agung	CC



Lanjutan Tabel V.6

No.	Kementerian/lembaga	Kriteria
25.	Sekretariat Jenderal MPR	CC
26.	Kementerian Perindustrian	CC
27.	Kementerian Pertahanan	CC
28.	Kementerian Perumahan Rakyat	CC
29.	Kementerian Riset dan Teknologi	CC
30.	Kementerian Sosial	CC
31.	Markas Besar TNI	CC
32.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	CC
33.	Mahkamah Agung	CC
34.	Sekretariat Jenderal MPR	CC
35.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	CC
36.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	CC
37.	Arsip Nasional Republik Indonesia	CC
38.	Badan Kepegawaian Negara	CC
39.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	CC
40.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	CC
41.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	CC
42.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	CC
43.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	CC
44.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	CC
45.	Badan Narkotika Nasional	CC
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	CC
47.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	CC
48.	Badan Pegusahaan BATAM	CC
49.	Badan Pusat Statistik	CC
50.	Badan Standarisasi Nasional	CC
51.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	CC
52.	Lembaga Administrasi Negara	CC
53.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	CC
54.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	CC
55.	Lembaga Ketahanan Nasional	CC
56.	Lembaga Sandi Negara	CC
57.	Perpustakaan Nasional RI	CC
58.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	CC
	Jumlah	49
NILAI C		
1.	Kejaksaan Agung	C
2.	Badan Intelijen Negara	C
3.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	C
4.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	C
5.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	C
6.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	C
7.	Badan Pertanahan Nasional	C
8.	Badan SAR Nasional	C
9.	Dewan Ketahanan Nasional	C
10.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	C
11.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	C





Lanjutan Tabel V.6

No.	Kementerian/lembaga	Kriteria
12.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	C
13.	Sekretariat Jenderal Dewan Jaminan Sosial Nasional	C
14.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	C
	Jumlah	14

Sumber : Kementerian PAN RB, 2012

Tabel V.7 Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

Daerah	Hasil Penilaian LAKIP 2011						Total
	AA	A	B	CC	C	D	
Provinsi			2	17	11		30
kabupaten				14	73	53	140
Kota			1	7	20	12	40

Sumber : Kementerian PAN RB, 2012

Tabel V.8 Nomenklatur Pemerintah Daerah Propinsi dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

No	Provinsi	Kriteria
1.	Jawa Tengah	B
2.	Kalimantan Timur	B
	Jumlah	2
1.	Bali	CC
2.	DI Yogyakarta	CC
3.	DKI Jakarta	CC
4.	Jawa Barat	CC
5.	Jawa Timur	CC
6.	Kalimantan Barat	CC
7.	Kalimantan Selatan	CC
8.	Kepulauan Riau	CC
9.	Maluku	CC
10.	Nusa Tenggara Barat	CC
11.	Nusa Tenggara Timur	CC
12.	Riau	CC
13.	Sulawesi Tengah	CC
14.	Sulawesi Utara	CC
15.	Sumatera Barat	CC
16.	Sumatera Selatan	CC
17.	Sumatera Utara	CC
	Jumlah	17



lanjutan Tabel V.8.

No	Provinsi	Kriteria
1.	Aceh	C
2.	Banten	C
3.	Bengkulu	C
4.	Gorontalo	C
5.	Jambi	C
6.	Kalimantan Tengah	C
7.	Kepulauan Bangka Belitung	C
8.	Lampung	C
9.	Papua	C
10.	Sulawesi Barat	C
11.	Sulawesi Selatan	C
	Jumlah	11
	Rata Rata	CC

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel V.9 Nomenklatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Kriteria
1.	Kota Sukabumi	B
	Jumlah	1
1.	Kab. Batang Hari	CC
2.	Kab. Bengkayang	CC
3.	Kab. Bima	CC
4.	Kab. Bogor	CC
5.	Kab. Boyolali	CC
6.	Kab. Garut	CC
7.	Kab. Gunung Kidul	CC
8.	Kab. Karimun	CC
9.	Kab. Kerinci	CC
10.	Kab. Musi Banyuasin	CC
11.	Kab. Pacitan	CC
12.	Kab. Pandeglang	CC
13.	Kab. Pangkajene Kepulauan	CC
14.	Kab. Sleman	CC
15.	Kota Banjar Baru	CC
16.	Kota Bekasi	CC
17.	Kota Bitung	CC
18.	Kota Blitar	CC
19.	Kota Cilegon	CC
20.	Kota Malang	CC
21.	Kota Tegal	CC
	Jumlah	21





Lanjutan Tabel V.9

No	Kabupaten/Kota	Kriteria
1.	Kab. Aceh Tengah	C
2.	Kab. Bandung	C
3.	Kab. Balangan	C
4.	Kab. Bangka	C
5.	Kab. Banjar	C
6.	Kab. Bengkulu Selatan	C
7.	Kab. Bintan	C
8.	Kab. Bone Bolango	C
9.	Kab. Buru	C
10.	Kab. Dairi	C
11.	Kab. Donggala	C
12.	Kab. Ende	C
13.	Kab. Enrekang	C
14.	Kab. Kampar	C
15.	Kab. Kapuas	C
16.	Kab. Karang Anyar	C
17.	Kab. Karawang	C
18.	Kab. Katingan	C
19.	Kab. Kaur	C
20.	Kab. Kediri	C
21.	Kab. Ketapang	C
22.	Kab. Klaten	C
23.	Kab. Kota Waringin Timur	C
24.	Kab. Kudus	C
25.	Kab. Kulon Progo	C
26.	Kab. Kutai Barat	C
27.	Kab. Lahat	C
28.	Kab. Lampung Selatan	C
29.	Kab. Lampung Utara	C
30.	Kab. Landak	C
31.	Kab. Langkat	C
32.	Kab. Lombok Timur	C
33.	Kab. Madiun	C
34.	Kab. Magelang	C
35.	Kab. Malinau	C
36.	Kab. Maluku Tengah	C
37.	Kab. Maluku Tenggara	C
38.	Kab. Manggarai	C
39.	Kab. Manggarai Timur	C
40.	Kab. Merauke	C
41.	Kab. Minahasa Utara	C
42.	Kab. Muna	C
43.	Kab. Musi Rawas	C
44.	Kab. Ogan Komering Ilir	C
45.	Kab. Ogan Komering Ulu	C
46.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	C
47.	Kab. Padang Pariaman	C
48.	Kab. Parigi Moutong	C
49.	Kab. Pasaman	C



Lanjutan Tabel V.9

No	Kabupaten/kota	Kriteria
50.	Kab. Pasaman Barat	C
51.	Kab. Pati	C
52.	Kab. Pesisir Selatan	C
53.	Kab. Pidie Jaya	C
54.	Kab. Polewali Mandar	C
55.	Kab. Purbalingga	C
56.	Kab. Rokan Hulu	C
57.	Kab. Samosir	C
58.	Kab. Sanggau	C
59.	Kab. Selayar	C
60.	Kab. Sinjai	C
61.	Kab. Situbondo	C
62.	Kab. Sragen	C
63.	Kab. Sumenep	C
64.	Kab. Tabanan	C
65.	Kab. Tanah Datar	C
66.	Kab. Tanah Laut	C
67.	Kab. Tangerang	C
68.	Kab. Tanjung Jabung Timur	C
69.	Kab. Tebo	C
70.	Kab. Temanggung	C
71.	Kab. Timor Tengah Selatan	C
72.	Kab. Toujo Una-Una	C
73.	Kab. Trenggalek	C
74.	Kota Banda aceh	C
75.	Kota Banjarmasin	C
76.	Kota Batam	C
77.	Kota Bogor	C
78.	Kota Bukit Tinggi	C
79.	Kota Cimahi	C
80.	Kota Denpasar	C
81.	Kota Dumai	C
82.	Kota Madiun	C
83.	Kota Makassar	C
84.	Kota Medan	C
85.	Kota Metro	C
86.	Kota Pariaman	C
87.	Kota Probolinggo	C
88.	Kota Singkawang	C
89.	Kota Tanah Bumbu	C
90.	Kota Tanjung Pinang	C
91.	Kota Tarakan	C
92.	Kota Ternate	C
93.	Kota Yogyakarta	C
94.	Jumlah	93





Lanjutan Tabel V.9

No	Kabupaten/kota	Kriteria
1.	Kab. Aceh Barat	D
2.	Kab. Aceh Barat Daya	D
3.	Kab. Aceh Jaya	D
4.	Kab. Aceh Selatan	D
5.	Kab. Asahan	D
6.	Kab. Banggai	D
7.	Kab. Bangka Tengah	D
8.	Kab. Barito Selatan	D
9.	Kab. Batang	D
10.	Kab. Bau-Bau	D
11.	Kab. Bekasi	D
12.	Kab. Belitung	D
13.	Kab. Belitung Timur	D
14.	Kab. Belu	D
15.	Kab. Berau	D
16.	Kab. Bireuen	D
17.	Kab. Bojonegoro	D
18.	Kab. Boolang Mongondow	D
19.	Kab. Bulukumba	D
20.	Kab. Cianjur	D
21.	Kab. Jayapura	D
22.	Kab. Karo	D
23.	Kab. Kepahiang	D
24.	Kab. Kepulauan Aru	D
25.	Kab. Kota Waringin Barat	D
26.	Kab. Kuantan Singingi	D
27.	Kab. Kuningan	D
28.	Kab. Kupang	D
29.	Kab. Kutai Kartanegara	D
30.	Kab. Lingga	D
31.	Kab. Lombok Tengah	D
32.	Kab. Luwu Timur	D
33.	Kab. Wanokwari	D
34.	Kab. Melawi	D
35.	Kab. Muara Enim	D
36.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	D
37.	Kab. Pidie	D
38.	Kab. Pringsewu	D
39.	Kab. Sangihe	D
40.	Kab. Seluma	D
41.	Kab. Seram Bagian Timur	D
42.	Kab. Siak	D
43.	Kab. Sidengreng Rapang	D
44.	Kab. Sigi	D
45.	Kab. Sorong	D
46.	Kab. Sumba Tengah	D
47.	Kab. Sumbawa	D
48.	Kab. Sumedang	D
49.	Kab. Tanah Toraja	D



Lanjutan Tabel V.9

No	Kabupaten/Kota	Kriteria
50.	Kab. Timor Tengah Utara	D
51.	Kab. Toli Toli	D
52.	Kab. Tulang Bawang	D
53.	Kab. Tulang Bawang Barat	D
54.	Kota Ambon	D
55.	Kota Mataram	D
56.	Kota Pagar Alam	D
57.	Kota Pakpak Barat	D
58.	Kota Palu	D
59.	Kota Payakumbuh	D
60.	Kota Prabumulih	D
61.	Kota Salatiga	D
62.	Kota Sibolga	D
63.	Kota Sorong	D
64.	Kota Sungai Penuh	D
65.	Kota Tual	D
	Jumlah	65

Sumber : Kementerian PAN RB, 2012

Tabel V.10 Perkembangan Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional Tahun 2008 - 2012

No.	Kategori	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Variabel Pengalaman Integritas	7,21	6,71	5,70	6,48	6,89
2.	Variabel Potensi Integritas	5,96	5,87	4,86	5,97	5,34
3.	Indeks Integritas nasional (IIN)	6,84	6,50	5,42	6,31	6,37

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2013





Tabel V.11 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Secara Nasional Tahun 2011 – 2012

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
1.	Prov. Aceh	30	1,8100	Tinggi	30	1,7867	Sedang
2.	Kab. Aceh Barat	250	2,3061	Tinggi	361	0,8482	Rendah
3.	Kab. Aceh Barat Daya				343	1,1334	Sedang
4.	Kab. Aceh Besar	347	1,8203	Sedang	157	2,4072	Tinggi
5.	Kab. Aceh Jaya	321	1,9855	Sedang	244	1,9436	Sedang
6.	Kab. Aceh Selatan	212	2,3981	Tinggi	176	2,2825	Tinggi
7.	Kab. Aceh Singkil	275	2,2113	Tinggi	178	2,2688	Tinggi
8.	Kab. Aceh Tamiang	269	2,2368	Tinggi	306	1,4634	Sedang
9.	Kab. Aceh Tengah	129	2,5859	Tinggi	302	1,5125	Sedang
10.	Kab. Aceh Tenggara	346	1,8259	Sedang	334	1,2365	Sedang
11.	Kab. Aceh Timur	231	2,3429	Tinggi	284	1,6896	Sedang
12.	Kab. Aceh Utara	274	2,3137	Tinggi	181	2,2502	Tinggi
13.	Kab. Bener Meriah	179	2,4823	Tinggi	281	1,7352	Sedang
14.	Kab. Bireuen	208	2,4093	Tinggi	196	2,2099	Tinggi
15.	Kab. Gayo Lues	271	2,2235	Tinggi	314	1,4123	Sedang
16.	Kab. Nagan Raya	107	2,6429	Tinggi	180	2,2527	Tinggi
17.	Kab. Pidie	306	2,1010	Tinggi	266	1,8287	Sedang
18.	Kab. Pidie Jaya	230	2,3433	Tinggi	280	1,7474	Sedang
19.	Kab. Simeulue	332	1,9302	Sedang	278	1,7505	Sedang
20.	Kota Banda Aceh	33	2,7862	tinggi	33	2,8271	Tinggi
21.	Kota Langsa	84	2,2392	tinggi	85	1,6173	Sedang
22.	Kota Lhokseumawe	62	2,5005	tinggi	78	1,7366	Sedang
23.	Kota Sabang	66	2,4352	tinggi	80	1,7212	Sedang
24.	Kota Subulussalam	89	2,0262	tinggi	90	1,1481	Sedang
25.	Prov. Sumatera Utara	18	2,2898	tinggi	19	2,1965	Tinggi
26.	Kab. Asahan	140	2,5653	Tinggi	144	2,4655	Tinggi
27.	Kab. Batubara	341	1,8429	Sedang	298	1,5433	Sedang
28.	Kab. Dairi	172	2,5040	Tinggi	325	1,3029	Sedang
29.	Kab. Deli Serdang	124	2,6095	Tinggi	146	2,4560	Tinggi
30.	Kab. Humbang Hasundutan	10	3,0876	Sangat tinggi	39	3,0391	Sangat tinggi
31.	Kab. Karo	222	2,3688	Tinggi	296	1,5635	Sedang
32.	Kab. Labuhan batu	192	2,4444	Tinggi	175	2,3022	Tinggi
33.	Kab. Labuhan batu Selatan						
34.	Kab. Labuhan batu Utara						
35.	Kab. Langkat	244	2,3217	Tinggi	190	2,2243	Tinggi
36.	Kab. Mandailing Natal	198	2,4265	Tinggi	286	1,6691	Sedang
37.	Kab. Nias	319	1,9877	Sedang	331	1,2640	Sedang
38.	Kab. Nias Barat						
39.	Kab. Nias Selatan	363	1,2347	Sedang	223	2,0836	Tinggi
40.	Kab. Nias Utara						
41.	Kab. Padang Lawas	317	2,0078	Tinggi	188	2,2295	Tinggi
42.	Kab. Padang Lawas Utara	309	2,0499	Tinggi	132	2,5403	Tinggi
43.	Kab. Pakpak Bharat	223	2,3666	Tinggi	104	2,7368	Tinggi
44.	Kab. Samosir	65	2,7658	Tinggi	56	2,9576	Tinggi
45.	Kab. Serdang Bedagai	68	2,7581	Tinggi	135	2,5018	Tinggi
46.	Kab. Simalungun	264	2,2526	Tinggi	213	2,1426	Tinggi
47.	Kab. Tapanuli Selatan	218	2,3844	Tinggi	259	1,8780	Sedang
48.	Kab. Tapanuli Tengah	185	2,4658	Tinggi	260	1,8727	Sedang



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
49.	Kab. Tapanuli Utara	182	2,4771	Tinggi	349	1,0458	Sedang
50.	Kab. Toba Samosir	300	2,1269	Tinggi	147	2,4512	Tinggi
51.	Kota Binjai	58	2,5507	tinggi	62	2,1901	Tinggi
52.	Kota Gunung Sitoli						
53.	Kota Medan	5	3,1165	sangat tinggi	50	2,5002	Tinggi
54.	Kota Padang Sidempuan	83	2,2456	tinggi	67	2,0499	Tinggi
55.	Kota Pematang Siantar	86	2,1381	tinggi	63	2,1553	Tinggi
56.	Kota Sibolga	75	2,3606	tinggi	75	1,8044	Sedang
57.	Kota Tanjung Balai	74	2,3620	tinggi	61	2,2012	Tinggi
58.	Kota Tebing Tinggi	69	2,4094	tinggi	49	2,5130	Tinggi
59.	Prov. Sumatera Barat	25	2,0436	tinggi	10	2,4612	Tinggi
60.	Kab. Agam	123	2,6099	Tinggi	129	2,577	Tinggi
61.	Kab. Dharmasraya	273	2,2170	Tinggi	172	2,3123	Tinggi
62.	Kab. Kep. Mentawai	365	1,0356	Sedang	225	2,0681	Tinggi
63.	Kab. Lima Puluh Kota	139	2,5662	Tinggi	118	2,6477	Tinggi
64.	Kab. Padang Pariaman	217	2,3873	Tinggi	195	2,2136	Tinggi
65.	Kab. Pasaman	67	2,7613	Tinggi	4	3,2618	Sangat tinggi
66.	Kab. Pasaman Barat	211	2,4012	Tinggi	139	2,4756	Tinggi
67.	Kab. Pesisir Selatan	108	2,6412	Tinggi	228	2,0567	Tinggi
68.	Kab. Sijunjung	177	2,4940	Tinggi	121	2,625	Tinggi
69.	Kab. Solok	181	2,4774	Tinggi	273	1,7759	Sedang
70.	Kab. Solok Selatan	228	2,3497	Tinggi	307	1,4536	Sedang
71.	Kab. Tanah Datar	55	2,7950	Tinggi	100	2,7492	Tinggi
72.	Kota Bukittinggi	55	2,5769	tinggi	74	1,8254	Sedang
73.	Kota Padang	42	2,6659	tinggi	58	2,2428	Tinggi
74.	Kota Padang Panjang	45	2,6515	tinggi	51	2,4721	Tinggi
75.	Kota Pariaman	59	2,5375	tinggi	46	2,6054	Tinggi
76.	Kota Payakumbuh	43	2,6563	tinggi	24	2,9600	Tinggi
77.	Kota Sawahlunto	10	3,0257	sangat tinggi	18	3,0303	Sangat tinggi
78.	Kota Solok	13	2,9974	Tinggi	19	3,0248	Sangat tinggi
79.	Prov. Riau	16	2,3479	tinggi	25	1,9955	Sedang
80.	Kab. Bengkalis	213	2,3941	Tinggi	87	2,8139	Tinggi
81.	Kab. Indragiri Hilir	245	2,3209	Tinggi	179	2,2618	Tinggi
82.	Kab. Indragiri Hulu	284	2,1766	Tinggi	115	2,6676	Tinggi
83.	Kab. Kampar	233	2,3419	Tinggi	316	1,3941	Sedang
84.	Kab. Kepulauan Meranti				299	1,5354	Sedang
85.	Kab. Kuantan Singingi	162	2,2564	Tinggi	145	2,4649	Tinggi
86.	Kab. Pelalawan	339	1,8833	Sedang	269	1,7999	Sedang
87.	Kab. Rokan Hilir	296	2,1381	Tinggi			
88.	Kab. Rokan Hulu	301	2,1246	Tinggi	311	1,4250	Sedang
89.	Kab. Siak	119	2,6176	Tinggi	117	2,6652	Tinggi
90.	Kota Dumai	50	2,6199	tinggi	66	2,0986	Tinggi
91.	Kota Pekanbaru	72	2,3997	tinggi	83	1,6580	Sedang
92.	Prov. Jambi	14	2,4166	tinggi	17	2,2188	Tinggi
93.	Kab. Batang Hari	189	2,4530	Tinggi	122	2,6239	Tinggi
94.	Kab. Bungo	153	2,5407	Tinggi	45	3,0017	Sangat tinggi
95.	Kab. Kerinci	196	2,4365	Tinggi	300	1,5205	Sedang
96.	Kab. Merangin	237	2,3398	Tinggi	252	1,9064	Sedang





Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
97.	Kab. Muaro Jambi	216	2,3893	Tinggi	276	1,7587	Sedang
98.	Kab. Sarolangun	77	2,7340	Tinggi	246	1,9378	Sedang
99.	Kab. Tanjung Jabung Barat	351	1,7974	Sedang	272	1,7857	Sedang
100.	Kab. Tanjung Jabung Timur	336	1,9072	Sedang	216	2,1307	Tinggi
101.	Kab. Tebo	184	2,4659	Tinggi	248	1,9331	Sedang
102.	Kota Jambi	65	2,4889	tinggi	70	2,0018	Tinggi
103.	Kota Sungai Penuh				48	2,5136	Tinggi
104.	Prov. Sumatera Selatan	10	2,4455	tinggi	13	2,2961	Tinggi
105.	Kab. Banyuasin	187	2,4628	Tinggi	97	2,7559	Tinggi
106.	Kab. Empat Lawang	201	2,4190	Tinggi	141	2,4692	Tinggi
107.	Kab. Lahat	225	2,3590	Tinggi	130	2,556	Tinggi
108.	Kab. Muara Enim	240	2,3341	Tinggi	70	2,9157	Tinggi
109.	Kab. Musi Banyuasin	131	2,5819	Tinggi	63	2,9441	Tinggi
110.	Kab. Musi Rawas	307	2,0780	Tinggi	182	2,2484	Tinggi
111.	Kab. Musi Rawas Utara						
112.	Kab. Ogan Ilir	169	2,5141	Tinggi	107	2,7199	Tinggi
113.	Kab. Ogan Komering Ilir	98	2,6746	Tinggi	110	2,6911	Tinggi
114.	Kab. Ogan Komering Ulu	248	2,3163	Tinggi	214	2,1366	Tinggi
115.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan				112	2,6736	Tinggi
116.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	165	2,5263	Tinggi	204	2,1745	Tinggi
117.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir						
118.	Kota Lubuk Linggau	48	2,6323	tinggi	52	2,4695	Tinggi
119.	Kota Pagaralam	77	2,2970	tinggi	56	2,2698	Tinggi
120.	Kota Palembang	30	2,8250	tinggi	42	2,6743	Tinggi
121.	Kota Prabumulih	85	2,2028	tinggi	47	2,5486	Tinggi
122.	Prov. Bengkulu	28	1,9804	sedang	24	2,0580	Tinggi
123.	Kab. Bengkulu Selatan	142	2,5640	Tinggi	243	1,9528	Sedang
124.	Kab. Bengkulu Tengah	345	1,8261	Sedang	218	2,1123	Tinggi
125.	Kab. Bengkulu Utara	241	2,3334	Tinggi	168	2,3271	Tinggi
126.	Kab. Kaur	190	2,4469	Tinggi	171	2,3153	Tinggi
127.	Kab. Kepahiang	203	2,4171	Tinggi	318	1,3670	Sedang
128.	Kab. Lebong	258	2,2668	Tinggi	241	1,9687	Sedang
129.	Kab. Muko Muko	161	2,5300	Tinggi	233	2,0285	Tinggi
130.	Kab. Rejang Lebong	200	2,4233	Tinggi	288	1,6483	Sedang
131.	Kab. Seluma	362	1,3742	Sedang	291	1,623	Sedang
132.	Kota Bengkulu	78	2,2924	tinggi	79	1,7248	Sedang
133.	Prov. Lampung	24	2,0750	tinggi	29	1,8189	Sedang
134.	Kab. Lampung Barat	242	2,3317	Tinggi	344	1,1300	Sedang
135.	Kab. Lampung Selatan	152	2,5417	Tinggi	256	1,885	Sedang
136.	Kab. Lampung Tengah	103	2,6576	Tinggi	102	2,7393	Tinggi
137.	Kab. Lampung Timur	299	2,1275	Tinggi	164	2,3583	Tinggi
138.	Kab. Lampung Utara	207	2,4128	Tinggi	192	2,2172	Tinggi
139.	Kab. Mesuji						
140.	Kab. Pesawaran	313	2,0232	Tinggi	236	2,0054	Tinggi
141.	Kab. Pesisir Barat						
142.	Kab. Pringsewu						



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
143.	Kab. Tanggamus	267	2,2515	Tinggi	350	1,0412	Sedang
144.	Kab. Tulang Bawang	235	2,3409	Tinggi	303	1,5100	Sedang
145.	Kab. Tulang Bawang Barat						
146.	Kab. Way Kanan	361	1,4793	Sedang	140	2,4717	Tinggi
147.	Kota Bandar Lampung	64	2,4923	tinggi	35	2,8049	Tinggi
148.	Kota Metro	57	2,5656	tinggi	91	0,9733	Rendah
149.	Prov. Bangka Belitung	12	2,4241	tinggi	12	2,3393	Tinggi
150.	Kab. Bangka	81	2,7265	Tinggi	165	2,3581	Tinggi
151.	Kab. Bangka Barat	148	2,5529	Tinggi	138	2,4776	Tinggi
152.	Kab. Bangka Selatan	206	2,4137	Tinggi	189	2,2264	Tinggi
153.	Kab. Bangka Tengah	95	2,6856	Tinggi	159	2,3973	Tinggi
154.	Kab. Belitung	76	2,7343	Tinggi	148	2,4493	Tinggi
155.	Kab. Belitung Timur	56	2,7853	Tinggi	57	2,9551	Tinggi
156.	Kota Pangkal Pinang	47	2,6336	tinggi	53	2,4173	Tinggi
157.	Prov. Kepulauan Riau	8	2,5164	Tinggi	5	2,6900	Tinggi
158.	Kab. Bintan	47	2,8179	Tinggi	30	3,0667	Sangat tinggi
159.	Kab. Karimun	133	2,5764	Tinggi	38	3,0428	Sangat tinggi
160.	Kab. Kepulauan Anambas				161	2,3777	Tinggi
161.	Kab. Lingga	232	2,3419	Tinggi	205	2,1720	Tinggi
162.	Kab. Natuna	197	2,4274	Tinggi	124	2,606	Tinggi
163.	Kota Batam	60	2,5253	tinggi	39	2,7631	Tinggi
164.	Kota Tanjung Pinang	44	2,6553	tinggi	32	2,8426	Tinggi
165.	Prov. DKI Jakarta	13	2,4218	tinggi	6	2,6620	Tinggi
166.	Prov. Jawa Barat	4	2,6923	tinggi	4	2,6934	Tinggi
167.	Kab. Bandung	63	2,7692	tinggi	234	2,0184	Tinggi
168.	Kab. Bandung Barat	166	2,5256	Tinggi	69	2,9166	Tinggi
169.	Kab. Bekasi	88	2,7042	Tinggi	177	2,2808	Tinggi
170.	Kab. Bogor	16	3,0754	Sangat tinggi	11	3,1874	Sangat tinggi
171.	Kab. Ciamis	87	2,7051	tinggi	12	3,1846	Sangat tinggi
172.	Kab. Cianjur	104	2,6564	Tinggi	79	2,8605	Tinggi
173.	Kab. Cirebon	120	2,6169	Tinggi	123	2,6134	Tinggi
174.	Kab. Garut	39	2,8425	Tinggi	113	2,6706	Tinggi
175.	Kab. Indramayu	147	2,5542	Tinggi	103	2,7384	Tinggi
176.	Kab. Karawang	83	2,7195	Tinggi	150	2,4410	Tinggi
177.	Kab. Kuningan	89	2,7024	Tinggi	217	2,1279	Tinggi
178.	Kab. Majalengka	54	2,7972	Tinggi	119	2,6281	Tinggi
179.	Kab. Pangandaran						
180.	Kab. Purwakarta	128	2,5974	Tinggi	74	2,8982	Tinggi
181.	Kab. Subang	116	2,6205	Tinggi	109	2,6921	Tinggi
182.	Kab. Sukabumi	45	2,8237	Tinggi	34	3,0523	Sangat tinggi
183.	Kab. Sumedang	136	2,5742	Tinggi	158	2,4028	Tinggi
184.	Kab. Tasikmalaya	151	2,5436	Tinggi	75	2,891	Tinggi
185.	Kota Bandung	12	3,0108	sangat tinggi	23	2,9610	Tinggi
186.	Kota Banjar	29	2,8259	tinggi	36	2,7947	Tinggi
187.	Kota Bekasi	40	2,6917	tinggi	31	2,8430	Tinggi





Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
188.	Kota Bogor	17	2,9456	tinggi	37	2,7811	Tinggi
189.	Kota Cimahi	6	3,0907	sangat tinggi	26	2,9543	Tinggi
190.	Kota Cirebon	25	2,8518	tinggi	34	2,8232	Tinggi
191.	Kota Depok	4	3,1486	sangat tinggi	9	3,1212	Sangat tinggi
192.	Kota Sukabumi	23	2,8689	tinggi	30	2,8960	Tinggi
193.	Kota Tasikmalaya	54	2,6020	tinggi	64	2,1057	Tinggi
194.	Prov. Jawa Tengah	2	2,9208	Tinggi	2	2,8963	Tinggi
195.	Kab. Banjarnegara	62	2,7699	Tinggi	120	2,6264	Tinggi
196.	Kab. Banyumas	61	2,7718	Tinggi	90	2,8087	Tinggi
197.	Kab. Batang	84	2,7156	Tinggi	54	2,9729	Tinggi
198.	Kab. Blora	69	2,7475	Tinggi	68	2,9177	Tinggi
199.	Kab. Boyolali	52	2,7998	Tinggi	52	2,9773	Tinggi
200.	Kab. Brebes	111	2,6269	Tinggi	262	1,8489	Sedang
201.	Kab. Cilacap	71	2,7472	Tinggi	94	2,7713	Tinggi
202.	Kab. Demak	41	2,8397	Tinggi	76	2,8818	Tinggi
203.	Kab. Grobogan	36	2,8594	Tinggi	62	2,9468	Tinggi
204.	Kab. Jepara	9	3,0893	Sangat tinggi	3	3,2739	Sangat tinggi
205.	Kab. Karanganyar	50	2,8075	Tinggi	77	2,8799	Tinggi
206.	Kab. Kebumen	96	2,6848	Tinggi	28	3,0839	Sangat tinggi
207.	Kab. Kendal	58	2,7798	Tinggi	42	3,0301	Sangat tinggi
208.	Kab. Klaten	106	2,6475	Tinggi	108	2,7022	Tinggi
209.	Kab. Kudus	11	3,0829	Sangat tinggi	105	2,7318	Tinggi
210.	Kab. Magelang	66	2,7651	Tinggi	89	2,8088	Tinggi
211.	Kab. Pati	51	2.8041	Tinggi	37	3,0470	Sangat tinggi
212.	Kab. Pekalongan				60	2,9524	Tinggi
213.	Kab. Pemalang	53	2,7981	Tinggi	47	2,9992	Tinggi
214.	Kab. Purbalingga	5	3,1332	Sangat tinggi	6	3,2406	Sangat Tinggi
215.	Kab. Purworejo	114	2,6215	Tinggi	53	2,9731	Tinggi
216.	Kab. Rembang	40	2,8421	Tinggi	19	3,1367	Sangat Tinggi
217.	Kab. Semarang	6	3,1177	Sangat tinggi	48	2,9938	Tinggi
218.	Kab. Sragen	79	2,7308	Tinggi	93	2,7772	Tinggi
219.	Kab. Sukoharjo	27	2,9106	Tinggi	26	3,0895	Sangat Tinggi
220.	Kab. Tegal	134	2,5756	Tinggi	136	2,4871	Tinggi
221.	Kab. Temanggung	48	2,8117	Tinggi	13	3,1489	Sangat Tinggi
222.	Kab. Wonogiri	126	2,6048	Tinggi	116	2,6657	Tinggi
223.	Kab. Wonosobo	32	2,8801	Tinggi	32	3,0559	Sangat Tinggi
224.	Kota Magelang	24	2,8629	tinggi	45	2,6260	Tinggi
225.	Kota Pekalongan	35	2,7356	tinggi	25	2,9579	Tinggi
226.	Kota Salatiga	20	2,9094	tinggi	10	3,1126	Sangat Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
227.	Kota Semarang	11	3,0257	sangat tinggi	1	3,2950	Sangat Tinggi
228.	Kota Surakarta	7	3,0823	sangat tinggi	3	3,1805	Sangat Tinggi
229.	Kota Tegal	9	3,0785	sangat tinggi	7	3,1292	Sangat Tinggi
230.	Prov. DI Yogyakarta	5	2,6554	tinggi	8	2,4930	Tinggi
231.	Kab. Bantul	13	3,0770	Sangat tinggi	86	2,8177	Tinggi
232.	Kab. Gunung Kidul	60	2,7727	tinggi	173	2,3073	Tinggi
233.	Kab. Kulon Progo	15	3,0758	Sangat tinggi	1	3,3465	Sangat tinggi
234.	Kab. Sleman	8	3,0923	Sangat tinggi	5	3,2614	Sangat Tinggi
235.	Kota Yogyakarta	3	3,1535	sangat tinggi	15	3,0620	Sangat Tinggi
236.	Prov. Jawa Timur	1	3,1482	tinggi	1	3,0576	Sangat Tinggi
237.	Kab. Bangkalan	38	2,8452	Tinggi	8	3,2089	Sangat Tinggi
238.	Kab. Banyuwangi	26	2,9464	Tinggi	16	3,1452	Sangat Tinggi
239.	Kab. Blitar	72	2,7448	Tinggi	35	3,0510	Sangat Tinggi
240.	Kab. Bojonegoro	33	2,8692	Tinggi	22	3,1208	Sangat Tinggi
241.	Kab. Bondowoso	42	2,8358	Tinggi	40	3,0381	Sangat Tinggi
242.	Kab. Gresik	24	2,9754	Tinggi	21	3,1222	Sangat Tinggi
243.	Kab. Jember	94	2,6859	Tinggi	111	2,6823	Tinggi
244.	Kab. Jombang	3	3,3756	Sangat tinggi	10	3,1910	Sangat tinggi
245.	Kab. Kediri	23	3,0002	Sangat tinggi	36	3,0487	Sangat tinggi
246.	Kab. Lamongan	25	2,9556	Tinggi	20	3,1228	Sangat Tinggi
247.	Kab. Lumajang	19	3,0555	Sangat tinggi	24	3,0926	Sangat Tinggi
248.	Kab. Madiun	37	2,8452	Tinggi	49	2,9913	Tinggi
249.	Kab. Magetan	29	2,9083	tinggi	50	2,9911	Tinggi
250.	Kab. Malang	28	2,9086	Tinggi	95	2,7696	Tinggi
251.	Kab. Mojokerto	31	2,8990	Tinggi	41	3,0323	Sangat Tinggi
252.	Kab. Nganjuk	44	2,8337	Tinggi	99	2,7506	Tinggi
253.	Kab. Ngawi	20	3,0550	Sangat tinggi	58	2,9547	Tinggi
254.	Kab. Pacitan	4	3,2124	Sangat tinggi	7	3,2400	Sangat Tinggi
255.	Kab. Pamekasan	12	3,0789	Sangat tinggi	23	3,1159	Sangat Tinggi
256.	Kab. Pasuruan	30	2,9006	Tinggi	46	3,0001	Sangat Tinggi





Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
257.	Kab. Ponogoro	22	3,0153	Sangat tinggi	15	3,1455	Sangat Tinggi
258.	Kab. Probolinggo	57	2,7847	Tinggi	91	2,8039	Tinggi
259.	Kab. Sampang	21	3,0329	Sangat tinggi	27	3,0856	Sangat Tinggi
260.	Kab. Sidoarjo	17	3,0732	Sangat tinggi	17	3,1415	Sangat Tinggi
261.	Kab. Situbondo	43	2,8356	Tinggi	33	3,0525	Sangat Tinggi
262.	Kab. Sumenep	18	3,0661	Sangat tinggi	84	2,849	Tinggi
263.	Kab. Trenggalek	34	2,8691	Tinggi	43	3,0183	Sangat Tinggi
264.	Kab. Tuban	1	3,4787	Sangat tinggi	9	3,2079	Sangat Tinggi
265.	Kab. Tulungagung	2	3,4298	Sangat tinggi	25	3,0918	Sangat Tinggi
266.	Kota Batu	31	2,8244	tinggi	40	2,7115	Tinggi
267.	Kota Blitar	22	2,8763	tinggi	17	3,0369	Sangat Tinggi
268.	Kota Kediri	19	2,9179	tinggi	14	3,0827	Sangat Tinggi
269.	Kota Madiun	2	3,2144	sangat tinggi	2	3,2157	Sangat Tinggi
270.	Kota Malang	14	2,9634	tinggi	11	3,1045	Sangat Tinggi
271.	Kota Mojokerto	8	3,0803	sangat tinggi	6	3,1473	Sangat Tinggi
272.	Kota Pasuruan	16	2,9458	tinggi	12	3,0940	Sangat Tinggi
273.	Kota Probolinggo	18	2,9234	tinggi	4	3,1601	Sangat Tinggi
274.	Kota Surabaya	21	2,8956	tinggi	13	3,0918	Sangat Tinggi
275.	Prov. Banten	23	2,1163	tinggi	20	2,1961	Tinggi
276.	Kab. Lebak	100	2,6657	Tinggi	338	1,1942	Sedang
277.	Kab. Pandeglang	86	2,7144	Tinggi	279	1,7483	Sedang
278.	Kab. Serang	113	2,6258	Tinggi	29	3,0763	Sangat Tinggi
279.	Kab. Tangerang	49	2,8090	Tinggi	80	2,8569	Tinggi
280.	Kota Cilegon	32	2,7863	tinggi	28	2,9260	Tinggi
281.	Kota Serang	49	2,6305	tinggi	44	2,6335	Tinggi
282.	Kota Tangerang	1	3,2320	sangat tinggi	5	3,1533	Sangat tinggi
283.	Kota Tangerang Selatan						
284.	Prov. Bali	27	1,9960	sedang	28	1,8767	Sedang
285.	Kab. Badung				322	1,3153	Sedang
286.	Kab. Bangli	304	2,1168	Tinggi	366	0,7093	Rendah
287.	Kab. Buleleng	130	2,5831	Tinggi	92	2,7829	Tinggi
288.	Kab. Gianyar	125	2,6078	Tinggi	229	2,0505	Tinggi
289.	Kab. Jembrana	70	2,7473	Tinggi	114	2,6704	Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
290.	Kab. Karangasem	173	2,5032	Tinggi	312	1,4245	Sedang
291.	Kab. Klungkung	168	2,5151	Tinggi	83	2,8524	Tinggi
292.	Kab. Tabanan	80	2,7273	Tinggi	133	2,5262	Tinggi
293.	Kota Denpasar	15	2,9594	tinggi	41	2,6986	Tinggi
294.	Prov. Nusa Tenggara Barat	6	2,5824	tinggi	18	2,1986	Tinggi
295.	Kab. Bima	156	2,5353	Tinggi	154	2,4250	Tinggi
296.	Kab. Dompu	293	2,1398	Tinggi	149	2,4466	Tinggi
297.	Kab. Lombok Barat	110	2,6310	Tinggi	64	2,9325	Tinggi
298.	Kab. Lombok Tengah	253	2,2913	Tinggi	261	1,8554	Sedang
299.	Kab. Lombok Timur	112	2,6267	Tinggi	153	2,4302	Tinggi
300.	Kab. Lombok Utara	276	2,2035	Tinggi	203	2,1787	Tinggi
301.	Kab. Sumbawa	99	2,6745	Tinggi	245	1,9404	Sedang
302.	Kab. Sumbawa Barat	115	2,6213	Tinggi	201	2,1859	Tinggi
303.	Kota Bima				88	1,5233	Sedang
304.	Kota Mataram	36	2,7355	tinggi	29	2,9239	Tinggi
305.	Prov. Nusa Tenggara Timur	22	2,1500	tinggi	31	1,7313	Sedang
306.	Kab. Alor	294	2,1396	Tinggi	174	2,3050	Tinggi
307.	Kab. Belu	194	2,4394	Tinggi	353	0,9588	Rendah
308.	Kab. Ende	256	2,2754	Tinggi	371	0,5291	Rendah
309.	Kab. Flores Timur	261	2,2595	Tinggi	352	0,9825	Rendah
310.	Kab. Kupang	170	2,5096	Tinggi	184	2,2428	Tinggi
311.	Kab. Lembata	263	2,2528	Tinggi	354	0,9529	Rendah
312.	Kab. Malaka						
313.	Kab. Manggarai	246	2,3200	Tinggi	209	2,1502	Tinggi
314.	Kab. Manggarai Barat	191	2,4469	Tinggi			
315.	Kab. Manggarai Timur	826	2,2465	Tinggi	155	2,4236	Tinggi
316.	Kab. Nagekeo	195	2,5368	Tinggi	167	2,3279	Tinggi
317.	Kab. Ngada	255	2,2804	Tinggi	363	0,7524	Rendah
318.	Kab. Rote Ndao	308	2,0528	tinggi	231	2,0440	Tinggi
319.	Kab. Sabu Raijua						
320.	Kab. Sikka	236	2,3405	Tinggi	365	0,7187	Rendah
321.	Kab. Sumba Barat	209	2,4087	Tinggi	211	2,148	Tinggi
322.	Kab. Sumba Darat Daya	337	1,9010	Sedang	271	1,7866	Sedang
323.	Kab. Sumba Tengah	288	2,1661	Tinggi	270	1,7903	Sedang
324.	Kab. Sumba Timur	298	2,1323	Tinggi	194	2,2144	Tinggi
325.	Kab. Timor Tengah Selatan	310	2,0438	Tinggi	356	0,9290	Rendah
326.	Kab. Timor Tengah Utara	323	1,9739	Sedang	186	2,2366	Tinggi
327.	Kota Kupang				65	2,1003	Tinggi
328.	Prov. Kalimantan Barat	7	2,5300	tinggi	22	2,1457	Tinggi
329.	Kab. Bengkayang	171	2,5066	Tinggi	264	1,8397	Sedang
330.	Kab. Kapuas hulu	163	2,5272	Tinggi	187	2,2352	Tinggi
331.	Kab. Kayong Utara	285	2,1728	tinggi	327	1,2869	Sedang
332.	Kab. Ketapang	135	2,5742	Tinggi	220	2,1018	Tinggi
333.	Kab. Kubu Raya	183	2,4663	Tinggi	321	1,3545	Sedang
334.	Kab. Landak	210	2,4031	Tinggi	162	2,3751	Tinggi
335.	Kab. Melawi	243	2,3224	Tinggi	206	2,1713	Tinggi
336.	Kab. Pontianak	121	2,6149	Tinggi	198	2,1952	Tinggi
337.	Kab. Sambas	154	2,5405	tinggi	313	1,4200	Sedang
338.	Kab. Sanggau	186	2,4629	Tinggi	221	2,1011	Tinggi
339.	Kab. Sekadau	193	2,4400	Tinggi	283	1,7023	Sedang
340.	Kab. Sintang	118	2,6179	tinggi	247	1,9354	Sedang





Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
341.	Kota Pontianak	46	2,6457	tinggi	27	2,9307	Tinggi
342.	Kota Singkawang	63	2,4957	tinggi	76	1,7772	Sedang
343.	Prov. Kalimantan Tengah	20	2,2176	tinggi	9	2,4894	Tinggi
344.	Kab. Barito Selatan	259	2,2651	Tinggi	254	1,8929	Sedang
345.	Kab. Barito Timur	257	2,2739	Tinggi	335	1,2136	Sedang
346.	Kab. Barito Utara	202	2,4186	Tinggi	359	0,8588	Rendah
347.	Kab. Gunung Mas	215	2,3893	Tinggi	208	2,1533	Tinggi
348.	Kab. Kapuas	167	2,5249	Tinggi	332	1,2631	Sedang
349.	Kab. Katingan	204	2,4155	Tinggi	268	1,8041	Sedang
350.	Kab. Kotawaringin Barat	149	2,5485	Tinggi	151	2,4381	Tinggi
351.	Kab. Kotawaringin Timur	266	2,2519	Tinggi	237	2,0042	Tinggi
352.	Kab. Lamandau	155	2,5374	Tinggi	239	1,9763	Sedang
353.	Kab. Murung Raya	318	1,9891	Sedang	191	2,2205	Tinggi
354.	Kab. Pulang Pisang	291	2,1515	Tinggi	317	1,3744	Sedang
355.	Kab. Seruyan	278	2,1863	Tinggi	183	2,2441	Tinggi
356.	Kab. Sukamara	219	2,3822	Tinggi	199	2,1907	Tinggi
357.	Kota Palangkaraya	87	2,1026	tinggi	89	1,2890	Sedang
358.	Prov. Kalimantan Selatan	19	2,2748	tinggi	11	2,4338	Tinggi
359.	Kab. Balangan	162	2,5286	Tinggi	106	2,7273	Tinggi
360.	Kab. Banjar	137	2,5720	Tinggi	78	2,8688	Tinggi
361.	Kab. Barito Kuala	59	2,7741	Tinggi	67	2,9251	Tinggi
362.	Kab. Hulu Sungai Selatan	78	2,7337	Tinggi	55	2,9706	Tinggi
363.	Kab. Hulu Sungai Tengah	102	2,6578	Tinggi	156	2,4073	Tinggi
364.	Kab. Hulu Sungai Utara	74	2,7373	Tinggi	101	2,7469	Tinggi
365.	Kab. Kotabaru	160	2,5321	Tinggi	98	2,7518	Tinggi
366.	Kab. Tabalong	295	2,1388	Tinggi	249	1,9242	Sedang
367.	Kab. Tanah Bumbu	117	2,6196	Tinggi	85	2,8361	Tinggi
368.	Kab. Tanah Laut	343	1,8388	sedang	143	2,4662	Tinggi
369.	Kab. Tapin	158	2,5327	Tinggi	96	2,7627	Tinggi
370.	Kota Banjarbaru	52	2,6122	tinggi	54	2,3993	Tinggi
371.	Kota Banjarmasin	38	2,7030	tinggi	57	2,2487	Tinggi
372.	Prov. Kalimantan Timur	9	2,5085	tinggi	7	2,5914	Tinggi
373.	Kab. Berau	97	2,6787	Tinggi	61	2,9506	Tinggi
374.	Kab. Kutai Barat	199	2,4234	Tinggi	142	2,4662	Tinggi
375.	Kab. Kutai Kartanegara	150	2,5446	Tinggi	14	3,1468	Sangat tinggi
376.	Kab. Kutai Timur	265	2,2524	Tinggi	152	2,4306	Tinggi
377.	Kab. Paser	157	2,5342	Tinggi	207	2,1570	Tinggi
378.	Kab. Penajam Paser Utara	93	2,6901	Tinggi	125	2,604	Tinggi
379.	Kab. Mahakam Hulu						
380.	Kota Balikpapan	26	2,8486	tinggi	8	3,1278	Sangat tinggi
381.	Kota Bontang	39	2,6979	tinggi	16	3,0378	Sangat tinggi
382.	Kota Samarinda	27	2,8468	tinggi	20	2,9782	Tinggi
383.	Prov. Kalimantan utara						
384.	Kab. Bulungan	109	2,6392	Tinggi	65	2,9273	Tinggi
385.	Kab. Malinau	105	2,6501	Tinggi	73	2,9015	Tinggi
386.	Kab. Nunukan	91	2,6955	Tinggi	125	2,604	Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
387.	Kab. Tana Tidung	350	1,8032	Sedang	134	2,5099	Tinggi
388.	Kota Tarakan				21	2,9765	Tinggi
389.	Prov Sulawesi Utara	11	2,4341	tinggi	14	2,2822	Tinggi
390.	Kab. Bolaang Mongondow	359	1,5168	Sedang	362	0,8254	Rendah
391.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan						
392.	Kab. Bolaang Mongondow Timur						
393.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	281	2,1813	Tinggi	200	2,1903	Tinggi
394.	Kab. Kepulauan Sangihe	176	2,4948	Tinggi	360	0,8536	Rendah
395.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	305	2,1100	Tinggi	348	1,0529	Sedang
396.	Kab. Kepulauan Taulad	270	2,2241	Tinggi	308	1,4514	Sedang
397.	Kab. Minahasa	234	2,3410	Tinggi	212	2,1474	Tinggi
398.	Kab. Minahasa Selatan	226	2,3534	Tinggi	324	1,3049	Sedang
399.	Kab. Minahasa Tenggara	280	2,1832	Tinggi	341	1,1763	Sedang
400.	Kab. Minahasa Utara	144	2,5626	Tinggi	347	1,0710	Sedang
401.	Kota Bitung	41	2,6813	tinggi	73	1,8323	Sedang
402.	Kota Kotamobagu	90	2,7767	sedang	86	1,6026	Sedang
403.	Kota Manado	70	2,4077	tinggi	22	2,9759	Tinggi
404.	Kota Tomohon	80	2,2644	tinggi	82	1,6852	Sedang
405.	Prov. Sulawesi Tengah	21	2,2094	tinggi	15	2,2540	Tinggi
406.	Kab. Banggai	145	2,5604	Tinggi	210	2,1494	Tinggi
407.	Kab. Banggai Kepulauan	297	2,1357	Tinggi	263	1,8465	Sedang
408.	Kab. Banggai Laut						
409.	Kab. Buol	349	1,8059	Sedang	346	1,0900	Sedang
410.	Kab. Donggala	174	2,5053	Tinggi	127	2,5948	Tinggi
411.	Kab. Morowali	279	2,1841	Tinggi	301	1,5134	Sedang
412.	Kab. Morowali Utara						
413.	Kab. Parigi Moutong	175	2,5003	Tinggi	131	2,5503	Tinggi
414.	Kab. Poso	205	2,4140	Tinggi	287	1,6610	Sedang
415.	Kab. Sigi						
416.	Kab. Tojo Una-Una	251	2,3053	Tinggi	250	1,9212	Sedang
417.	Kab. Tolitoli	353	1,7869	Sedang	251	1,9143	Sedang
418.	Kota Palu	68	2,4131	tinggi	69	2,0021	Tinggi
419.	Prov. Sulawesi Selatan	3	2,7876	Tinggi	3	2,7260	Tinggi
420.	Kab. Bantaeng	143	2,5635	Tinggi	163	2,3646	Tinggi
421.	Kab. Barru	132	2,5788	Tinggi	59	2,9524	Tinggi
422.	Kab. Bone	85	2,7152	Tinggi	51	2,9808	Tinggi
423.	Kab. Bulukumba	159	2,5323	Tinggi	226	2,0671	Tinggi
424.	Kab. Enrekang	7	3,1016	Sangat tinggi	82	2,8526	Tinggi
425.	Kab. Gowa	64	2,7680	Tinggi	2	3,2897	Sangat tinggi
426.	Kab. Jeneponto	239	2,3392	Tinggi	364	0,7198	Rendah
427.	Kab. Kep. Selayar	254	2,2895	Tinggi	330	1,2667	Sedang
428.	Kab. Luwu	311	2,0288	Tinggi	253	1,8996	Sedang
429.	Kab. Luwu Timur	46	2,8226	Tinggi	18	3,1410	Sangat tinggi





Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
430.	Kab. Luwu Utara	14	3,0763	Sangat tinggi	31	3,0573	Sangat tinggi
431.	Kab. Maros	127	2,6038	Tinggi	238	1,9865	Sedang
432.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	73	2,7396	Tinggi	219	2,1108	Tinggi
433.	Kab. Pinrang	90	2,6979	Tinggi	242	1,9566	Sedang
434.	Kab. Sindereng Rappang	101	2,6630	Tinggi	240	1,9712	Sedang
435.	Kab. Sinjai	138	2,5706	Tinggi	81	2,8532	Tinggi
436.	Kab. Soppeng	122	2,6108	Tinggi	71	2,9118	Tinggi
437.	Kab. Takalar	141	2,5648	Tinggi	193	2,2145	Tinggi
438.	Kab. Tana Toraja	82	2,7216	Tinggi	72	2,9082	Tinggi
439.	Kab. Toraja Utara						
440.	Kab. Wajo	75	2,7360	Tinggi	169	2,3260	Tinggi
441.	Kota Makassar	28	2,8342	tinggi	55	2,056	Tinggi
442.	Kota Palopo	51	2,6153	tinggi	43	2,468	Tinggi
443.	Kota Pare-Pare	34	2,7574	tinggi	38	2,769	Tinggi
444.	Prov. Sulawesi Tenggara	31	1,7544	sedang	27	1,8989	Sedang
445.	Kab. Bombana	247	2,3186	Tinggi	333	1,2502	Sedang
446.	Kab. Buton	302	2,1205	Tinggi	275	1,7600	Sedang
447.	Kab. Buton Utara	286	2,1677	Tinggi	372	0,4536	Rendah
448.	Kab. Kolaka	146	2,5578	Tinggi	339	1,1845	Sedang
449.	Kab. Kolaka Utara	314	2,0220	Tinggi	224	2,0823	Tinggi
450.	Kab. Kolaka Timur						
451.	Kab. Konawe	348	1,8158	Sedang	370	0,5748	Rendah
452.	Kab. Konawe Selatan	221	2,3774	Tinggi	282	1,7348	Sedang
453.	Kab. Konawe Utara	358	1,5781	Sedang	373	0,1656	Rendah
454.	Kab. Muna	329	1,9453	Sedang	128	2,5876	Tinggi
455.	Kab. Wakatobi	164	2,5266	Tinggi	351	1,0285	Sedang
456.	Kota Bau-Bau	53	2,6120	tinggi	77	1,7679	Sedang
457.	Kota Kendari	56	2,5710	tinggi	87	1,5992	Sedang
458.	Prov. Gorontalo	26	2,0091	tinggi	16	2,2263	Tinggi
459.	Kab. Boalemo	214	2,3912	tinggi	137	2,4859	Tinggi
460.	Kab. Bone Bolango	320	1,9873	sedang	215	2,1364	Tinggi
461.	Kab. Gorontalo	220	2,3804	tinggi	66	2,9270	Tinggi
462.	Kab. Gorontalo Utara	354	1,7662	sedang	319	1,3646	Sedang
463.	Kab. Pohuwato	92	2,6949	tinggi	44	3,0066	Sangat tinggi
464.	Kota Gorontalo	71	2,4066	Tinggi	68	2,0471	Tinggi
465.	Prov. Sulawesi Barat	15	2,3691	tinggi	21	2,1653	Tinggi
466.	Kab. Majene	249	2,3072	Tinggi	88	2,8106	Tinggi
467.	Kab. Mamasa	188	2,4540	Tinggi	340	1,1796	Sedang
468.	Kab. Mamuju	180	2,4791	Tinggi	160	2,3819	Tinggi
469.	Kab. Mamuju Utara	260	2,2649	Tinggi	222	2,0868	Tinggi
470.	Kab. Mamuju Tengah						
471.	Kab. Polewali Mandar	178	2,4912	Tinggi	197	2,1978	Tinggi
472.	Prov. Maluku	17	2,2924	tinggi	23	2,1043	Tinggi
473.	Kab. Buru	252	2,3051	Tinggi	326	1,2933	Sedang
474.	Kab. Buru Selatan				337	1,1949	Sedang



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
475.	Kab. Kepulauan Aru	355	1,7639	Sedang	336	1,1969	Sedang
476.	Kab. Konawe Kepulauan						
477.	Kab. Maluku Barat Daya						
478.	Kab. Maluku Tengah	283	2,1770	Tinggi	166	2,3453	Tinggi
479.	Kab. Maluku Tenggara	334	1,9131	Sedang	257	1,8835	Sedang
480.	Kab. Maluku Tenggara Barat	312	2,0254	Tinggi	267	1,8125	Sedang
481.	Kab. Seram Bagian Barat	333	1,9156	Sedang	235	2,0072	Tinggi
482.	Kab. Seram Bagian Timur	322	1,9815	Sedang	310	1,4397	Sedang
483.	Kota Ambon	79	2,2848	tinggi	72	1,8363	Sedang
484.	Kota Tual	88	2,0653	tinggi	81	1,7060	Sedang
485.	Prov. Maluku Utara	32	1,7535	sedang	33	1,3720	Sedang
486.	Kab. Halmahera Barat	338	1,8976	Sedang	309	1,4409	Sedang
487.	Kab. Halmahera Selatan	331	1,9435	Sedang	369	0,6040	Rendah
488.	Kab. Halmahera Tengah	289	2,1575	Tinggi	323	1,3066	Sedang
489.	Kab. Halmahera Timur	330	1,9450	Sedang	230	2,0462	Tinggi
490.	Kab. Halmahera Utara	229	2,3462	Tinggi	357	0,9163	Rendah
491.	Kab. Kepulauan Sula	272	2,2219	Tinggi	265	1,8295	Sedang
492.	Kab. Pulau Morotai				329	1,2786	Sedang
493.	Kab. Pulau Taliabu						
494.	Kota Ternate	81	2,2605	tinggi	60	2,2117	Tinggi
495.	Kota Tidore Kepulauan	67	2,4318	tinggi	84	1,6519	Sedang
496.	Prov. Papua	28	1,8598	sedang	26	1,9259	Sedang
497.	Kab. Asmat	327	1,9697	Sedang	274	1,7678	Sedang
498.	Kab. Biak Numfor	364	1,0889	Sedang	297	1,5508	Sedang
499.	Kab. Boven Digoel	344	1,8287	Sedang	304	1,4987	Sedang
500.	Kab. Deiyai						
501.	Kab. Dogiyai						
502.	Kab. Intan Jaya						
503.	Kab. Jayapura	224	2,3629	Tinggi	328	1,2836	Sedang
504.	Kab. Jayawijaya	356	1,7604	Sedang	258	1,8804	Sedang
505.	Kab. Keerom	316	2,0082	Tinggi	342	1,1411	Sedang
506.	Kab. Kepulauan Yapen	335	1,9100	Sedang	185	2,2386	Tinggi
507.	Kab. Lanny Jaya						
508.	Kab. Memberamo Raya	360	1,4914	Sedang	355	0,9470	Rendah
509.	Kab. Memberamo Tengah						
510.	Kab. Mappi	315	2,0135	Tinggi	285	1,6715	Sedang
511.	Kab. Marauke	287	2,1670	Tinggi	202	2,1798	Tinggi
512.	Kab. Mimika	282	2,1774	Tinggi	170	2,3230	Tinggi
513.	Kab. Nabire	292	2,1500	Tinggi	255	1,8903	Sedang
514.	Kab. Nduga						
515.	Kab. Paniai				368	0,6224	Rendah
516.	Kab. Pegunungan Bintang	328	1,9629	Sedang	290	1,6288	Sedang
517.	Kab. Puncak						
518.	Kab. Puncak Jaya	342	1,8391	Sedang	292	1,6118	Sedang
519.	Kab. Sarmi				227	2,0630	Tinggi
520.	Kab. Supiori	303	2,1190	Tinggi	305	1,4932	Sedang
521.	Kab. Tolikara	352	1,7895	sedang	295	1,5803	Sedang
522.	Kab. Waropen	340	1,8558	Sedang	232	2,0307	Tinggi
523.	Kab. Yahukimo	357	1,5840	Sedang	367	0,6343	Rendah
524.	Kab. Yalimo						





Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2011			2012		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
525.	Kota Jayapura				59	2,2144	Tinggi
526.	Prov. Papua Barat				32	1,6992	Sedang
527.	Kab. Fakfak	33	1,4074	sedang	289	1,6476	Sedang
528.	Kab. Kaimana				277	1,7576	Sedang
529.	Kab. Manokwari	325	1,9728	Sedang			
530.	Kab. Manokwari Selatan						
531.	Kab. Maybrat						
532.	Kab. Pungenungan Arfak						
533.	Kab. Raja Ampat				358	0,8693	Rendah
534.	Kab. Sorong	326	1,9702	Sedang	320	1,3606	Sedang
535.	Kab. Sorong Selatan	238	2,3395	Tinggi	293	1,6060	Sedang
536.	Kab. Tambrau	324	1,9735	Sedang			
537.	Kab. Teluk Bintuni						
538.	Kab. Teluk Wondama				315	1,3992	Sedang
539.	Kota Sorong	290	2,1534	Tinggi	71	1,8824	Sedang

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-2818 Tahun 2013.

Tabel V.12 Peringkat *Doing Business* Negara ASEAN Tahun 2011 - 2014

No.	Negara	2011	2012	2013	2014
1.	Singapura	1	1	1	1
2.	Thailand	16	17	18	18
3.	Malaysia	23	18	12	6
4.	Brunei Darussalam	86	83	79	59
5.	Vietnam	90	98	99	99
6.	Indonesia	126	129	128	120
7.	Philipina	134	136	138	108
8.	Kamboja	138	138	133	137
9.	Laos			163	159

Sumber : *Doing Business in a more transparent world*, <http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013>; <http://www.doingbusiness.org/-/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-reports/English/DB14-Full-Report.pdf> 2014.



Tabel V.13 Peringkat E-Government Negara ASEAN Tahun 2010 - 2014

No.	Country	2010		2012		2014	
		Rank	Index	Rank	Index	Rank	Index
1.	Singapore	11	0.7476	10	0.8474	3	0.9076
2.	Malaysia	32	0.6101	40	0.6703	52	0.6115
3.	Brunei Darussalam	68	0.4796	54	0.6250	86	0.5042
4.	Vietnam	90	0.4454	83	0.5217	99	0.4705
5.	Philippines	78	0.4637	88	0.5130	95	0.4768
6.	Thailand	76	0.4653	92	0.5093	102	0.4631
7.	Indonesia	109	0.4026	97	0.4949	106	0.4487
8.	Laos	151	0.2637	153	0.2935	152	0.2659
9.	Kamboja	140	0.2878	155	0.2902	139	0.2999
10.	Myanmar	141	0.2818	160	0.2703	175	0.1869

Sumber : http://unpan3.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2014-survey/e-gov_complete_survey-2014.pdf

Tabel V.14 Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2008 - 2013

No.	Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Singapura	9,2	9,2	9,3	9,2	87	86
2.	Brunei Darussalam	0	5,5	5,5	5,2	55	60
3.	Malaysia	5,1	4,5	4,4	4,3	49	50
4.	Thailand	3,5	3,4	3,5	3,4	37	35
5.	Indonesia	2,6	2,8	2,8	3,0	32	32
6.	Vietnam	2,7	2,7	2,7	2,9	31	31
7.	Philipina	2,3	2,4	2,4	2,6	34	36
8.	Kamboja	1,8	2	2,1	2,1	22	20
9.	Laos	2	2	2,1	2,2	21	26
10.	Myanmar	1,3	1,4	1,4	1,5	15	21

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara 2010, Bappenas; *Corruption Perception Index 2011*, http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruptionperceptions_index_2011, *Corruption Perception Index 2012*, <http://www.transparency.org/cpi2012/results>; [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Transparency-International-Corruption-Perceptions-Index-2013/\\$FILE/EY-Transparency-International-Corruption-Perceptions-Index-2013.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Transparency-International-Corruption-Perceptions-Index-2013/$FILE/EY-Transparency-International-Corruption-Perceptions-Index-2013.pdf)



Tabel V.15 Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2008-2013

No.	Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Singapura	4	3	1	5	5	5
2.	Malaysia	47	56	56	60	54	53
3.	Philipina	141	139	134	129	105	94
4.	Thailand	80	84	78	80	88	102
5.	Vietnam	121	120	116	112	123	116
6.	Indonesia	126	111	110	100	118	114
7.	Brunei Darussalam	-	39	38	44	46	38
8.	Laos				154	160	140
9.	Myanmar				180	172	157
10.	Kamboja				164	157	160

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara 2010, Bappenas; *Corruption Perception Index 2011*, http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruptionperceptions_index_2011, *Corruption Perception Index 2012*, <http://www.transparency.org/cpi2012/results>; [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Transparency-International-Corruption-Perceptions-Index-2013/\\$FILE/EY-Transparency-International-Corruption-Perceptions-Index-2013.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Transparency-International-Corruption-Perceptions-Index-2013/$FILE/EY-Transparency-International-Corruption-Perceptions-Index-2013.pdf)

Tabel V.16 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tahun 2009 – Juni 2014

No.	Jenis Penanganan	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1.	Penyelidikan	67	54	78	77	81	31
2.	Penyidikan	37	40	39	48	70	19
3.	Penuntutan	32	32	40	36	41	16
4.	<i>Inkracht</i>	39	34	34	28	40	13
5.	Eksekusi	37	36	35	32	44	26
	Jumlah	212	196	226	221	276	105

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014

*data sampai bulan Juli 2014

Tabel V.17 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh KPK Tahun 2009 - 2013

No.	Jabatan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Anggota DPR dan DPRD	8	27	5	16	7
2.	Kepala lembaga/ kementerian	1	2	-	1	-
3.	Duta besar	-	1	-	-	-
4.	Komisioner	-	-	-	-	-
5.	Gubernur	2	1	-	-	1
6.	Walikota/bupati dan wakil	5	4	4	4	1
7.	Eselon I, II dan III	14	12	15	8	5
8.	Hakim	-	1	2	2	1
9.	Swasta	11	8	10	16	13
10.	Lain-lain	4	9	3	3	6
	Jumlah	45	65	39	50	34

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013



Tabel V.18 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Dittipidkor Polri Tahun 2010 -2013

No.	Jenis Penanganan	2010	2011	2012	2013
1.	P.21	285	498	610	905
2.	SP3	28	26	39	69
3.	Limpah	4	2	8	2
4.	Proses sidik	176	432	591	424
	Jumlah	493	958	1248	1400

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, 2013

Catatan :

P.21 : Berkas dinyatakan lengkap dan dikirim ke kejaksaan

SP 3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Limpah : Dilimpahkan ke Instansi Lain

Tabel V.19 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima oleh KPK Tahun 2008 - 2013

No.	Instansi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	MPR/DPR	16	17	22	18	18	20
2.	DPRD	15	5	82	28	3	1
3.	DPD	-	1	-	-	1	-
4.	Kepresidenan	1	-	4	2	-	-
5.	Kementerian Koordinator	1	1	1	4	4	3
6.	Kementerian	43	37	66	61	74	182
7.	Kementerian Negara	1	3	5	8	-	3
8.	Lembaga Setingkat Kementerian	14	17	12	16	9	11
9.	LPND	6	12	41	19	10	34
10.	Lembaga ekstra struktural	-	2	1	6	44	32
11.	Pemerintah Daerah	81	166	48	106	75	98
12.	Yudikatif	9	1	5	9	3	5
13.	Inspektif (BPK)	15	10	10	-	-	-
14.	Lembaga Independen	47	54	57	39	23	21
15.	BUMN/BUMD	17	9	39	1057	894	981
	Jumlah	266	335	393	1373	1158	1391

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014





Tabel V.20 Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Diterima oleh KPK Tahun 2011 - 2013

No.	Bidang	Jenis	2011		2012		2013	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Eksekutif	Jumlah wajib lapor	139274	79	170378	74	149964	67
		Jumlah yang melaporkan	110218		126194		100327	
2.	Legislatif	Jumlah wajib lapor	17458	99	17467	99	2907	96
		Jumlah yang melaporkan	17236		17219		2780	
3.	Yudikatif	Jumlah wajib lapor	11241	87	11602	87	11128	86
		Jumlah yang melaporkan	9754		10149		9598	
4.	BUMN/D	Jumlah wajib lapor	17422	86	19827	87	15698	82
		Jumlah yang melaporkan	15056		17168		12799	

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014

Tabel V.21 Rangkings (Rank) dan Nilai (Value) Human Development Index (HDI) Negara ASEAN Tahun 2011 - 2013

No.	Negara	HDI Rank			HDI Values		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1.	Singapura	26	18	9	0,866	0,895	0,901
2.	Brunei Darussalam	33	30	30	0,838	0,855	0,852
3.	Malaysia	61	64	62	0,761	0,769	0,773
4.	Thailand	103	103	89	0,682	0,690	0,722
5.	Philipina	112	114	117	0,644	0,654	0,660
6.	Indonesia	124	121	108	0,617	0,629	0,684
7.	Kamboja	139	138	136	0,523	0,543	0,584
8.	Myanmar	149	149	150	0,483	0,498	0,524
9.	Laos	138	138	139	0,524	0,543	0,569
10.	Vietnam	128	127	121	0,593	0,617	0,638

Sumber : Human Development Report UNDP, 2013; <http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components>, 2014.



Tabel V.22 Nilai Komponen (components) Human Development Index (HDI) Negara ASEAN Tahun 2012 - 2013

No	Negara	Health		Education				Living Standard	
		Life Expectancy at birth		Mean Years of schooling		Expected Years of schooling		Gross National Income (GNI) per capita	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1.	Singapura	81,2	82,3	10,1	10,2	14,4	15,4	52.613	72.371
2.	Brunei Darussalam	78,1	78,5	8,6	8,7	15,0	14,5	45.690	70.883
3.	Malaysia	74,5	75,0	9,2	9,5	12,6	12,7	13.676	21.824
4.	Thailand	74,3	74,4	6,6	7,3	12,3	13,1	7.722	13.364
5.	Philipina	69,0	68,7	8,9	8,9	11,7	11,3	3.752	6.381
6.	Indonesia	69,8	70,8	5,8	7,5	12,9	12,7	4.154	8.970
7.	Kamboja	63,6	71,9	5,8	5,8	10,5	10,9	2.095	2.805
8.	Myanmar	65,7	65,2	3,9	4,0	9,4	8,6	1.817	3.998
9.	Laos	67,8	68,3	4,6	4,6	10,1	10,2	2.435	4.351
10.	Vietnam	75,4	75,9	5,5	5,5	11,9	11,9	2.970	4.892

Sumber : Human Development Report UNDP, 2013; <http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components>, 2014.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 1033/PI.1/HKM.03.2/2014

TENTANG

TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN DATABASE APARATUR TAHAP III

NO	NAMA	JABATAN
1.	Candra Setya Nugroho, SH	Koordinator
2.	Pratiwi, S.Sos	Pembantu Peneliti
3.	Rosita Novi Andari, S.Sos	Pembantu Peneliti
4.	Kurnia Angraeni Dewi, ST.	Pembantu Peneliti
5.	Dikdik Hendarin, SAP.	Pembantu Peneliti
6.	Tia Setiawati, S.Si.	Pembantu Peneliti
7.	Muhammad Afif Muttaqin, S.Sos	Sekretariat
8.	Wuri Indri Pramesti, S.Sos	Sekretariat
9.	Kezia Larasati S., A.Mk	Sekretariat
10.	Wahyudin	Sekretariat
11.	Yuyu Yuningsih, SE.	Sekretariat
12.	Ade Suhendar, ST.	Sekretariat
13.	Dr. H. Baban Sobandi, SE., M. Si.	Peneliti Madya
14.	Wawan D. Setiawan, SH, M.Si.	Peneliti Madya
15.	Drs. Syarifudin Hidayat, M. Si	Peneliti Muda
16.	Putri Wulandari, S.Si., ME.	Peneliti Muda
17.	Shafiera Amalia, S.IP	Peneliti Pertama

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 7 April 2014

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR I LAN,



Dr. H. Joni Dawud, DEAF
NIP 196805311994011001

